Peraturan Daerah Kabupaten Ngada
No 3 Tahun 2025
tentang

RPJMD
Kabupaten Ngada

Tahun
2025-2029

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ngada

BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025 - 2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Pemangku ...

19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Ngada.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD ini dimaksudkan untuk:
   a. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah;
   b. menjadi acuan dalam penyusunan APBD, Renstra setiap PD, dan sebagai acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2025-2029;
   c. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih;
   d. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati;
   e. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Daerah; dan
   f. sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
   a. menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas dan program pembangunan daerah yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama lima tahun (5) ke depan.
   b. menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah baik antar perangkat daerah, maupun antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
e. mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku Pembangunan; dan
f. mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

BAB II
SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

f. mewujudkan ...

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
e. Bab V Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 23 Agustus 2025

BUPATI NGADA,

RAYMUNDUS BENA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 23 Agustus 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

YOHANES CAPISTRANO WATU NGEBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 03/2025

PARAF KOORDINASI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	
KABAG HUKUM	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif – alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

RPJMD Kabupaten Ngada 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ngada yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan periodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025–2045 menjadi sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Ngada. Mengingat pentingnya hal dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 11
1.1. Latar Belakang 11
1.2. Dasar Hukum 13
1.3. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya17
1.3.1. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 18
1.3.2. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJMD Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 -2029 19
1.3.3. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2024-2044 19
1.3.4. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 20
1.3.5. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 20
1.3.6. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 20
1.4. Maksud dan Tujuan 20
1.4.1. Maksud 20
1.4.2. Tujuan 21
1.5. Sistematika 21

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH 23
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 23
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 23
2.1.1.1. Aspek Geografi 23
2.1.1.2. Aspek Demografi 60
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 68
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 68
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua 76
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata 81
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 85
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 85
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif . 86
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 90
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 90
2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 92
2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 102
2.1.3.4. Transformasi Digital 105
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 106
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 107
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro 111
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 113
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 113
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 118

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 120
2.1.4.4. Urusan Wajib Dasar 121
2.1.4.5. Urusan Wajib Non Dasar 127
2.1.4.6. Urusan Pilihan 140
2.1.4.7. Urusan Penunjang 144
2.1.5. Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 148
2.1.5.1. Capaian Misi 148
2.1.5.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah 150
2.1.5.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 151
2.1.5.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci 156
2.1.6. Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana 157
2.1.6.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal 157
2.1.6.2. Proyeksi Timbulan Sampah 157
2.1.6.3. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 158
2.1.6.4. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik 159
2.1.6.5. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 160
2.1.6.6. Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan 160
2.1.6.7. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan 161
2.1.7. Standar Pelayanan Minimal 161
2.1.7.1. Pendidikan 161
2.1.7.2. Kesehatan 162
2.1.7.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 163
2.1.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 163
2.1.7.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 163
2.1.7.6. Sosial 164
2.1.8. Potensi Daerah 164
2.2. Gambaran Keuangan Daerah 166
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 166
2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 167
2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 191
2.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 191
2.2.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah 197
2.2.3. Kerangka Pendanaan 203
2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025-2030 203
2.2.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan 207
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 208
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 208
2.3.1.1. Aspek Demografi dan Geografi 208
2.3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 208
2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah 209
2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum 210
2.3.2. Isu Strategis Daerah 210
2.3.2.1. Isu Strategis Global 210
2.3.2.2. Isu Strategis Nasional 211
2.3.2.3. Isu Strategis Regional 212
2.3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan 215
2.3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Ngada 217

BAB 3 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 222
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 222
3.1.1. Visi 222

3.1.2. Misi 227
3.1.3. Tujuan 231
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 236
3.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan 236
3.1.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 245

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 254
4.1. Program Perangkat Daerah..... 254
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 263

BAB 5 PENUTUP 296

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luasan Kabupaten Ngada Menurut Kecamatan 23
Tabel 2. 2 KPPN di Provinsi NTT 25
Tabel 2. 3. Potensi Sumber Daya Tambang Kabupaten Ngada 27
Tabel 2. 4. Potensi Sumber Daya Pertanian Kabupaten Ngada 28
Tabel 2. 5. Potensi Sumber Daya Peternakan Kabupaten Ngada 28
Tabel 2. 6. Potensi Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ngada 28
Tabel 2. 7. Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada 31
Tabel 2. 8. Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 32
Tabel 2. 9. Luas Panen Tanaman Pangan per kapita Kabupaten Ngada 34
Tabel 2. 10. Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Ngada 35
Tabel 2. 11 Klasifikasi Kelas Ketersediaan Kebutuhan Beras 35
Tabel 2. 12. Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2023 36
Tabel 2. 13. Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 36
Tabel 2. 14. Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten Ngada 39
Tabel 2. 15. Klasifikasi Kelas Ketersediaan Daya Dukung Lindung 41
Tabel 2. 16. Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Ngada 2024 41
Tabel 2. 17. Daya Tampung Pemukiman Kabupaten Ngada 2029 44
Tabel 2. 18. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 51
Tabel 2. 19. Prevalensi Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 52
Tabel 2. 20. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum 53
Tabel 2. 21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 54
Tabel 2. 22. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak 54
Tabel 2. 23. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 55
Tabel 2. 24. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada 56
Tabel 2. 25. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 56
Tabel 2. 26. Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada 57
Tabel 2. 27. Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada 58
Tabel 2. 28. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja 60
Tabel 2. 29. Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada Periode 2020-2024 60
Tabel 2. 30. Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 61
Tabel 2. 31. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada 62
Tabel 2. 32. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Ngada Tahun 2020 – 2024 62
Tabel 2. 33 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) 63
Tabel 2. 34 Angka Ketergantungan Kabupaten Ngada, 2020-2024 63
Tabel 2. 35 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2024 64
Tabel 2. 36 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (ribu jiwa) 67
Tabel 2. 37 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 68
Tabel 2. 38 Laju Pertumbuhan PDRB Sejumlah Lapangan Usaha di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 70
Tabel 2. 39 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 95
Tabel 2. 40 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 96
Tabel 2. 41 Pertumbuhan PDRB Per Tahun Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 97
Tabel 2. 42 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 ... 99
Tabel 2. 43 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngada 100
Tabel 2. 44. Indikator Penyusun Indeks Ekonomi Hijau 102

Tabel 2. 45 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 107
Tabel 2. 46. Indeks Infrastruktur dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 107
Tabel 2. 47 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 109
Tabel 2. 48 Peningkatan UMKM di Kabupaten Ngada 2020-2024 111
Tabel 2. 49 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 114
Tabel 2. 50 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 114
Tabel 2. 51 Domain Indeks SPBE Kabupaten Ngada Tahun 2024 115
Tabel 2. 52 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 117
Tabel 2. 53 Nilai SAKIP Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 118
Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 121
Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 122
Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 124
Tabel 2. 57 Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 125
Tabel 2. 58 Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 126
Tabel 2. 59 Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 127
Tabel 2. 60 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 127
Tabel 2. 61 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 128
Tabel 2. 62 Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 129
Tabel 2. 63 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 130
Tabel 2. 64 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 130
Tabel 2. 65 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 131
Tabel 2. 66 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 132
Tabel 2. 67 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 133
Tabel 2. 68 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 134
Tabel 2. 69 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 135
Tabel 2. 70 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 136
Tabel 2. 71 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 136
Tabel 2. 72 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 137
Tabel 2. 73 Indikator Kinerja Urusan Statistika Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 138
Tabel 2. 74 Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 138
Tabel 2. 75 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 138
Tabel 2. 76 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 139
Tabel 2. 77 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 139
Tabel 2. 78 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 140
Tabel 2. 79 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Modal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 141
Tabel 2. 80 Indikator Kinerja Urusan Peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 141
Tabel 2. 81 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 142
Tabel 2. 82 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 143
Tabel 2. 83 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 143
Tabel 2. 84 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 143
Tabel 2. 85 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 144

Tabel 2. 86 Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 144
Tabel 2. 87 Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 145
Tabel 2. 88 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 146
Tabel 2. 89 Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 146
Tabel 2. 90 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 147
Tabel 2. 91 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 147
Tabel 2. 92 Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 147
Tabel 2. 93 Capaian Misi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 148
Tabel 2. 94 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 150
Tabel 2. 95 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 151
Tabel 2. 96 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 156
Tabel 2. 97 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 157
Tabel 2. 98 Standar Acuan Timbulan Sampah 157
Tabel 2. 99 Proyeksi Volume Timbulan Sampah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 158
Tabel 2. 100 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan 158
Tabel 2. 101 Standar Kebutuhan Air Bersih 159
Tabel 2. 102 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 159
Tabel 2. 103 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 159
Tabel 2. 104 Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga 160
Tabel 2. 105 Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 160
Tabel 2. 106 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 161
Tabel 2. 107 Indikator SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 161
Tabel 2. 108 Indikator SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 162
Tabel 2. 109 Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 163
Tabel 2. 110 Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 163
Tabel 2. 111 Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 163
Tabel 2. 112 Indikator SPM Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 164
Tabel 2. 113 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman 165
Tabel 2. 114. Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 173
Tabel 2. 115 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 182
Tabel 2. 116 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020-2024 183
Tabel 2. 117 Rasio Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 186
Tabel 2. 118 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ngada 2020-2024 188
Tabel 2. 119 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 192
Tabel 2. 120 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngada 2020-2024 194
Tabel 2. 121 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 195
Tabel 2. 122 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 198
Tabel 2. 123 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 200
Tabel 2. 124 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 202
Tabel 2. 125 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026-2030 204

Tabel 2. 126 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada 207
Tabel 2. 127 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada 207
Tabel 2. 128 Permasalahan Aspek Geografi di Kabupaten Ngada 208
Tabel 2. 129 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ngada 208
Tabel 2. 130 Permasalahan Aspek Daya Saing di Kabupaten Ngada 209
Tabel 2. 131 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum di Kabupaten Ngada 210
Tabel 2. 132 Keterkaitan Masalah Pokok, Isu Strategis dan Misi 221
Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 231
Tabel 3. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Daerah 233
Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 237
Tabel 3. 4 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Ngada 243
Tabel 3. 5 Program Prioritas RPJMD 246
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2026-2030 255
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama 264
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ngada 264

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 18
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Ngada 24
Gambar 2. 2 Diagram Daya Dukung Lahan..... 29
Gambar 2. 3. Peta Daya Dukung Lahan 33
Gambar 2. 4 Peta Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR)..... 37
Gambar 2. 5. Peta Daya Dukung Air Berdasar Sistem Grid 40
Gambar 2. 6. Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Ngada..... 42
Gambar 2. 7. Peta Daya Tampung Penduduk..... 45
Gambar 2. 8. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 51
Gambar 2. 9. Diagram Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 52
Gambar 2. 10. Diagram Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 53
Gambar 2. 11. Diagram IKLH Kabupaten Ngada Tahun 2021-2024 54
Gambar 2. 12. Diagram Rumah Tangga dengan Akses Sanitas Layak Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 54
Gambar 2. 13. Diagram Timbulan Sampah Terolah di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 55
Gambar 2. 14. Diagram Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 57
Gambar 2. 15. Diagram Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada 58
Gambar 2. 16. Diagram Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada 59
Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada tahun 2020 -2024..... 61
Gambar 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada (Ribu Jiwa) Tahun 2025-2030 64
Gambar 2. 19 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 65
Gambar 2. 20 Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030..... 65
Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2025..... 66
Gambar 2. 22 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2030..... 66
Gambar 2. 23 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2030 68
Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada, ... 69
Gambar 2. 25 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, ... 71
Gambar 2. 26 PDRB ADHB dan ADHK per Kapita Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 72
Gambar 2. 27 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2018-2020 72
Gambar 2. 28 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Ngada,..... 73
Gambar 2. 29 Perbandingan TPT Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 74
Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 75
Gambar 2. 31 Usia Harapan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 76
Gambar 2. 32 Prevalensi Stunting Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 77
Gambar 2. 33 Angka Kematian Ibu Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 78
Gambar 2. 34 Angka Kematian Bayi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 79
Gambar 2. 35 Rasio Dokter Umum Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 80
Gambar 2. 36 Prevalensi TB Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 80
Gambar 2. 37 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 81
Gambar 2. 38 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 82
Gambar 2. 39 Angka Literasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 82
Gambar 2. 40 Angka Numerasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 83
Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 84
Gambar 2. 42 Indeks Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 84
Gambar 2. 43 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 85

Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2020-2024 86
Gambar 2. 45 Indeks Perlindungan Anak Keluarga Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 87
Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 88
Gambar 2. 47 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 88
Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 89
Gambar 2. 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 90
Gambar 2. 50 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024..... 91
Gambar 2. 51 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 91
Gambar 2. 52 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 93
Gambar 2. 53 Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.... 98
Gambar 2. 54 Proporsi Ekonomi Kreatif Kabupaten Ngada Tahun 2023 dan 2024 99
Gambar 2. 55 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)..... 101
Gambar 2. 56 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 102
Gambar 2. 57 Persentase Sampah Terkelola Kabupaten Ngada Tahun 2020 – 2024 103
Gambar 2. 58. Volume Produksi Perikanan Tahun 2020 – 2024..... 104
Gambar 2. 59. Volume Produksi Perikanan Budidaya Laut, Produksi Budidaya Tambak, ... 104
Gambar 2. 60. Jumlah Wisata Bahari dan Jumlah Usaha Wisata Tirta Komersial..... 105
Gambar 2. 61. Penyusun IPTIK Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 105
Gambar 2. 62 Nominal dan Laju Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 106
Gambar 2. 63 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak..... 108
Gambar 2. 64 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Ngada 2020-2024 109
Gambar 2. 65 Jumlah BUMDes dan Jumlah BUMDes Aktif yang Terlibat dalam Pengelolaan Hasil Pertanian dan Pemasaran Produk Lokal di Kabupaten Ngada 2020-2024..... 110
Gambar 2. 66 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Ngada 2020-2024..... 110
Gambar 2. 67 Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Ngada 2020-2024..... 111
Gambar 2. 68 Rasio Pajak Daerah, Rasio Pajak dan Retribusi Daerah, serta Rasio PAD terhadap PDRB Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 112
Gambar 2. 69 Tingkat Inflasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 113
Gambar 2. 70 Indeks SPBE Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024..... 115
Gambar 2. 71 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 116
Gambar 2. 72 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024..... 117
Gambar 2. 73 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024 119
Gambar 2. 74 Indeks Rasa Aman Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024..... 119
Gambar 2. 75 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024..... 120
Gambar 2. 76 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022–2024..... 120
Gambar 2. 77 Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022–2024..... 121
Gambar 2. 78. Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 165
Gambar 2. 79 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 167
Gambar 2. 80 Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 168
Gambar 2. 81 Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 169
Gambar 2. 82 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 170
Gambar 2. 83 Perkembangan Komponen Pendapatan Transfer Daerah..... 170
Gambar 2. 84 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 171
Gambar 2. 85 Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 174
Gambar 2. 86 Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 175

Gambar 2. 87 Proporsi Belanja Modal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 177
Gambar 2. 88 Proporsi Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap total Belanja Kabupaten Ngada Tahun 2019-2023..... 179
Gambar 2. 89 Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024..... 180
Gambar 2. 90 Megatren Global..... 211

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagai upaya penyelarasan struktur dan pola ruang wilayah dengan wilayah sekitarnya, dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan transformasi sosial, budaya dan politik.

Pembangunan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa dokumen perencanaan disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 disusun dengan berorientasi pada proses yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari lingkup pemerintahan terkecil, yakni desa, kecamatan hingga kabupaten. Perencanaan pembangunan daerah ini berorientasi pada substansi, yakni dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok pada Tahap I RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2044, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta berbagai kebijakan nasional maupun regional lainnya. Sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi dan perencanaan pembangunan desa menjadi hal penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dinyatakan bahwa sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasi. Penyelarasan dimaksudkan bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 selain menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan bagian dari upaya mendukung seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 proyek hasil terbaik cepat (*quick wins*) yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, program Perangkat Daerah (PD), program lintas PD, program kewilayahan, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target Renstra diturunkan dalam target tahunan Renja PD. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 disusun secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, dimana sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu RPJMD ini akan digunakan secara formal sebagai dasar perencanaan strategis dan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kurun waktu 2025-2029 setelah RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tahapan yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, meliputi: (1) Persiapan penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Konsultasi Rancangan Awal, (4) Penyusunan Rancangan, (5) Musrenbang, (6) Penyusunan Rancangan Akhir, (7) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), (8) Penyampaian Ranperda kepada DPRD, (9) Pembahasan Ranperda, (10) Evaluasi Ranperda, (11) Penetapan Ranperda.

Kabupaten Ngada sebagai salah satu daerah otonom Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Flores memiliki potensi yang akan membawa kemajuan dan perkembangan berarti jika dapat dikelola dengan baik. Potensi tersebut akan menjadi modal pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045.

Tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 tersebut merupakan tahapan penguatan fondasi transformasi pembangunan untuk mewujudkan Ngada yang maju, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan. Tahap penguatan fondasi transformasi pembangunan tersebut diwujudkan melalui misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki prioritas pada penguatan akses dan kualitas pelayanan dasar. Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan difokuskan pada penguatan sumber daya ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif diarahkan pada penguatan fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan adaptif. Misi 4: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan difokuskan pada upaya memperkuat fondasi ketangguhan sosial budaya dan lingkungan. Misi 5: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan berkesinambungan berfokus pada peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah merupakan pendukung pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu selama periode RPJPD 2005-2025 khususnya tahap pembangunan keempat tahun 2021-2026, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah telah diarahkan untuk mewujudkan Ngada yang maju, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan. Namun demikian berbagai permasalahan dan tantangan daerah masih harus dihadapi dan diatasi agar tujuan pembangunan sebagai keberlanjutan dari pembangunan jangka panjang daerah periode 2005-2025 dapat diwujudkan.

Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 mengisyaratkan bahwa capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan catatan yang akan menjadi masukan dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029, yakni capaian kinerja yang cukup fluktuatif khususnya indikator makro. Kondisi pandemi Covid-19 yang dialami seluruh dunia tahun 2020 berdampak pada turunnya capaian kinerja. Selain itu indikator kinerja program yang diampu Perangkat Daerah tidak mampu menjadi pengungkit capaian indikator sasaran RPJMD. Selain itu indikator kinerja program yang diampu oleh OPD belum dapat menjadi pengungkit capaian indikator sasaran RPJMD. Diharapkan agar terdapat konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra PD, RKPD hingga Renja.

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 ini merupakan penyempurnaan berdasarkan hasil konsultasi publik, DPRD dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. RPJMD disusun dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan daerah yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang di bawah kepemimpinan **Bupati Raymundus Bena, S.S., M.Hum** dan **Wakil Bupati Bernardinus Dhey Ngebu, S.P** yang terpilih untuk periode 2025-2030. Visi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan **Kabupaten Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya berbasis pengelolaan sumber daya manusia berkualitas dan sumber daya alam berkelanjutan**, sesuai dengan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif secara terencana, terukur.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentag Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

25. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Nomor 006, Tambahan Lembar Daerah Nomor 0138 Tahun 2025);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun **2025** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rancangan RPJMD. RPJMD disusun setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di daerah harus disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan lain di level provinsi yaitu RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumen perencanaan nasional yaitu RPJMN 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RPJMD juga harus memperhatikan dokumen perencanaan lain di level daerah antara lain RTRW Kabupaten Ngada dan KLHS RPJMD, dan KLHS RPJPD Kabupaten Ngada serta dokumen perencanaan sektoral lain yang relevan. Sinkronisasi antara dokumen RPJMD Kabupaten Ngada dengan RPJMN perlu untuk dilakukan karena dokumen perencanaan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan dengan rencana tata ruang juga perlu diperhatikan guna menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.

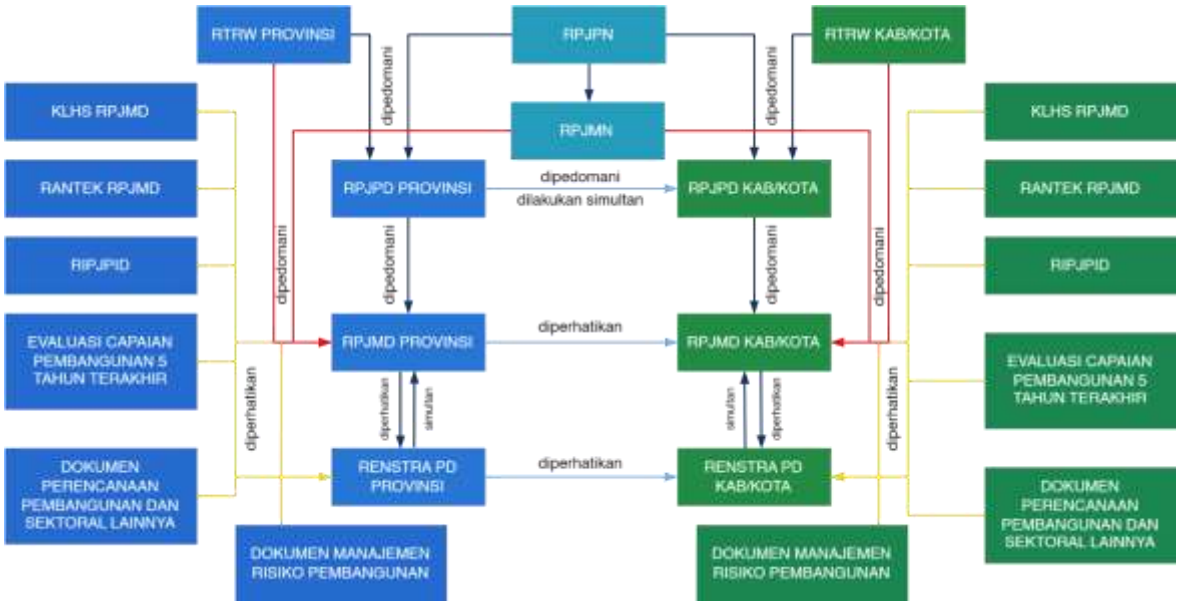

Gambar 1. 1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.3.1. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki tema Penguatan Landasan Transformasi yang dilengkapi dengan 5 Arah Kebijakan Transformasi yang meliputi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis. Visi RPJMN Tahun 2025-2029 adalah **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**, yang dituangkan dalam delapan misi atau Asta Cita, dengan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Kabupaten Ngada memiliki peran penting untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan nasional yakni: (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, (2) kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, (3) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission* yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Ngada harus mampu menjabarkan dan mendukung tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi kewilayahan yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Demikian pula prioritas pembangunan nasional dapat terjamin pelaksanaannya jika dokumen perencanaan pembangunan daerah sinkron dengan RPJMN, serta terdapat sinergi antara perencanaan dan penganggaran. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada juga merujuk pada arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung tercapainya perwujudan dan sinkronisasi perencanaan berbagai tingkat wilayah.

Dalam RPJMN 2025–2029, Kabupaten Ngada diarahkan sebagai bagian dari perluasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo-Flores bersama Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ende. Kabupaten Ngada juga ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas melalui pengembangan Agrowisata Kopi Flores Bajawa. Selain itu, Kabupaten Ngada memiliki fungsi strategis dalam pelestarian lingkungan melalui kawasan konservasi Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau dan Cagar Alam Riung.

1.3.2. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJMD Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta indikator dan target kinerja yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 adalah "**NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan,**" yang dijabarkan dalam lima misi, yakni: (1) Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU), (2) Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (SEHAT), (3) Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS), (4) Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat, (5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN). Misi tersebut diturunkan dalam tujuh pilar prioritas daerah, yaitu: (1) Pilar ekonomi berkelanjutan, (2) Pilar pemberdayaan prioritas, (3) Pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan, (4) Pilar kesehatan, (5) Pilar pendidikan, (6) Pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, (7) Pilar kolaborasi. Prioritas daerah tersebut diwujudkan dalam dasa cita program prioritas, yaitu: (1) Dari ladang dan laut ke pasar: efisien, modern dan aman, (2) Milineal dan perempuan motor kreativitas lokal, (3) Wisata NTT penggerak ekonomi lokal, (4) Kesejahteraan bersama; jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat, (5) Posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting, (6) Sekolah vokasi unggulan berbasis potensi unggulan, (7) Jalan, air ,listrik, rumah layak huni: mewujudkan NTT yang sejahtera, (8) Pendapatan daerah naik, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin, (9) Membangun NTT digital: akses merata, komunikasi lancar, (10) Ayo bangun NTT, kolaborasi bersama.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Ngada harus mampu memberi kontribusi untuk terwujudnya visi dan misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan Kabupaten Ngada. Sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program prioritas dasa cita yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut perlu diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029. Oleh karena beberapa program prioritas tersebut merupakan program-program yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada dalam lima tahun ke depan.

1.3.3. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2024-2044

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada tahun 2025-2044. Periode RTRW Kabupaten Ngada memiliki irisan yang cukup panjang dengan periode RPJMD. Kesesuaian RPJMD dengan RTRW menjadi bagian yang cukup penting mengingat Kabupaten Ngada memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup dinamis. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Ngada tahun 2025-2044, tujuan penataan ruang Kabupaten Ngada adalah **"Mewujudkan Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing Secara Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata."** Wujud ruang wilayah yang mendukung pariwisata dan pertanian diharapkan dapat meningkatkan minat investasi, yang didukung oleh sektor agroindustri, agrowisata, dan agribisnis. Hal tersebut diharapkan mampu memicu perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat. Hal ini perlu ditopang dengan pengaturan ruang serta aspek

pendukung lainnya, terutama aspek sarana prasarana serta manajerialnya. Guna menjamin terwujudnya tujuan tersebut, maka berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029.

1.3.4. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 berpedoman pada arahan tema, sasaran pembangunan, arah kebijakan, dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045. RPJMD ini merupakan pelaksanaan periode pertama RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045. Tema RPJMD Tahun 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi pembangunan yang diturunkan dalam 5 arah kebijakan misi yakni: (1) penguatan akses dan kualitas pelayanan dasar; (2) penguatan sumber daya ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif; (3) penguatan fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan adaptif; (4) penguatan fondasi ketangguhan sosial budaya dan lingkungan; dan (5) peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 ini harus mampu mendukung terwujudnya pencapaian visi RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 **Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan**, khususnya tahapan pertama yakni penguatan fondasi transformasi pembangunan.

1.3.5. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

KLHS RPJMD bersifat sebagai masukan yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029. Dokumen ini bertujuan untuk menjamin bahwa perumusan kebijakan RPJMD menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup, memperkuat proses pengambilan keputusan, dan memberikan rekomendasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Keterkaitan antara kedua dokumen ini dapat dilihat dalam setiap bagian dalam RPJMD khususnya pada perumusan sasaran dan arah kebijakan pembangunan RPJMD yang mengacu pada kondisi daya dukung, daya tampung, pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), peran daerah dan rekomendasi hasil kajian KLHS.

1.3.6. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun oleh setiap perangkat daerah di bawa koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngada.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan APBD, Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada setiap tahun selama tahun 2025-2029.
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Ngada.
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas dan program pembangunan daerah yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama lima tahun (5) ke depan.
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah baik antar perangkat daerah, maupun antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.
6. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

1.5. Sistematika

Sistematika RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada pedoman yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada beserta landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi 4 (empat) aspek pembangunan yakni aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, yang disertai analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Gambaran umum keuangan daerah memuat gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

Sub bab permasalahan memuat permasalahan yang ada di Kabupaten Ngada berdasarkan kondisi daerah. Sementara sub bab isu strategis memuat identifikasi isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Bab ini memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada yang akan menjadi arahan bagi perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja pelaksanaan pembangunan jangka menengah, pentahapan pembangunan, serta program prioritas daerah dalam pencapaian visi dan misi.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi program perangkat daerah yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah berserta indikator kinerja, pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Ngada.

BAB 2
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

Aspek geografi memberikan gambaran karakteristik geografis dan posisi strategis wilayah di Kabupaten Ngada. Aspek geografi menjelaskan tentang peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Letak Geografis Kabupaten Ngada

Luas wilayah daratan Kabupaten Ngada adalah seluas 173.683,29 Ha. Wilayah administrasi di Kabupaten Ngada terdiri atas 12 kecamatan, 16 Kelurahan dan 206 Desa. Wilayah terluas adalah Kecamatan Riung dengan luas 35.190,31 Ha (20 persen), diikuti Kecamatan Riung Barat 28.672,23 Ha (19 persen). Wilayah terkecil adalah Kecamatan Jerebuu dengan luas 4.849,76 Ha (4 persen). Berikut tabel luas wilayah menurut kecamatan, diagram, dan peta administrasi Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 1. Luasan Kabupaten Ngada Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Aimere	15.324,07	6
2	Bajawa	10.781,95	8
3	Bajawa Utara	15.429,73	10
4	Golewa	10.276,18	5
5	Golewa Barat	6.853,78	5
6	Golewa Selatan	8.056,82	6
7	Inerie	6.571,62	5
8	Jerebuu	4.849,76	4
9	Riung	35.190,31	20
10	Riung Barat	28.672,23	19
11	Soa	8.735,06	6
12	Wolomeze	22.941,78	6
Total		**173.683,29**	**100**

Sumber: Permendagri No.44 tahun 2019, Permendagri No.55 tahun 2020

Secara astronomis Kabupaten Ngada terletak antara 8° 20’ 24.28”-8° 57’ 28.39” Lintang Selatan dan 120° 48’ 29.26”-121° 11’ 8.57’’ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan : Laut Sawu
2. Sebelah Utara : Laut Flores
3. Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Timur
4. Sebelah Timur : Kabupaten Nagekeo

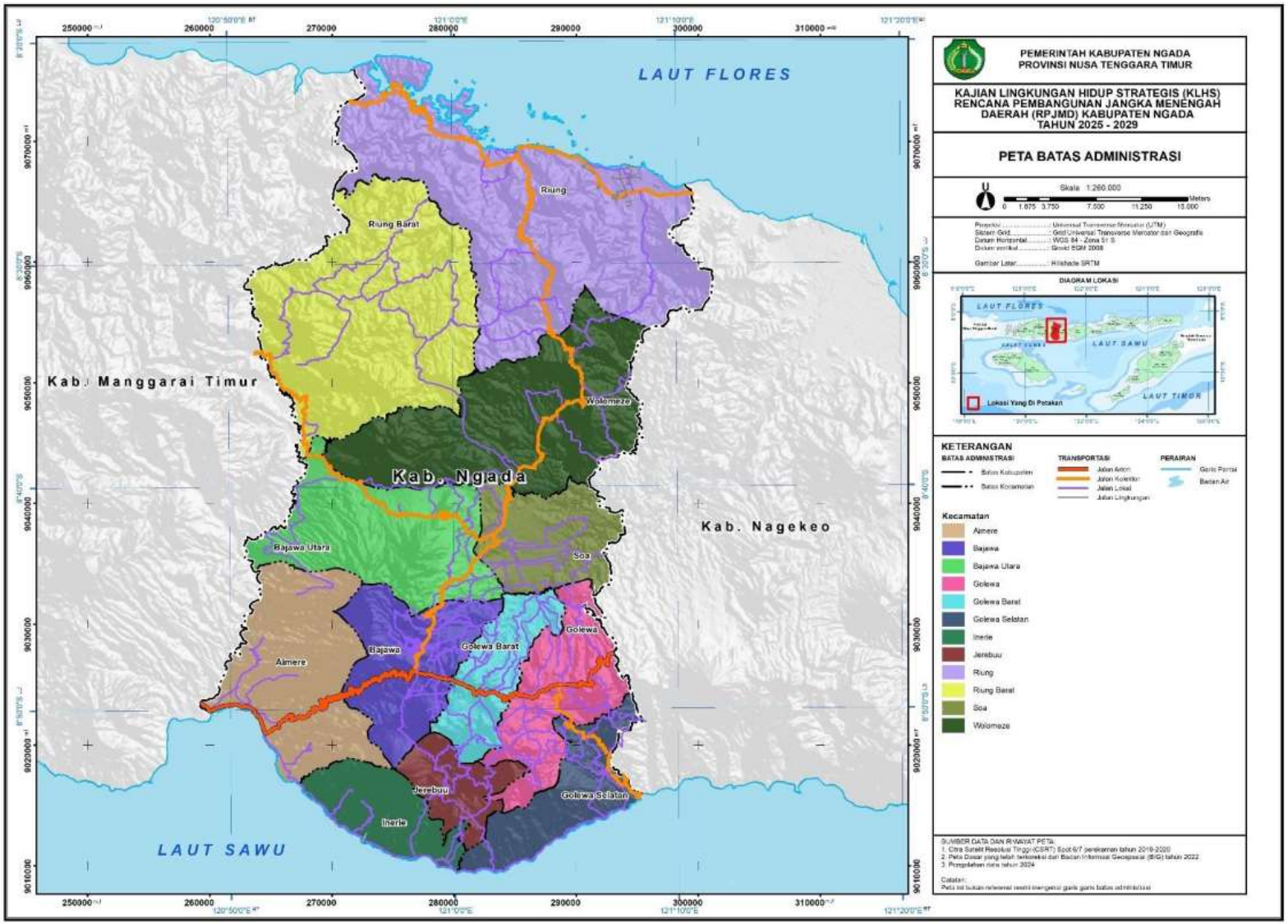

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Ngada

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

2. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, Kabupaten Ngada mempunyai peranan yang cukup penting terutama dalam bidang pertanian dalam arti luas dan pariwisata. RPJMN Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa Kabupaten Ngada menjadi salah satu wilayah yang direncanakan menjadi kawasan perluasan rencana Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat) dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo-Flores (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada). Kabupaten Ngada mempunyai beberapa destinasi wisata yang dapat dikembangkan menjadi kawasan pariwisata unggulan untuk mendukung posisi Kabupaten Ngada dalam rencana perluasan DPP Labuan Bajo-Flores.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, ditetapkan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di mana Kabupaten Ngada masuk dalam salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN Bajawa dan sekitarnya). Untuk lebih jelasnya KPPN yang ada di Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 KPPN di Provinsi NTT

No	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional	Destinasi Pariwisata Nasional
1	KPPN Komodo dan sekitarnya	DPN KOMODO–RUTENG dan sekitarnya
2	KPPN Labuhan Bajo dan sekitarnya	
3	KPPN Ruteng dan sekitarnya	
4	**KPPN Bajawa dan sekitarnya**	DPN KELIMUTU–MEUMERE dan sekitarnya
5	KPPN Ende–Kelimutu dan sekitarnya	
6	KPPN Meumere–Sikka dan sekitarnya	
7	KPPN Waingapu–Laiwangi Wanggameti dan sekitarnya	DPN SUMBA – WAIKABUBAK dan sekitarnya
8	KPPN Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya	
9	KPPN Larantuka dan sekitarnya	DPN ALOR–LEMBATA dan sekitarnya
10	KPPN Lamalera–Lembata dan sekitarnya	
11	KPPN Alor–Kalabahi dan sekitarnya	
12	KPPN Nemberala–Rote Ndao dan sekitarnya	DPN KUPANG–ROTENDAO dan sekitarnya
13	KPPN Kupang–Soe dan sekitarnya	

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Dalam konteks pertanian dalam arti luas, Kabupaten Ngada diarahkan untuk menjadi Kawasan Afirmasi Kawasan Pengembangan Pedesaan Prioritas Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa dalam RPJMN tahun 2025-2029. Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan sektor basis atau sektor unggulan dari Kabupaten Ngada (KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029). Dalam konteks lingkungan hidup, RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Tujuh Belas Pulau dan Cagar Alam (CA) Riung sebagai kawasan konservasi. Secara global, kawasan konservasi ini mempunyai peranan penting dalam mendukung keberlanjutan kelestarian alam baik di dalam Kabupaten Ngada maupun di dalam skala wilayah yang lebih luas.

Dalam konteks infrastruktur wilayah, Kabupaten Ngada (Kota Bajawa) ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal yang diharapkan dapat menjadi simpul kegiatan atau aglomerasi fasilitas yang dapat melayani seluruh Kabupaten Ngada. Salah satu simpul transportasi di Kabupaten Ngada yang mempunyai fungsi melayani beberapa kabupaten di sekitarnya adalah Pelabuhan Aimere. Pelabuhan Aimere ini dalam tatanan kepelabuhan terklasifikasi sebagai pelabuhan pengumpan yang fungsinya menunjang tingkat pelabuhan yang lebih tinggi. Pelabuhan Aimere dalam pemanfaatannya termasuk dalam alur pelayaran regional dan lokal. Pelabuhan tersebut dimanfaatkan untuk mengakomodasikan barang dan manusia ke wilayah Kupang, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Dalam perkembangannya

Kabupaten Ngada akan mengembangkan Pelabuhan Pariwisata sebagai penunjang pelabuhan pariwisata di Labuan Bajo. Hal tersebut mengingat Kabupaten Ngada memiliki potensi pariwisata laut yang tidak kalah menarik dengan Labuan Bajo yakni Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung. Selain Pelabuhan Aimere, Kabupaten Ngada juga mempunyai simpul transportasi udara, yaitu Bandara Soa. Banda Udara Soa merupakan bandara pengumpan yang melayani daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Nagekeo, karena wilayah tersebut tidak memiliki bandar udara atau fasilitas pelayanan penerbangan.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Ngada mempunyai banyak potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam tersebut berupa potensi kondisi fisik Kabupaten Ngada, potensi sumber daya pertanian dalam arti luas dan potensi sumber daya tambang.

1. Potensi Kondisi Fisik

Potensi sumber daya alam merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan suatu wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang mempunyai potensi sumber daya alam cukup beragam. Potensi sumber daya alam ini dapat berupa kondisi fisik wilayah maupun hasil alam (pertanian, perikanan, perkebunan). Kondisi fisik khususnya topografi wilayah didominasi dataran tinggi. Karakteristik wilayah seperti itu merupakan salah satu keunggulan komparatif karena dapat mendukung kegiatan pertanian (perkebunan) khususnya perkebunan untuk tanaman komoditas dataran tinggi seperti kopi, coklat. Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi yang cukup terkenal, yaitu kopi Bajawa.

Kondisi morfologi berupa bentang alam pegunungan vulkanis kuarter, bentang alam dataran aluvial, bentang alam perbukitan sedimen tersier juga dapat memberikan keunggulan komparatif bagi Kabupaten Ngada. Dampak positif dari kondisi morfologi tersebut adalah memberikan kontribusi terhadap kesuburan tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati, sumber daya geologi dan adanya potensi wisata alam. Keberadaan sumber daya air ditunjukkan dengan adanya 255 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan, 13 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan, 9 danau, dan 3 Cekungan Air Tanah di mana salah satunya merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten. Sementara sumber daya keanekaragaman hayati adalah keberadaan TWAL 17 Pulau Riung dan CA Riung. Keberadaan sumber daya hayati tersebut dapat memberikan peluang baru dalam pengembangan kegiatan pariwisata alam di Kabupaten Ngada. Adapun sumber daya geologi yang dimiliki oleh Kabupaten Ngada adalah kawasan geopark di Kecamatan Soa (cekungan Soa). Cekungan Soa mempunyai keanekaragaman obyek geologi yang dapat dijadikan pondasi dalam membangun kawasan cagar alam geologi dan tersusun oleh perlapisan batuan vulkanik, endapan sungai dan endapan danau yang membentuk perbukitan bergelombang.

Cekungan Soa juga merupakan tempat ditemukannya ribuan fosil vertebrata dan alat batu (artefak). Selain itu, di situs Mata Menge Cekungan Soa ditemukan fosil manusia purba. Sumber daya geologi lainnya yang ada adalah hasil tambah yang cukup melimpah seperti bijih besi, mangan, timah hitam, emas-perak, batu bara, batu pasir, marmer, dolomit, tanah liat, panas bumi.

Sementara kondisi klimatologi juga merupakan salah satu keunggulan komparatif dari Kabupaten Ngada. Data dari KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa curah hujan Kabupaten Ngada didominasi oleh curah hujan 87 mm yang terjadi di area seluas 133.425,07 Ha atau sekitar 76persen dari total luas wilayah. Berdasarkan peta curah hujan, Kabupaten

Ngada terbagi menjadi 3 tipologi wilayah, yaitu wilayah tengah utara didominasi oleh curah hujan 87 mm, wilayah pesisir utara didominasi curah hujan 150 mm, dan wilayah selatan didominasi oleh curah hujan 62 mm. Setiap tipologi wilayah tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan sebagai potensi ekonomi Kabupaten Ngada, yaitu:

a. Wilayah tengah utara dapat dikembangkan tanaman pertanian padi, jagung dan hortikultura dataran sedang.
b. Wilayah pesisir utara dapat dikembangkan ekowisata dan tanaman hutan tropis.
c. Wilayah selatan dapat dikembangkan peternakan, tanaman keras dan konservasi lahan kering.

Kondisi tutupan lahan juga merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dapat menjadi potensi ekonomi bagi pembangunan Kabupaten Ngada. Data tutupan lahan tahun 2023 dari KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa tutupan lahan yang cukup dominan adalah hutan, semak dan padang rumput. Ketiga jenis tutupan lahan tersebut dapat dijadikan sebagai bagian dari sumber daya pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.

2. Potensi Sumber Daya Tambang

Kabupaten Ngada mempunyai banyak potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang tersebut antara lain adalah bijih besi, tembaga, mangan, timah hitam, batu bara, batu pasir, batu gamping, dolomit, tanah liat, panas bumi. Potensi sumber daya tambang tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Pada tabel berikut dapat dilihat sebaran dari potensi sumber daya tambang di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 3. Potensi Sumber Daya Tambang Kabupaten Ngada

No	Potensi Sumber Daya Tambang	Desa	Kecamatan
1.	Bijih besi	Latung, Sambinasi, Lengkosambi	Riung
2.	Tembaga	Lanamai	Riung Barat
3.	Mangan	Lanamai	Riung Barat
		Turaloa	Wolomeze
		Lengkosambi	Riung
4.	Timah hitam	Lanamai	Riung Barat
5.	Emas-perak	Wangka	Riung
	Batubara	Wangka	Riung
	Batu pasir	Naru	Bajawa
		Warupele 1	Inerie
		Binawali	Aimere
		Kila	Aimere
		Beja	Bajawa
		Tadho	Riung
		Tiworiwu	Jerebuu
		Watumanu	Jerebuu
		Denatana	Wolomeze
6.	Batu gamping	Wangka	Riung
		Ria	Riung Barat
		Sambinasi	Riung
		Denatana	Riung
		Wangka	Riung
		Bomari	Bajawa
		Beja	Bajawa
		Langagedha	Bajawa
7.	Panas bumi	Todabelu	Golewa

Sumber: Laporan Fakta Analisis RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2012-2022

3. Potensi Sumber Daya Pertanian

Hasil analisis ekonomi menunjukkan terdapat beberapa produk pertanian (pertanian, perikanan, peternakan) yang mempunyai nilai surplus sehingga dinilai mempunyai potensi untuk didistribusikan keluar wilayah Kabupaten Ngada. Adapun potensi sumber daya pertanian tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4. Potensi Sumber Daya Pertanian Kabupaten Ngada

No	Potensi Sumber Daya Pertanian	Kecamatan
1.	Jagung	Aimere, Jerebuu, Inerie, Bajawa, Golewa, Golewa Selatan, Golewa Barat, Bajawa Utara, Riung, Riun Barat
2.	Padi ladang	Aimere, Jerebuu, Bajawa, Golewa, Golewa Barat, Soa, Riung, Wolomeze
3.	Petsai	Inerie
4.	Jeruk	Bajawa, Bajawa Utara
5.	Pepaya	Jerebuu, Bajawa Utara, Riung, Riung Barat, Molomeze
6.	Kapuk	Golewa, Golewa Selatan, Golewa Barat
7.	Pala	Jerebuu, Golewa, Golewa Selatan
8.	Sirih	Soa, Riung Barat, Wolomeze

Sumber: Laporan Fakta Analisis Kabupaten Ngada Tahun 2012-2022

Potensi sumber daya pertanian Kabupaten Ngada berupa tanaman jagung, padi ladang, petsai, jeruk, pepaya, kapuk, pala dan sirih. Tanaman-tanaman tersebut tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 2. 5. Potensi Sumber Daya Peternakan Kabupaten Ngada

No	Potensi Sumber Daya Peternakan	Kecamatan
1.	Babi	Aimere, Jerebuu, Inerie, Golewa, Golewa Selatan, Golewa Barat, Soa
2.	Sapi	Aimere, Inerie, Golewa, Golewa Selatan, Bajawa Selatan, Soa, Wolomeze
3.	Kambing	Aimere, Inerie, Golewa Selatan, Bajawa Utara, Riung Barat, Wolomeze
4.	Itik	Bajawa, Golewa, Golewa Selatan, Golewa Barat, Bajawa Utara, Soa

Sumber: Laporan Fakta Analisis Kabupaten Ngada Tahun 2012-2022

Potensi sumber daya peternakan berupa ternak babi, sapi, kambing dan itik. Persebaran sumber daya peternakan tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di atas. Sementara potensi sumber daya perikanan berupa perikanan laut dan perikanan kolam. Persebaran perikanan laut dan kolam secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6. Potensi Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ngada

No	Potensi Sumber Daya Perikanan	Kecamatan
1.	Perikanan laut	Aimere, Inerie, Riung, Golewa Selatan
2.	Perikanan kolam	Jerebuu, Bajawa, Golewa Selatan, Bajaw Utara, Soa, Wolomeze

Sumber: Laporan Fakta Analisis Kabupaten Ngada Tahun 2012-2022

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang nantinya tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumber daya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Penataan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan dipastikan akan menimbulkan permasalahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti banjir, longsor dan kekeringan, pencemaran dan lain sebagainya. Konsep dan metode pengukuran daya dukung lingkungan memiliki

banyak definisi, tetapi kesamaannya adalah bahwa daya dukung selalu memperhatikan perbandingan dan keseimbangan antara ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) dan kesemuanya disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Secara umum teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Muta'ali (2014) dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014 telah merangkum beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan tujuannya sebagai pendekatan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung dalam RTRW Kabupaten Ngada.

1. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Berdasarkan pada tujuan dari perencanaan yang akan dicapai dapat memberikan perlindungan terhadap lahan potensial dan mencegah pembangunan pada kawasan lindung. Analisa ini dilakukan dengan tujuan mengatur peruntukan tanah yang sesuai dalam pelestarian dan menjaga tingkat bahaya erosi, agar tidak melebihi batas ambang.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan seperti digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 2. 2 Diagram Daya Dukung Lahan

Sumber: Permen LH No 17 Tahun 2009 dalam KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

a. Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Cara Perhitungan:

Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Lahan

Rumus:

$$S_L = \frac{\Sigma (P_i \times H_i)}{Hb} \quad X \quad \frac{1}{Ptv_b}$$

Keterangan:

SL : Ketersediaan lahan (ha)
Pi : Produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan tergantung kepada jenis komoditas)
Komoditas yang diperhitungkan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
Hi : Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen
Hb : Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen
Ptvb : Produktivitas beras (kg/ha)
Dalam penghitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga.

b. Kebutuhan Lahan
Rumus:

$$D_L = N \times KHL_L$$

Keterangan:
DL : Total kebutuhan lahan setara beras (ha)
N : Jumlah penduduk (orang)
KHLL : Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk:

- Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal.
- Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/ tahun.
- Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

c. Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- Bila SL > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Status daya dukung lahan Kabupaten Ngada pada tahun 2023 dinyatakan belum terlampaui. Adapun terdapat total nilai produksi pertanian sebesar 1.098.304.950.000, produksi perkebunan sebesar 249.209.120.000 dan produksi peternakan sebesar 9.700.151.250.000 agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 7. Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada

No	Kecamatan	Total Nilai Produksi			total Σ (Pi x Hi)	Harga satuan beras (Rp/kg) Hb	Produk-tivitas beras (kg/ha) Ptvb	Ketersе-diaan Lahan (Ha) SL	Jumlah pendu-duk 2023 (jiwa) N	Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk KHLL	Total kebutuh an lahan setara beras (ha) DL	Status daya dukung lahan	Kete-rangan
		Pertanian (Rp)	Perkebunan (Rp)	Peternakan (Rp)									
1	Aimere	3.023.300.000	34.554.000.000	575.162.550,000	612.739.850.000	11,100	2.400	23.001	10.680	0,17	1.816	SL>DL	Surplus
2	Jerebuu	1.320.800.000	24.744.000.000	239.080.100.000	265.144.900.000	11,100	2.400	9.953	7.609	0,17	1.294	SL>DL	Surplus
3	Inerie	2.210.700.000	11.018.000.000	186.037.300.000	199.266.000.000	11,100	2.400	7.480	8.419	0,17	1.431	SL>DL	Surplus
4	Bajawa	19.185.900.000	28.144.000.000	1.224.146.850.000	1.271.476.750.000	11,100	2.400	47.728	39.715	0,17	6.752	SL>DL	Surplus
5	Golewa	43.186.800.000	40.724.000.000	590.857.500.000	674.768.300.000	11,100	2.400	25.329	19.040	0,17	3.237	SL>DL	Surplus
6	Golewa Selatan	81.333.900.000	12.506.000.000	629.259.250.000	723.099.150.000	11.100	2.400	27.143	12.464	0,17	2.119	SL>DL	Surplus
7	Golewa Barat	36.477.150.000	11.710.000.000	548.562.100.000	596.749.250.000	11.100	2.400	22.400	11.454	0,17	1.947	SL>DL	Surplus
8	Bajawa Utara	143.139.000.000	20.624.000.000	774.668.100.000	938.431.100.000	11.100	2.400	35.226	10.600	0,17	1.802	SL>DL	Surplus
9	Soa	396.417.300.000	11.690.000.000	1.092.072.500.000	1.500.179.800.000	11.100	2.400	56.313	14.466	0,17	2.459	SL>DL	Surplus
10	Riung	94.623.100.000	37.533.120.000	2.277.383.200.000	2.409.539.420.000	11.100	2.400	90.448	16.873	0,17	2.868	SL>DL	Surplus
11	Riung Barat	135.378.750,000	6.226.000.000	1.187.358.550,000	1.328.963.300.000	11.100	2.400	49.886	9.362	0,17	1.592	SL>DL	Surplus
12	Wolomeze	142.008.250,000	9.736.000.000	375.563.250.000	527,307,500,000	11.100	2.400	19.794	6.714	0,17	1.141	SL>DL	Surplus
Total		**1.098.304.950.000**	**237.111.520.000**	**9.700.151.250.000**	**11.035.567.720.000**	**11.100**	**2.400**	**41.428**	**171.828**	**0,17**	**29.211**	**SL>DL**	**Belum terlampui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

Tabel 2. 8. Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan									
		2025		2026		2027		2028		2029	
1	Aimere	1.980	SL>DL	1.940	SL>DL	1.973	SL>DL	2.006	SL>DL	2.040	SL>DL
2	Bajwa	1.360	SL>DL	1.382	SL>DL	1.405	SL>DL	1.429	SL>DL	1.453	SL>DL
3	Bajawa Utara	1.501	SL>DL	1.525	SL>DL	1.550	SL>DL	1.574	SL>DL	1.600	SL>DL
4	Golewa	6.842	SL>DL	6.872	SL>DL	6.903	SL>DL	6.934	SL>DL	6.964	SL>DL
5	Golewa Barat	3.357	SL>DL	3.398	SL>DL	3.440	SL>DL	3.482	SL>DL	3.525	SL>DL
6	Golewa Selatan	2.189	SL>DL	2.213	SL>DL	2.237	SL>DL	2.261	SL>DL	2.286	SL>DL
7	Inerie	2.012	SL>DL	2.034	SL>DL	2.057	SL>DL	2.080	SL>DL	2.103	SL>DL
8	Jerebuu	1.821	SL>DL	1.827	SL>DL	1.834	SL>DL	1.840	SL>DL	1.846	SL>DL
9	Riung	2.544	SL>DL	2.572	SL>DL	2.601	SL>DL	2.631	SL>DL	2.661	SL>DL
10	Riung Barat	3.371	SL>DL	3.558	SL>DL	3.755	SL>DL	3.962	SL>DL	4.181	SL>DL
11	Soa	1.524	SL>DL	1.502	SL>DL	1.480	SL>DL	1.459	SL>DL	1.438	SL>DL
12	Wolomeze	1.177	SL>DL	1.189	SL>DL	1.201	SL>DL	1.213	SL>DL	1.225	SL>DL
	Jumlah	**29.678**	**SL>DL**	**30.012**	**SL>DL**	**30.436**	**SL>DL**	**30.871**	**SL>DL**	**31,322**	**SL>DL**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, tahun 2025

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa proyeksi daya dukung lahan Kabupaten Ngada pada tahun 2025-2029 sebesar 31,322, dimana SL (ketersediaan lahan) > DL (kebutuhan lahan) yang artinya surplus.

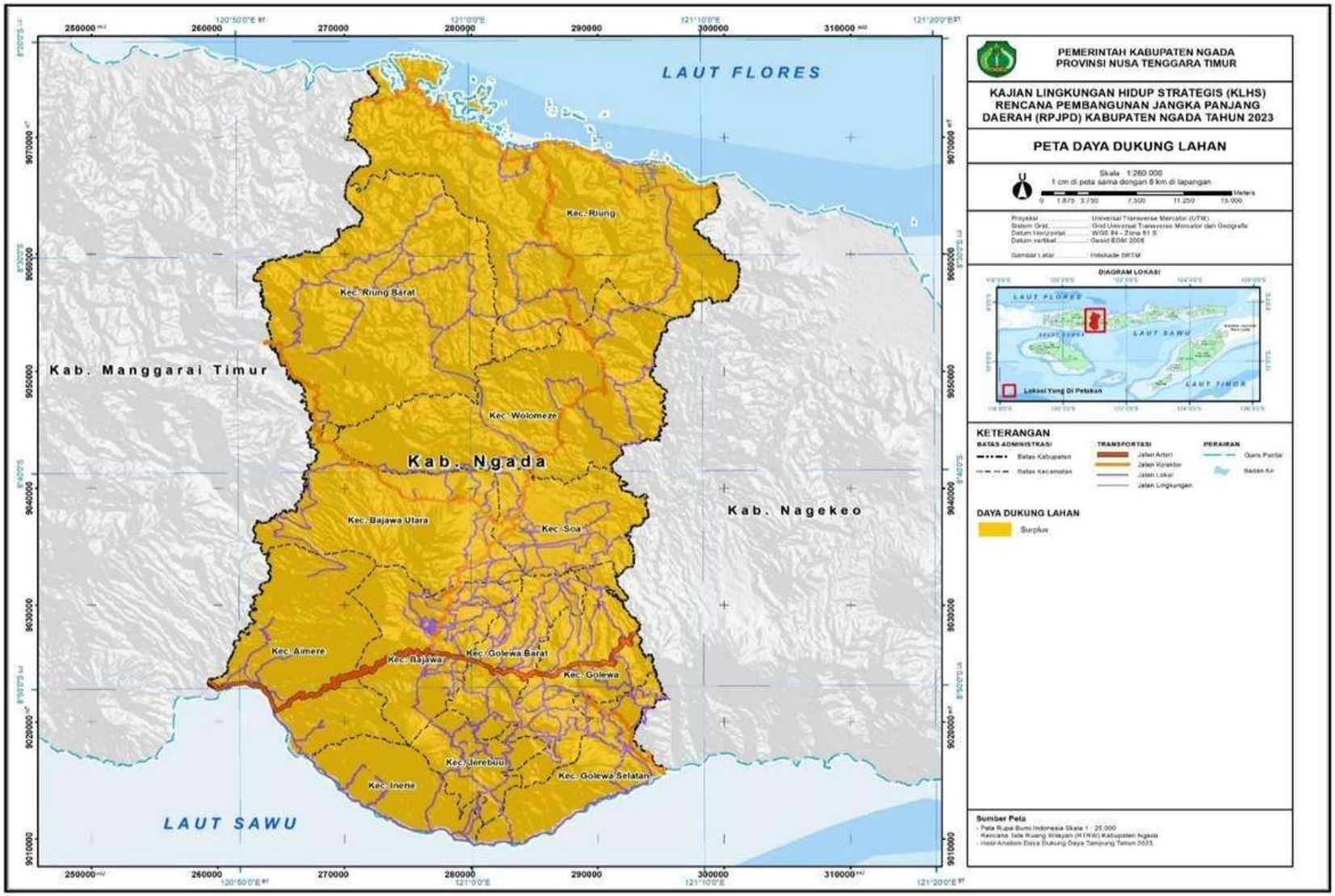

Gambar 2. 3. Peta Daya Dukung Lahan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

d. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Tingkat daya dukung lahan pertanian dituliskan dengan simbol ô dimana:

$$\tau = \frac{\chi}{\kappa}$$

τ : Luas panen tanaman pangan per kapita: $\frac{Luas\ panen\ (ha)}{Jumlah\ penduduk\ (jiwa)}$

k : Luas lahan untuk swasembada pangan: $\frac{Kebutuhan\ fisik\ minimum\ (KFM)}{Produksi\ tanaman\ pangan/\ ha/tahun}$

Klasifikasi daya dukung lahan pertanian:

τ > 1 : wilayah yang mampu swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya

τ < 1 : wilayah yang belum mampu swasembada pangan

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa keseluruhan wilayah di Kabupaten Ngada termasuk dalam lahan yang sesuai untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Hal ini terbukti pada tabel luas daya dukung lahan pada tahun 2025-2029 mengalami penurunan.

Tabel 2. 9. Luas Panen Tanaman Pangan per kapita Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapita (X)					Luas Lahan Swasembada Pangan (K)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Aimere	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01
2	Jerebuu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Inerie	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02
4	Bajawa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,01
5	Golewa	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,01
6	Golewa Selatan	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,01
7	Golewa Barat	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,01
8	Bajawa Utara	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,01
9	Soa	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,01
10	Riung	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,01
11	Riung Barat	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,01
12	Wolomeze	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,01
	Total	**0,25**	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,23**	**0,01**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

Tabel 2. 10. Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Daya Dukung Lahan Pertanian (T)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Aimere	4,23	4,16	4,10	4,03	3,96
2	Jerebuu	0,95	0,93	0,92	0,90	0,89
3	Inerie	3,87	3,81	3,75	3,69	3,63
4	Bajawa	7,64	7,60	7,57	7,54	7,50
5	Golewa	14,33	14,16	13,98	13,81	13,65
6	Golewa Selatan	30,17	29,84	29,52	29,20	28,89
7	Golewa Barat	29,03	28,72	28,40	28,09	27,79
8	Bajawa Utara	63,09	62,87	62,65	62,43	62,22
9	Soa	138,82	137,27	135,73	134,21	132,71
10	Riung	21,66	20,52	19,44	18,43	17,46
11	Riung Barat	77,99	79,13	80,28	81,45	82,64
12	Wolomeze	36,58	36,21	35,85	35,49	35,13
Total		**24,68**	**24,35**	**24,01**	**23,67**	**23,33**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

Selain menghitung daya dukung lahan pertanian dihitung pula nilai rasio kemampuan daya dukung (CCR) yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan pokok penduduknya. Sesuai pedoman D3TLH tahun 2014, nilai CCR dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

CCR : rasio kemampuan daya dukung (*Carrying Capacity Ratio*)

$$CCR = \frac{(A\ x\ r)}{(H\ x\ h\ x\ f)}$$

A : jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian
R : frekuensi panen per hektar per tahun
H : jumlah KK (rumah tangga)
h : persentase jumlah penduduk yang tinggal (80 persen)
F : ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani (1 ha)

Dengan ketentuan nilai CCR:

CCR > 1 : Wilayah memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk

CCR < 1 : Wilayah tidak memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk

Tabel 2. 11 Klasifikasi Kelas Ketersediaan Kebutuhan Beras

Kelas	Klasifikasi	Angka Rasio
I	Sangat rendah	0 – 0,5
II	Rendah	0,51 – 1
III	Cukup	1,01 – 1,5
IV	Baik	1,51 – 2
V	Sangat baik	>2

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

Tabel 2. 12. Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2023

No.	Kecamatan	2023						Keterangan
		A	R	H	h	f	CCR	
1	Aimere	555,81	3,00	2.760	0,8	1	0,76	Rendah
2	Jerebuu	14,58	3,00	1.966	0,8	1	0,03	Sangat rendah
3	Inerie	1,13	3,00	2.173	0,8	1	0,00	Sangat rendah
4	Bajawa	1.056,00	3,00	10.017	0,8	1	0,40	Sangat rendah
5	Golewa	1.492,63	3,00	4.877	0,8	1	1,15	Cukup
6	Golewa Selatan	473,00	3,00	3.184	0,8	1	0,56	Rendah
7	Golewa Barat	2.697,06	3,00	2.927	0,8	1	3,46	Sangat baik
8	Bajawa Utara	2.991,02	3,00	2.668	0,8	1	4,20	Sangat baik
9	Soa	4.331,32	3,00	3.699	0,8	1	4,39	Sangat baik
10	Riung	3.944,87	3,00	4.698	0,8	1	3,15	Sangat baik
11	Riung Barat	3.173,08	3,00	2.274	0,8	1	5,23	Sangat baik
12	Wolomeze	3.323,40	3,00	1.713	0,8	1	7,28	Sangat baik
	Total	**24.053,00**	**3,00**	**42,957**	**0,8**	**1**	**2,10**	**Sangat baik**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

Dari perhitungan rasio kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tiap kecamatan didominasi sangat baik dan sebagian mampu swasembada.

Tabel 2. 13. Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	CCR					Keterangan	
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Aimere	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	Belum Mampu Swasembada	Rendah
2	Jerebuu	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
3	Inerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
4	Bajawa	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
5	Golewa	1,13	1,12	1,11	1,09	1,08	Belum Mampu Swasembada	Rendah
6	Golewa Selatan	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
7	Golewa Barat	3,42	3,38	3,34	3,31	3,27	Mampu Swasembada	Sangat Baik
8	Bajawa Utara	4,19	4,17	4,16	4,15	4,13	Mampu Swasembada	Sangat Baik
9	Soa	4,34	4,29	4,25	4,20	4,15	Mampu Swasembada	Sangat Baik
10	Riung	2,98	2,83	2,68	2,54	2,41	Mampu Swasembada	Sangat Baik
11	Riung Barat	5,31	5,39	5,47	5,55	5,63	Mampu Swasembada	Sangat Baik
12	Wolomeze	7,20	7,13	7,06	6,99	6,92	Mampu Swasembada	Sangat Baik
Total		**2,07**	**2,04**	**2,02**	**1,99**	**1,96**	**Mampu Swasembada**	**Sangat Baik**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, tahun 2025

Pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa proyeksi CCR daya dukung Kabupaten Ngada pada tahun 2025-2029 menunjukkan sebagian besar kecamatan termasuk kategori sangat baik dan mampu swasembada.

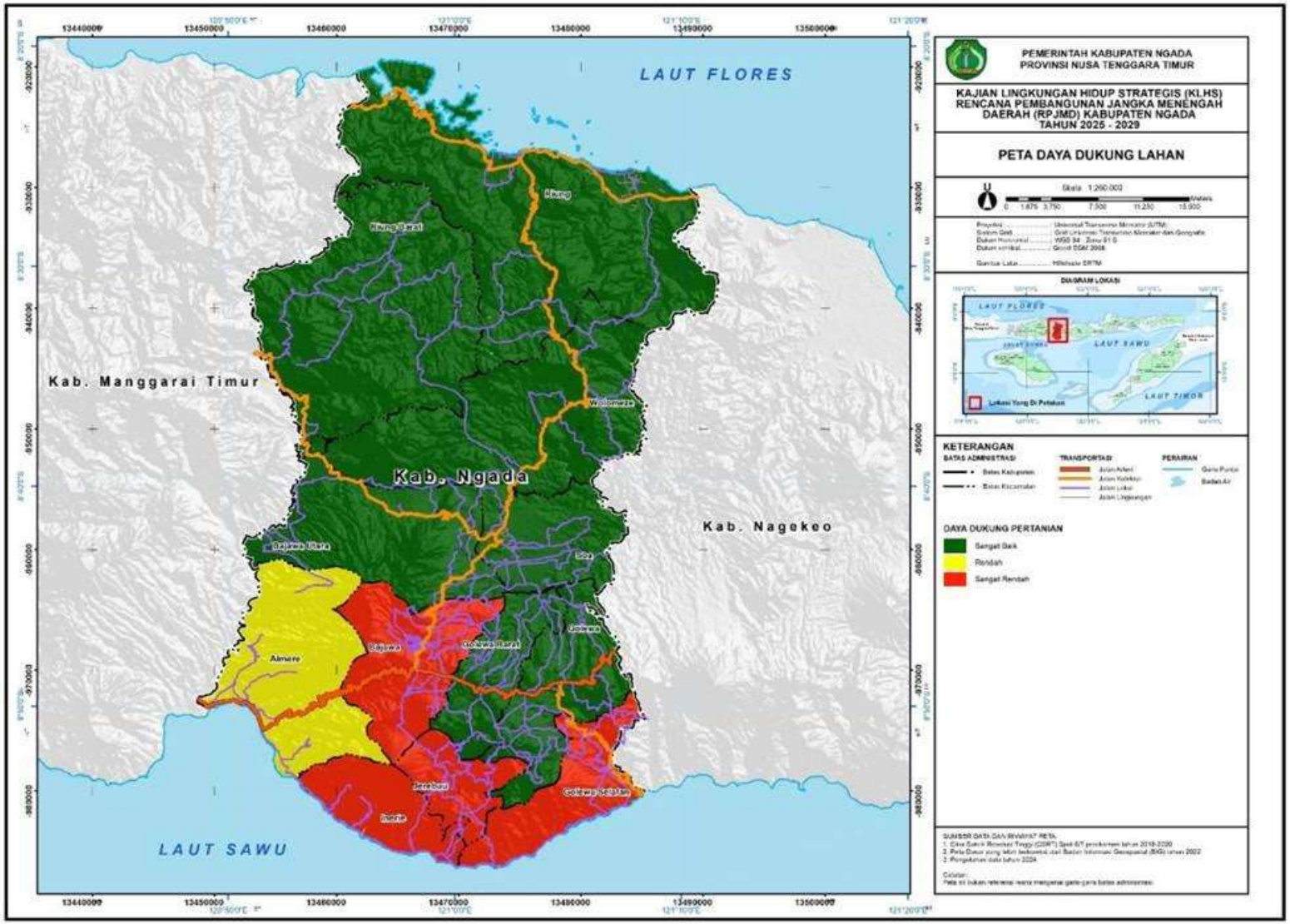

Gambar 2. 4 Peta Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR)

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

2. Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid

Sistem grid skala ragam dibuat dengan memperhatikan datum geodetik, sitem koordinat, titik asal sistem koordinat grid skala ragam, resolusi grid, dan sistem penomoran grid. Sistem grid skala ragam ini dimanfaatkan untuk data lingkungan Indonesia dengan titik asal (origin) sitem koordinat terletak pada koordinat terletak pada koordinat (90° BT, 15° LS); titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 144° BT dan 10° LU, sama dengan grid penomoran lembar peta rupa bumi Indonesia (RBI) (BAKOSURTANAL, 2005). Titik asal tersebut terletak pada sudut kiri bawah yang menjadi awal dari nomor grid pada sistem grid skala ragam Indonesia.

Ukuran grid yang dibangun berbeda-beda dari mulai ukuran 1°30 x 1° hingga ukuran grid terkecil yaitu 5" x 5" (atau setara dengan ukuran di lapangan sekitar 154 x 154 m). Dalam sistem yang dibuat, data jumlah penduduk, kondisi tutupan lahan dan keberadaan jalan akses akan diintegrasikan melalui nilai tertentu. Distribusi densitas populasi dimodelkan dalam sistem grid melalui persamaan sebagai berikut.

$$P = \sum_{i=1}^{n} A_i D_i$$

Keterangan:
P : Jumlah penduduk total
Ai : Luas area setiap tutupan lahan
Di : Kepadatan penduduk setiap tipe penggunaan lahan
Dari persamaan tersebut, dapat ditambahkan parameter bobot untuk setiap tipe tutupan lahan dan jalan, sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi:

$$P = \sum_{i=1}^{n} A_{ij} \, (W_i W_{i1}) \, D_i$$

Keterangan:
P : Jumlah penduduk total
Aij : Luas area setiap tutupan lahan dari data tutupan lahan
Dij : Kepadatan penduduk setiap tipe penggunaan lahan dari data tutupan lahan
Wi : Bobot setiap kelas lahan
Wjl : Bobot setiap kelas jalan

Untuk menghitung densitas populasi penduduk untuk setiap kelas lahan dalam suatu wilayah administratif (kabupaten, kecamatan atau kelurahan), persamaan di atas dikembangkan menggunakan persamaan tambahan berikut:

$$A'_{ij} = A_{ij} \, (W_i + W_{jl})$$

$$D_{ij} = \frac{\left(\frac{\left(\frac{A'_{ij}}{\sum A'_{ij}} \times A_{ij} \right)}{\sum \left(\frac{A'_{ij}}{\sum A'_{ij}} \times A_{ij} \right)} \right)}{A_{ij}} \times P_j$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diperoleh densitas populasi penduduk per grid untuk tiap kelas lahan di masing-masing wilayah administrasi. Perhitungan densitas dilakukan dalam dua tahap yaitu:

a. Memasukkan data tutupan lahan sebagai masukan.
b. Memasukkan data tutupan lahan dan jalan sebagai masukan untuk menentukan identitas.

Tabel 2. 14. Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Kebutuhan (SA)	Ketersediaan (DA)	Status Daya Dukung Air Grid (Ha)		Total
				Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Aimere	45.042.684,1	89.346.598,05	11.976,08	3.356,25	15.332,33
2	Bajawa	72.418.658,21	62.525.581,9	4.378,44	6.408,25	10.786,69
3	Bajawa Utara	132.757.406	92.273.515,03	9.132,09	6.304,78	15.436,87
4	Golewa	98.232.695,63	62.086.193,56	2.545,75	7.733,60	10.279,35
5	Golewa Barat	60.698.011,91	36.826.979,29	2.802,67	4.053,60	6.856,27
6	Golewa Selatan	40.736.901,55	52.671.122,13	5.790,89	2.268,38	8.059,27
7	Inerie	6.197.278,498	43.155.105,79	6.380,13	194,52	6.574,65
8	Jerebuu	8.097.587,664	38.368.768,94	4.249,00	602,68	4.851,68
9	Riung	48.967.411,62	17.317.527,88	31.649,35	3.552,75	35.202,10
10	Riung Barat	61.241.401,83	19.603.008,16	26.348,32	2.337,49	28.685,81
11	Soa	168.334.190,6	52.823.219,87	1.862,89	6.874,95	8.737,83
12	Wolomeze	74.401.351,51	93.575.887,44	19.066,52	3.883,18	22.949,70
Kabupaten Ngada		**818.125.579,1**	**992.858.332,3**	**126.182,13**	**47.570,42**	**173.752,5**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

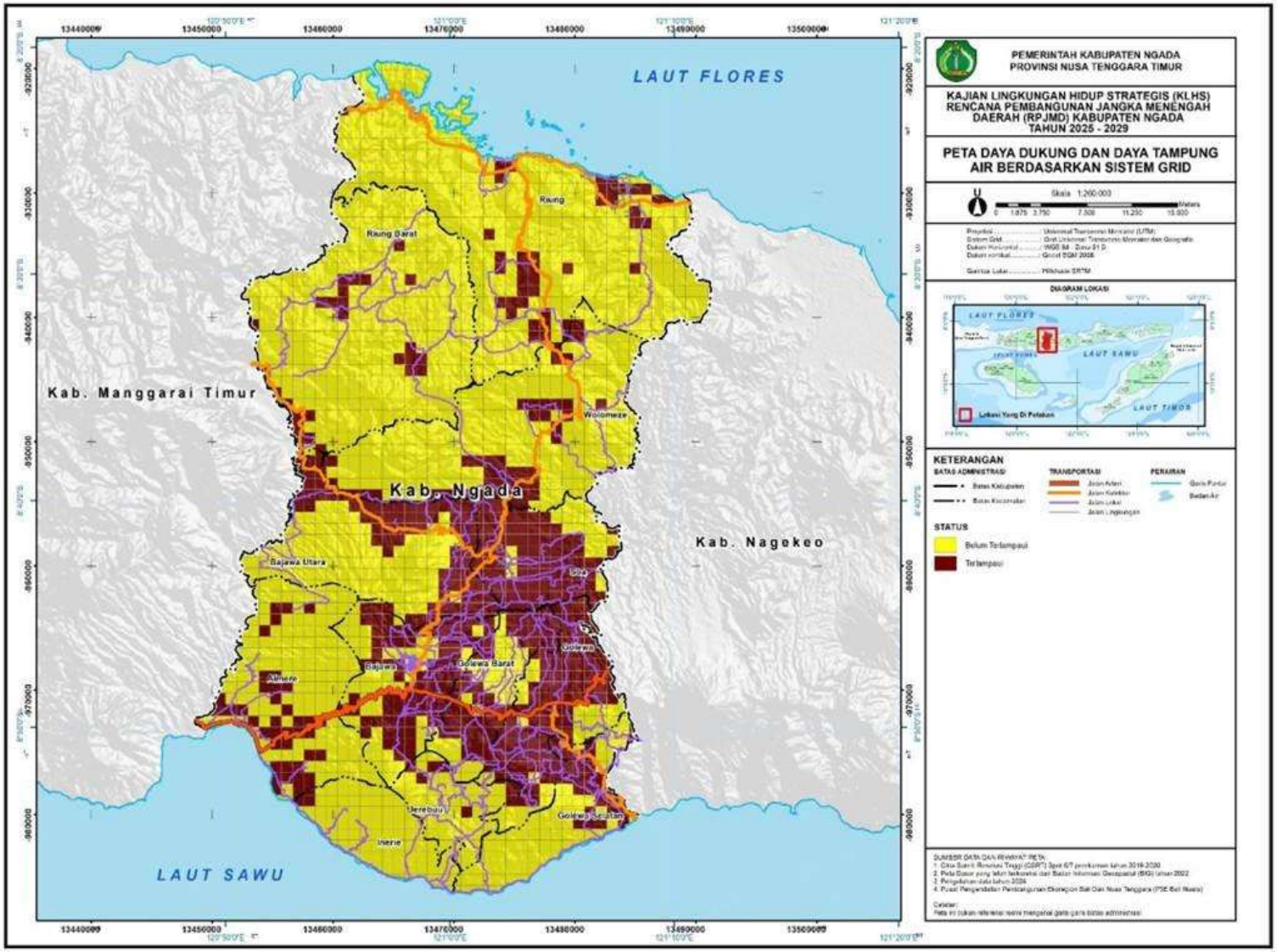

Gambar 2. 5. Peta Daya Dukung Air Berdasar Sistem Grid

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Hutan dengan penyebaran vegetasinya yang luas, struktur dan komposisinya yang sangat beragam merupakan salah satu komponen sumber daya alam terpenting dalam ekosistem. Keberadaan hutan diharapkan mampu memberi manfaat lingkungan yang besar bagi kehidupan manusia, antara lain dalam pengendalian banjir, erosi, sedimentasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengendalian daur air dan pemeliharaan kualitas udara.

Tingkat daya dukung fungsi lindung dituliskan dengan simbol DDL, dimana:

$$DDL = \frac{\Sigma(Lgl1.\alpha1 + Lgl2.\alpha2 + Lgl3.\alpha3 + Lglx.\alpha x)}{LW}$$

DDL : daya dukung fungsi lindung
LW : Luas wilayah (ha)
Lgl1 : Luas guna lahan jenis 1 (Ha)
α1 : Koefisien lindung untuk guna lahan jenis 1
Koefisien lindung untuk tata guna lahan adalah:

Cagar Alam	:	1	Hutan produksi	:	0,68
Suaka Margasatwa	:	1	Perkebunan besar	:	0,54
Taman wisata	:	1	Perkebunan rakyat	:	0,42
Taman buru	:	0,82	Persawahan	:	0,46
Hutan lindung	:	1	Ladang/ tegal	:	0,21
Hutan cadangan	:	0,61	Padang rumput	:	0,28
Danau/ tambak	:	0,98	Tanaman kayu	:	0,35
Permukiman	:	0,18	Tanah kosong	:	0,01

Tabel 2. 15. Klasifikasi Kelas Ketersediaan Daya Dukung Lindung

Nilai DDL	Kategori
0 – 0,25	Kurang baik
0,26 – 0,5	Cukup baik
0,51 – 0,75	Baik
0,76 – 1	Sangat baik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

Tabel 2. 16. Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Ngada 2024

No.	Kecamatan	DDL	Keterangan
1	Aimere	0,77	Sangat Baik
2	Bajawa	0,73	Baik
3	Bajawa Utara	0,66	Baik
4	Golewa	0,73	Baik
5	Golewa Barat	0,70	Baik
6	Golewa Selatan	0,91	Sangat Baik
7	Inerie	0,90	Sangat Baik
8	Jerebuu	0,72	Baik
9	Riung	0,41	Cukup Baik
10	Riung Barat	0,66	Baik
11	Soa	0,61	Baik
12	Wolomeze	0,63	Baik
Total		**0,65**	**Baik**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel di atas, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Ngada tahun 2024 dikategorikan baik.

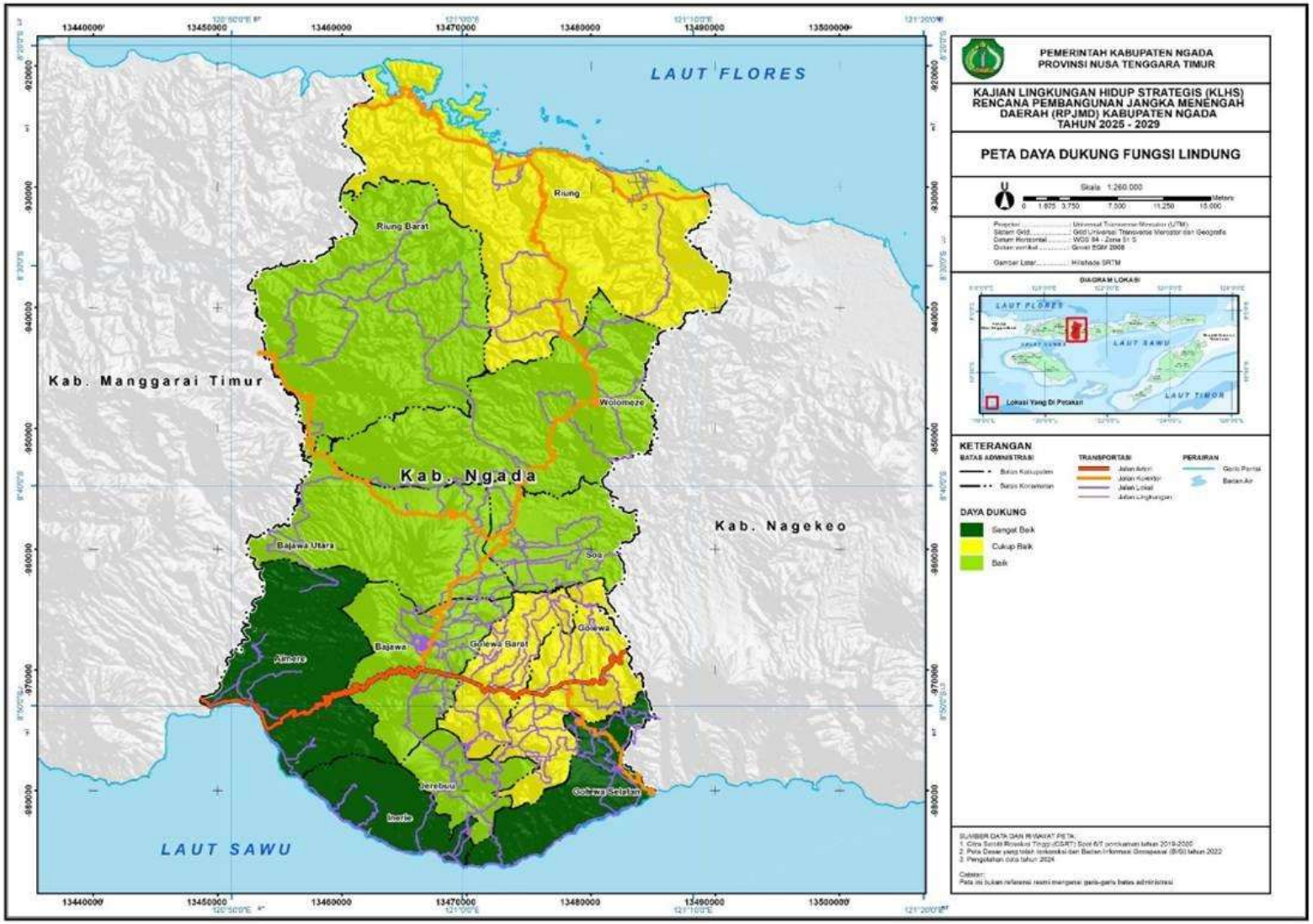

Gambar 2. 6. Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Ngada

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

4. Daya Tampung Penduduk

Daya tampung penduduk sangat berkaitan dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran permukiman dan kebutuhan permukiman sampai akhir tahun perencanaan. Daya tampung penduduk juga berfungsi untuk melihat jumlah kebutuhan ruang untuk perumahan pada tahun perencanaan 2029 dengan membandingkan kesesuaian lahan potensial yang ada.

Asumsi yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 bahwa melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Oleh karena itu, lingkungan hunian harus dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 3 : 2 : 1 (kavling sederhana : menengah : mewah).

Dalam tabel di bawah ini terlihat bahwa daya tampung penduduk Kabupaten Ngada tahun 2029 yaitu 59.827.989 jiwa dengan daya tampung rumah sebesar 11.965.598 unit. Selain itu juga, daya tampung rumah memenuhi daya tampung jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 17. Daya Tampung Pemukiman Kabupaten Ngada 2029

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan Eksisting	PSU (30%)	Perumahan (70%)	Luas Lahan Bagi Perumahan Baru			Jumlah Unit Rumah			Daya Tampung Rumah (unit)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)	Jml Pen-duduk 2029	Keterangan
					Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)	Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)				
		A	B = (Ax30%)	C = (Ax70%)	D= (Cx1/3)	E= (Cx2/3)	F=(Cx3/3)	H = (Dx10.000 m/ 288 m^2)	I = (E x10.000 m/144 m^2)	J = (Fx 10.000 m/ 72 m^2)	K = H+I+J	L = Kx 5 jiwa		
1	Aimere	15.332,33	4.599,70	10.732,63	1.788,77	3577,54	5.366,32	62.110,15	24.440,60	745.321,80	1.055.873	5.279.363	11.998	Memenuhi
2	Jerebuu	4.851,68	1.455,50	3.396,18	566,03	1132,06	1.698,09	19.653,81	78.615,23	235.845,69	334.115	1.670.574	8.545	Memenuhi
3	Inerie	6.574,65	1.972,40	4.602,26	767,04	1534,09	2.301,13	26.633,43	106.533,70	319.601,10	452.768	2.263.841	9.409	Memenuhi
4	Bajawa	10.786,69	3.236,01	7.550,68	1.258,45	2516,89	3.775,34	43.696,08	174.784,30	524.352,90	742.833	3.714.166	40.967	Memenuhi
5	Golewa	10.279,35	3.083,80	7.195,54	1.199,26	2398,51	3.597,77	41.640,87	166.563,47	499.690,41	707.895	3.539.474	20.735	Memenuhi
6	Golewa Selatan	8.059,27	2.417,78	5.641,49	940,25	1880,50	2.820,74	32.647,50	130.589,99	391.769,96	555.007	2.775.037	13.447	Memenuhi
7	Golewa Barat	6.856,27	2.056,88	4.799,39	799,90	1599,80	2.399,69	27.774,22	111.096,89	333.290,66	472.162	2.360.809	12.368	Memenuhi
8	Bajawa Utara	15.436,87	4.631,06	10.805,81	1.800,97	3601,94	5.402,90	62.533,61	250.134,44	750.403,31	1.063.071	5.315.357	10.861	Memenuhi
9	Soa	8.737,83	2.621,35	6.116,48	1.019,41	2038,83	3.058,24	35.396,32	141.585,28	424.755,85	601.737	3.008.687	15.651	Memenuhi
10	Riung	35.202,09	10.560,63	24.641,47	4.106,91	8213,82	12.320,73	142.601,07	570.404,28	1.711.212,85	2.424.218	12.121.091	24.596	Memenuhi
11	Riung Barat	28.685,81	8.605,74	20.080,07	3.346,68	6693,36	10.040,03	116.204,10	464.816,39	1.394.449,16	1.975.470	9.877.348	8.460	Memenuhi
12	Wolomeze	22.949,70	6.884,91	16.064,79	2.677,47	5354,93	8.032,40	92.967,55	371.870,21	1.115.610,64	1.580.448	7.902.242	7.208	Memenuhi
Total		**173.752,55**	**52.125,76**	**121.626,78**	**20.271,13**	**40542,26**	**60.813,39**	**703.858,70**	**2.815.434,78**	**8.446.304,34**	**11.965.598**	**59.827.989**	**184.248**	**Memenuhi**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

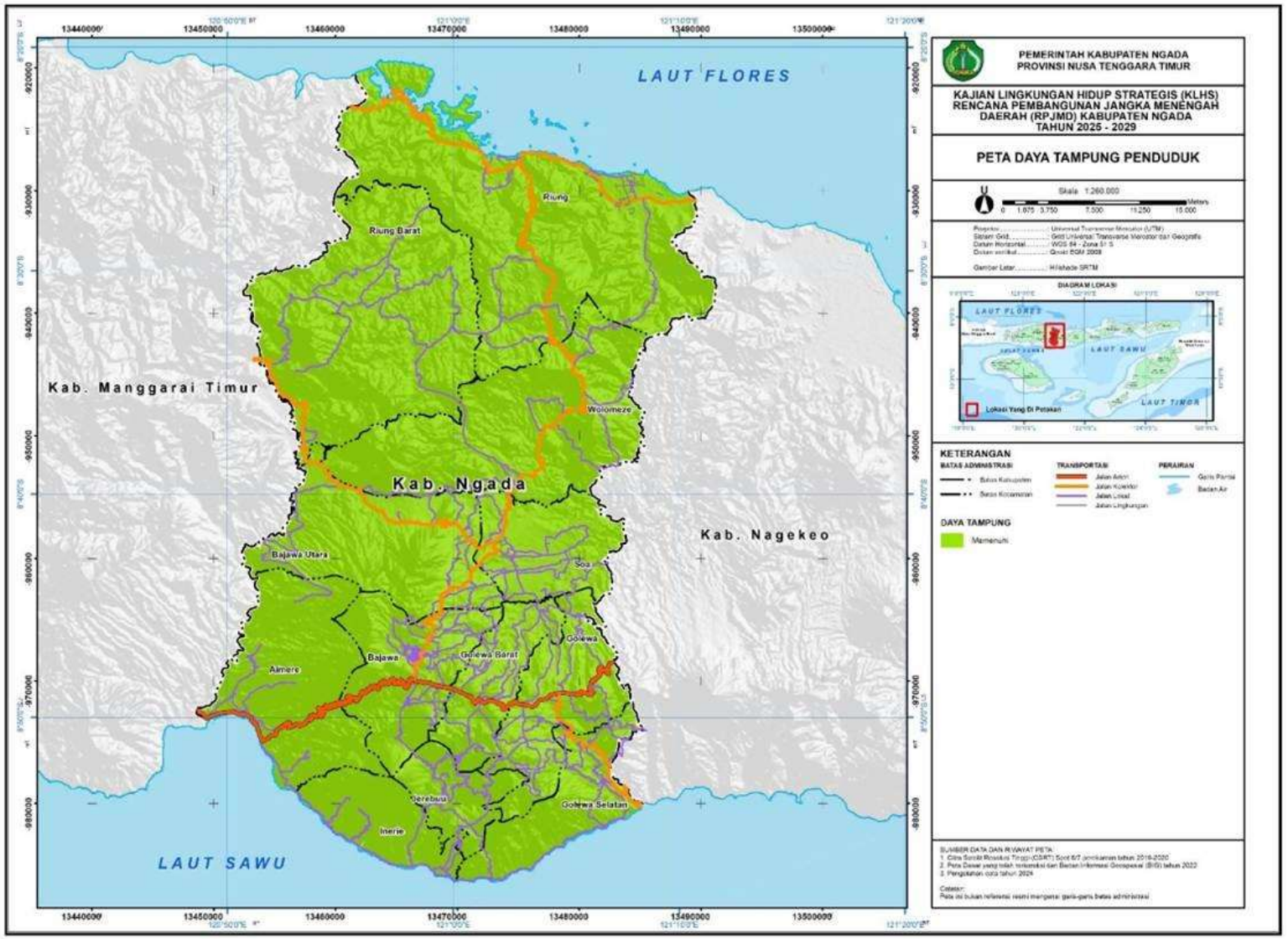

Gambar 2. 7. Peta Daya Tampung Penduduk

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, tahun 2025

5. Daya Dukung dan Daya Tampung Berdasar Jasa Ekosistem

a. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa lingkungan untuk penyediaan bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun tidak diolah. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 18 persen dari wilayah Kabupaten Ngada masuk kategori sangat tinggi, 43 persen wilayah lainnya masuk dalam kategori tinggi, 36 persen masuk dalam kategori sedang, dan sisanya yaitu sebesar 3 persen masuk dalam kategori rendah.

b. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air Bersih

Jasa lingkungan hidup penyediaan air bersih adalah jasa lingkungan yang memberikan manfaat bagi penyediaan air bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan dan air tanah. Hasil analisis DDDTLH menyebutkan bahwa 6 persen dari wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam kategori tinggi, 24 persen masuk dalam kategori sedang dan sisanya yaitu sebesar 58 persen masuk kategori rendah dan sangat rendah (12 persen).

c. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Serat

Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat dapat berasal dari hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan. Adapun hasil analisis DDDTLH terkait jasa lingkungan hidup penyediaan serat adalah sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada masuk kategori rendah (79 persen), 3 persen masuk kategori sangar tinggi, 8 persen masuk kategori tinggi, 6 persen masuk kategori sedang, dan 4 persen masuk kategori sangat rendah.

d. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Bakar

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara serta sumber energi alternatif seperti tenaga air mikrohidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi dari minyak sawit, minyak buah biji jarak. Adapun hasil analisis mendapatkan hasil yaitu sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam kategori tinggi (88 persen), 2 persen wilayah masuk dalam kategori sangat tinggi, 7 persen masuk dalam kategori sedang, 2 persen masuk dalam kategori rendah dan 1 persen masuk kategori sangat rendah.

e. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Air dan Banjir

Siklus hidrologi atau tata air dan banjir adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (*flow*). Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentang alam) suatu wilayah. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa sekitar 20 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk kategori sangat tinggi, 63 persen masuk dalam kategori tinggi, 12 persen masuk dalam kategori sedang, dan sisanya yaitu sebesar 3 persen dan 2 persen masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah.

f. Jasa Lingkungan Hidup Pencegah dan Perlindungan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non -alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa hanya 19 persen dari wilayah Kabupaten Ngada yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 10 persen masuk dalam kategori tinggi, 45 persen masuk dalam kategori sedang, 25 persen masuk dalam kategori rendah dan 1 persen masuk dalam kategori sangat rendah.

g. Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air

Kemampuan ekosistem dalam membersihkan pencemar disebabkan adanya proses-proses kimia, fisik dan biologi yang berlangsung secara alami di dalamnya. Pemurnian air dipengaruhi oleh tinggi rendahnya bahan pencemar dan aktivitas bakteri alam dalam mengurai bahan organik. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 2 persen dari wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam kategori sangat tinggi, 24 persen masuk dalam kategori tinggi, 23 persen masuk dalam kategori sedang, 50 persen masuk dalam kategori rendah, dan 1 persen masuk dalam kategori sangat rendah

h. Jasa Lingkungan Hidup Pengolahan dan Pengurai Limbah

Limbah sebagai buangan atau hasil dari suatu proses produksi baik produksi industri maupun domestik akan kembali ke alam. Zat organik dalam limbah mampu dinetralisir oleh ekosistem karena ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir, mengurai serta menyerap limbah dan sampah yang diterima. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 8 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk kategori sangat tinggi, 3 persen masuk dalam kategori tinggi, 83 persen masuk dalam kategori sedang, 5 persen masyarakat dalam kategori sendang dan 1 persen masuk dalam kategori sangat rendah.

i. Jasa Lingkungan Hidup Pemeliharaan Kualitas Udara

Kualitas udara merupakan sesuatu yang tidak tetap dari waktu ke waktu. Fluktuasinya dipengaruhi oleh angin, suhu udara, hujan, sinar matahari dan yang paling penting adalah pemanfaatan ruang pada permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, maka semakin dinamis pula kualitas udaranya. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 19 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam kategori sangat tinggi, 68 persen masuk dalam kategori tinggi, 7 persen masuk dalam kategori sedang, dan sisanya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah sebesar 5 persen dan 1 persen.

j. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan dan Penyerbukan Alami

Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami melalui adanya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat tersebut seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengaturan penyerbukan yang lebih melimpah. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 10 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam kategori sangat tinggi, 77 persen masuk dalam kategori tinggi, dan sisanya masuk dalam kategori sedang dan sangat rendah sebesar 12 persen dan 1 persen.

k. Jasa Lingkungan Hidup Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama adalah makhluk atau organisme yang mengganggu kesehatan manusia, keseimbangan ekologis dan ekonomi. Ekosistem mampu mengendalikan makhluk/organisme yang menjadi hama penyakit karena dalam ekosistem terdapat habitat spesies *trigger* dan pengendali hama penyakit. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan hasil bahwa 3 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam kategori sangat tinggi, 8 persen masuk dalam kategori tinggi, 36 persen masuk dalam kategori sedang, 50 persen masuk dalam kategori rendah, dan 3 persen masuk dalam kategori sangat rendah.

l. Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik, geografis dan peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 2 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk kategori sangat tinggi, 5 persen masuk kategori tinggi, 5 persen masuk kategori sedang, 20 persen masuk kategori rendah dan 68 persen masuk kategori sangat rendah.

m. Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Rekreasi dan Ekowisata

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa Kabupaten Ngada terdapat 5 klasifikasi untuk pengadaan budaya rekreasi dan ekowisata. Klasifikasi tersebut adalah 72 persen masuk dalam kelas sangat tinggi, 21 persen masuk dalam kelas tinggi, 5 persen masuk dalam kelas sedang, 1 persen masuk dalam kelas rendah, dan 1 persen masuk dalam kelas sangat rendah.

n. Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Estetika Alam

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa Kabupaten Ngada mempunyai 5 (lima) klasifikasi untuk pengadaan budaya estetika alam. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 81 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam klasifikasi sangat tinggi, 9 persen masuk dalam klasifikasi tinggi, 8 persen masuk dalam klasifikasi sedang, dan sisanya 1 persen masuk dalam klasifikasi rendah dan sangat rendah.

o. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa hanya 2 persen wilayah Kabupaten Ngada yang masuk dalam klasifikasi sangat tinggi, 5 persen wilayah masuk dalam klasifikasi tinggi, 38 persen masuk dalam klasifikasi sedang, 49 persen masuk dalam klasifikasi rendah, dan 6 persen masuk dalam klasifikasi sangat rendah.

p. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara

Hara diperlukan untuk produksi bahan organik baik pada tingkat trofik produser ataupun konsumen yang umumnya berapa dalam lingkungan abiotik dengan konsentrasi yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk aktivitas pertumbuhan. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 6 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam klasifikasi sangat tinggi, 6 persen masuk dalam klasifikasi tinggi, 67 persen masuk dalam klasifikasi sedang, 20 persen masuk dalam klasifikasi rendah dan 1 persen masuk dalam klasifikasi sangat rendah.

q. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer

Ekosistem dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen dan pengikat karbon. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembuatan makanan melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi yang berhubungan erat dengan vegetasi dan hutan. Hasil analisis DDDTLH menunjukkan bahwa 4 persen wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam klasifikasi sangat tinggi, 36 persen masuk dalam klasifikasi tinggi, 55 persen masuk dalam klasifikasi sedang, dan sisanya 5 persen masuk dalam klasifikasi sangat rendah.

r. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumberdaya Genetik

Jasa lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan sumber daya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati (kehati) baik flora maupun fauna. Keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumber daya genetik ditentukan oleh tipe ekosistemnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 2 persen wilayah Kabupaten Ngada yang mempunyai klasifikasi jasa penyediaan sumber daya genetik sangat tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada (68 persen) masuk dalam klasifikasi sedang. Sedangkan sisanya masuk dalam klasifikasi tinggi (9 persen), rendah (20 persen) dan sangat rendah (1 persen).

6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

a. Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas

Terkait dengan jasa lingkungan keanekaragaman hayati/biodiversitas Kabupaten Ngada didominasi kategori sangat tinggi yaitu sebesar 83 persen luas wilayah (144.291,84 ha). Kabupaten Ngada memiliki area bernilai konservasi tinggi (ABKT) seluas 30.568,77 ha. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi wilayah bernilai konservasi di dalam kawasan produksi untuk melengkapi upaya konservasi di kawasan konservasi/lindung. Selain itu Kabupaten Ngada juga mempunyai wilayah sebaran habitat komodo. Habitat komodo tersebut berada di Kecamatan Riung dan Riung Barat dengan luas total 1.075,76 ha.

b. Ekoregion

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa ekoregion Kabupaten Ngada terdiri dari 32 jenis yang didominasi oleh pegunungan denudasional monsun merangas dengan total luas 43.808,36 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

7. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Dampak dan risiko lingkungan hidup Kabupaten Ngada dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Jenis Risiko Bencana

Data KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa Kabupaten Ngada paling rawan terhadap bencana kebakaran hutan, disusul kemudian oleh bencana kekeringan, tanah longsor.

b. Kerusakan tutupan lahan

Data KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa hutan lahan kering primer dari tahun 2013-2022 berkurang sebesar 76,76 persen. Berkurangnya tutupan lahan kering primer tersebut diindikasikan terjadi karena perubahan fungsi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan permukiman dan lahan terbuka.

c. Degradasi Lahan

Data KLHS RPJMD Tahun 2022-2029 menunjukkan bahwa lahan kritis banyak ditemui di Kabupaten Ngada dan diindikasikan terjadi karena aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan pembukaan lahan dan penebangan liar.

d. Kerentanan Iklim

Data kerentanan iklim menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada masuk dalam kategori kerawanan sedang hingga tinggi. Hal tersebut diindikasikan dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air, pangan dan kesehatan lingkungan

e. Kerusakan Kawasan Hutan

Data KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luasan kawasan hutan yang cukup signifikan di Kabupaten Ngada. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan konservasi mengalami peningkatan

f. Dampak Sosial Lingkungan

Studi KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 diindikasikan secara tidak langsung kondisi kemiskinan Kabupaten Ngada dapat mempengaruhi perilaku masyarakat Kabupaten Ngada dalam pengelolaan lingkungan. Contohnya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat karena keterbatasan modal dan alat untuk melakukan pembukaan hutan dengan cara yang aman dan lestari.

8. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Jasa lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan sumberdaya genetik berhubungan erat dengan kehati baik flora maupun fauna. Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin beberlanjutannya. Hasil analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menunjukkan bahwa Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Riung mempunyai luasan jasa lingkungan hidup penyediaan sumber daya genetik paling besar dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada.

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pangan, air dan energi merupakan bagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Ketersediaan pangan, air dan energi di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut. Adapun kondisi kemandirian pangan, air dan energi di Kabupaten Ngada dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan suatu daerah dapat diukur dengan indeks ketersediaan pangan, indeks keterjangkauan pangan dan indeks pemanfaatan pangan. Gabungan dari ketiga indeks tersebut adalah Indeks Ketahanan Pangan. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada dari tahun 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung fluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 1,12 persen per tahun. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT, nampaknya rata-rata pertumbuhan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada relatif di bawah kondisi keseluruhan Provinsi NTT (lihat tabel di bawah ini).

Tabel 2. 18. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Kabupaten/Provinsi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
Kabupaten Ngada	Indeks	80,24	79,87	79,24	81,74	82,72	1,40
Provinsi NTT	Indeks	66,92	67,35	68,42	71,25	tad	8,88

Sumber: Pengolahan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

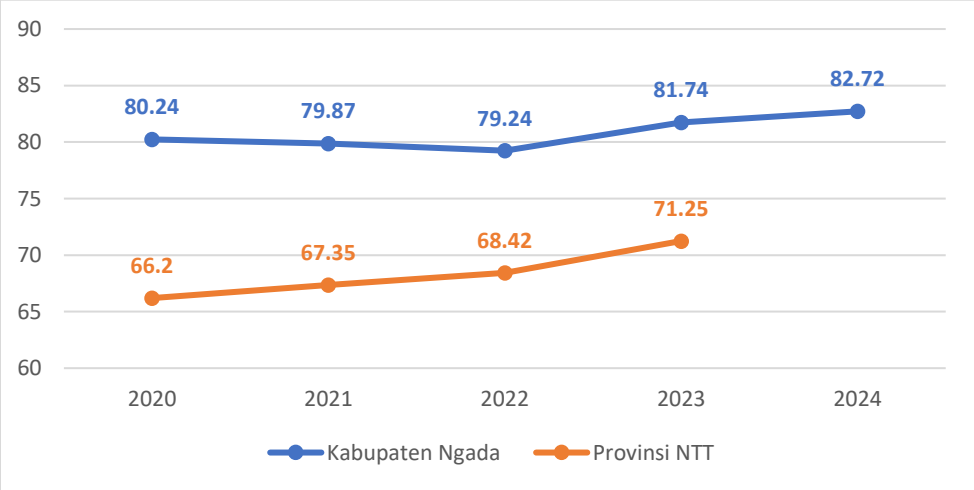

Gambar 2. 8. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Pengolahan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan indikator untuk melihat kerawanan pangan dan gizi. Data menyebutkan bahwa selama kurun waktu 2020-2023, rata-rata pertumbuhan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Ngada adalah sebesar 10,48 persen. Apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Provinsi NTT, rata-rata pertumbuhan Kabupaten Ngada jauh lebih kecil. Ini berarti penduduk Kabupaten Ngada yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi lebih sedikit dibandingkan Provinsi NTT. Untuk lebih jelasnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram di bawah ini.

Tabel 2. 19. Prevalensi Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Provinsi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
Kabupaten Ngada	Persen	8,93	7,49	11,2	10,9		10,48
Provinsi NTT	Persen	2,97	1,78	2,24	14,98	12,49	71,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025, diolah

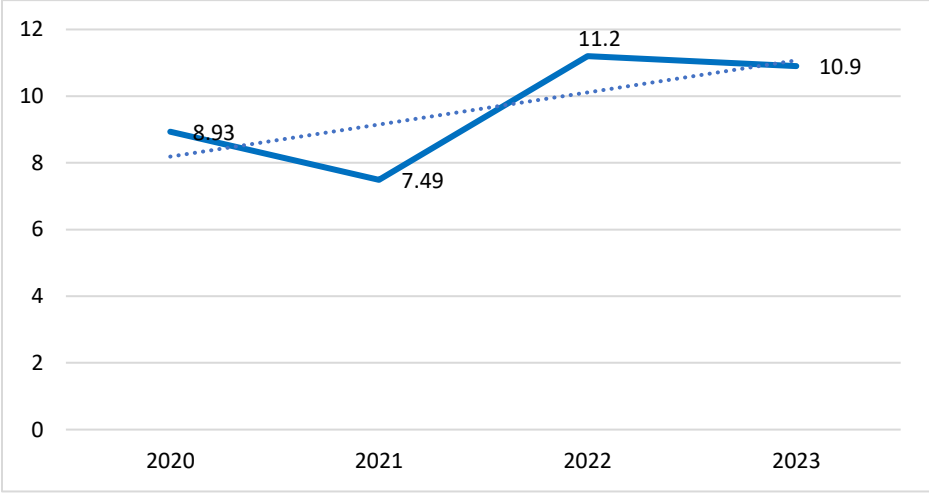

Gambar 2. 9. Diagram Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025, diolah

3. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah proporsi rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak konsumsi, yaitu air yang memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum sesuai standar Kementerian Kesehatan. Rata-rata pertumbuhan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah sebesar 0,43 persen. Apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum Provinsi NTT, nampaknya nilai rerata pertumbuhan Kabupaten Ngada lebih kecil dibandingkan nilai rerata pertumbuhan Provinsi NTT (1,46 persen). Ini berarti rumah tangga di Kabupaten Ngada yang memiliki akses terhadap konsumsi air minum sedikit lebih banyak dibandingkan Provinsi NTT. Untuk lebih

jelasnya data akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram di bawah ini.

Tabel 2. 20. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Kabupaten/ Provinsi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/tahun)
Kabupaten Ngada	Persen	92,36	94,55	95,78	95,41	97,2	0,43
Provinsi NTT	Persen	83,87	85,40	86,76	88,35	88,55	1,46

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

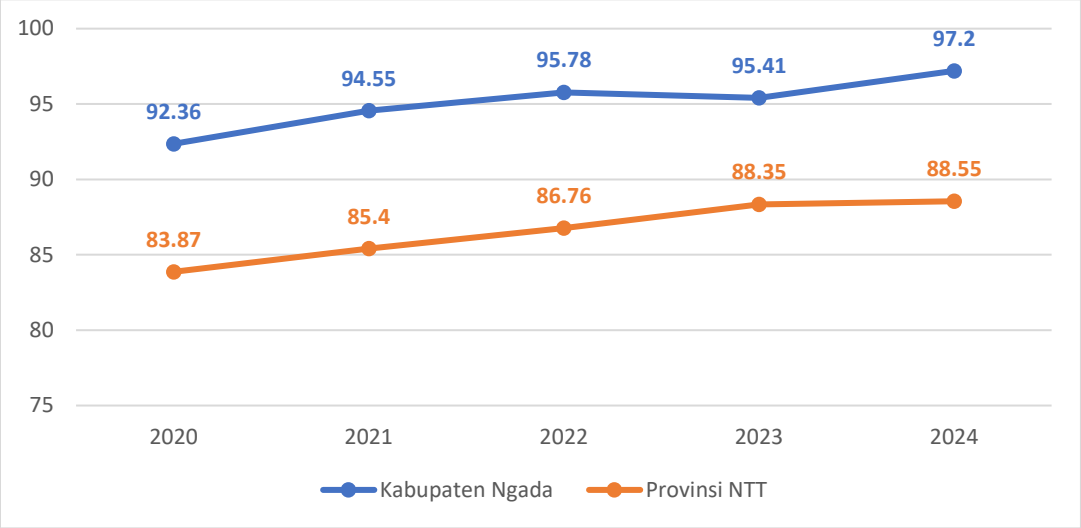

Gambar 2. 10. Diagram Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas adalah suatu kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Data IKLH Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 sebesar 0,60 persen per tahun. Apabila ditelaah lebih lanjut, nampaknya bagian dari IKLH yang mempengaruhi penurunan nilai IKLH adalah Indeks Kualitas Air. Pada tahun 2021, nilai Indeks Kualitas Air sebesar 66,67. Nilai Indeks Kualitas Air tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 61,67 pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya nilai IKLH Kabupaten Ngada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Kabupaten	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
Kabupaten Ngada	Indeks	tad	74,58	75,6	74,4	75,92	0,60

Sumber: Pengolahan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

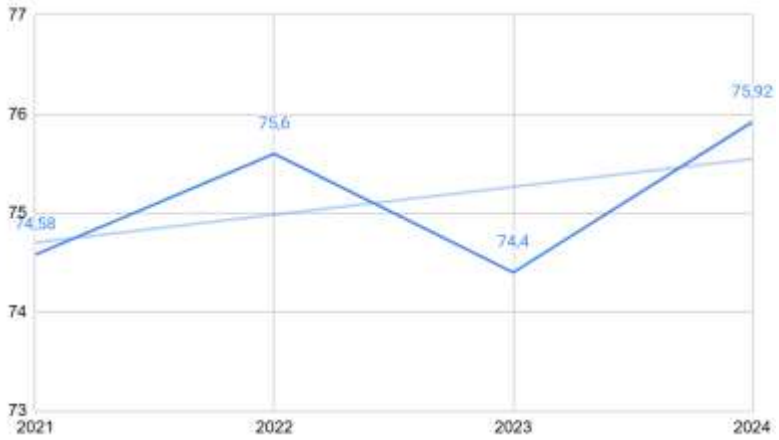

Gambar 2. 11. Diagram IKLH Kabupaten Ngada Tahun 2021-2024

Sumber: Pengolahan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa atau plengsengan tertutup, bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL). Data rumah tangga dengan akses sanitasi layak menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung bertumbuh positif dengan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,67 persen. Data rumah tangga dengan akses sanitasi layak dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 22. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Kabupaten	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
Kabupaten Ngada	Persen	74,69	75,4	76,66	77,08	79,56	1,67

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

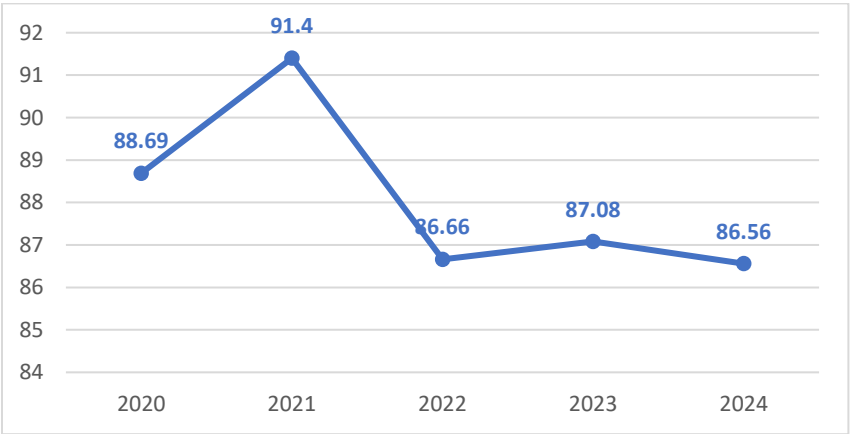

Gambar 2. 12. Diagram Rumah Tangga dengan Akses Sanitas Layak Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah adalah volume atau berat sampah yang berhasil diolah di fasilitas tersebut, melalui proses pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, atau pengolahan menjadi bentuk yang lebih ramah lingkungan. Data menunjukkan bahwa persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,99 persen. Data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 23. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kabupaten	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
Kabupaten Ngada	Persen	18,39	20,37	21,77	21,5	22,8	3,99

Sumber: Pengolahan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

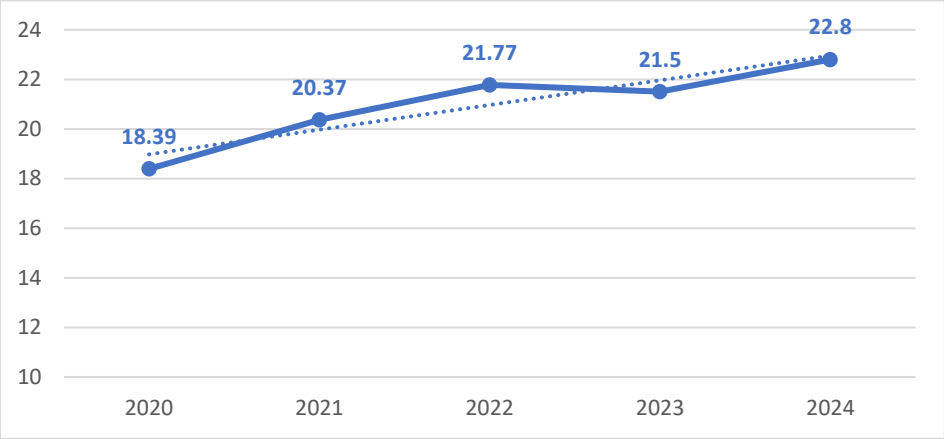

Gambar 2. 13. Diagram Timbulan Sampah Terolah di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Pengolahan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan masyarakat, infrastruktur dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Kondisi kebencanaan di Kabupaten Ngada dapat dilihat melalui gambaran umum wilayah. Posisi Kabupaten Ngada yang berhadapan langsung dengan dua perairan laut dan berdekatan dengan lempeng tektonik aktif membuat Kabupaten Ngada rentan terhadap bencana alam tsunami, gempa bumi serta abrasi laut akibat pasang surut air laut. Secara umum topografi berupa pegunungan dan perbukitan. Topografi yang sangat bervariasi ketinggiannya mempengaruhi karakteristik bencana yang ada di Kabupaten Ngada terutama pada kondisi lahan dan kondisi cuaca. Terdapat 3 gunung api aktif yang memberikan kesuburan tanah tetapi juga memberikan potensi ancaman bencana letusan gunung api. Sementara itu iklim cenderung kering pada tempat yang relatif datar sehingga memunculkan potensi ancaman bencana kekeringan dan kebakaran lahan, sedangkan pada tempat yang relatif tinggi memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan berpotensi terjadinya bencana banjir. Dilihat dari sejarah kejadian bencananya baik dari DIBI maupun dari data BPBD Kabupaten Ngada diperoleh data bahwa bahaya dengan dampak tertinggi adalah tanah longsor. Berikut data yang menunjukkan kelas bahaya pada setiap jenis bahaya dan luasannya.

Tabel 2. 24. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	16.887	Tinggi
2	Banjir bandang	1.503	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	47.182	Tinggi
4	Gelombang ekstrim dan abrasi	2.323	Tinggi
5	Gempa bumi	166.517	Tinggi
6	Kekeringan	166.517	Tinggi
7	Kebakaran hutan dan lahan	105.813	Tinggi
8	Letusan Gunung Api Ebulobo	794	Rendah
9	Letusan Gunung Api Inelika	5.424	Sedang
10	Letusan Gunung Api Inerie	14.137	Tinggi
11	Tanah longsor	11.1894	Tinggi
12	Tsunami	2.363	Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada dalam Rantek RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

Adapun indikator untuk menunjukkan tingkat resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi ancaman, kerentanan masyarakat, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Oleh sebab itu program atau kegiatan pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas dapat mempengaruhi penurunan Indeks Risiko Bencana.

Data menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan per tahun adalah sebesar 1,37 persen. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2024 diindikasikan terjadi peningkatan pada komponen bahaya dan kerentanan atau terjadi penurunan pada komponen kapasitas (kapasitas pemerintah). Tabel di bawah ini merupakan data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 25. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Kabupaten	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
Kabupaten Ngada	Indeks	115,7	128,63	128,63	122,18	tad	1,37

Sumber: Pengolahan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

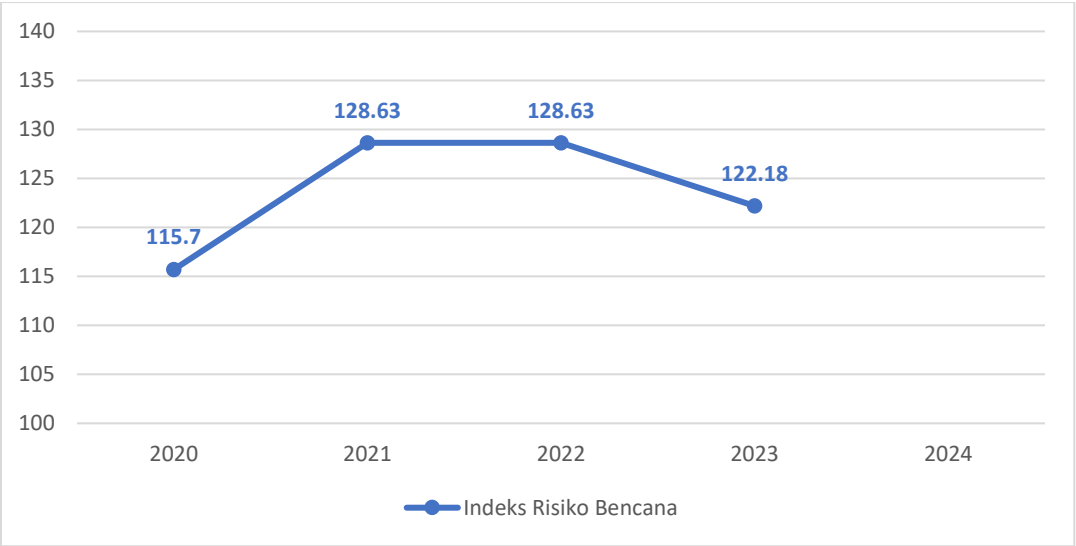

Gambar 2. 14. Diagram Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, diolah 2025

2. Kerentanan Perubahan Iklim

Kemampuan Kabupaten Ngada dalam mengelola dampak dari perubahan iklim (termasuk keragaman dan iklim ekstrem) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Dalam analisis ini, kapasitas adaptif desa direpresentasikan oleh 13 (tiga belas) indikator, yaitu fasilitas listrik, infrastruktur jalan, kelembagaan, industri kecil dan mikro, fasilitas pendidikan, sarana prasarana ekonomi, fasilitas kesehatan, lembaga keuangan, kegiatan pelestarian lingkungan, fasilitas kredit yang diterima warga, kegiatan sosial, lama sekolah, dan komunikasi. Kawasan yang memiliki lebih banyak jumlah kondisi indikator kapasitas adaptif yang bagus, secara relatif memiliki kemampuan adaptif yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Kabupaten Ngada memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori rendah, cukup rendah, cukup tinggi dan tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada berada pada kerentanan perubahan iklim kelas sedang dengan luas 96.044,57 Ha.

Tabel 2. 26. Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada

No	Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Aimere	-	1.018,34	9.899,33	60,37	4.354,30	15.332,33
2	Bajawa	425,05	-	4.244,40	5.030,97	1.086,27	10.786,69
3	Bajawa Utara	708,70	3.631,51	8.508,05	840,18	1.748,43	15.436,87
4	Golewa	80,66	808,70	4.304,22	3.547,49	1.538,27	10.279,35
5	Golewa Barat	68,48	429,96	3.616,06	2.681,86	59,91	6.856,27
6	Golewa Selatan	-	1.144,13	1.396,37	1.404,53	4114,23	8.059,27
7	Inerie	279,55	1.294,02	1.689,54	1.028,92	2.282,62	6.574,65
8	Jerebuu	-	91.46	941,17	1.957,62	1.861,44	4.851,68
9	Riung	2.493,67	7.501,16	21.294,73	468,69	3.443,85	35.202,10
10	Riung Barat	323,85	1.708,96	16.978,51	1.032,17	8.642,32	28.685,81
11	Soa	153,13	29,64	8.531,98		23,08	8.737,83
12	Wolomeze	132,87	3.955,79	14.640,21	18,54	4.202,29	22.949,70
Kabupaten Ngada		**4.665,96**	**21.613,66**	**96.044,57**	**18.071,34**	**33.357,01**	**173.752,55**

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

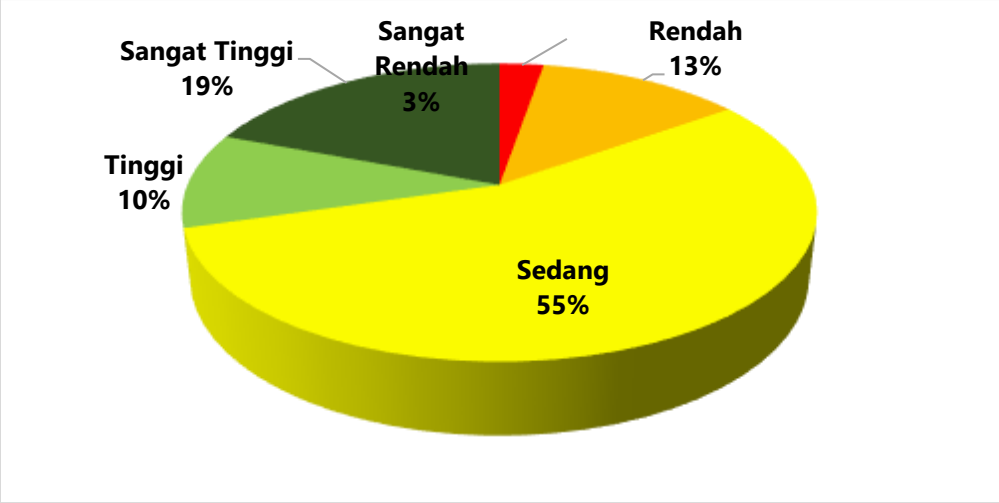

Gambar 2. 15. Diagram Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2019-2024, 2025

Terkait kondisi iklim, KLHK telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) pada tahun 2022 yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Kemampuan Kabupaten Ngada dalam mengelola dampak dari perubahan iklim (termasuk keragaman dan iklim ekstrem) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Kabupaten Ngada memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori Sangat Rendah, Sedang, Rendah dan Tinggi. Adapun tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Ngada di dominasi kategori Rendah dengan luasan 103.971,89 Ha.

Tabel 2. 27. Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada

No	Kecamatan	Kerentanan Iklim (Ha)				Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Aimere		9.248,42	0,28	6.083,63	15.332,33
2	Bajawa		8.370,47	171,68	2.244,54	10.786,69
3	Bajawa Utara		5.834,68	83.,40	9.518,79	15.436,87
4	Golewa		8.525,76	0,00	1.753,59	10.279,35
5	Golewa Barat		4.854,59	301,27	1.700,40	6.856,27
6	Golewa Selatan		3.722,13		4.337,14	8.059,27
7	Inerie		5.965,92		608,73	6.574,65
8	Jerebuu		3.442,81	21,34	1.387,53	4.851,68
9	Riung		28.665,24	242,26	6.294,60	35.202,10
10	Riung Barat		3.663,61	19.121,14	5.901,06	28.685,81
11	Soa	0,04	8.259,20		478,59	8.737,83
12	Wolomeze		13.419,07	882,46	8.648,17	22.949,70
Total		**0,04**	**103.971,89**	**20.823,84**	**48.956,78**	**173.752,55**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2019-2024, 2025

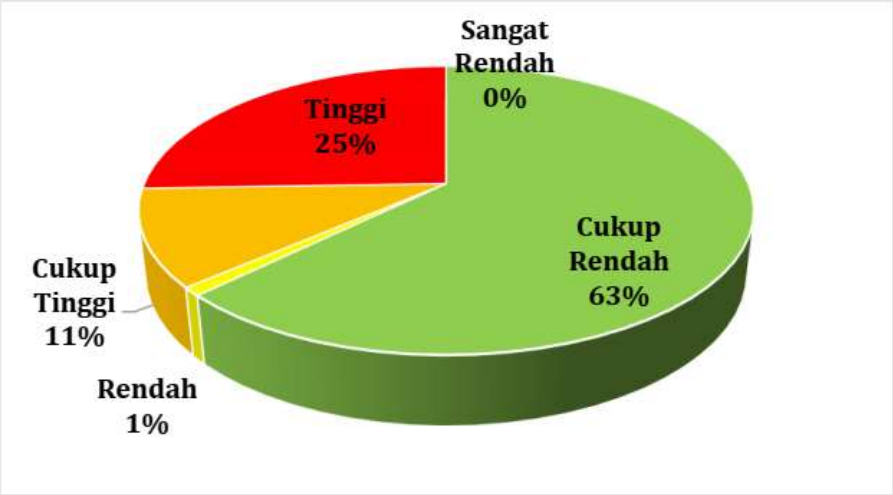

Gambar 2. 16. Diagram Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan kondisi kawasan hutan dan non-hutan, maka Kabupaten Ngada yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT berpotensi untuk terlibat dan berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini untuk mendukung kebijakan penyimpanan karbon dengan pendekatan *carbon net sink* tahun 2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Melalui pembahasan dari 4 bidang yaitu pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi serta instrumen dan informasi telah ditetapkan 8 rencana aksi mitigasi berbasis spasial pada lokasi yang sudah ditentukan. 8 rencana aksi mitigasi tersebut mencakup mencegah degradasi lahan mineral; degradasi konsesi terencana; pembangunan hutan tanaman; penerapan pengkayaan hutan alam; penerapan RIL-C; peningkatan cadangan karbon dengan rotasi; peningkatan candangan karbon tanpa rotasi, serta perlindungan areal konservasi tinggi.

Arahan pelaksanaan aksi mitigasi terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu RO 1 hingga RO 11 berada pada semua kabupaten/kota, pada perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan perhutanan sosial, pada Areal Penggunaan Lain, pada kawasan konservasi, dan pada semua kabupaten/kota untuk RO 3- RO 11. Adapun Kabupaten Ngada berada pada arahan aksi mitigasi RO 11 yaitu Perlindungan Areal Konservasi Tinggi seluas 23.471,699 Ha, dimana konservasi keanekaragaman hayati program pengelolaan hutan berkelanjutan yang mencakup; (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi, (3) Konservasi Spesies dan Genetik, dan (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, serta juga merupakan bagian dari program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pembinaan konservasi di luar kawasan hutan negara. Kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal. Lokasi prioritas untuk perlindungan areal konservasi tinggi pada berbagai fungsi Kawasan hutan. Berikut adalah tabel arahan pelaksanaan aksi mitigasi rencana kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 28. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Kabupaten Ngada

No	Kecamatan	RO11 (Ha)
1	Aimere	164,664
2	Bajawa	74,726
3	Bajawa Utara	2.745,905
4	Golewa	114,275
5	Inerie	26,957
6	Jerebuu	0,607
7	Riung	10.634,062
8	Riung Barat	5.941,740
9	Wolomeze	3.768,764
Grand Total		**23.471,699**

Sumber: Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

2.1.1.2. Aspek Demografi

Aspek demografi sangat erat berkaitan dengan dinamika dan proses kependudukan di suatu wilayah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: kelahiran, kematian, dan migrasi. Berkaitan dengan bonus demografi yang akan dialami oleh seluruh daerah di Indonesia, penting untuk pemerintah daerah mengelola kualitas sumber daya manusia secara baik agar dapat menjadi modal yang potensial guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Aspek demografi memiliki peran krusial karena sangat berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah, karena penduduk/masyarakat merupakan penerima manfaat langsung dari hasil pembangunan. Aspek demografi diuraikan melalui struktur jumlah penduduk dan struktur penduduk secara temporal lima tahun ke belakang.

A. Jumlah Penduduk

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Pertumbuhan penduduk berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah di masa akan datang yang selanjutnya akan melahirkan konsep proyeksi penduduk. Jumlah penduduk menyajikan informasi populasi yang hidup dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi tren jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu sangat berguna untuk melakukan analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk dalam suatu daerah sangat dipengaruhi oleh fenomena natalitas dan mortalitas yang dinamis berdasarkan faktor waktu. Jumlah penduduk juga menjadi dasar guna melakukan identifikasi kepadatan penduduk yang bermukim dalam satuan luas tertentu.

Jumlah penduduk di Kabupaten Ngada pada tahun 2024 sebanyak 174.088 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi tahun 2024 terdapat di Kecamatan Bajawa sejumlah 40.564 jiwa, sedangkan jumlah terendah tahun 2024 terdapat di Kecamatan Wolomeze sejumlah 7.105 jiwa. Dilihat dari persebarannya, penduduk Kabupaten Ngada terkonsentrasi pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bajawa, Golewa, Riung, dan Soa yang merupakan kawasan perkotaan Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 29. Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada Periode 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aimere	10.518	10.680	10.880	110.100	11.187

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Jerebuu	7.506	7.609	7.738	7.817	7.929
3	Inerie	8.281	8.419	8.586	8.699	8.849
4	Bajawa	39.442	39.715	40.120	40.259	40.564
5	Golewa	18.914	19.040	19.228	19.290	19.431
6	Golewa Selatan	12.174	12.464	12.801	13.060	13.380
7	Golewa Barat	11.260	11.454	11.689	11.849	12.061
8	Bajawa Utara	10.410	10.600	10.827	10.987	11.194
9	Soa	14.327	14.466	14.653	14.743	14.896
10	Riung	16.610	16.873	17.196	17.408	17.695
11	Riung Barat	9.222	9.362	9.534	9.645	9.797
12	Wolomeze	6.590	6.714	6.863	6.969	7.105
	Kabupaten Ngada	**165.254**	**167.396**	**170.115**	**171.736**	**174.088**

Sumber: BPS Ngada, 2024

Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Ngada mengalami peningkatan yang konstan dari tahun 2020 hingga 2024 dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 seperti ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 30. Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Kepadatan Penduduk	95,15	96,38	97,95	98,88	100,23

Sumber: BPS Ngada, 2024 (diolah)

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dinamika penduduk diidentifikasi lebih lanjut melalui laju pertumbuhan penduduk pada rentang waktu 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah. Dalam lima tahun terakhir, tren laju pertumbuhan Kabupaten Ngada cenderung fluktuatif dengan nilai terendah berada pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,95 dan nilai tertinggi berada pada tahun 2022, yaitu sebesar 1,62.

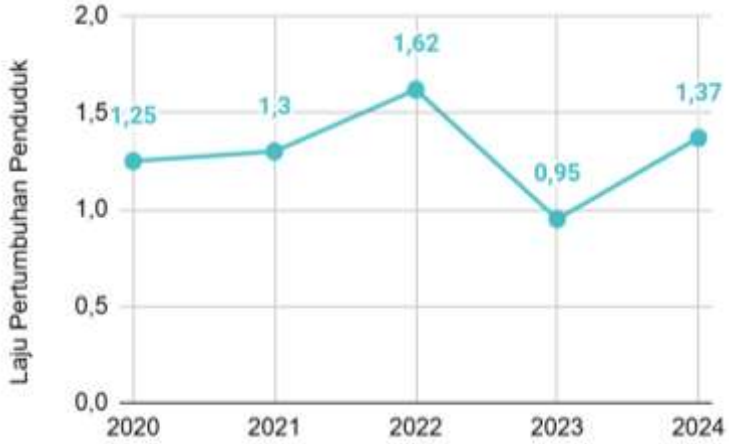

Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada tahun 2020 -2024

Sumber : BPS, 2024

Angka laju pertumbuhan penduduk diproyeksikan cenderung akan terus naik mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Ngada dan penetapan kawasan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super prioritas - efek berantai juga akan sampai ke Kabupaten Ngada. Sebagai bagian

dari analisis demografi, laju pertumbuhan penduduk menjadi aspek penting untuk mengetahui kepadatan penduduk di Kabupaten Ngada, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Tabel 2. 31. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/tahun)
1	Aimere	1,61
2	Bajawa	0,76
3	Bajawa Utara	1,88
4	Golewa	0,73
5	Golewa Barat	1,79
6	Golewa Selatan	2,45
7	Inerie	1,72
8	Jerebuu	1,43
9	Riung	1,65
10	Riung Barat	1,58
11	Soa	1,03
12	Wolomeze	1,95
	Kabupaten Ngada	**1,37**

Sumber: BPS, 2025

Jika dilihat laju pertumbuhan penduduk per kecamatan, Kecamatan Golewa Selatan menjadi kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 2,45 persen. Sementara itu, laju terendah berada di Kecamatan Golewa, yaitu 0,73 persen. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah 1,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada kawasan perkotaan lebih lambat daripada laju pertumbuhan kabupaten, kecuali Kecamatan Riung yang memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada laju kabupaten. Kecamatan dengan laju pertumbuhan yang tertinggi berada dekat dengan kawasan perkotaan Golewa, diikuti Kecamatan Wolomeze yang berada di antara Kecamatan Riung dan Soa.

C. Struktur Penduduk

Identifikasi struktur penduduk menjadi hal yang esensial untuk dilakukan, khususnya dalam mendukung penyediaan layanan dasar yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok umur dan jenis kelamin. Perbedaan kebutuhan antar kelompok tersebut berdampak pada penyusunan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Berikut rasio jenis kelamin di Kabupaten Ngada selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 32. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Ngada Tahun 2020 – 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio jenis kelamin	98	98	97	97	97

Sumber : BPS, 2024

Dalam enam tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kabupaten Ngada berada pada kisaran 95 hingga 98 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara konsisten jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin tercatat sebesar 97

persen, yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dominasi penduduk perempuan masih terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 2. 33 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur	Laki - laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Total
0-4	8.079	7.839	1,03	15.918
5-9	7.459	7.357	1,01	14.816
10-14	8.041	7.586	1,06	15.627
15-19	7.411	7.124	1,04	14.535
20-24	7.997	7.772	1,03	15.769
25-29	7.564	7.473	1,01	15.037
30-34	6.455	6.224	1,04	12.679
35-39	5.411	5.780	0,94	11.191
40-44	5.532	5.934	0,93	11.466
45-49	5.155	5.707	0,90	10.862
50-54	4.262	4.836	0,88	9.098
55-59	3.538	3.955	0,89	7.493
60-64	2.935	3.265	0,90	6.200
65-69+	6.070	7.327	0,83	13.397
Total	**85.909**	**88.179**	**0,97**	**174.088**

Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2024, kelompok umur 0-34 tahun memiliki rasio jenis lebih dari 100 persen, yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Sebaliknya, pada rentang umur 35 ke atas, rasio jenis kelamin berkisar antara 83 hingga 94 persen, menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Rasio terendah tercatat pada kelompok umur 65–69 tahun ke atas, yaitu sebesar 83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup perempuan di Kabupaten Ngada lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.

Sementaraitu indikator dinamika kependudukan yang juga memiliki peran penting adalah angka ketergantungan (*dependency ratio*). Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk usia tidak produktif, baik kelompok usia muda maupun usia lanjut, terhadap penduduk usia produktif yang berpotensi menghasilkan barang dan jasa ekonomi. Tingginya angka ketergantungan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas nasional, karena semakin besar beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Kondisi ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 34 Angka Ketergantungan Kabupaten Ngada, 2020-2024

Kabupaten/Provinsi	Angka Beban Ketergantungan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Ngada	66,4	55,04	52,18	52,26	52,27
Provinsi NTT	64,89	54,88	55,66	55,5	54,92

Sumber: BPS NTT diolah, 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, angka ketergantungan di Kabupaten Ngada dalam enam tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Namun demikian, secara umum terdapat kecenderungan penurunan yang mengindikasikan potensi perbaikan struktur penduduk menuju komposisi yang lebih produktif. Apabila dibandingkan dengan Provinsi NTT, capaian dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan tren yang mengarah pada kondisi yang membaik.

D. Komposisi Penduduk

Dilihat dari komposisi penduduk, pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu sebesar 65,67 persen. Walaupun demikian, rasio ketergantungan Kabupaten Ngada masih berada pada angka 52,27 persen yang berarti terdapat sekitar 52 penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif. Jika ditelaah lebih lanjut beban ketergantungan tersebut lebih besar berasal dari kelompok usia muda. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok usia muda, khususnya dalam pemenuhan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya, guna membentuk generasi yang tangguh dan kompetitif di masa mendatang.

Tabel 2. 35 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2024

Indikator	Tahun 2024
Komposisi penduduk	
0 - 14 Tahun	26,64
15 - 64 Tahun	65,67
65 + Tahun	7,7
Rasio beban ketergantungan	**52,27**
Rasio beban ketergantungan penduduk muda	40,55
Rasio beban ketergantungan penduduk tua	11,72

Sumber: BPS, 2024

E. Proyeksi Demografi

1. Proyeksi Jumlah penduduk

Analisis proyeksi kependudukan Kabupaten Ngada didasarkan pada hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota untuk tahun 2020-2035 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil proyeksi BPS mengacu pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang disebut sebagai *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Penyajian hasil proyeksi tersebut menggunakan metode komponen kohort dengan beberapa asumsi yang digunakan dalam metode ini meliputi asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR); asumsi kematian dengan menggunakan *Infant Mortality Rate* dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir; serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2020.

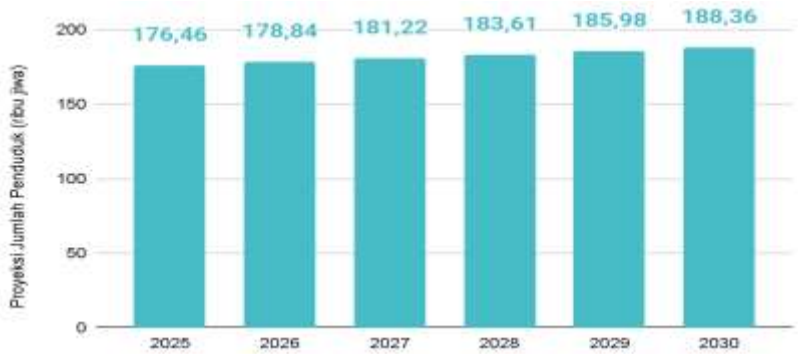

Gambar 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada (Ribu Jiwa) Tahun 2025-2030

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi NTT 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, diolah

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngada menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan estimasi mencapai 188.360 jiwa pada tahun 2030 sebagaimana ditampilkan pada gambar di atas. Laju pertumbuhan penduduk lima tahun ke depan diproyeksikan berkisar antara 1,37-1,28 persen per tahun. Meskipun terjadi perlambatan laju pertumbuhan pada tahun-tahun terakhir, penurunan tersebut masih bersifat moderat dan tidak begitu signifikan sebagaimana tergambar pada gambar di bawah. Oleh karena itu, potensi penambahan penduduk yang cukup besar di Kabupaten Ngada perlu disikapi dengan baik karena akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, intensifikasi pemanfaatan ruang, dan heterogenitas aktivitas masyarakat yang tentunya akan berdampak lanjut terhadap kualitas jasa lingkungan.

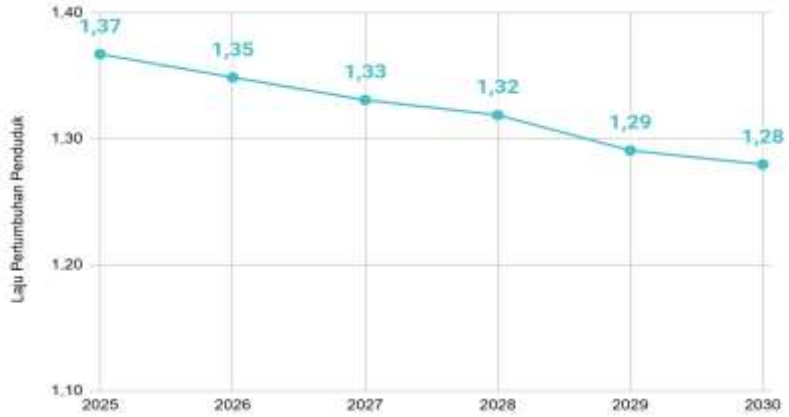

Gambar 2. 19 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi NTT 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, diolah

Selain proyeksi jumlah penduduk, proyeksi kepadatan penduduk juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan. Proyeksi ini membantu memahami perbandingan ketersediaan ruang dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang kemudian berimplikasi pada alokasi ruang wilayah dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Ngada tahun 2025-2030 disajikan pada Gambar di bawah.

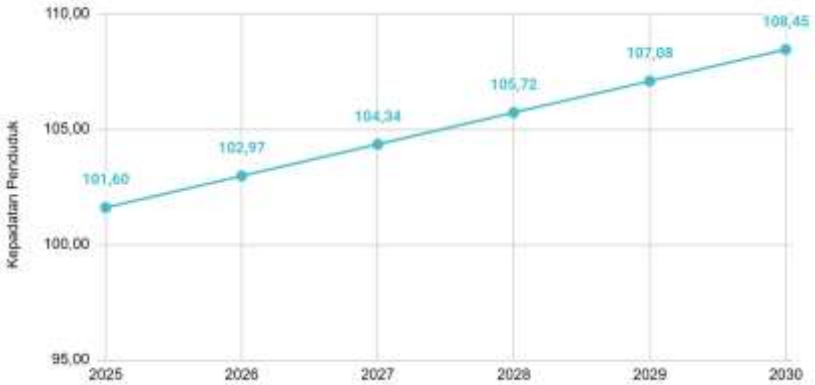

Gambar 2. 20 Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi NTT 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, diolah

a. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin divisualisasikan melalui piramida penduduk di bawah. Kategorisasi ini menjadi bagian dari analisis komposisi penduduk yang bertujuan untuk mengelompokkan struktur penduduk suatu daerah berdasarkan karakteristik tertentu. Subbab ini akan difokuskan pada komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin yang direpresentasikan oleh piramida penduduk.

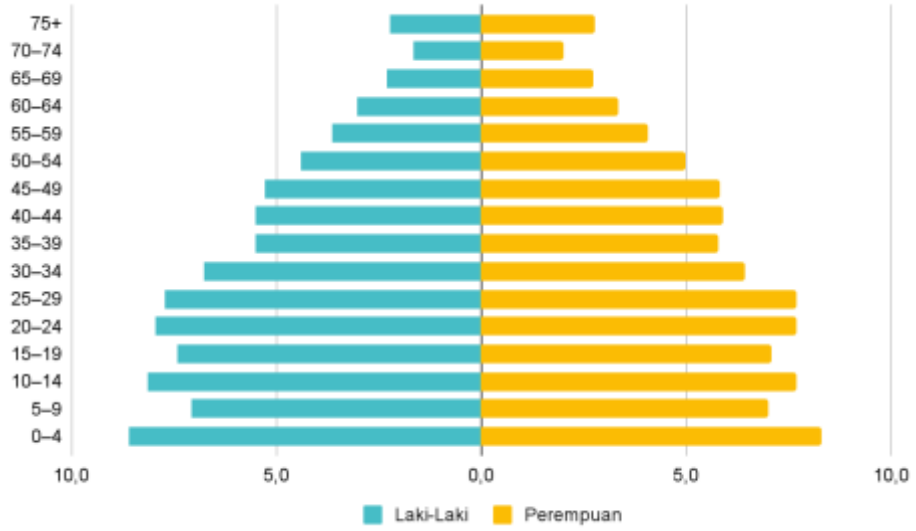

Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2025

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi NTT 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, diolah

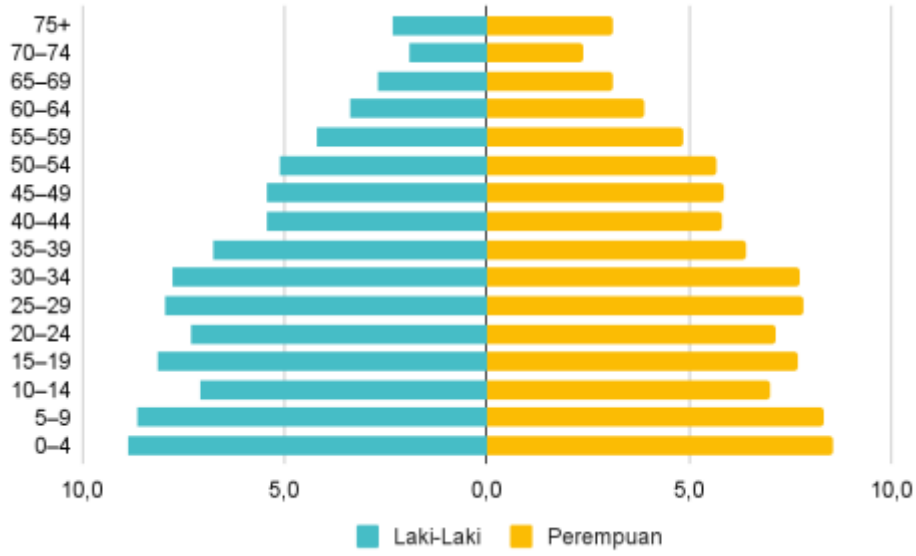

Gambar 2. 22 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2030

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi NTT 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, diolah

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Ngada menunjukkan pola piramida ekspansif, yang menggambarkan dominasi kelompok usia muda dalam struktur kependudukan. Hal ini

mencerminkan tingkat kelahiran penduduk Kabupaten Ngada yang relatif tinggi. Hingga tahun 2030, kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan, dengan kelompok usia muda tetap mendominasi.

Berdasarkan diagram di atas, penduduk perempuan tercatat masih mendominasi daripada penduduk laki-laki, sehingga tren rasio jenis kelamin yang terjadi pada tahun 2024 diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2030. Kondisi dan proyeksi ini perlu direspons melalui kebijakan yang tepat, khususnya yang berorientasi pada pemberdayaan kelompok usia muda dan perempuan, mengingat kedua kelompok tersebut akan tetap menjadi porsi terbesar dalam struktur penduduk Kabupaten Ngada setidaknya dalam lima tahun mendatang.

b. Proyeksi Jumlah Penduduk Penduduk Berdasarkan Umur

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan umur disusun dengan mengklasifikasikan penduduk ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat produktivitasnya. Kelompok umur 0-14 dikategorikan sebagai usia sekolah atau non-produktif muda, kelompok umur 15-64 berarti usia produktif, dan umur 65 ke atas menandakan usia pensiun dan lansia atau non-produktif tua.

Tabel 2. 36 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (ribu jiwa) Kabupaten Ngada

Kelompok Umur	2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (ribu jiwa)	
		2025	2030
0-14	44,33	46,82	48,50
15-64	107,86	115,95	124,40
65+	12,52	13,69	15,46
Jumlah	**164,71**	**176,46**	**188,36**

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Ngada 2025-2029, 2024

Struktur penduduk Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 2020 hingga 2030 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun), dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dominasi ini mencerminkan potensi demografis yang signifikan untuk mendorong pembangunan daerah, apabila dapat dikelola dengan tepat melalui penyediaan lapangan kerja, pendidikan keterampilan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada produktivitas masyarakat.

Di sisi lain, kelompok usia muda (0–14 tahun) menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan, dari 5 persen pada tahun 2025 menjadi sekitar 3 persen pada tahun 2030. Fenomena ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kelahiran yang perlu dicermati, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan layanan pendidikan dan kesehatan anak. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan yang relatif tinggi, yakni sebesar 12 persen selama periode proyeksi. Kondisi ini perlu direspons dengan memperkuat sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi lansia.

c. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Angka proyeksi jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Ngada berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah mulai dari jenjang TK, SD/Sederajat, hingga SMP/Sederajat. Proyeksi ini dilakukan mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 yang berguna untuk membantu pemerintah Kabupaten Ngada merumuskan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran pada anak usia sekolah. Tabel di bawah merupakan rincian proyeksi jumlah penduduk usia sekolah mulai dari TK, SD/Sederajat, dan SMP/Sederajat.

Tabel 2. 37 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

	Proyeksi 2025			Proyeksi 2030		
Usia Sekolah	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Jumlah	**8.865**	**18.250**	**8.912**	**10.528**	**18.130**	**9.178**

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Ngada 2025-2029, 2024

Proyeksi jumlah penduduk usia sekolah mulai dari jenjang TK, SD/Sederajat, hingga SMP/Sederajat di Kabupaten Ngada selalu mengalami peningkatan secara konstan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dari ketiga kategori tersebut, penduduk usia TK diproyeksikan memiliki peningkatan jumlah yang paling besar dibandingkan kategori lainnya, yaitu hingga 18 persen pada tahun 2030. Sementara itu, proyeksi penduduk usia SD justru mengalami penurunan pada tahun 2030. Diikuti dengan penduduk usia SMP yang mengalami peningkatan tetapi tidak begitu besar, yaitu sebanyak 2 persen.

d. Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan merupakan analisis lanjut dari proyeksi kependudukan. Rasio ketergantungan di Kabupaten Ngada diproyeksikan mengalami tren penurunan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Apabila dibandingkan antara tahun 2025 dan 2030, rasio ketergantungan menurun sekitar 1,5 persen, yang mencerminkan berkurangnya beban tanggungan penduduk non-produktif terhadap kelompok usia produktif dalam kurun waktu lima tahun tersebut. Penurunan ini mencerminkan kondisi demografi yang semakin menguntungkan, ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif dibandingkan penduduk usia non-produktif.

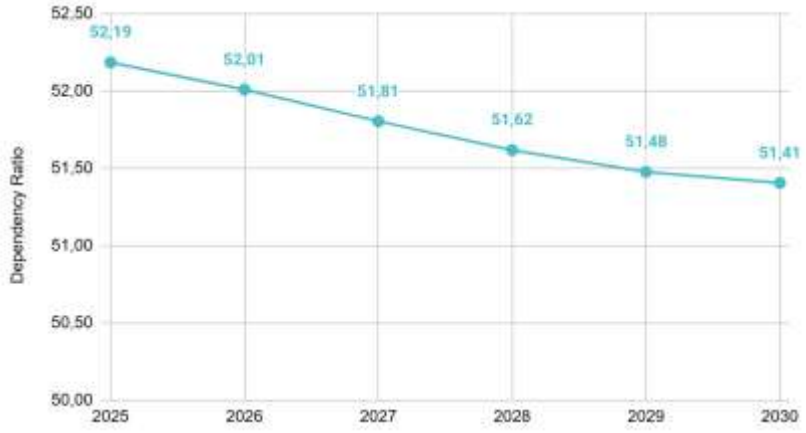

Gambar 2. 23 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2030

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Ngada 2025-2029, 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Sub bab ini menjelaskan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari sejumlah indikator makro ekonomi. Indikator tersebut meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dari pergerakan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi didapatkan dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) atau disebut juga sebagai PDRB riil dari tahun-*i* terhadap tahun *i-1* . Penggunaan harga konstan dipilih karena telah mengeluarkan faktor inflasi. Tahun dasar yang ditetapkan dalam perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2020 sehingga PDRB yang ditampilkan adalah periode 2020-2024.

Perekonomian Kabupaten Ngada terus mengalami pertumbuhan yang positif. Perekonomian daerah rata-rata tumbuh 2,28 persen per tahun selama periode 2020-2024. Sejak tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada menunjukkan tren yang melambat, dimulai dengan hanya tumbuh sebesar 0,04 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian mengalami perlambatan, yang turut berkontribusi terhadap melemahnya kinerja PDRB Kabupaten Ngada pada tahun-tahun berikutnya.

Perekonomian Kabupaten Ngada pasca Covid-19 berangsur pulih seiring dengan diterapkannya berbagai kebijakan penanganan pandemi dan kebijakan ekonomi lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah masih tertahan di angka 3,49 persen pada tahun 2023 dan meningkat di angka 3,67 pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada pada tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT maupun pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh hingga 5,03 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada didorong oleh kinerja seluruh lapangan usaha dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (35,07 persen); sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (18,57 persen); dan sektor konstruksi (12,57 persen) pada tahun 2024. Ketiga sektor tersebut memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada. Pada tahun 2024, PDRB sektor pertanian tercatat melambat hingga angka 1,43 persen, sedangkan dua sektor terbesar lainnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial serta sektor konstruksi tumbuh sebesar 5,59 persen dan 3,85 persen.

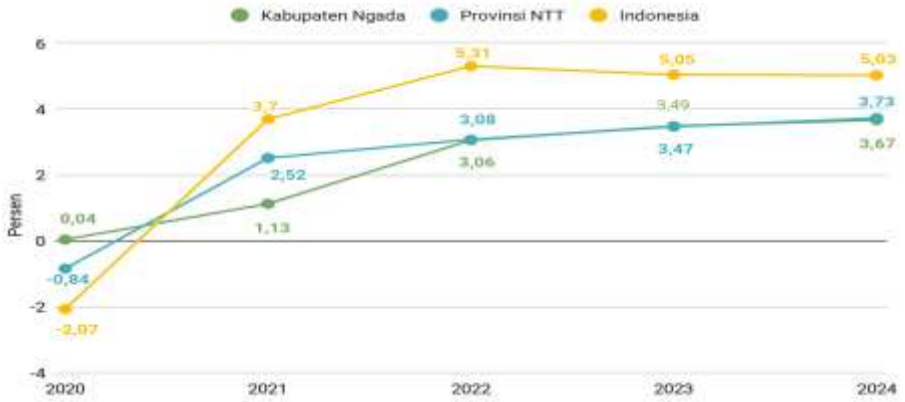

Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS, 2025

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh lapangan usaha lainnya yang menunjukkan kontribusi yang sangat kecil tetapi tumbuh pesat. Pada tahun 2024, sektor pengadaan listrik dan gas menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat tinggi dengan pertumbuhan mencapai 18,74 persen. Rata-rata pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,64 persen per tahun menjadikan sektor ini sebagai sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode 2020-2024. Tingginya pertumbuhan sektor ini didorong oleh pemenuhan penyediaan listrik yang semakin masif dan merata di Kabupaten Ngada.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga memiliki pertumbuhan yang tinggi dengan pertumbuhan mencapai 9,09 persen pada tahun 2024, turun 0,61 persen dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2021-2024, kinerja sektor akomodasi dan makan minum terus menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi yakni memiliki rata-rata pertumbuhan pada 9,19 persen, tanpa tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Apabila dibandingkan dengan stabilnya PDRB sektor pertanian sebagai kontributor terbesar, kenaikan PDRB sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor akomodasi dan makan minum tergolong relatif kecil. Namun, pertumbuhan dari tahun ke tahun kedua sektor tersebut tergolong relatif tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan perekonomian Kabupaten Ngada memiliki potensi untuk mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya pariwisata. Di sisi lain, perlambatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian namun tetap memiliki kontribusi besar dapat memberikan bahwa sektor pertanian mengalami stagnasi produktivitas atau kurangnya nilai tambah dari sebuah produk pertanian.

Tabel 2. 38 Laju Pertumbuhan PDRB Sejumlah Lapangan Usaha di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.04	1.89	3.77	4.14	1.43
B. Pertambangan dan Penggalian	2.73	1.90	2.18	3.06	3.54
C. Industri Pengolahan	-3.97	-1.89	4.76	7.24	5.79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	17.06	0.78	4.74	11.25	18.74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.52	6.51	2.23	3.68	3.19
F. Konstruksi	-7.73	5.33	0.72	4.70	3.85
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5.95	3.48	4.88	5.52	7.86
H. Transportasi dan Pergudangan	-5.10	0.86	1.75	3.37	5.52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-20.92	5.69	12.29	9.70	9.09
J. Informasi dan Komunikasi	11.52	6.58	5.76	2.71	3.22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.83	1.42	0.95	1.61	3.66
L. Real Estate	-0.93	1.94	2.06	2.24	2.39
M, N. Jasa Perusahaan	-29.46	-13.01	1.39	2.92	6.51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5.07	-5.82	2.97	1.49	5.59
P. Jasa Pendidikan	2.52	-1.69	-0.12	-0.09	0.38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.97	6.95	2.63	2.56	3.31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-13.57	-0.51	1.20	3.66	3.85
PDRB	**0.04**	**1.13**	**3.06**	**3.49**	**3.67**

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

B. PDRB per Kapita

PDRB per kapita sering kali digunakan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dengan asumsi nilai yang dihasilkan sama. PDRB per kapita didapatkan dengan

membagi PDRB total terhadap jumlah penduduk sehingga tinggi rendahnya PDRB per kapita suatu daerah dipengaruhi oleh nilai dari PDRB itu sendiri dan jumlah penduduk. Berikut adalah PDRB per kapita Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT, dan PDB per kapita Indonesia.

Pada periode 2020-2024, PDRB nominal per kapita Kabupaten Ngada terus mengalami kenaikan. PDRB per kapita Kabupaten Ngada pada tahun 2024 berada jauh di bawah PDB per kapita nasional yaitu 25,67 juta Rupiah tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi NTT yang sebesar 24,27 juta Rupiah. Kondisi ini mengindikasikan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Ngada masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk di seluruh Indonesia.

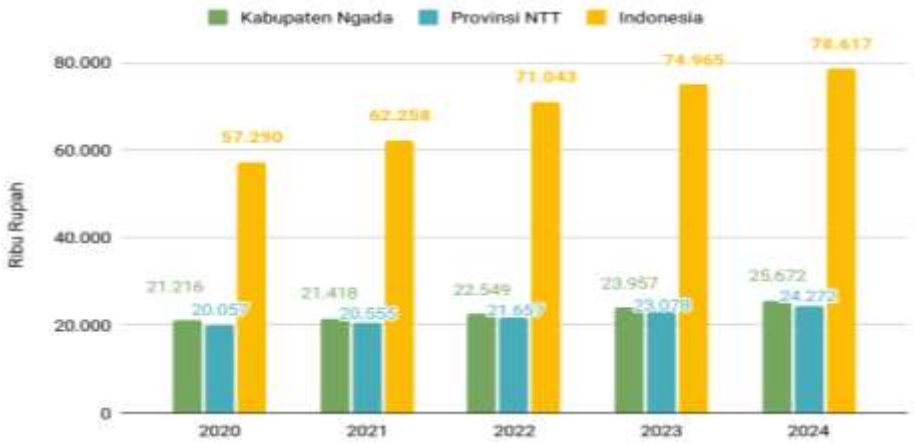

Gambar 2. 25 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan PDB (ADHB) per Kapita Indonesia Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Sumber: BPS, 2025

PDRB per kapita Kabupaten Ngada memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,47 persen per tahun selama periode 2020-2024, dengan penurunan secara riil pada tahun 2021. Melemahnya perekonomian pada tahun 2020, menyebabkan penurunan PDRB per kapita, baik secara riil maupun nominal. Kondisi ini masih terjadi hingga tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada masih mengalami pertumbuhan yang lambat yakni 1,13 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk naik menjadi 1,3 persen. Namun secara keseluruhan, PDRB per kapita kembali tumbuh positif pada tahun 2022 hingga 2024 seiring dengan perekonomian Kabupaten Ngada yang semakin menguat dengan pertumbuhan penduduk yang fluktuatif cenderung stagnan yakni 1,37 persen pada tahun 2024.

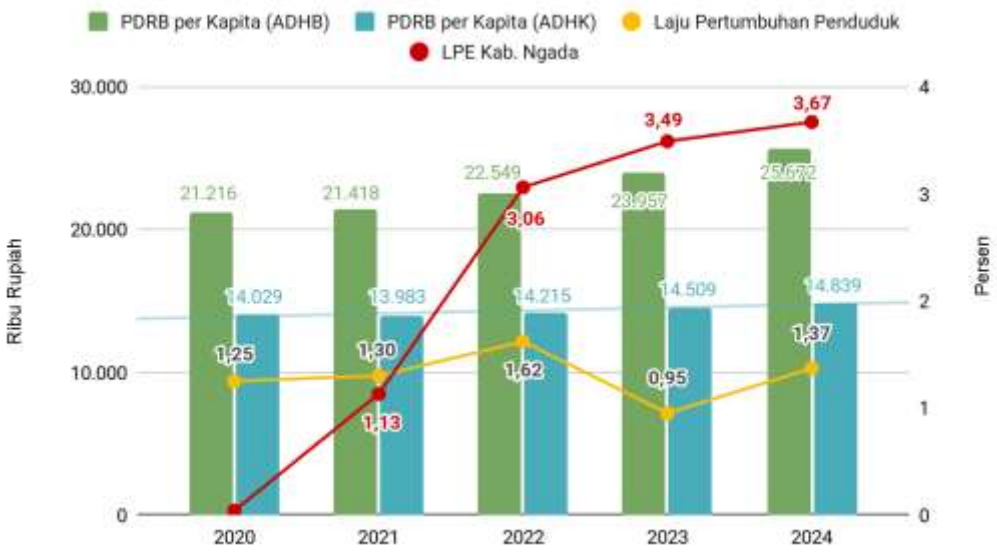

Gambar 2. 26 PDRB ADHB dan ADHK per Kapita Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

C. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 1 hingga 0. Skor Indeks Gini 0 menunjukkan bahwa penduduk di suatu daerah memiliki distribusi pendapatan yang merata. Dengan kata lain, setiap penduduk di daerah tersebut memiliki pendapatan sama. Sebaliknya, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna atau satu orang menguasai seluruh sumber pendapatan. Indeks Gini semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan semakin tinggi di suatu daerah. Indeks Gini perlu diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Indonesia tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

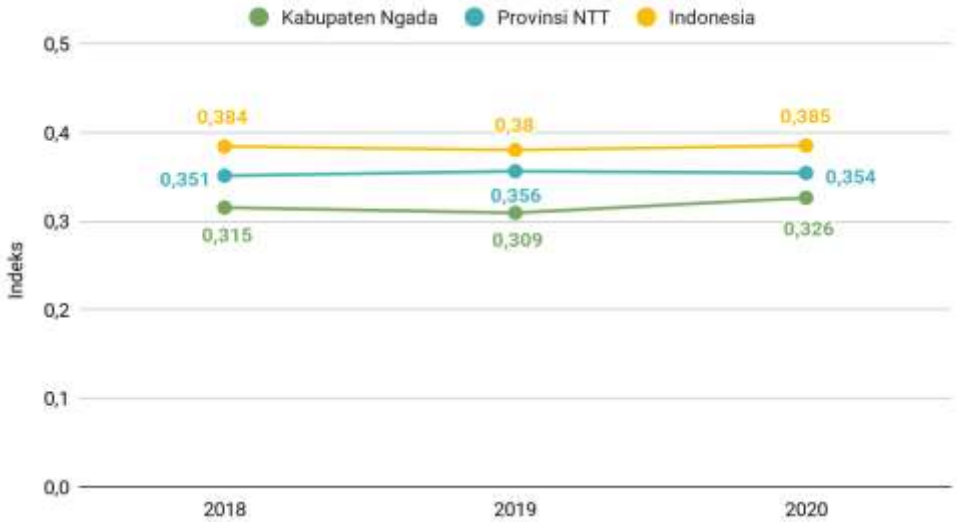

Gambar 2. 27 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2023

Data Indeks Gini Kabupaten Ngada yang tersedia hanya tahun 2018-2020, sehingga Indeks Gini Provinsi NTT dan Indonesia yang digunakan juga tahun 2018-2020. Indeks Gini Kabupaten Ngada lebih rendah daripada Provinsi NTT dan nasional. Meskipun demikian, Indeks Gini Kabupaten Ngada mengalami tren naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,80 persen. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Ngada berhasil diturunkan sebesar -1.90 persen pada tahun 2018-2019, namun ketimpangan pendapatan kembali naik secara cukup drastis sebesar 5,50 persen pada tahun 2019-2020.

Hal ini berkebalikan dengan Indeks Gini nasional dan Provinsi NTT yang mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Rata-rata pertumbuhan Indeks Gini Provinsi NTT sebesar 0,43 persen pada tahun 2018-2020, di mana lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Indeks Gini Indonesia sebesar 0,14 persen pada tahun tersebut.

Indeks Gini Kabupaten Ngada yang mengalami tren naik pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk berpendapatan rendah dan tinggi di Kabupaten Ngada cenderung semakin lebar pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk pemerataan pendapatan belum berjalan secara optimal.

D. Angka Kemiskinan

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dinilai sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan suatu daerah. Gambaran perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 28 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2024

Angka kemiskinan Kabupaten Ngada mengalami tren fluktuatif cenderung menurun pada tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 12,51 persen, dan berhasil turun menjadi 11,87 persen pada tahun 2024. Rata-rata penurunan selama periode ini cukup stabil, meskipun terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2021 dan 2023. Tren ini serupa dengan Provinsi NTT dan nasional yang juga menunjukkan penurunan angka kemiskinan secara konsisten, meskipun tetap ada fluktuasi kecil. Provinsi NTT mengalami penurunan dari 21,21 persen pada tahun 2020 menjadi 19,02 persen pada tahun 2024, sedangkan nasional menurun dari 10,19 persen menjadi 8,57 persen di periode yang sama. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Ngada selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional selama periode 2020–2024.

Angka kemiskinan Kabupaten Ngada paling tinggi mencapai 12,51 persen pada tahun 2020, namun dapat diturunkan sebesar 0,13 persen pada tahun 2022. Namun demikian, angka kemiskinan naik kembali sebesar 0,13 persen pada tahun 2023. Angka kemiskinan Kabupaten Ngada berhasil diturunkan sebesar 0,65 persen pada tahun 2022, di mana merupakan penurunan angka kemiskinan paling tinggi sepanjang tahun 2020-2024. Namun demikian, angka kemiskinan Kabupaten Ngada kembali naik sebesar 1,09 persen pada tahun 2023 hingga pada tahun 2024 turun kembali sebesar 0,19 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Ngada perlu lebih dioptimalkan agar angka kemiskinan dapat ditekan secara lebih signifikan dan diturunkan mendekati bahkan lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT biasanya digunakan untuk mengetahui angkatan kerja yang belum atau tidak bekerja di suatu daerah. Semakin tinggi TPT, maka semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Gambaran perbandingan TPT Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

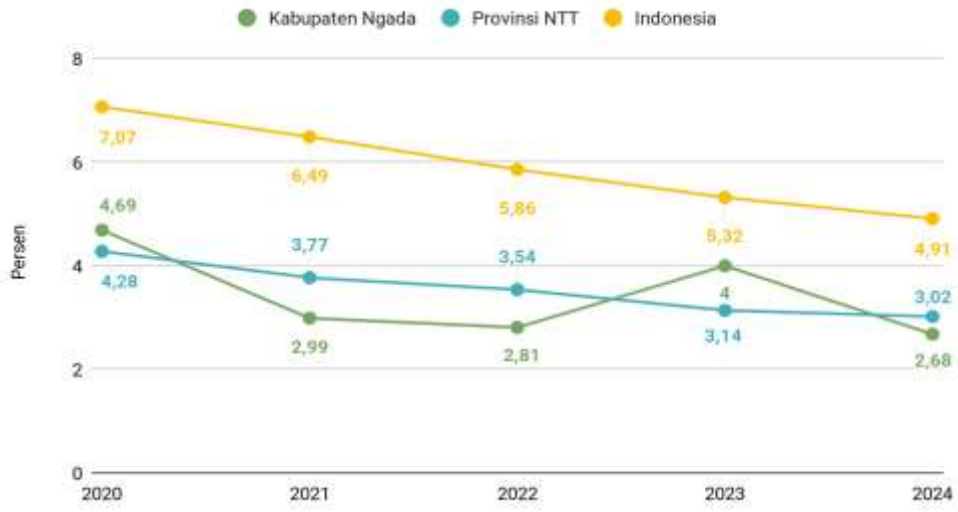

Gambar 2. 29 Perbandingan TPT Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS 2023, BPS Kabupaten Ngada 2025

TPT Kabupaten Ngada mengalami tren fluktuatif cenderung membaik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,93 persen selama tahun 2020-2024. Demikian halnya dengan TPT Provinsi NTT dan nasional yang juga mengalami tren pertumbuhan fluktuatif cenderung membaik pada tahun 2020-2024. Selama periode ini, TPT Kabupaten Ngada secara umum berada di bawah TPT Provinsi NTT dan nasional, kecuali pada tahun 2023 di mana TPT Kabupaten Ngada melonjak menjadi 4,00 persen, lebih tinggi dari Provinsi NTT (3,14 persen) dan hampir setara dengan TPT nasional.

TPT Kabupaten Ngada paling tinggi mencapai 4 persen pada tahun 2023. Kenaikan signifikan TPT Kabupaten Ngada pada tahun 2023 (dari 2,81 persen menjadi 4,00 persen, atau naik 42,35 persen) mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya lapangan kerja secara memadai bagi angkatan kerja di Kabupaten Ngada. Artinya, pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dibandingkan dengan ketersediaan angkatan kerja. Selain itu, para pencari kerja belum dapat berkompetisi secara optimal dalam dunia kerja dikarenakan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh pencari kerja.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan tingkat capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di suatu wilayah. IPM diukur melalui tiga komponen dasar kualitas hidup yang meliputi umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Umur panjang dan sehat diukur melalui angka harapan hidup, tingkat pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta kehidupan layak diukur melalui tingkat pengeluaran per kapita.

Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024

IPM Kabupaten Ngada meningkat dari 70,37 pada tahun 2020 menjadi 72,04 pada tahun 2024, atau bertambah 1,67, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 0,59 persen. Capaian IPM Kabupaten Ngada telah berada di atas capaian Provinsi NTT, namun masih di bawah capaian nasional. Secara umum, capaian pada komponen angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran

per kapita memiliki pola yang sama dengan capaian IPM, yakni berada di atas capaian provinsi dan di bawah capaian nasional.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Sub bab ini menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan yang ditinjau dari sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi usia harapan hidup, prevalensi stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, rasio dokter umum, serta prevalensi TB.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Ngada terus meningkat dari tahun ke tahun.

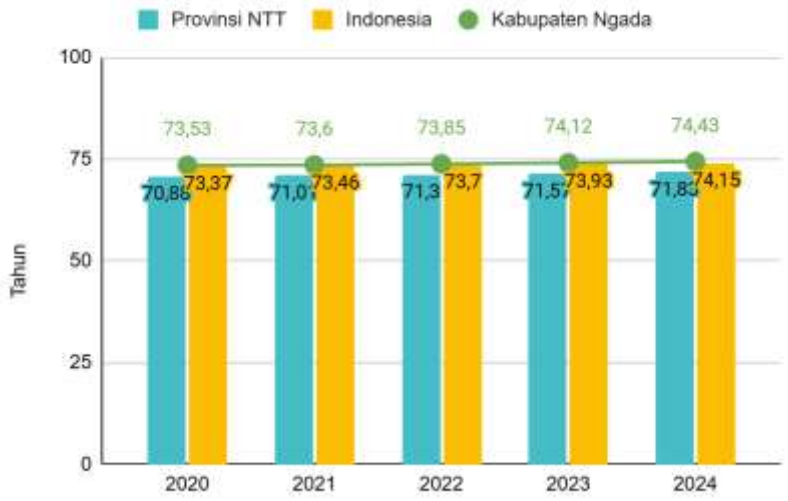

Gambar 2. 31 Usia Harapan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Usia Harapan Hidup Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 0,9 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian ini juga menjadikan UHH Kabupaten Ngada berada di atas capaian UHH Provinsi NTT dan nasional. Angka harapan hidup sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan secara umum di suatu wilayah. Untuk dapat meningkatkan capaian UHH diperlukan penyediaan infrastruktur kesehatan yang lebih memadai dari segi akses serta kualitas bagi seluruh masyarakat, tenaga medis dan kesehatan yang mencukupi dan berkualitas, serta pembiasaan hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

B. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Perpres RI No. 72 Tahun 2021). Penyebab terjadinya stunting sangat beragam antara lain asupan gizi ibu dan anak, lingkungan sosial dan kesehatan, status kesehatan balita ketahanan pangan, dll. Masalah stunting dapat

terjadi sejak janin dalam kandungan sampai masa awal kehidupan anak. Prevalensi stunting merupakan indikator yang mengukur proporsi seberapa banyak balita yang mengalami stunting dengan balita secara keseluruhan dalam suatu wilayah.

Data prevalensi stunting Kabupaten Ngada hanya tahun 2021, 2023 dan 2024. Jika dilihat grafik di atas menunjukkan prevalensi stunting tahun 2023 (21,3 persen) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (29 persen), tetapi kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 28,9 persen. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penurunan kondisi kesehatan di masyarakat menurun terutama kesehatan ibu dan anak. Secara umum, prevalensi stunting Kabupaten Ngada lebih rendah daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi lebih tinggi daripada nasional.

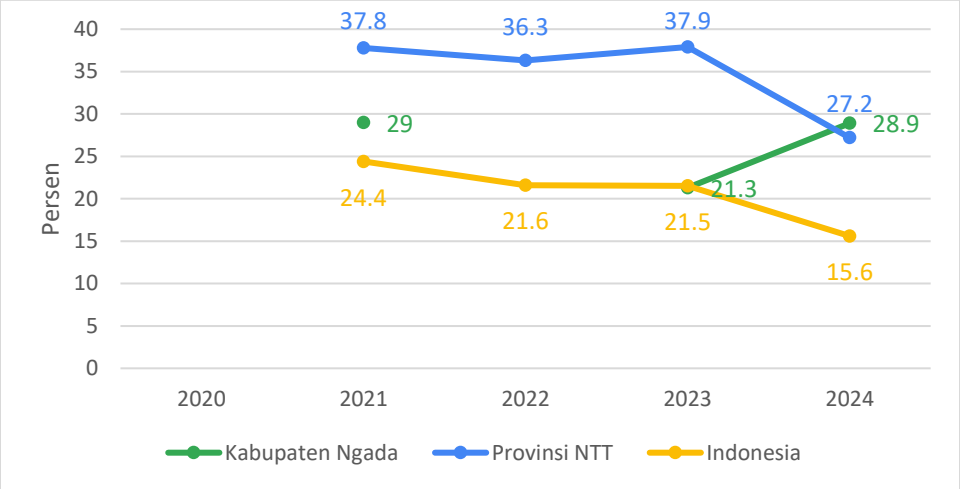

Gambar 2. 32 Prevalensi Stunting Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: SSGI, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025

C. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan perbandingan antara jumlah ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan dengan total kelahiran selama satu tahun dalam 100.000 kelahiran hidup. AKI digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan suatu wilayah terutama pelayanan kesehatannya terhadap ibu dan anak. Semakin tinggi AKI menandakan derajat kesehatan yang semakin rendah karena mengindikasikan pelayanan yang tidak optimal terhadap ibu. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya AKI seperti akses ke fasilitas kesehatan oleh ibu, tenaga kesehatan yang memadai, asupan gizi yang diterima ibu hamil dan melahirkan, penyakit bawaan ibu hamil, dsb.

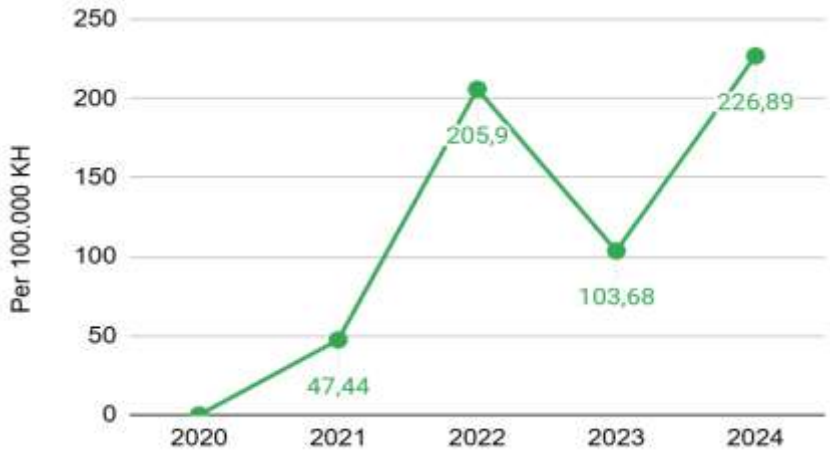

Gambar 2. 33 Angka Kematian Ibu Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025

AKI Kabupaten Ngada cenderung meningkat dari tahun 2020-2024. AKI tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan 226 kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Namun, jika diperhatikan jumlah kasus tersebut merupakan penyesuaian karena jumlah ibu melahirkan yang menurun. Pada tahun 2024 terjadi 4 kasus kematian ibu. Banyak faktor yang dapat menjadikan kematian ibu ini terjadi seperti penyakit bawaan yang diderita ibu, atau pengobatan dan pelayanan yang kurang maksimal. Namun, yang menjadi catatan adalah masih perlu peningkatan upaya pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil dan melahirkan melalui penyediaan suplemen tambahan bagi ibu hamil, pelayanan cepat tanggap terhadap ibu hamil dan melahirkan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, perlu dipastikan jumlah tenaga kesehatan yang ada mencukupi serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai.

D. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan perbandingan antara bayi yang meninggal dunia dengan jumlah kelahiran bayi selama satu tahun dalam 1000 kelahiran hidup. AKB digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan suatu wilayah utamanya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Semakin tinggi AKB mengindikasikan adanya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang tidak optimal. Sebagaimana AKI, banyak faktor yang dapat mempengaruhi AKB seperti akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, penyakit bawaan bayi, ketercukupan gizi, dsb. Berikut grafik AKB Kabupaten Ngada tahun 2020-2024.

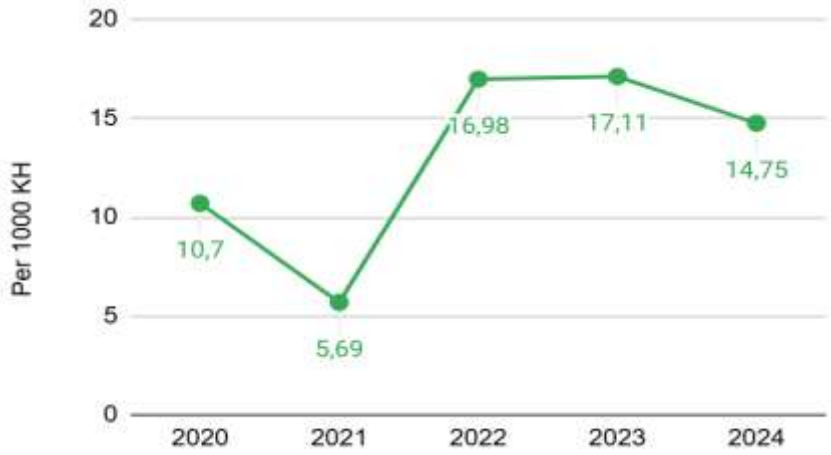

Gambar 2. 34 Angka Kematian Bayi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025

AKB Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat dari tahun 2020–2024. AKB tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 17 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Perlu diperhatikan karena AKB merupakan perbandingan sehingga penurunan jumlah kelahiran juga akan mempengaruhi perhitungannya. Namun, dari data tersebut mengindikasikan masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap ibu dan anak sehingga kasus kematian bayi dapat berkurang. Kualitas pelayanan kesehatan tersebut tercermin melalui akses fasilitas kesehatan yang terjangkau, ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, ketercukupan gizi ibu dan bayi, dsb.

E. Rasio Dokter Umum

Rasio dokter umum merupakan perbandingan jumlah dokter dengan penduduk suatu wilayah pada satu waktu tertentu. Satuan untuk mengukurnya adalah jumlah dokter per 1000 penduduk. Berdasarkan dokumen target rasio tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, idealnya rasio dokter untuk suatu wilayah adalah 1 dokter per 1000 penduduk. Selain jumlah dokter yang ada, persebaran dokter dalam suatu wilayah juga perlu diperhatikan supaya tidak terjadi ketimpangan pelayanan kesehatan antar wilayah.

Rasio dokter mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020–2024. Peningkatan tersebut tentu mengindikasikan sudah ada penambahan jumlah dokter umum yang ada. Namun, jika membandingkan dengan rasio ideal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maka Kabupaten Ngada masih perlu melakukan penambahan jumlah dokter serta memastikan distribusi dokter secara berkeadilan.

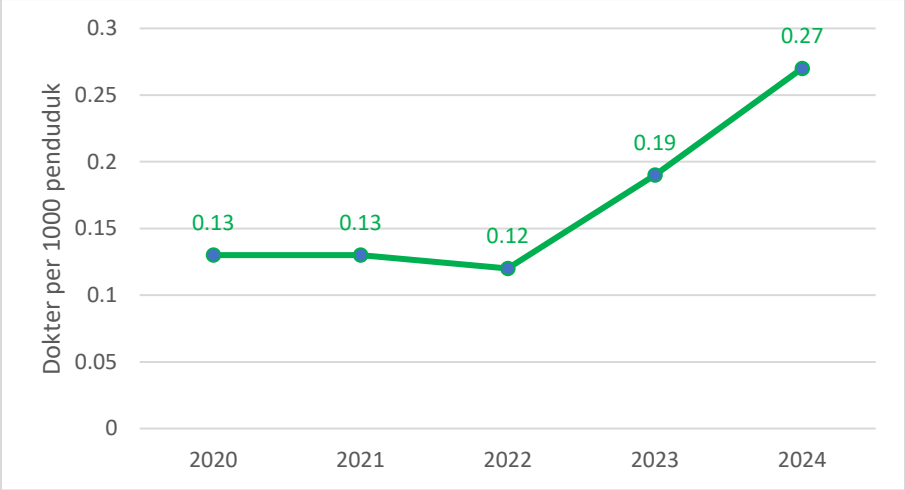

Gambar 2. 35 Rasio Dokter Umum Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025

F. Prevalensi TB

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Pada umumnya bakteri TBC akan menyerang paru-paru pengidapnya, namun demikian organ lain juga dapat terserang TBC. TBC yang menyerang organ selain paru disebut TBC ekstra paru. TBC dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui dahak yang keluar Ketika beraktivitas seperti bicara, batuk, bersin, dsb. Prevalensi TBC merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui proporsi orang dengan TBC dalam suatu wilayah per 100.000 jiwa.

Terjadi penurunan prevalensi TB pada tahun 2020-2021 kemudian meningkat hingga tahun 2024 menjadi 169 kasus per 100.000 jiwa, dari sebelumnya sebesar 76 kasus per 100.000 jiwa pada tahun 2020. Kenaikan jumlah ini dapat terjadi karena semakin meningkatnya deteksi terhadap kasus TBC sehingga ditemukan lebih banyak pengidap TBC meskipun belum tentu semuanya mengalami gejala yang terlihat.

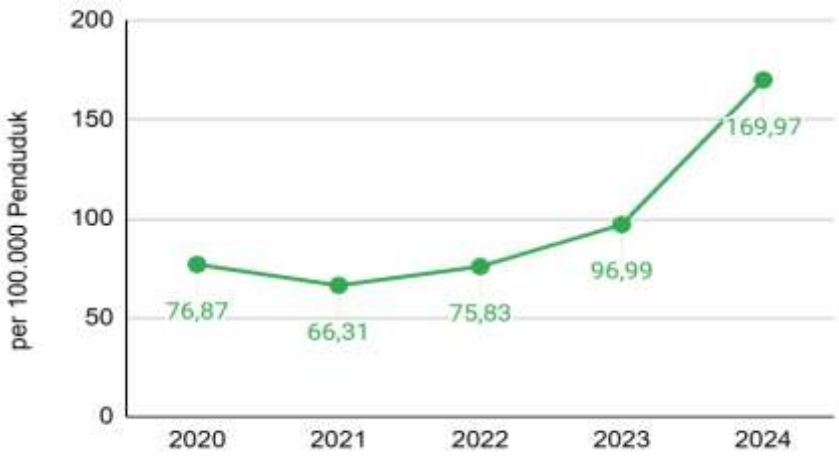

Gambar 2. 36 Prevalensi TB Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Sub bab ini menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat yang ditinjau dari sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi, angka numerasi, dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020-2024. Hal ini terlihat dari yang awalnya 8,52 tahun pada tahun 2020 dan menjadi 8,83 pada tahun 2024. Nilai ini juga menunjukkan RLS Kabupaten Ngada sudah melampaui RLS Provinsi NTT dan hampir setara dengan RLS nasional. Namun, perlu diperhatikan juga dengan nilai tersebut artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Ngada tidak menamatkan pendidikan SMP sederajat. Artinya, perlu adanya upaya lebih yang menjamin penduduk Ngada dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi setidaknya menuntaskan wajib belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain kuantitas penduduk yang mencapai derajat pendidikan lebih tinggi, perlu dipastikan juga kualitas pendidikan yang diterima merupakan pendidikan berkualitas dengan fasilitas sekolah yang memadai dan guru serta tenaga kependidikan yang mumpuni.

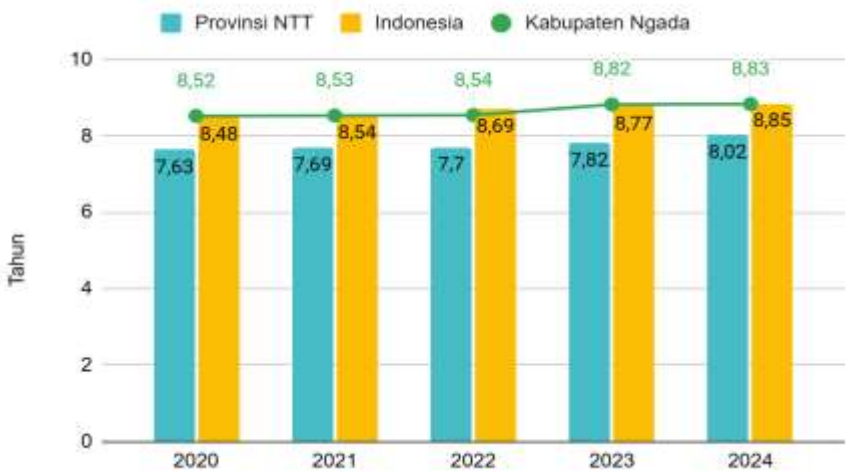

Gambar 2. 37 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Ngada Tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini.

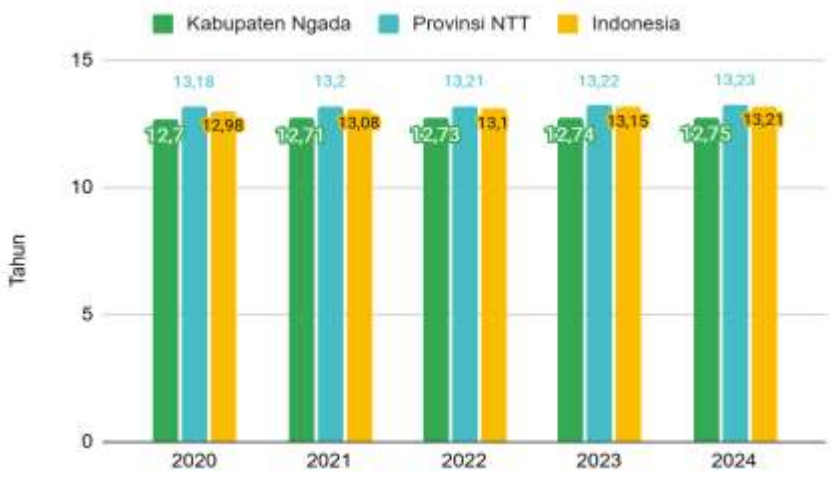

Gambar 2. 38 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan di sektor pendidikan. Meskipun demikian, capaian HLS Kabupaten Ngada masih ada di bawah capaian HLS Provinsi NTT dan HLS nasional. HLS Kabupaten Ngada yang masih di bawah 13 tahun juga menunjukkan sektor pendidikan di Kabupaten Ngada belum dapat memenuhi wajib belajar 13 tahun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh pemerintah daerah.

C. Angka Literasi

Literasi menjadi komponen dalam penilaian asesmen nasional. Dalam pengertian tersebut literasi memiliki definisi sebagai kemampuan peserta didik dalam memahami dan menginterpretasikan teks tulis dalam mewujudkan tujuan pribadinya serta mengembangkan potensinya sehingga sanggup berkontribusi dalam masyarakat. Penggunaan literasi sebagai asesmen nasional dimulai pada tahun 2022 sehingga data sebelum tahun 2022 tidak ada. Angka yang ditampilkan dalam grafik merupakan rata-rata hasil literasi dari jenjang pendidikan dasar dan menengah.

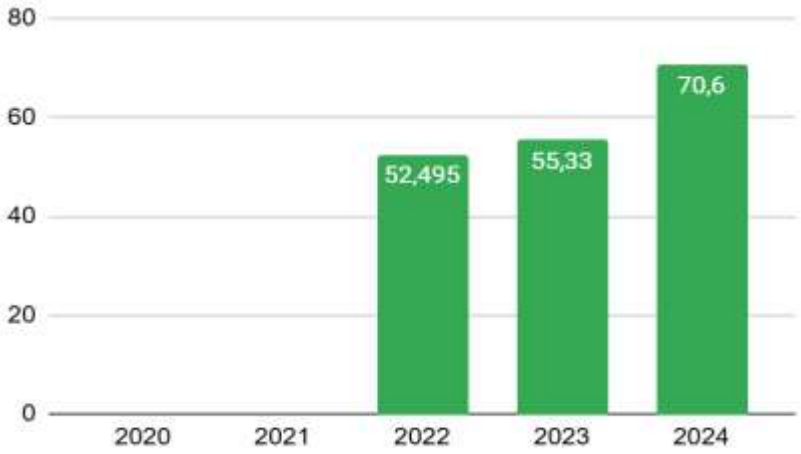

Gambar 2. 39 Angka Literasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, 2025

Angka literasi Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sejak tahun 2022 dari 52,49 menjadi 70,6 pada tahun 2024. Hasil ini menjadikan angka literasi di Kabupaten Ngada termasuk kategori baik. Namun, jika diperhatikan untuk setiap tingkat pendidikan maka pada tahun 2024, pendidikan vokasi melalui SMK masih membutuhkan perhatian lebih karena masih termasuk kategori sedang. Meskipun secara umum sudah tergolong baik, usaha peningkatan literasi siswa perlu diperhatikan supaya selalu membaik.

D. Angka Numerasi

Numerasi atau literasi matematika merupakan komponen asesmen nasional bersama dengan literasi membaca. Numerasi menekankan pada penggunaan pengetahuan matematika dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Numerasi Kabupaten Ngada mengalami peningkatan setiap tahunnya dari yang awalnya 32,49 pada tahun 2022 menjadi 63,19 pada tahun 2024. Hasil ini juga menjadikan angka numerasi Kabupaten Ngada naik dari yang awalnya termasuk kategori kurang menjadi sedang. Peningkatan tersebut harus diteruskan dengan memastikan pembelajaran numerasi yang mudah dipahami oleh para siswa. Angka numerasi pada grafik berikut merupakan rata-rata hasil numerasi asesmen nasional dari tingkat pendidikan di Kabupaten Ngada.

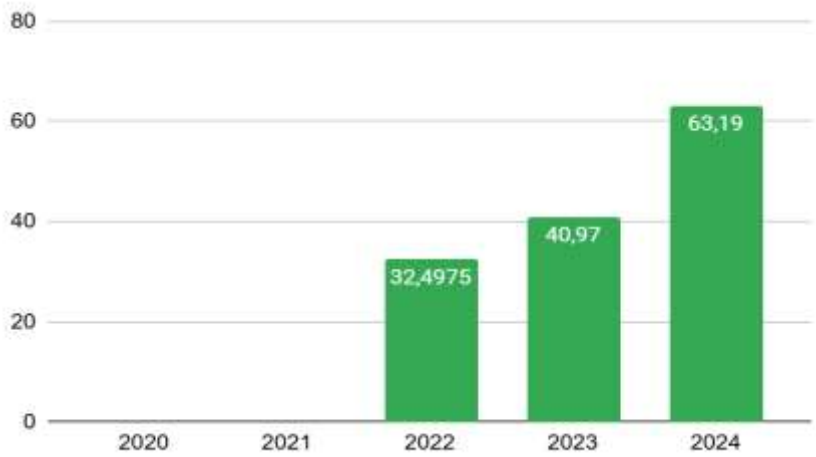

Gambar 2. 40 Angka Numerasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, 2025

E. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Selain mengukur tingkat kemampuan individu dalam berliterasi, IPLM juga mencakup upaya yang dilakukan pemerintah untuk membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Terdapat tujuh komponen perhitungan IPLM yang kemudian disebut dengan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, serta anggota perpustakaan. Ketujuh UPLM tersebut

akan dihitung juga dengan Aspek Masyarakat (AM) yang terdiri dari 3 AM yaitu jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat, populasi penduduk, dan jumlah perpustakaan yang tersedia.

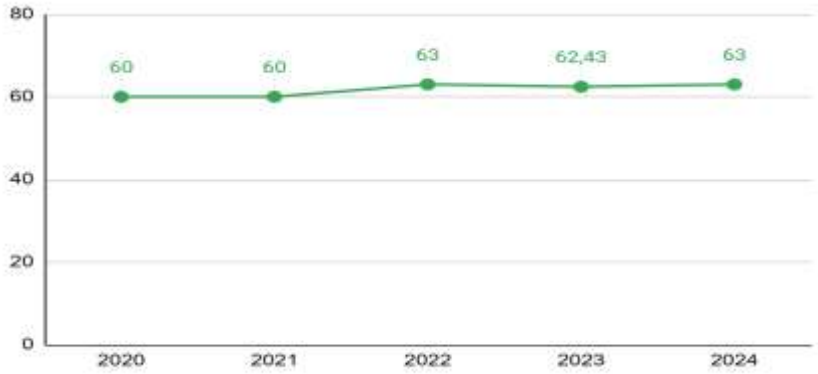

Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: https://satudata.perpusnas.go.id, 2025

IPLM Kabupaten Ngada cenderung stagnan dari tahun 2021-2024 dengan perolehan nilai di angka 60-an. Nilai ini tergolong sedang dan memenuhi standar. Namun, bukan berarti tidak perlu ada peningkatan kualitas baik dari sarana perpustakaan maupun kegiatan literasinya. Penyebarluasan akses perpustakaan melalui perpustakaan digital atau kegiatan pembudayaan membaca dapat menjadi alternatif pengembangan dalam meningkatkan pembangunan literasi masyarakat.

F. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan bagian dari penyusun IPM terutama dimensi pengetahuan. Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Keduanya disetarakan dengan standar yang berlaku kemudian dirata-ratakan.

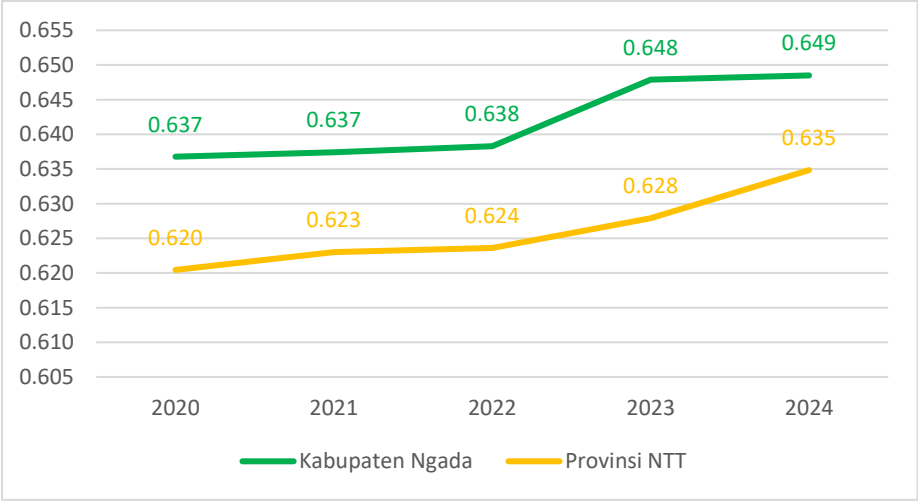

Gambar 2. 42 Indeks Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada diolah, 2025

Indeks Pendidikan Kabupaten Ngada secara umum mengalami peningkatan dan selalu berada di atas capaian Indeks Pendidikan NTT. Hal ini karena nilai RLS Kabupaten Ngada yang lebih tinggi daripada Provinsi NTT. Sedangkan HLS Kabupaten Ngada masih lebih rendah daripada Provinsi NTT. Kondisi ini menunjukkan kesempatan bersekolah anak-anak di Kabupaten Ngada secara umum lebih terbatas.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sub bab ini menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dan keluarganya terhadap risiko yang ada dalam pasar tenaga kerja. Risiko tersebut seperti kecelakaan kerja dan kehilangan pekerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan pada umumnya, lebih banyak ditemui dan diberikan pada para pekerja formal.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Ngada pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang cukup baik. Meskipun mengalami peningkatan, nilai ini masih termasuk rendah dan mengindikasikan masih banyak tenaga kerja di Kabupaten Ngada belum terproteksi. Rendahnya nilai tersebut juga dapat menjadi indikasi rendahnya kesadaran para pemilik tempat kerja untuk menjamin hak-hak pekerjanya.

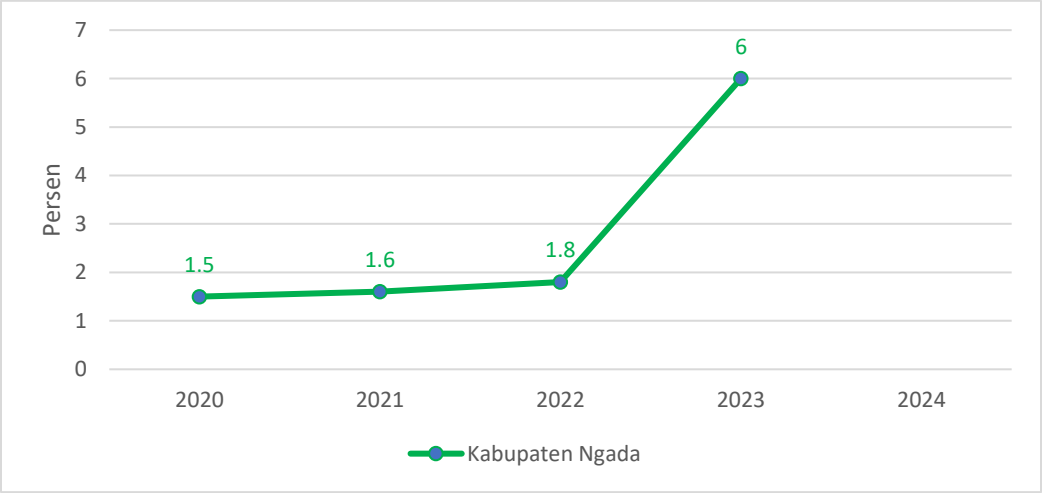

Gambar 2. 43 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: RPJPD Kabupaten Ngada, 2025

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Sub bab ini menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa yang ditinjau dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan.

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator yang mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Kebudayaan tersusun dari beberapa dimensi di antaranya dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, pendidikan, ketahanan sosial, warisan budaya, dan gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Ngada tidak tersedia sehingga dilakukan pendekatan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT.

Indeks Pembangunan Kebudayaan mengalami fluktuasi dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 53,04. Nilai tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya pembangunan kebudayaan di Provinsi NTT. Beberapa hal yang dapat ditingkatkan berdasarkan dimensi dan aspek di antaranya keberlanjutan penyelenggaraan kebudayaan, pemanfaatan budaya sebagai kegiatan ekonomi, serta pemenuhan hak untuk pendidikan serta kesetaraan gender.

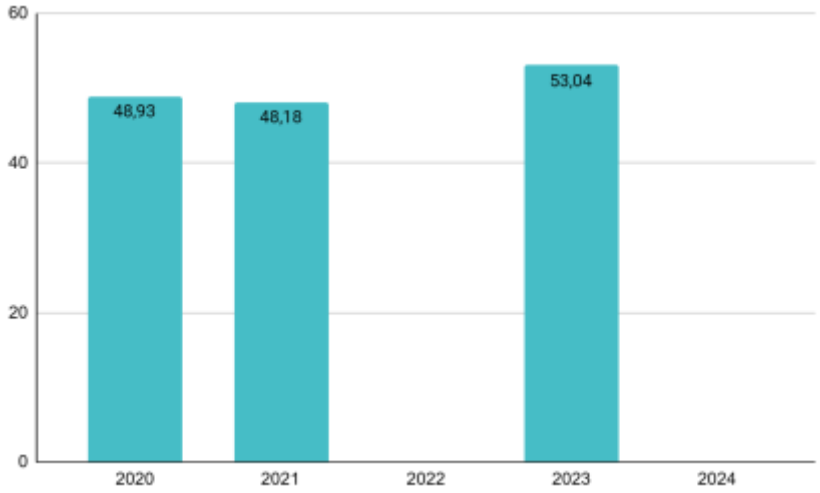

Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Sumber: Porta Data Pendidikan, 2025

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Sub bab ini menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang dilihat dari beberapa indikator. Indikator tersebut di antaranya adalah Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Pembangunan Gender.

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan salah satu instrumen yang dibuat untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Perlindungan Anak tersusun dari 27 indikator yang terbagi dalam 5 klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Berikut merupakan capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dalam tiga tahun serta dibandingkan dengan IPA nasional dan NTT.

IPA Kabupaten Ngada dari tahun 2021-2023 berfluktuasi dan secara konsisten masih berada di bawah capaian IPA nasional dari tahun 2021-2023. Hal ini mengindikasikan kualitas perlindungan anak di Kabupaten Ngada masih belum optimal bahkan lebih buruk daripada tingkat nasional. Apabila dilihat berdasarkan kluster penyusun IPA Kabupaten Ngada pada tahun 2023 maka terlihat kluster 1 dan 4 utamanya yaitu hak sipil dan kebebasan serta kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya masih perlu perhatian yang lebih.

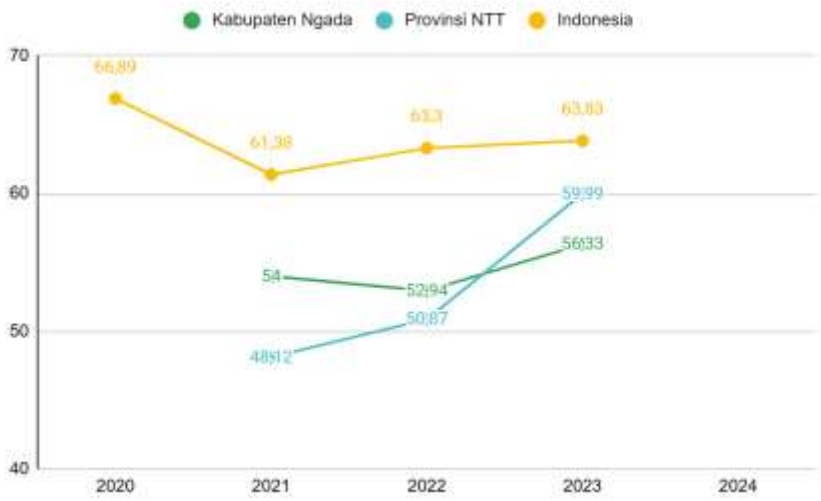

Gambar 2. 45 Indeks Perlindungan Anak Keluarga Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, 2025

Indikasi lain masih belum optimalnya perlindungan anak di Kabupaten Ngada adalah kekerasan anak yang masih tinggi dan termasuk yang tertinggi di Provinsi NTT. Data dari https://siga.kemenpppa.go.id/ memaparkan bahwa tahun 2023 jumlah kekerasan anak yang terlapor di Kabupaten Ngada sebanyak 56 laporan dan menjadikan Kabupaten Ngada berada di peringkat 3 jumlah laporan kekerasan anak terbanyak di Provinsi NTT. Pada tahun 2024, jumlah laporan kekerasan anak mengalami penurunan menjadi 35 laporan dan menurunkan posisi Kabupaten Ngada dari peringkat 3 menjadi peringkat 5 kabupaten/kota dengan jumlah laporan kekerasan anak terbanyak di Provinsi NTT. Masih tingginya jumlah laporan kekerasan terhadap anak mengindikasikan masih tingginya kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Ngada baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun lainnya, sehingga fasilitasi terhadap korban kekerasan perlu ada di samping upaya persuasif di masyarakat untuk melindungi hak anak dan peniadaan tindak kekerasan terhadap anak.

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan indikator untuk mengetahui kualitas keluarga yang tersusun dari 3 dimensi yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Pembangunan keluarga dinilai penting dalam rangka membangun masyarakat. Dalam indikator ini terdapat tiga kategori pembangunan kualitas keluarga yaitu tangguh, berkembang, dan renta. Berikut capaian indeks pembangunan kualitas keluarga Kabupaten Ngada dalam beberapa tahun terakhir.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Ngada cenderung sedikit menurun dari tahun 2021 ke 2024. Namun, nilai indeks yang masih di atas 70 menunjukkan pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Ngada termasuk tangguh. Sedangkan fluktuasi yang terjadi mengindikasikan masih perlunya peningkatan pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Ngada baik dalam hal ketenteraman, kemandirian, maupun kebahagiaan supaya stabil dan meningkat serta dapat berdampak pada perbaikan kualitas masyarakat.

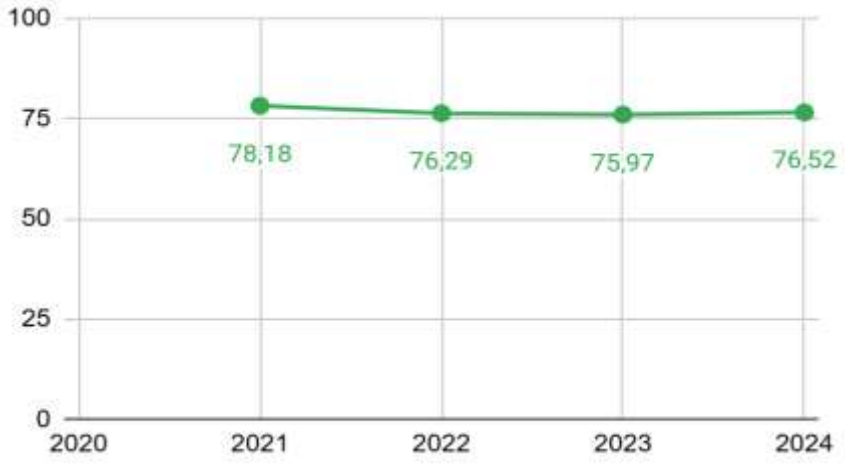

Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator baru dalam bidang pemberdayaan perempuan kaitannya dengan isu kesetaraan gender. IKG tidak hanya memperhatikan partisipasi perempuan/laki-laki dalam bidang pendidikan dan ekonomi, melainkan juga turut mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan seperti kelahiran di luar fasilitas kesehatan sebagai salah satu risiko kematian ibu saat melahirkan, angka kelahiran remaja, pemberdayaan terhadap perempuan, dan pasar tenaga kerja bagi perempuan.

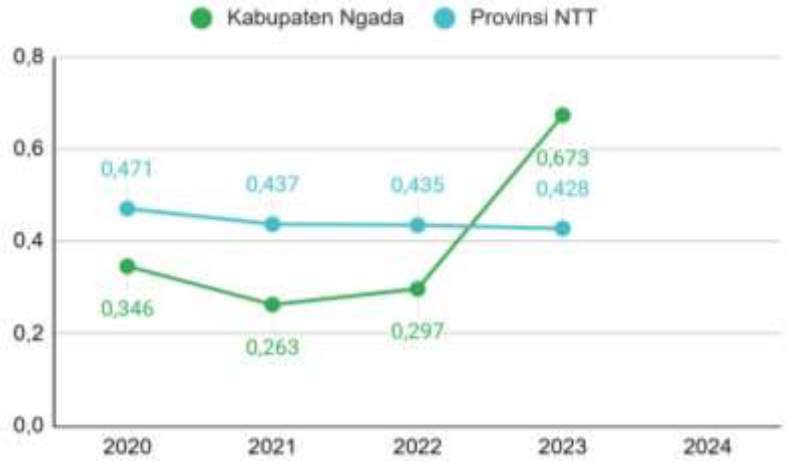

Gambar 2. 47 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS NTT, 2025

IKG Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2023. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 0,673. Kondisi demikian mengindikasikan terjadinya ketimpangan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 di Kabupaten Ngada. Nilai tersebut juga menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ngada lebih tinggi daripada Provinsi NTT pada tahun 2023.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Semakin kecil jarak dengan 100 maka dinilai semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

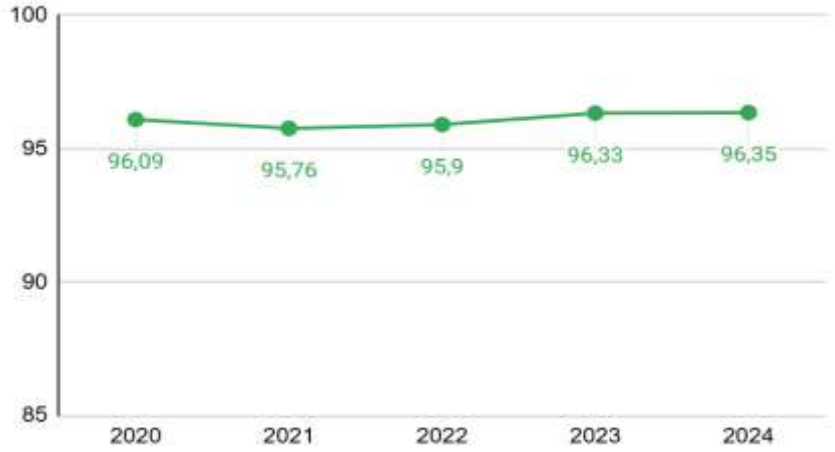

Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS NTT, 2025

Nilai IPG Kabupaten Ngada relatif stagnan antara 95-96,5 dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai ini juga menjadikan IPG Kabupaten Ngada lebih tinggi daripada IPG Provinsi NTT dan nasional. Artinya, pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak di Kabupaten Ngada lebih setara dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG dibentuk dari dua sektor utama yaitu politik dan ekonomi. Pada sektor politik terdiri dari keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif serta posisi perempuan yang menempati posisi manajerial. Sedangkan, sektor ekonomi ditinjau dari distribusi upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

IDG Kabupaten Ngada dari tahun 2020-2023 IDG Kabupaten Ngada selalu di bawah 60 sehingga termasuk kategori sedang. Kondisi yang demikian mengindikasikan masih minimnya partisipasi politik dan

ekonomi perempuan di Kabupaten Ngada. Terlebih kecenderungan yang menurun makin menunjukkan minimnya keterlibatan perempuan dalam sektor politik dan ekonomi.

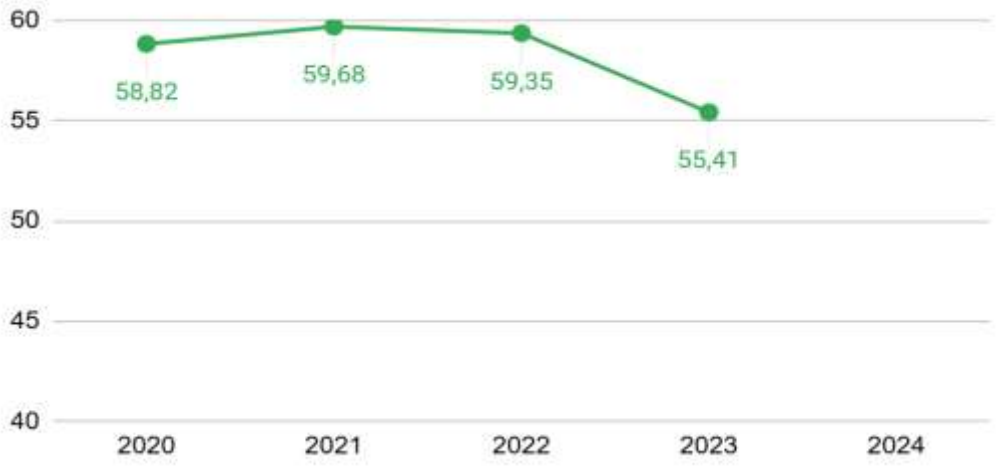

Gambar 2. 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS NTT, 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Aspek daya saing dapat yang dijelaskan meliputi daya saing ekonomi, sumber daya manusia, fasilitas/infrastruktur wilayah, serta iklim investasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing aspek daya saing.

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sub bab ini menjelaskan kondisi sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dilihat dari indikator rasio ketergantungan.

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Indikator ini akan menunjukkan beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam suatu wilayah dalam satu waktu tertentu. Semakin tinggi rasio ketergantungan suatu daerah akan menunjukkan semakin tinggi beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan Kabupaten Ngada cenderung stagnan sebesar 52. Angka ini menunjukkan 100 penduduk usia produktif menanggung beban setidaknya 52 penduduk usia non produktif. Hal ini dapat diartikan sebanyak 2 penduduk produktif menanggung 1–2 penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut juga menunjukkan masih besarnya potensi tenaga kerja produktif di Kabupaten Ngada secara umum dilihat dari usia penduduk.

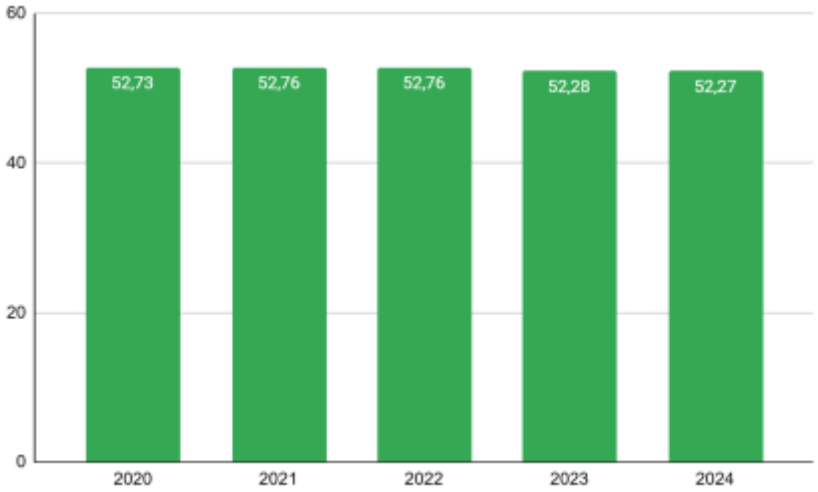

Gambar 2. 50 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

B. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang menjalankan usaha, dan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Tingginya rasio ini menunjukkan potensi SDM yang produktif, kreatif, dan berani mengambil risiko, yang merupakan ciri khas daya saing SDM. Oleh karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan berkontribusi langsung terhadap penguatan daya saing daerah melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi usaha, dan kemandirian ekonomi lokal.

Rasio kewirausahaan Kabupaten Ngada kenaikan signifikan dari 3,7 persen pada tahun 2023 menjadi 7,1 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan pesat dalam pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha, yang berpotensi memperkuat daya saing sumber daya manusia daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemandirian ekonomi lokal.

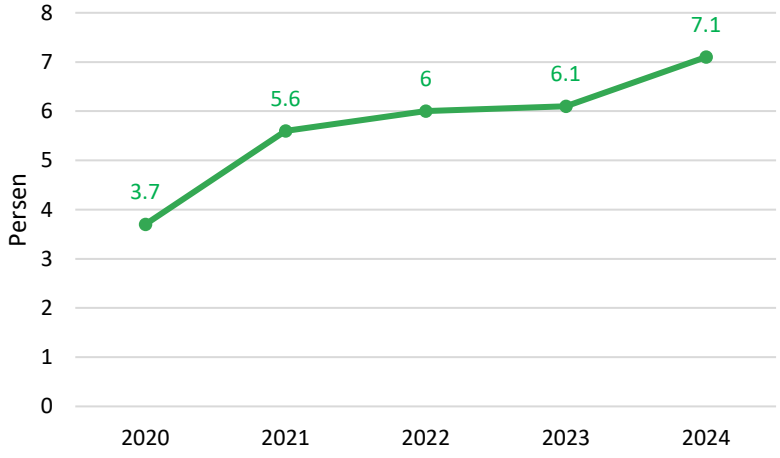

Gambar 2. 51 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada, 2025

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator PDRB adalah indikator penting dalam menganalisis perkembangan wilayah karena indikator ini memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sebaliknya, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, tanpa dipengaruhi oleh harga atau inflasi.

Selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Ngada menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Capaian PDRB ADHK meningkat dari Rp2.310,19 miliarpada tahun 2020 menjadi Rp2.583,23 miliar pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya setelah laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 melambat akibat Covid-19. Di sisi lain, PDRB ADHB mengalami peningkatan yang lebih signifikan, dari Rp3.493,65 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp4.469,22 miliar pada tahun 2024.

PDRB Kabupaten Ngada dibentuk oleh berbagai lapangan usaha dengan kontribusi yang beragam. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Ngada tahun 2020-2024, pergerakan kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Ngada tidak mengalami perubahan secara signifikan dan tetap didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan rata-rata kontribusi mencapai 34,68 persen per tahun. Produksi sejumlah produk pertanian daerah seperti kopi dan bambu menjadi produk unggulan Kabupaten Ngada yang banyak diekspor ke luar daerah. PDRB nominal sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai Rp1,57 triliun, menyumbang hingga 35,07 persen pada tahun 2024 meningkat dari 34,29 persen pada tahun 2020. Dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dan sektor konstruksi. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial menempati posisi kedua meskipun kontribusinya mengalami penurunan secara bertahap dari 20,70 persen menjadi 18,57 persen, dengan nilai PDRB meningkat dari Rp723 miliar menjadi Rp830 miliar. Sektor konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan dengan kisaran 12-13 persen, menunjukkan pertumbuhan nominal yang konsisten dari Rp424 miliar menjadi Rp562 miliar.

Perekonomian Kabupaten Ngada dalam lima tahun terakhir (2020–2024), jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), menunjukkan tren pemulihan secara bertahap pasca pandemi. Total PDRB ADHK meningkat dari Rp2.310,19 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.583,24 miliar pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan tahunan yang secara konsisten meningkat, dari hanya 0,04 persen tahun 2020 hingga mencapai 3,67 persen pada 2024. Meskipun pertumbuhan ini tergolong moderat, konsistensinya mencerminkan pemulihan yang berkelanjutan dan stabil. Namun, laju pertumbuhan antar sektor menunjukkan dinamika yang bervariasi, dengan beberapa sektor mulai tumbuh pesat, sementara yang lain masih mengalami stagnasi atau pemulihan lambat.

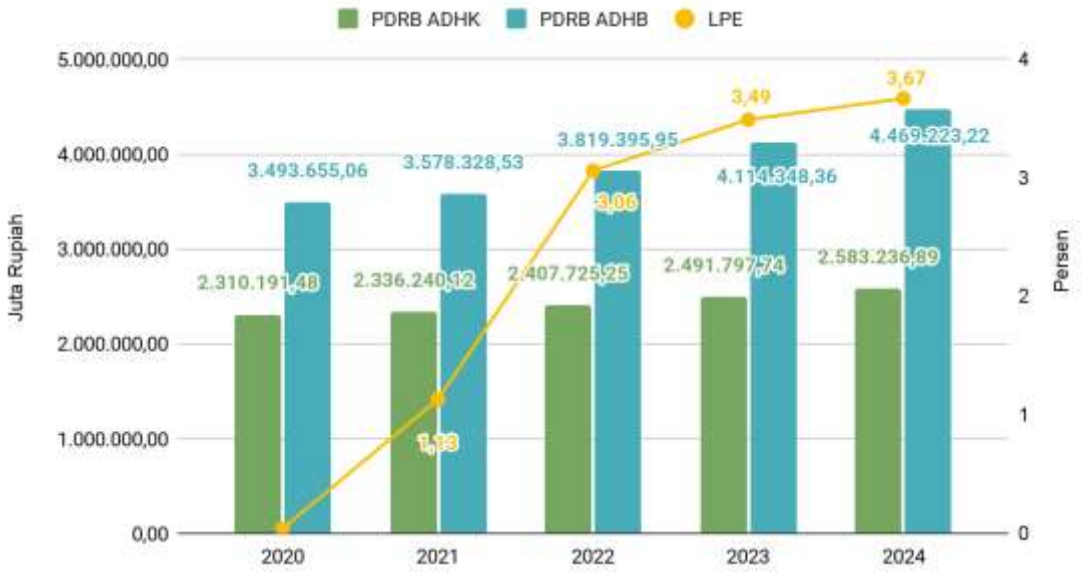

Gambar 2. 52 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2024

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung utama perekonomian Ngada, dengan nilai PDRB ADHK mencapai Rp859,67 miliar pada 2024, atau sekitar 33 persen dari total PDRB. Pertumbuhan sektor ini cukup stabil dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, dari 4,19 persen tahun 2023 menjadi 6,30 persen tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian mulai pulih dan berkembang dengan baik setelah terdampak pandemi. Namun demikian, tantangan terkait modernisasi alat produksi, efisiensi distribusi hasil pertanian, serta akses pasar masih perlu mendapat perhatian agar sektor ini tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga mampu menjadi penggerak inovasi dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Ngada, dengan nilai PDRB ADHK mencapai Rp859,67 miliar pada 2024 atau sekitar 33,28 persen dari total PDRB. Meskipun pangsanya sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor ini cukup fluktuatif: sempat tumbuh kuat pada 2022 (3,77 persen) dan 2023 (4,14 persen), namun melambat menjadi 1,43 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap nilai tambah, keberlanjutan, dan pertumbuhan sektor ini, termasuk modernisasi alat produksi, pengembangan rantai industri, serta peningkatan akses pasar, agar tidak hanya menjadi sektor dominan secara nominal, tetapi juga mendorong inovasi serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Industri pengolahan di Kabupaten Ngada masih dalam tahap pertumbuhan awal, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,37 persen pada 2024. Setelah mengalami kontraksi pada 2020 dan 2021, sektor ini menunjukkan pemulihan yang solid dengan pertumbuhan 4,76 persen (2022), 7,24 persen (2023), dan 5,79 persen (2024). Ini menunjukkan potensi sektor hilirisasi produk pertanian yang mulai bergerak, meskipun skalanya masih kecil. Jika dikembangkan secara strategis, sektor ini dapat menjadi jembatan penting antara produksi primer dan pasar industri, termasuk pengembangan sektor UMKM dan produk olahan lokal. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga menjadi salah satu sektor yang menarik untuk dianalisis

lebih lanjut. Sempat terkontraksi tajam sebesar -20,92 persen pada 2020, sektor ini kemudian tumbuh sebesar 5,69 persen (2021), 12,29 persen (2022), 9,7 persen (2023), dan 9,09 persen (2024). Meskipun kontribusinya terhadap total PDRB masih kecil di angka 0,49 persen dengan nilai Rp12,77 miliar pada 2024, sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang dengan rata-rata pertumbuhan per tahun hingga 9,23 persen (CAGR), terutama jika dikaitkan dengan pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kualitas layanan lokal untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik daerah.

Di tengah struktur ekonomi Kabupaten Ngada yang masih didominasi oleh sektor pertanian, terdapat beberapa sektor dengan kontribusi relatif kecil terhadap PDRB, namun menunjukkan laju pertumbuhan tahunan yang tinggi dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Sektor-sektor ini layak mendapat perhatian lebih karena potensinya sebagai penggerak diversifikasi ekonomi dan sumber pertumbuhan baru di masa depan. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki skala ekonomi yang sangat kecil dengan kontribusi hanya 0,06 persen terhadap PDRB pada 2024. Namun secara pertumbuhan, sektor ini mengalami lompatan signifikan, terutama pada 2020 (17,06 persen) dan 2024 (18,74 persen). Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, tren ini mencerminkan peningkatan kebutuhan dan penyediaan energi di wilayah ini, yang dapat menjadi sinyal awal dari pertumbuhan aktivitas ekonomi dan infrastruktur. Selain itu terdapat sektor jasa perusahaan yang meskipun kontribusinya masih sangat kecil, yaitu hanya 0,03 persen terhadap total PDRB, sektor jasa perusahaan mencatat pertumbuhan sebesar 6,51 persen pada 2024, melanjutkan tren positif sejak 2022. Ini mencerminkan mulai tumbuhnya permintaan terhadap layanan profesional, teknis, dan pendukung bisnis, yang sering menjadi cerminan dari peningkatan aktivitas usaha dan organisasi di daerah.

Tabel 2. 39 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB ADHB									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.197,93	34,29	1.236,06	34,54	1.339,48	35,07	1.453,48	35,33	1.567,24	35,07
B. Pertambangan dan Penggalian	61,15	1,75	62,91	1,76	66,06	1,73	70,27	1,71	72,52	1,62
C. Industri Pengolahan	50,04	1,43	49,33	1,38	52,38	1,37	60,51	1,47	68,42	1,53
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,61	0,05	1,65	0,05	1,81	0,05	2,07	0,05	2,46	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,4	0,1	3,66	0,1	3,78	0,1	3,95	0,1	4,13	0,09
F. Konstruksi	424,35	12,15	457,7	12,79	486,98	12,75	527,22	12,81	561,92	12,57
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	265,22	7,59	280,88	7,85	306,71	8,03	344,66	8,38	387,82	8,68
H. Transportasi dan Pergudangan	151,94	4,35	154,82	4,33	169,56	4,44	190,21	4,62	219,18	4,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,64	0,42	15,34	0,43	17,52	0,46	19,75	0,48	22,01	0,49
J. Informasi dan Komunikasi	162,01	4,64	173,25	4,84	184,77	4,84	190,8	4,64	200,1	4,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	233,47	6,68	244,81	6,84	261,51	6,85	270,55	6,58	285,75	6,39
L. Real Estate	62,93	1,8	62,45	1,75	66,04	1,73	71,64	1,74	78,61	1,76
M, N. Jasa Perusahaan	1,16	0,03	1,01	0,03	1,05	0,03	1,11	0,03	1,24	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	723,14	20,7	689,42	19,27	713,73	18,69	751,59	18,27	829,94	18,57
P. Jasa Pendidikan	66,68	1,91	66,31	1,85	67,06	1,76	68,98	1,68	72,13	1,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50	1,43	54,64	1,53	56,21	1,47	61,18	1,49	67,15	1,5
R,S,T,U. Jasa Lainnya	23,99	0,69	24,08	0,67	24,75	0,65	26,37	0,64	28,61	0,64
PDRB ADHB Kabupaten Ngada	**3.493,66**	**100**	**3.578,33**	**100**	**3.819,40**	**100**	**4.114,35**	**100**	**4.469,22**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Tabel 2. 40 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB ADHK									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	769,72	33,32	784,24	33,57	813,79	33,8	847,51	34,01	859,67	33,28
B. Pertambangan dan Penggalian	37,26	1,61	37,97	1,63	38,8	1,61	39,99	1,6	41,4	1,6
C. Industri Pengolahan	30,32	1,31	29,74	1,27	31,16	1,29	33,41	1,34	35,35	1,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,11	0,05	1,12	0,05	1,17	0,05	1,3	0,05	1,54	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,68	0,12	2,85	0,12	2,91	0,12	3,02	0,12	3,12	0,12
F. Konstruksi	303,17	13,12	319,33	13,67	320,81	13,32	336,87	13,52	349,84	13,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	185,26	8,02	191,69	8,21	201,67	8,38	212,16	8,51	228,83	8,86
H. Transportasi dan Pergudangan	99,68	4,31	100,53	4,3	102,49	4,26	105,74	4,24	111,58	4,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,99	0,39	9,51	0,41	10,67	0,44	11,71	0,47	12,77	0,49
J. Informasi dan Komunikasi	145,19	6,28	154,74	6,62	163,65	6,8	168,09	6,75	173,5	6,72
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	143,57	6,21	145,61	6,23	147	6,11	149,37	5,99	154,84	5,99
L. Real Estate	42,65	1,85	43,48	1,86	44,38	1,84	45,37	1,82	46,46	1,8
M, N. Jasa Perusahaan	0,84	0,04	0,73	0,03	0,74	0,03	0,76	0,03	0,81	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	456,24	19,75	429,67	18,39	442,42	18,38	449	18,02	474,11	18,35
P. Jasa Pendidikan	36,59	1,58	35,97	1,54	35,93	1,49	35,9	1,44	36,03	1,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,66	1,37	33,86	1,45	34,75	1,44	35,64	1,43	36,82	1,43
R,S,T,U. Jasa Lainnya	15,28	0,66	15,2	0,65	15,38	0,64	15,95	0,64	16,56	0,64
PDRB ADHK Kabupaten Ngada	**2.310,19**	**100**	**2.336,24**	**100**	**2.407,73**	**100**	**2.491,80**	**100**	**2.583,24**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Tabel 2. 41 Pertumbuhan PDRB Per Tahun Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Per Tahun (Persen)									
	ADHK					ADHB				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,04	1,89	3,77	4,14	1,43	0,98	3,18	8,37	7,84	7,83
B. Pertambangan dan Penggalian	2,73	1,9	2,18	3,06	3,54	3,31	2,88	5,01	5,99	3,20
C. Industri Pengolahan	-3,97	-1,89	4,76	7,24	5,79	-1,93	-1,42	6,18	13,44	13,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	17,06	0,78	4,74	11,25	18,74	17,66	2,48	9,70	12,56	18,84
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,52	6,51	2,23	3,68	3,19	3,17	7,65	3,28	4,30	4,56
F. Konstruksi	-7,73	5,33	0,72	4,7	3,85	-7,85	7,86	6,40	7,63	6,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,95	3,48	4,88	5,52	7,86	-3,50	5,90	9,20	11,01	12,52
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,1	0,86	1,75	3,37	5,52	-5,35	1,90	9,52	10,86	15,23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-20,92	5,69	12,29	9,7	9,09	-20,55	4,78	14,21	11,29	11,44
J. Informasi dan Komunikasi	11,52	6,58	5,76	2,71	3,22	11,17	6,94	6,65	3,16	4,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,83	1,42	0,95	1,61	3,66	6,48	4,86	6,82	3,34	5,62
L. Real Estate	-0,93	1,94	2,06	2,24	2,39	-1,37	-0,76	5,75	7,82	9,73
M, N. Jasa Perusahaan	-29,46	-13,01	1,39	2,92	6,51	-27,48	-12,93	3,96	5,41	11,71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5,07	-5,82	2,97	1,49	5,59	4,70	-4,66	3,53	5,04	10,42
P. Jasa Pendidikan	2,52	-1,69	-0,12	-0,09	0,38	4,63	-0,55	1,13	2,78	4,57
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,97	6,95	2,63	2,56	3,31	10,14	9,28	2,87	8,12	9,76
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-13,57	-0,51	1,2	3,66	3,85	-12,42	0,38	2,78	6,14	8,49
Pertumbuhan PDRB Per Tahun Kabupaten Ngada	**0,04**	**1,13**	**3,06**	**3,49**	**3,67**	**0,59**	**2,42**	**6,74**	**7,17**	**8,63**

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 202

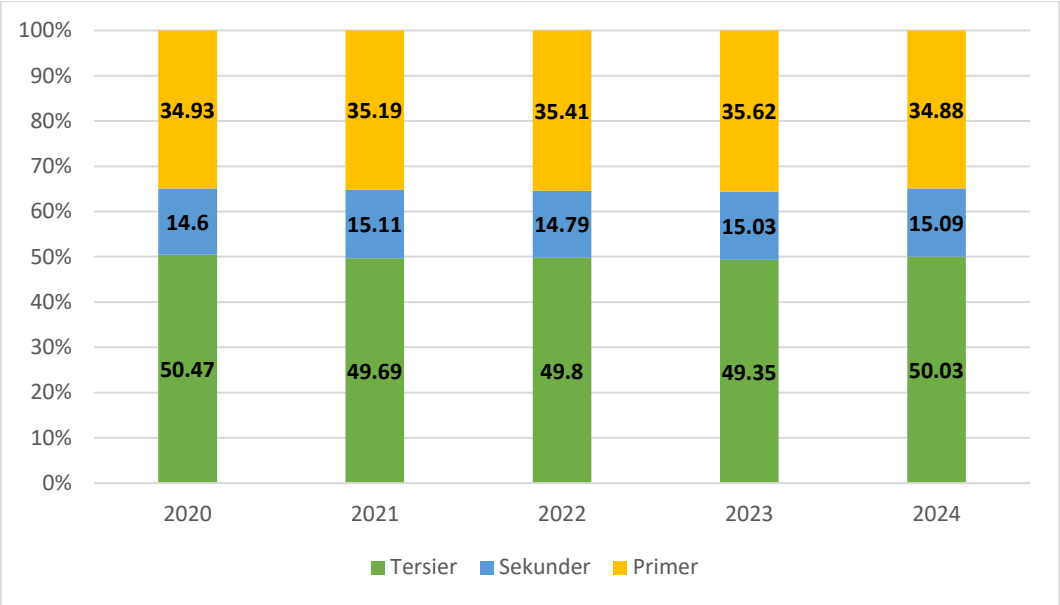

Gambar 2. 53 Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada 2025, diolah

Adapun berdasarkan sumbangan kelompok sektornya, dari 17 kategori lapangan usaha PDRB diagregasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ada dua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Selanjutnya, sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan konstruksi. Ada empat lapangan usaha yang termasuk sektor sekunder, yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara 11 lapangan usaha lainnya termasuk dalam sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Struktur PDRB Kabupaten Ngada pada periode 2020–2024 menunjukkan dominasi sektor tersier, dengan kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha administrasi pemerintahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Lapangan usaha administrasi pemerintahan secara konsisten berkontribusi tinggi, meskipun sempat menurun dari 19,75 persen (2020) menjadi 18,02 persen (2023), dan kembali naik menjadi 18,35 persen pada tahun 2024. Perdagangan besar dan eceran meningkat dari 8,02 persen menjadi 8,86 persen, sementara informasi dan komunikasi naik dari 6,28 persen menjadi 6,72 persen. Sektor primer juga tetap penting, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mendominasi lapangan usaha primer dengan kontribusi stabil sekitar 33–34 persen. Sebaliknya, sektor sekunder seperti industri pengolahan dan konstruksi cenderung stagnan, dengan industri pengolahan berada di bawah 1,4 persen dan konstruksi sebesar sekitar 13 persen. Dengan demikian, meskipun sektor tersier menjadi penggerak utama ekonomi daerah, dominasi sektor primer masih sangat terasa, sementara sektor sekunder belum menunjukkan penguatan signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi pengembangan sektor sekunder untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan bernilai tambah.

Lebih lanjut, ekonomi kreatif di Kabupaten Ngada mulai menunjukkan peran dalam struktur perekonomian daerah. Meskipun kontribusinya terhadap total PDRB masih terbatas, proporsi PDRB dari sektor ini mengalami peningkatan dari 0,2 persen pada tahun 2023 menjadi 6,23 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan potensi besar ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru dapat menyerap tenaga kerja, mendorong inovasi, dan mengangkat identitas lokal ke dalam pasar yang lebih luas.

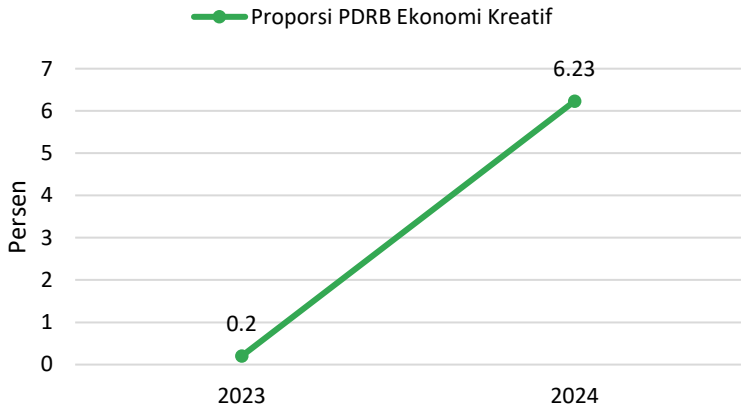

Gambar 2. 54 Proporsi Ekonomi Kreatif Kabupaten Ngada Tahun 2023 dan 2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, 2025

Secara keseluruhan, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah, namun arah pembangunan ekonomi Ngada ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah seperti industri pengolahan dan jasa akomodasi. Kombinasi antara penguatan sektor primer dan akselerasi sektor sekunder dan tersier dapat menjadi strategi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perhitungan PDRB tidak hanya dilihat berdasarkan lapangan usaha saja tetapi juga dapat dilihat dari komponen pengeluaran. PDRB pengeluaran menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung di dalam suatu wilayah yang digunakan oleh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Komponen PDRB pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi agregat (rumah tangga, pemerintah, dan LNPRT), pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor dan impor. Berikut adalah gambaran PDRB Kabupaten Ngada menurut pengeluaran.

Tabel 2. 42 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	62,35	63,99	65,13	64,77	62,73
Pengeluaran konsumsi LNPRT	3,03	3,12	3,07	3,15	3,30
Pengeluaran konsumsi pemerintah	24,16	21,91	20,99	19,52	19,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,02	27,48	27,44	27,53	26,96
Perubahan inventori	3,92	3,93	3,71	3,41	3,37
Net ekspor barang dan jasa	-19,48	-20,42	-20,34	-18,37	-15,77
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Perekonomian Kabupaten Ngada digerakkan oleh konsumsi agregat khususnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga berkontribusi rata-rata sebesar 63,79 persen per tahun pada periode 2020-2024 yang nilainya pada tahun 2024 sebesar Rp2.803,71 miliar. Selain konsumsi rumah tangga, perekonomian Kabupaten Ngada juga digerakkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) atau investasi fisik serta pengeluaran konsumsi pemerintah. Kontribusi PMTB cenderung fluktuatif dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,08 persen per tahun dengan nominal sebesar Rp1.205,04 miliar. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,19 persen per tahun dengan tren menurun terdapat pada posisi ketiga dengan nominal Rp867,38 miliar.

Tabel 2. 43 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngada Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (%)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	-0,06	2,99	3,85	3,21	3,45
Pengeluaran konsumsi LNPRT	-2,05	5,03	2,08	5,46	11,67
Pengeluaran konsumsi pemerintah	-10,36	-8,13	0,32	-1,70	5,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-5,56	5,10	1,75	4,41	3,16
Perubahan inventori					
Net ekspor barang dan jasa					
PDRB	**0,04**	**1,13**	**3,06**	**3,49**	**3,67**

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan tahunan yang relatif stabil. PDRB meningkat dari hanya 0,04 persen pada tahun 2020 menjadi 3,67 persen pada tahun 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi yang bertahap setelah tekanan yang mungkin disebabkan oleh pandemi.

Kontributor utama pertumbuhan PDRB adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang secara konsisten tumbuh positif sejak 2021, mencapai 3,45 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat, yang merupakan motor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu komponen yang menunjukkan lonjakan signifikan adalah pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Meskipun sempat tumbuh negatif pada 2020, pertumbuhan sektor ini naik tajam hingga mencapai 11,67 persen pada 2024. Kenaikan ini dapat menunjukkan peran aktif organisasi masyarakat sipil atau lembaga sosial dalam mendukung pemulihan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dimulai dengan kontraksi besar pada tahun 2020 (-10,36 persen) dan 2021 (-8,13 persen), kemudian membaik secara perlahan hingga tumbuh 5,14 persen pada tahun 2024. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami tren positif meskipun fluktuatif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2021 (5,10 persen) dan tetap tumbuh positif hingga 2024 (3,16 persen). Hal ini mencerminkan adanya investasi di sektor infrastruktur dan aset tetap yang menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Data untuk perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa tidak tercantum secara eksplisit dalam pertumbuhan tahunan, namun nilai negatif di Tabel 2.42 sebelumnya menunjukkan bahwa sektor perdagangan luar daerah mungkin belum menjadi kekuatan utama bagi perekonomian Kabupaten Ngada. Potensi penguatan ekspor atau substitusi impor dapat menjadi arah kebijakan yang perlu didorong ke depan.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menghitung persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi

barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut merupakan TPAK kabupaten Ngada selama periode 2020 hingga 2024.

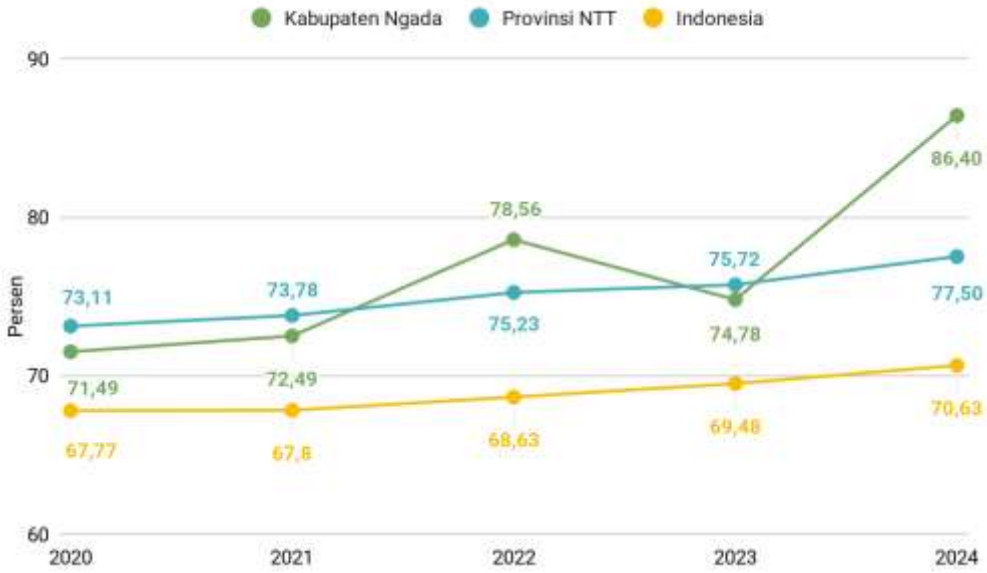

Gambar 2. 55 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, Provinsi NTT dan Indonesia, 2025

TPAK Kabupaten Ngada mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024 meskipun sempat menurun tahun 2023. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir TPAK Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 14,91 persen. Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Ngada sebesar 78,56 persen atau selisih 3,33 persen dari TPAK Provinsi NTT yang sebesar 75,23. Namun demikian, pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Ngada mengalami penurunan menjadi 74,78 persen atau turun sebesar 3,78 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan menurunnya serapan tenaga kerja dan meningkatnya angka pengangguran di wilayah tersebut. Peningkatan kembali TPAK terjadi pada tahun 2024, di mana TPAK Kabupaten Ngada melonjak tajam menjadi 86,40 persen, mencatatkan selisih yang cukup besar dibandingkan rata-rata Provinsi NTT (77,50 persen) maupun nasional (70,63 persen). Tren fluktuatif dan cenderung meningkat ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap serapan penduduk usia kerja di dunia kerja salah satunya karena faktor pembukaan lapangan kerja.

C. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi penerapan inovasi atau pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Capaian pada indeks ini mendorong terjadinya kompetisi yang konstruktif diantara pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, IID memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 56 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020-2024

Data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2020 tidak tersedia. Namun pada tahun 2021 IID sebesar 11,20, yang dikategorikan sebagai "Kurang Inovatif," indeks ini kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 41,96, termasuk dalam kategori "Inovatif." Pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 41,70, namun tetap berada dalam kategori "Inovatif." Namun pada tahun 2024, indeks kembali turun cukup drastis menjadi 33,26, sehingga kembali masuk ke dalam kategori "Kurang Inovatif."

Secara umum, terdapat tren fluktuatif dalam kinerja inovasi pemerintah daerah Kabupaten Ngada, dengan indeks inovasi daerah tertinggi pada tahun 2022, namun kemudian mengalami penurunan kembali dalam dua tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan strategi inovasi daerah secara berkelanjutan.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau tersusun atas 15 indikator yang terbagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun, Kabupaten Ngada memiliki keterbatasan terhadap beberapa data penyusun komponen Indeks Ekonomi Hijau, maka penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Ngada dilihat dari beberapa indikator penyusun yang telah tercantum pada indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel di bawah. Ke depan diharapkan penerapan ekonomi hijau dapat didukung oleh data penyusun komponen Indeks Ekonomi Hijau.

Tabel 2. 44. Indikator Penyusun Indeks Ekonomi Hijau

No	Indikator	Kategori	Target Kinerja Program					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Aspek Lingkungan							
1	Timbulan sampah terkelola	IKD	23	23,5	24	24,5	25,00	25,5
	Aspek Ekonomi							
1	PDRB perkapita	IKU	26,39	27,39	28	29,39	30,39	31,83
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	-	4797	4346	4674	5221	5415	5474
	Aspek Sosial							

No	Indikator	Kategori	Target Kinerja Program					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rata-rata lama sekolah	IKD	8,84	8,85	8,86	8,87	8,88	8,89
2	Usia harapan hidup	IKU	74,74	75,05	75,36	75,67	75,98	76,29
3	Tingkat kemiskinan	IKU	20,45	20,43	20,41	20,39	20,37	20,36
4	Tingkat pengangguran	IKU	2,66	2,64	2,62	2,6	2,58	2,56

Sumber: Bapperida Kabupaten Ngada, 2025

Persentase sampah terkelola di Kabupaten Ngada dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan yang terjadi mengindikasikan sudah adanya kesadaran untuk mengurangi sampah yang ada dan mulai mengelolanya. Pengelolaan ini dapat menjadi pintu untuk memulai kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan guna mendukung terwujudnya ekonomi hijau.

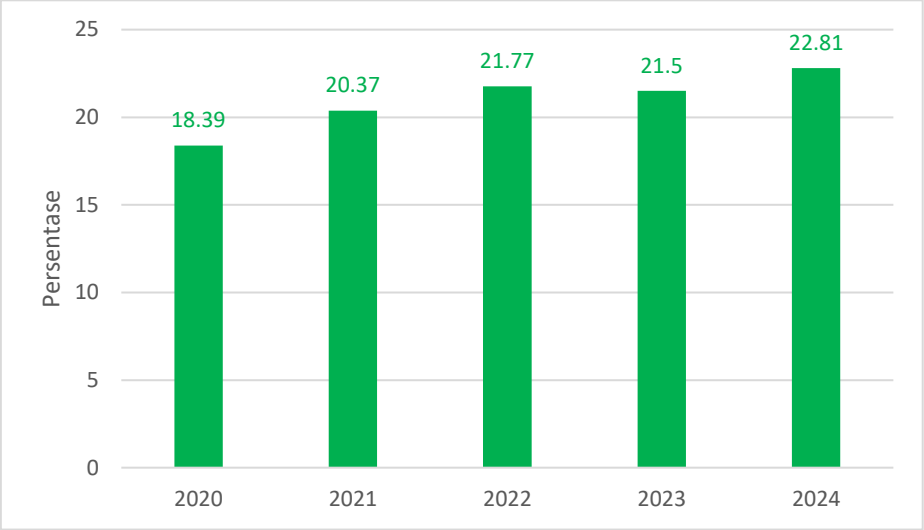

Gambar 2. 57 Persentase Sampah Terkelola Kabupaten Ngada Tahun 2020 – 2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

B. Indeks Ekonomi Biru

Dalam menyusun indeks ekonomi biru, Kabupaten Ngada juga mengalami keterbatasan data. Oleh karena itu penerapan ekonomi biru direpresentasikan melalui dua komponen penyusun aspek ekonomi, yaitu perikanan tangkap dan budidaya (akuakultur) dan pariwisata berbasis kelautan. Dilihat dari produksi, sektor perikanan menunjukkan peningkatan positif mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Ngada.

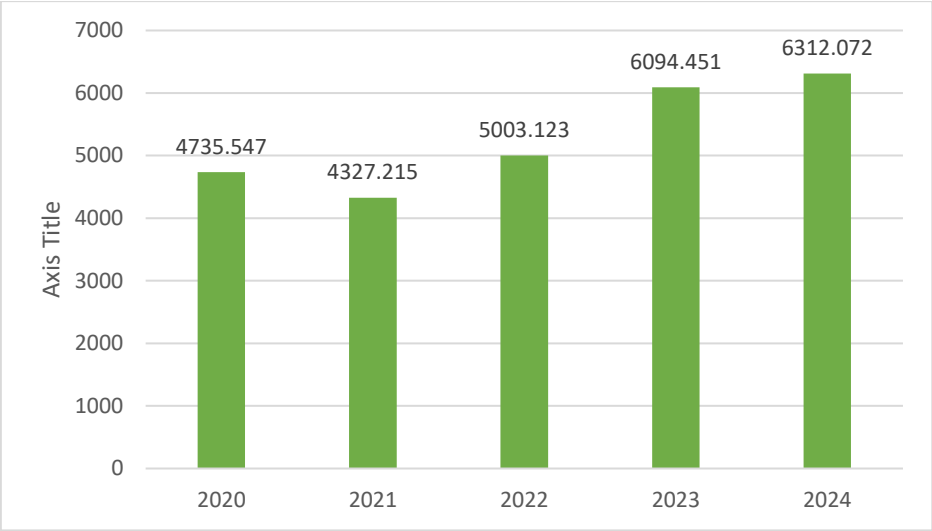

Gambar 2. 58. Volume Produksi Perikanan Tahun 2020 – 2024

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Ngada, 2025

Apabila diperhatikan lebih lanjut berdasarkan jenis perikanan yang ada di Kabupaten Ngada maka terliihat peningkatan paling tinggi terjadi pada budidaya tambak dibandingkan jenis lainnya pada tahun 2024. Sedangkan budidaya perikanan lainnya yaitu budidaya laut dan rumput laut justru cenderung mengalami penurunan volume produksi.

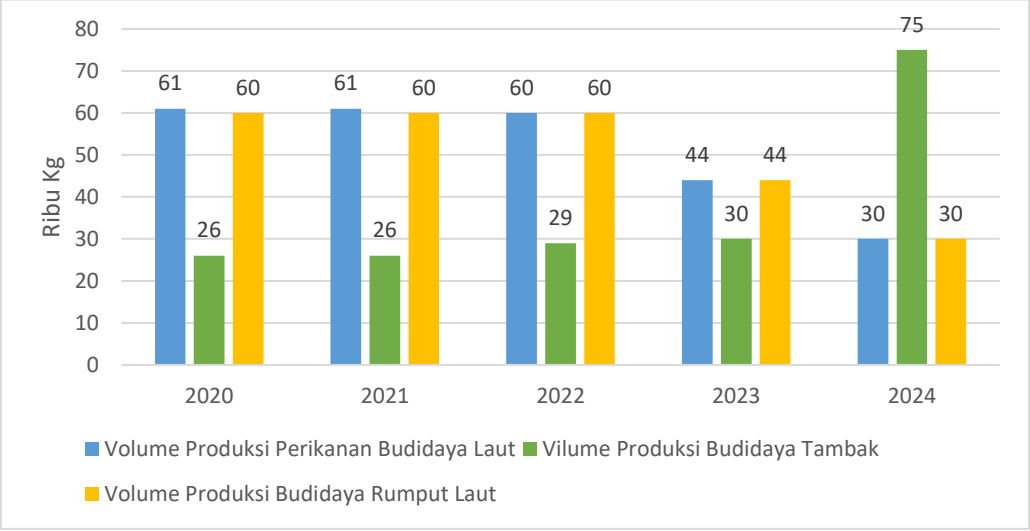

Gambar 2. 59. Volume Produksi Perikanan Budidaya Laut, Produksi Budidaya Tambak, Produksi Budidaya Rumput Laut (Ribu kg)

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Ngada, 2025

Sementara itu pendukung ekonomi biru lainnya yakni sektor pariwisata bahari menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan cenderung menurun. Bahkan, pada tahun 2024 tercatat wisata bahari dan usaha atau perusahaan wisata tirta komersial tidak ada. Penurunan yang terjadi mengindikasikan masih diperlukan banyak upaya untuk mendorong sektor pariwisata utamanya wisata bahari.

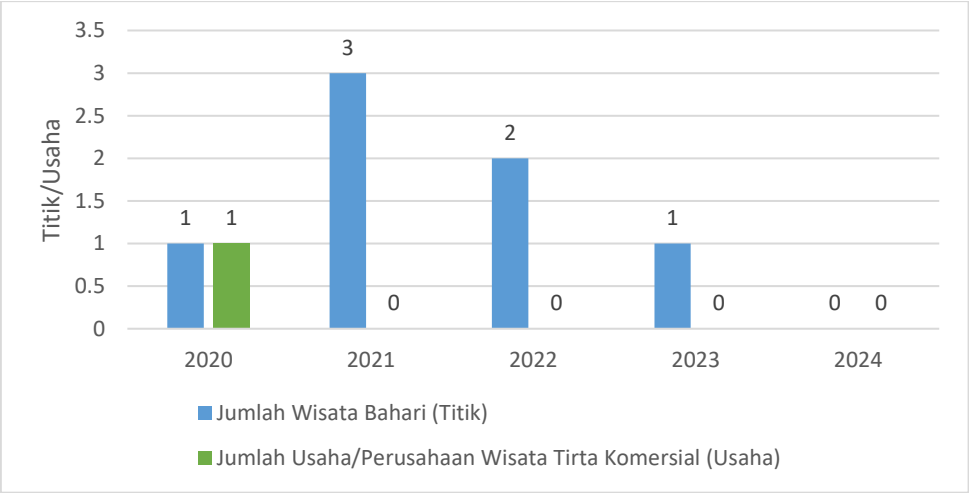

Gambar 2. 60. Jumlah Wisata Bahari dan Jumlah Usaha Wisata Tirta Komersial

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, 2025

2.1.3.4. Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam menyusun Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), Kabupaten Ngada mengalami keterbatasan data. IPTIK Kabupaten Ngada akan didekati dengan menggunakan 4 indikator yaitu pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, pelanggan telepon tetap per 100 penduduk, persentase rumah tangga dengan komputer, dan persentase individu yang menggunakan internet yang dapat menggambarkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Ngada. Ke depan diharapkan penerapan transformasi digital dapat didukung oleh data penyusun komponen IPTIK.

Secara umum, penggunaan telepon seluler dan pengguna internet di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan. Sedangkan penggunaan komputer belum terlalu masif terlihat dari grafik yang sedikit berfluktuasi dan penggunaan telepon tetap tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan penggunaan teknologi seperti ponsel ataupun ponsel pintar lebih mudah diadaptasi oleh masyarakat. Perkembangan ini akan lebih baik apabila diikuti perkembangan kualitas internet serta konten positif di masyarakat.

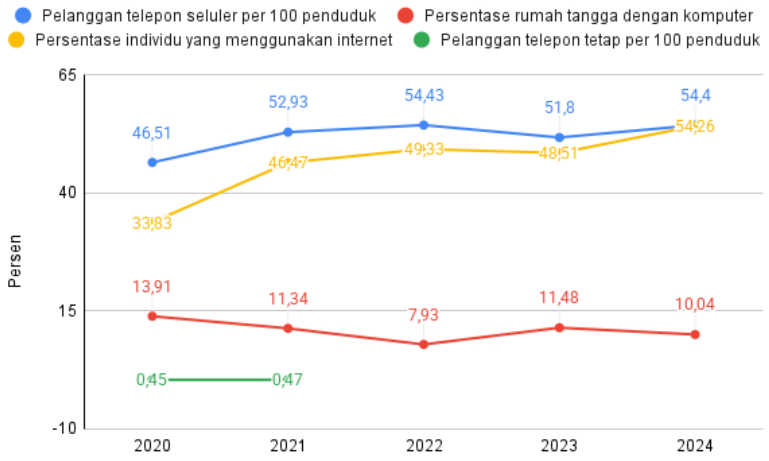

Gambar 2. 61. Penyusun IPTIK Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada diolah, 2025

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pada tahun 2020, PMTB Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp568,87 miliar, mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan negatif sebesar -5,56 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat investasi dan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, kondisi mulai membaik dengan kenaikan PMTB menjadi Rp597,89 miliar, dan mencatat laju pertumbuhan tertinggi dalam periode lima tahun sebesar 5,10 persen.

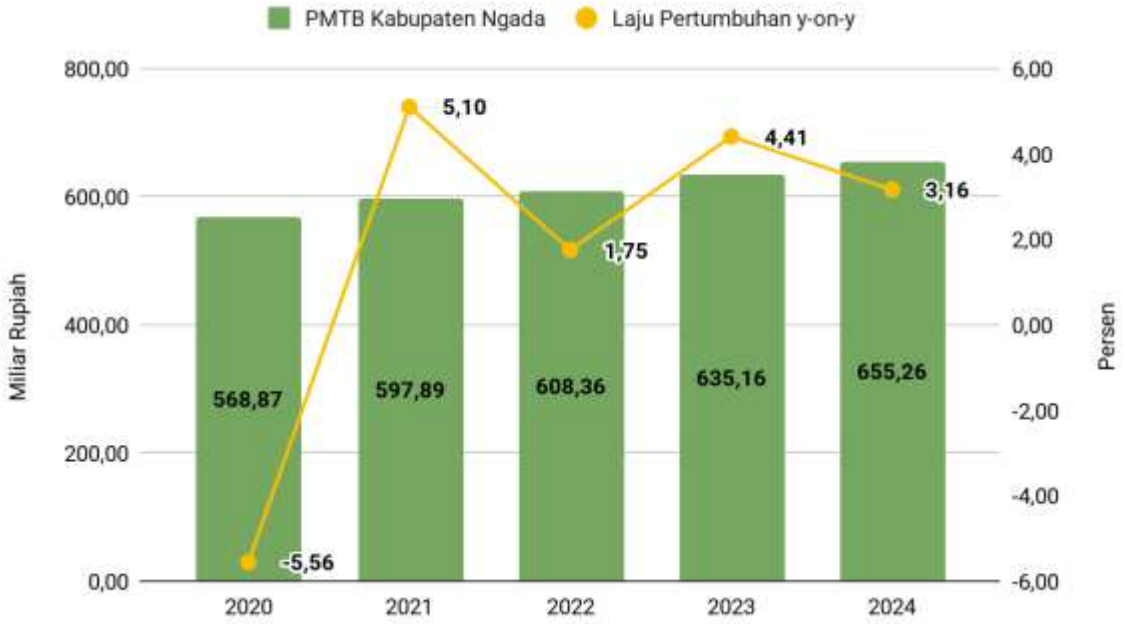

Gambar 2. 62 Nominal dan Laju Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan tersebut mencerminkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan investasi tetap. Namun pada tahun 2022, meskipun PMTB masih mengalami kenaikan menjadi Rp608,36 miliar, laju pertumbuhannya melambat menjadi 1,75 persen, menandakan adanya perlambatan laju investasi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, investasi kembali tumbuh cukup kuat dengan PMTB mencapai Rp635,16 miliar dan laju pertumbuhan meningkat menjadi 4,41 persen, menunjukkan kepercayaan pelaku usaha dan pemerintah terhadap prospek pembangunan jangka menengah. Tahun 2024 mencatat PMTB tertinggi selama periode lima tahun, yaitu sebesar Rp655,26 miliar, meskipun laju pertumbuhannya melambat menjadi 3,16 persen. Meskipun pertumbuhan sedikit menurun, angka ini tetap menunjukkan tren positif dalam penguatan kapasitas produksi dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ngada.

B. Ekspor Barang Jasa

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Ekspor-impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota dapat terdiri dari ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota dan impor dari luar provinsi/kabupaten/kota. Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai net ekspor.

Tabel 2. 45 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

	2020	2021	2022	2023	2024
Net ekspor barang dan jasa Kabupaten Ngada (PDRB ADHK)	-388,10	-399,39	-400,27	-389,16	-410,83
Net ekspor barang dan jasa Kabupaten Ngada (PDRB ADHB)	-680,65	-730,85	-776,69	-755,89	-704,94

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), terlihat bahwa Kabupaten Ngada mengalami defisit net ekspor secara konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, defisit tercatat sebesar Rp388,10 miliar, yang kemudian meningkat menjadi Rp399,39 miliar di tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan defisit sebesar Rp400,27 miliar. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp389,16 miliar, angka ini kembali meningkat pada tahun 2024 hingga Rp410,83 miliar, menjadikannya defisit tertinggi selama periode lima tahun terakhir jika dilihat dari sisi harga konstan.

Sementara itu, data berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren serupa namun dengan fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, defisit net ekspor berada pada angka Rp680,65 miliar, dan meningkat secara bertahap menjadi Rp730,85 miliar di tahun 2021 serta Rp776,69 miliar di tahun 2022. Setelah mencapai puncaknya pada 2022, terjadi penurunan defisit menjadi Rp755,89 miliar pada 2023 dan kembali menurun menjadi Rp704,94 miliar pada tahun 2024.

Tren negatif yang berkelanjutan dalam net ekspor ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Ngada lebih bergantung pada konsumsi produk dan jasa dari luar daerah dibandingkan kemampuan daerah untuk menghasilkan dan menjual barang/jasa ke luar. Hal ini dapat diasumsikan oleh lemahnya daya saing produk lokal, keterbatasan infrastruktur ekspor, atau rendahnya produksi komoditas unggulan yang dapat dipasarkan secara luas.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Keterbatasan data tentang Indeks Infrastruktur Kabupaten Ngada mengakibat perkembangan kondisi infrastruktur dan layanannya tidak dapat tergambarkan secara utuh. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk Indeks Infrastruktur dari tahun 2022 ke 2024 seperti terlihat pada tabel di bawah. Kondisi ini menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dasar permukiman yang mengalami peningkatan.

Tabel 2. 46. Indeks Infrastruktur dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Ngada Tahun 2022 dan 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	tad	tad	42,76	tad	52,88
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	tad	tad	tad	tad	50

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Ngada, 2025

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak mencerminkan kualitas hidup dan berperan penting dalam mendukung kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Di perkotaan, hunian layak memperkuat daya saing melalui peningkatan produktivitas dan kesehatan penduduk, sementara di pedesaan, ketersediaan hunian layak mendorong pemerataan pembangunan dan mencegah urbanisasi berlebihan. Kesenjangan akses antarwilayah menunjukkan perlunya kebijakan yang adil dalam penyediaan infrastruktur dasar dan program perumahan.

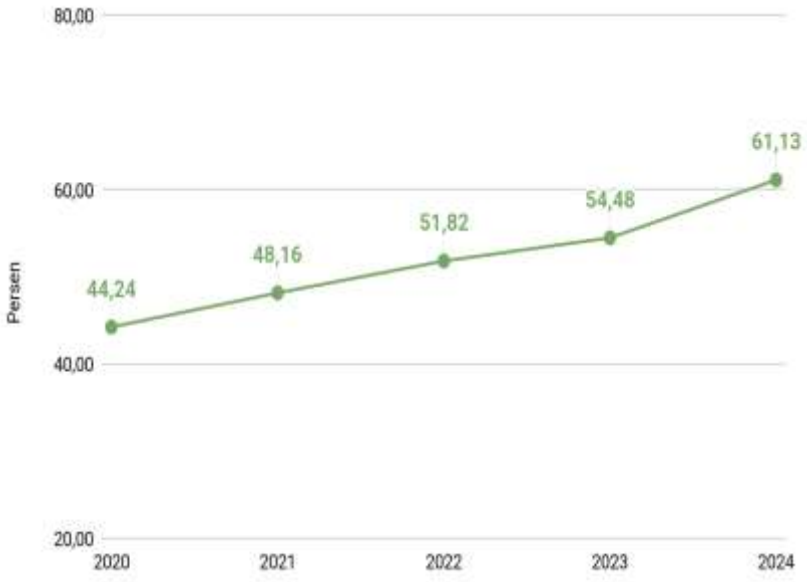

Gambar 2. 63 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Kabupaten Ngada selama periode 2020 hingga 2024 memiliki tren yang membaik. Pada tahun 2020, hanya sekitar 44,24 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Angka ini meningkat secara bertahap dari 48,16 persen tahun 2021 menjadi 54,48 persen tahun 2023. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 mencapai 61,13 persen. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan infrastruktur dasar perumahan, akses air minum, sanitasi, serta ketahanan bangunan, yang merupakan komponen utama dalam definisi hunian layak menurut BPS.

C. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator yang dibuat untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa melalui tiga aspek utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terdapat lima kategori desa yang didasarkan pada nilai IDM yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Berdasarkan data dari buku IDM yang dikeluarkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Ngada dari tahun 2020 sampai dengan 2024 masih berada pada kategori yang sama yaitu berkembang. Meskipun demikian, terjadi fluktuasi nilai pada rentang waktu tersebut. Nilai IDM tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 0,6662 kemudian turun pada tahun berikutnya menjadi 0,6360 dan turun lagi menjadi 0,6341 pada tahun 2024. Kondisi yang menurun mengindikasikan adanya penurunan kemandirian desa di Kabupaten Ngada.

D. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri mencerminkan tingkat kemandirian dan kapasitas pembangunan di wilayah perdesaan, yang secara langsung mempengaruhi daya saing wilayah secara keseluruhan. Desa yang mandiri mampu menyediakan layanan dasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas lokal, sehingga memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang sejajar dengan kota.

Tabel 2. 47 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase desa mandiri	tad	tad	0,70	0,50	0,50
Jumlah desa mandiri menurut IDM	tad	tad	1	1	1
Jumlah desa menurut IDM	tad	tad	135	190	190

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025

Berdasarkan data persentase desa mandiri Kabupaten Ngada, terlihat bahwa terjadi stagnasi jumlah desa mandiri selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentase desa mandiri tercatat sebesar 0,70 persen, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 0,50 persen pada tahun 2023 dan berlanjut hingga tahun 2024. Jumlah desa mandiri menurut Indeks Desa Membangun selama tiga tahun terakhir tercatat hanya 1 desa dari total desa yang ada yaitu Desa Aimere Timur sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah desa yang dinilai, jumlah desa yang berhasil mencapai status mandiri belum bertambah.

E. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi merupakan salah satu pilar strategis untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam kerangka pembangunan daerah penguatan kelembagaan ekonomi yang meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam mengintegrasikan inovasi produk, tenaga kerja, serta rantai nilai hulu hingga hilir mulai dari pasokan bahan baku hingga pemasaran suatu produk. Integrasi ini akan memperkuat fungsi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan daya saing daerah secara menyeluruh.

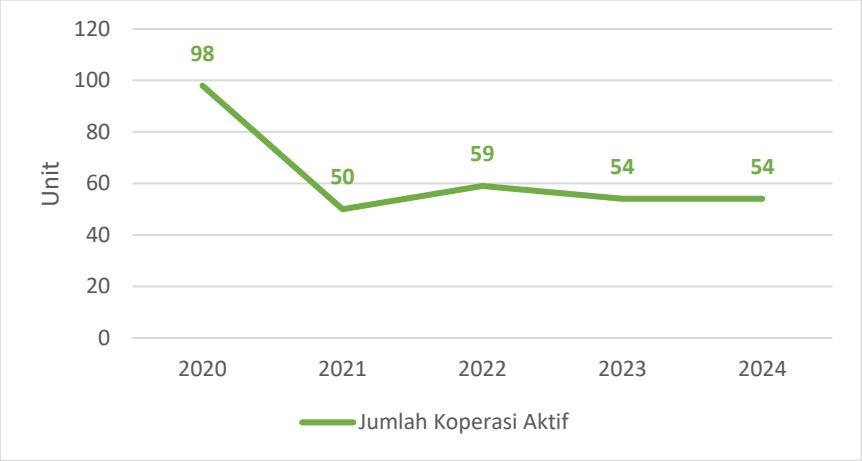

Gambar 2. 64 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Ngada 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ngada, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ngada, jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 terdapat 98 unit koperasi dan merupakan tahun terbanyak adanya koperasi aktif yang mencerminkan keberhasilan sementara dalam penguatan kelembagaan koperasi. Namun, pada tahun 2021 jumlahnya menurun drastis menjadi 50 unit, diduga akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan operasional koperasi. Kemudian, jumlah koperasi aktif menunjukkan fluktuasi kecil, yakni 59 unit pada 2022, dan stabil di angka 54 unit pada tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi ini menandakan bahwa koperasi-

koperasi di Kabupaten Ngada belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan serta memerlukan penguatan strategi pembinaan serta mekanisme pendampingan yang konsisten.

Gambar 2. 65 Jumlah BUMDes dan Jumlah BUMDes Aktif yang Terlibat dalam Pengelolaan Hasil Pertanian dan Pemasaran Produk Lokal di Kabupaten Ngada 2020-2024

Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada, 2025

Jumlah BUMDes aktif di Kabupaten Ngada pada tahun 2020 hingga 2024 fluktuatif cenderung meningkat dengan 18 unit pada tahun 2024. Jumlah BUMDes aktif yang terlibat dalam pengelolaan hasil pertanian dan pemasaran produk lokal juga fluktuatif yaitu 2 unit pada tahun 2020 menjadi 4 unit pada tahun 2024 dengan jumlah terbanyak pada tahun 2023 sebanyak 7 unit. Serupa dengan koperasi, dinamika jumlah BUMDes aktif di Kabupaten Ngada mengindikasikan bahwa operasional BUMDes belum berjalan secara berkelanjutan.

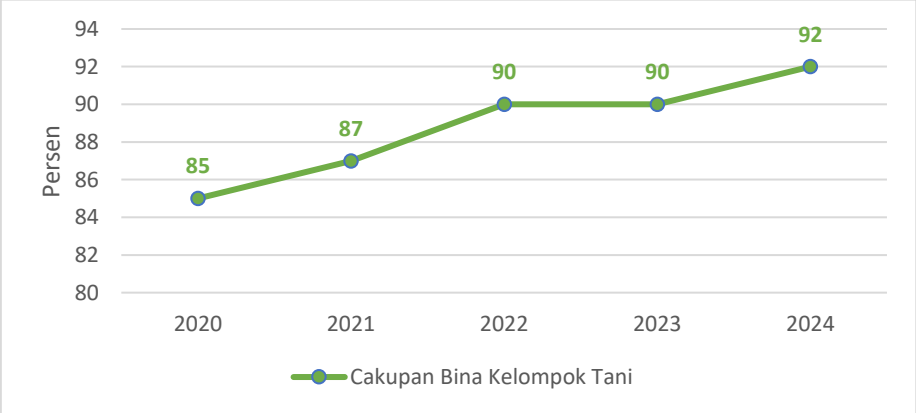

Gambar 2. 66 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Ngada 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Cakupan bina kelompok petani menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 cakupan bina kelompok petani sebesar 85 persen dan terus meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2022. Peningkatan tersebut berlanjut hingga mencapai 92 persen pada tahun 2024. Kecenderungan positif ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani melalui pembinaan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Ngada.

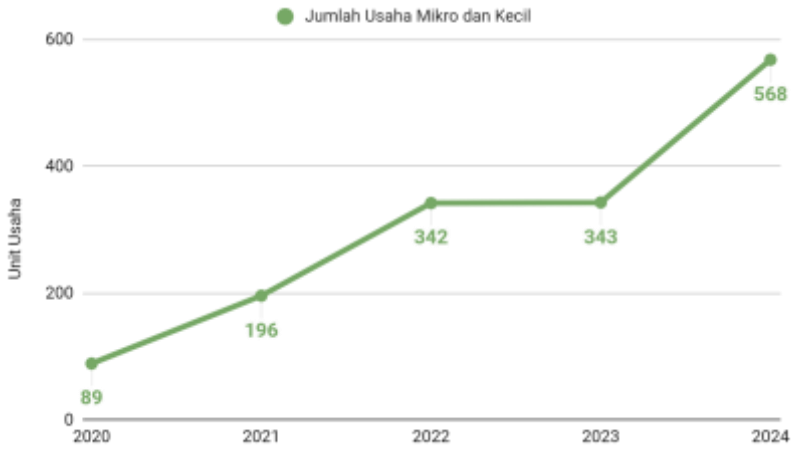

Gambar 2. 67 Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Ngada 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ngada, 2025

Jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 89 unit usaha, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 196 unit pada tahun 2021. Pertumbuhan ini berlanjut dengan kenaikan tajam menjadi 342 unit pada tahun 2022, dan stabil di angka 343 unit pada tahun 2023. Peningkatan paling mencolok terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah UMK melonjak menjadi 568 unit. Tren positif ini menandakan adanya dorongan pada aspek kewirausahaan masyarakat yang dapat secara langsung berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Ngada

Tabel 2. 48 Peningkatan UMKM di Kabupaten Ngada 2020-2024

	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan jumlah UMKM	Persen	tad	53,80	9,40	0,90	17
Persentase UMKM naik kelas	Persen	2	2	3	4	5

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada, 2025

Berdasarkan data mengenai peningkatan UMKM di Kabupaten Ngada tahun 2020–2024, terlihat adanya tren positif dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Persentase peningkatan jumlah UMKM mengalami fluktuasi signifikan, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 53,80 persen. Meskipun sempat menurun drastis pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 9,40 persen dan 0,90 persen, pada tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan menjadi 17 persen. Sementara itu, persentase UMKM yang naik kelas menunjukkan peningkatan bertahap dan konsisten dari tahun ke tahun, dimulai dari 2 persen pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 3 persen pada 2022, lalu 4 persen pada 2023, dan mencapai 5 persen pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM di Kabupaten Ngada.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan indikator penting yang menghubungkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan kemampuannya mendukung daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi makro regional. Rasio yang optimal (tidak terlalu rendah hingga menyebabkan kurangnya dana publik, dan tidak terlalu tinggi hingga memberatkan ekonomi) yang disertai dengan

tata kelola pajak yang baik dan belanja publik yang efektif, akan berkontribusi positif pada penciptaan lingkungan yang stabil dan kompetitif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten Ngada mengalami penurunan dari 1,40 persen pada tahun 2020 menjadi 1,00 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya kontribusi PAD terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren stabil dengan sedikit peningkatan, dari 0,21 persen pada tahun 2020–2022 menjadi 0,24 persen pada tahun 2024. Rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB juga mengalami kenaikan dari 0,30 persen menjadi 0,34 persen dalam periode yang sama. Secara umum, meskipun terdapat peningkatan kecil pada rasio pajak dan retribusi, kontribusi PAD terhadap PDRB cenderung menurun sehingga diperlukan upaya optimalisasi penerimaan asli daerah.

Gambar 2. 68 Rasio Pajak Daerah, Rasio Pajak dan Retribusi Daerah, serta Rasio PAD terhadap PDRB Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2025; LKPD Kabupaten Ngada 2020-2023 Audited; LRA Kabupaten Ngada 2024 Unaudited, diolah

B. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi makro di suatu daerah yang menunjukkan tren kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan. Indikator ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan diukur secara berkala melalui Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan tujuan untuk memantau stabilitas harga sebagai cerminan stabilitas ekonomi. Inflasi dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian suatu wilayah dan dapat berdampak negatif pada pemerataan kesejahteraan serta pendapatan. Peningkatan inflasi akan menyebabkan penurunan nilai mata uang dan berkurangnya daya beli masyarakat.

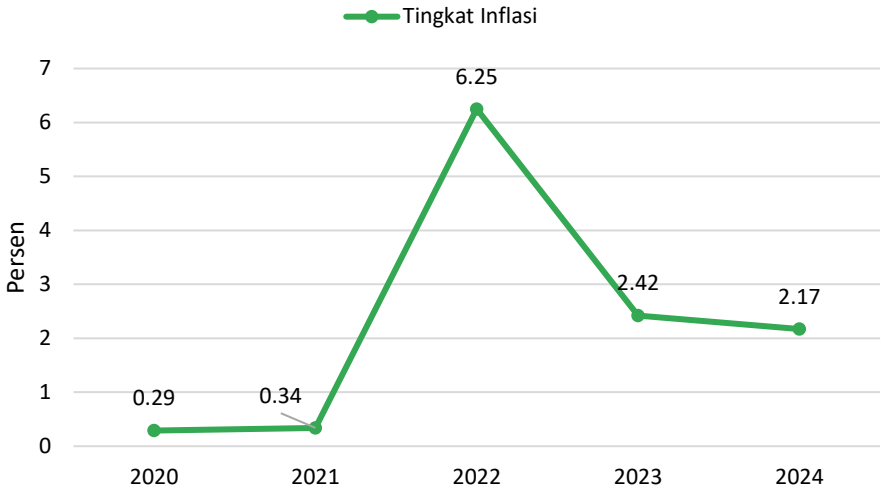

Gambar 2. 69 Tingkat Inflasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, Diolah

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat inflasi di Kabupaten Ngada menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, inflasi berada pada tingkat rendah, masing-masing sebesar 0,29 persen dan 0,34 persen. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan inflasi mencapai 6,25 persen, mencerminkan tekanan harga yang cukup besar dalam perekonomian. Setelah puncaknya di tahun 2022, laju inflasi menurun menjadi 2,42 persen pada tahun 2023 dan kembali sedikit turun menjadi 2,17 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren inflasi menunjukkan lonjakan tajam di tengah periode sebelum kembali stabil, mengindikasikan adanya faktor eksternal atau gejolak ekonomi yang sempat memicu kenaikan harga secara umum, sebelum akhirnya terkendali kembali dalam dua tahun terakhir.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Sub bab ini menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum ditinjau dari beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain Indeks Reformasi Hukum, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional.

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum yang sudah berjalan di pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks Reformasi Hukum merupakan bagian penting dalam terbentuk reformasi birokrasi yang berkualitas pada sistem pemerintahan. Aspek penting dalam reformasi hukum adalah terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas. Penilaian Indeks Reformasi hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terdapat empat variabel pengukuran dalam penilaian indeks ini yaitu tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang perundang-undangan, kualitas hasil reviu peraturan perundang-undangan dalam mendorong re-regulasi atau deregulasi, serta terkait dengan penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2. 49 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	tad	tad	tad	CC	BB

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, 2025

Kabupaten Ngada mendapatkan predikat CC dan BB pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan reformasi hukum di Kabupaten Ngada. Artinya, peraturan perundang-undangan telah mengalami peningkatan kualitas.

B. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah fondasi dalam mengukur penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan, antara lain: manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngada pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 50 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	CC	C

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, 2025

IRB Kabupaten Ngada selama tahun 2020-2023 menunjukkan kondiisi stabil dengan kategori “CC”, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi “C”. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Ngada. Perlu adanya peningkatan kualitas tata kelola, kelembagaan, dan akuntabilitas sehingga reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik.

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang mengukur penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi SPBE ditunjukkan dengan mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut nilai Indeks SPBE Kabupaten Ngada tahun 2020-2024.

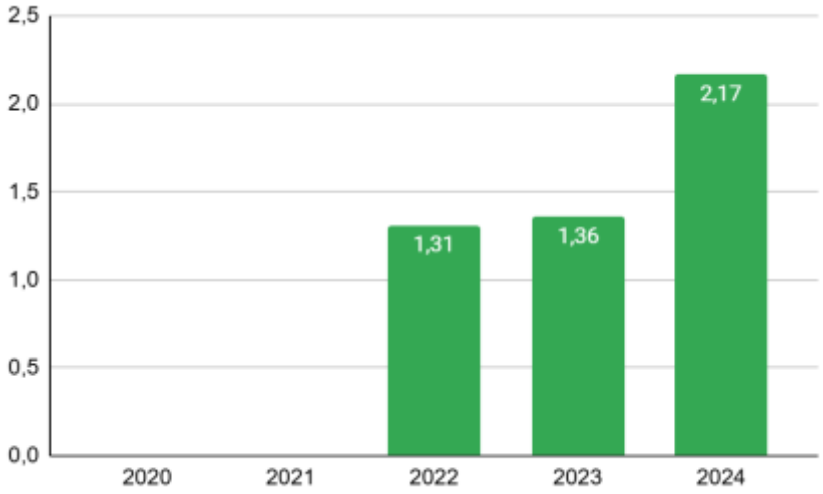

Gambar 2. 70 Indeks SPBE Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ngada, 2025

Perhitungan nilai Indeks SPBE dilakukan mulai tahun 2022-2024, sebelumnya belum dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Terdapat kenaikan nilai yang cukup baik dari 1,31 tahun 2022 menjadi 2,17 tahun 2024. Peningkatan ini juga meningkatkan predikat Kabupaten Ngada yang awalnya "kurang" menjadi "cukup." Apabila dilihat secara rinci maka perlu adanya perbaikan pada domain dua dan tiga dari Indeks SPBE yaitu domain tata kelola dan manajemen SPBE. Domain 2 Tata kelola SPBE meliputi perencanaan strategis, kematangan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kematangan penyelenggaraan SPBE. Sedangkan, domain 3 meliputi dua aspek yaitu penerapan manajemen SPBE serta pelaksanaan audit TIK. Berikut rincian domain Indeks SPBE Kabupaten Ngada Tahun 2024.

Tabel 2. 51 Domain Indeks SPBE Kabupaten Ngada Tahun 2024

	Domain 1 Kebijakan SPBE	Domain 2 Tata Kelola SPBE	Domain 3 Manajemen SPBE	Domain 4 Layanan SPBE
Nilai	3	1	1	3

Sumber: Laporan Evaluasi SPBE, 2025

D. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data yang menunjukkan tingkat kepuasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif masyarakat terhadap pelayanan dari aparatur penyelenggara layanan publik. IKM juga mempertimbangkan harapan dan realita masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

IKM Kabupaten Ngada berfluktuasi dari tahun 2021–2023, IKM tertinggi tahun 2021 yaitu 80,55. Nilai tersebut kemudian turun menjadi 50 pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 68 pada tahun 2023. Nilai yang fluktuatif tersebut mengindikasikan belum konsistennya pelayanan publik yang diberikan sehingga kepuasan masyarakat menjadi tidak stabil. Perlu adanya perbaikan pelayanan publik dengan sesuai dengan SOP secara tertib.

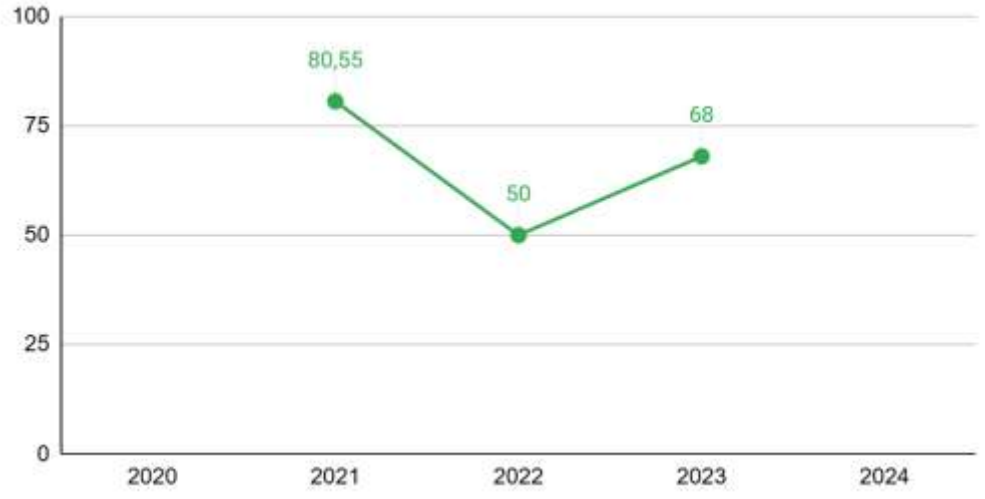

Gambar 2. 71 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, 2025

E. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah. Pengukuran didasarkan pada enam aspek utama yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. IPP Kabupaten Ngada pada tahun 2024 senilai 1,89 berdasarkan Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada oleh Kementerian PANRB. Nilai tersebut termasuk kategori ”buruk” dan harus segera ditingkatkan.

F. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN dihitung berdasarkan 4 dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai IP ASN dibagi menjadi empat kategori yaitu sangat rendah apabila di bawah atau sama dengan 60, 61-70 kategori rendah, 71-80 kategori sedang, 81-90 kategori tinggi, dan 91-100 kategori sangat tinggi.

IP ASN Kabupaten Ngada pada tahun 2020-2023 termasuk kategori sangat rendah karena memiliki nilai di bawah 60 dengan rincian 41 pada tahun 2020, 43,24 tahun 2021, 46,34 pada tahun 2022, dan 55,45 pada tahun 2023. Kemudian, meningkat tajam menjadi kategori tinggi pada tahun 2024 dengan nilai 85. Peningkatan dari kategori sangat rendah menjadi tinggi mengindikasikan terjadi perubahan besar dalam ASN di Kabupaten Ngada terutama dari 4 dimensi yang dihitung.

G. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko terjadinya korupsi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui survei masyarakat serta data objektif dari internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kebijakan. Nilai Indeks Integritas Nasional diambil dari nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).

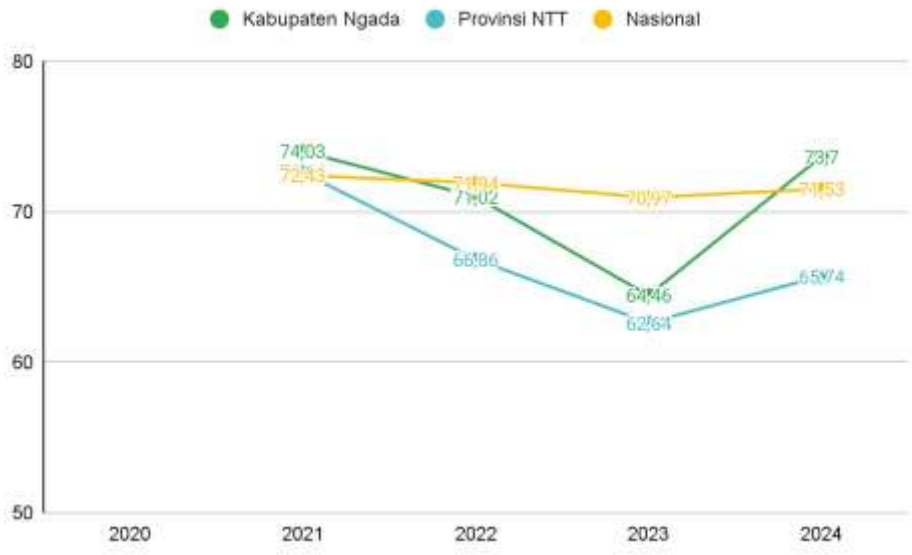

Gambar 2. 72 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Sumber: Inspektorat Kabupaten Ngada, Jaga.id, 2025

Nilai Indeks Integritas Nasional Kabupaten Ngada cenderung menurun dari tahun 2021–2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Namun, secara konsisten berada di atas capaian Provinsi NTT. Capaian terendah terjadi tahun 2023 dengan nilai 64,46. Namun dapat meningkat menjadi 73,7 pada tahun 2024, kenaikan capaian tersebut menyebabkan Kabupaten Ngada berubah dari kategori "rentan" menjadi "waspada."

H. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan gambaran tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP. Terdapat enam tingkatan dalan rangka maturitas SPIP yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukut, serta optimum. Tingkatan tersebut digambarkan dengan level 0-5.

Tabel 2. 52 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP	tad	1 (rintisan)	1 (rintisan)	1 (rintisan)	2 (berkembang)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Ngada, 2025

Capaian tingkat maturitas SPIP Kabupaten Ngada menunjukkan peningkatan dari rintisan pada tahun 2023, menuju berkembang pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan yang cukup baik dalam pengendalian intern. Meskipun demikian, pada tingkatan ini masih banyak pengendalian intern yang perlu diperbaiki seperti penyelarasan dengan semua unit organisasi, dokumentasi pengendalian, serta sistem pengendalian yang belum optimal.

I. SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2. 53 Nilai SAKIP Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	CC	CC	CC	CC	B

Sumber: Inspektorat Kabupaten Ngada, 2025

SAKIP Kabupaten Ngada mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai B dari tahun-tahun sebelumnya yang bernilai CC. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja terutama unit kerja utama. Namun, masih terdapat beberapa yang dapat ditingkatkan terutama pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerja.

J. Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Permenpan No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merti dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sarana pengukur sistem merit tersebut adalah indeks sistem merit. Terdapat 8 aspek yang menjadi komponen penyusun Indeks Sistem Merit yaitu perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Pada tahun 2023 indeks sistem merit Kabupaten Ngada memiliki nilai 129,5. Nilai tersebut masih termasuk buruk dalam peraturan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan masih diperlukan upaya yang cukup besar untuk mewujudkan sistem merit di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Ngada.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Sub bab ini menjelaskan kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia ditinjau dari beberapa indikator. Indikator tersebut di antaranya persentase penegakan perda, indeks rasa aman, indeks ketenteraman dan ketertiban.

A. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan perda merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjalankan pelaksanaan perda di daerah. Pelaksanaan penegakan perda dilakukan tidak hanya berdasarkan aduan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat tetapi juga melalui penanganan ketika dilakukan patroli. Berikut grafik capaian persentase penegakan perda di Kabupaten Ngada.

Penegakan perda pada tahun 2020-2024 cenderung membaik dengan capaian 100 persen dari tahun 2022-2024. Meskipun demikian, bukan berarti tidak terjadi kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Dimungkinkan masih adanya kasus berulang yang dilakukan masyarakat akibat kesadaran yang rendah serta minimnya pengawasan secara langsung.

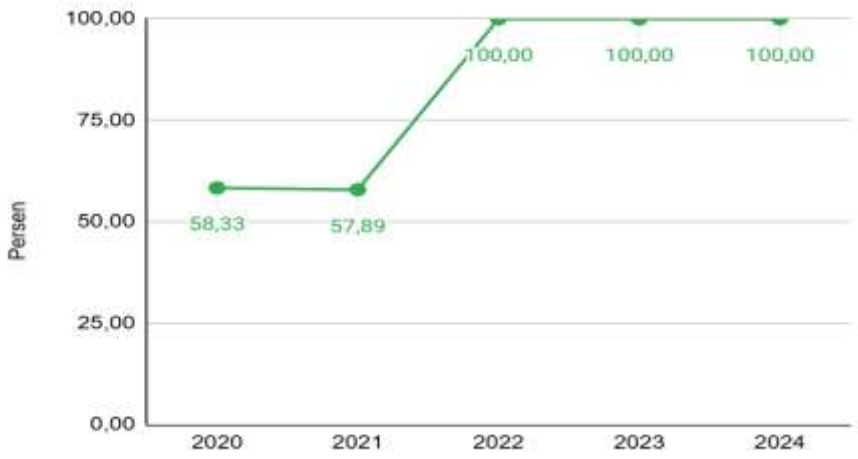

Gambar 2. 73 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngada, 2025

B. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan indikator untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh masyarakat dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu. Pengukuran dilakukan melalui survei kepada masyarakat dengan pertimbangan keamanan terhadap bencana dan kekerasan atau kejahatan.

Indeks Rasa Aman sepanjang tahun 2020-2024 sebesar 100. Hal ini mengindikasikan masyarakat Kabupaten Ngada merasa aman. Hal ini juga menunjukkan pelaksanaan penjagaan keamanan di Kabupaten Ngada berjalan baik.

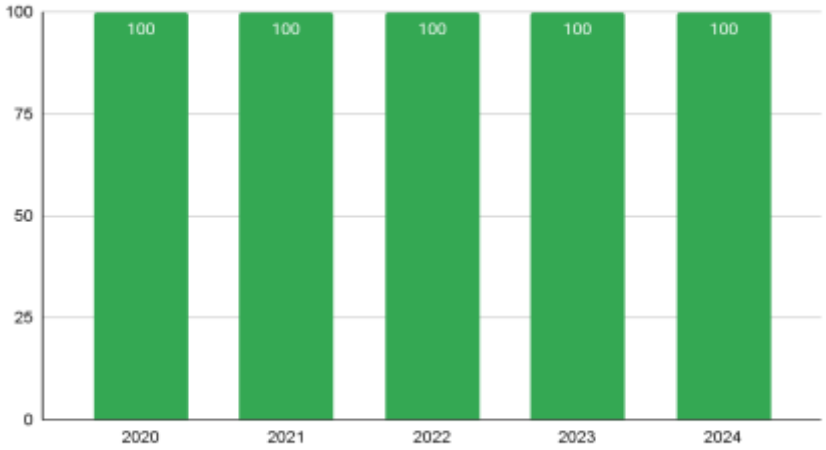

Gambar 2. 74 Indeks Rasa Aman Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngada, 2025

C. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam suatu wilayah. Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Ngada cukup baik dengan nilai 100 dari tahun 2021-2024. Capaian 59,38 pada tahun 2020 terjadi karena adanya Covid-19 sehingga pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban seperti patroli, dsb. tidak berjalan optimal.

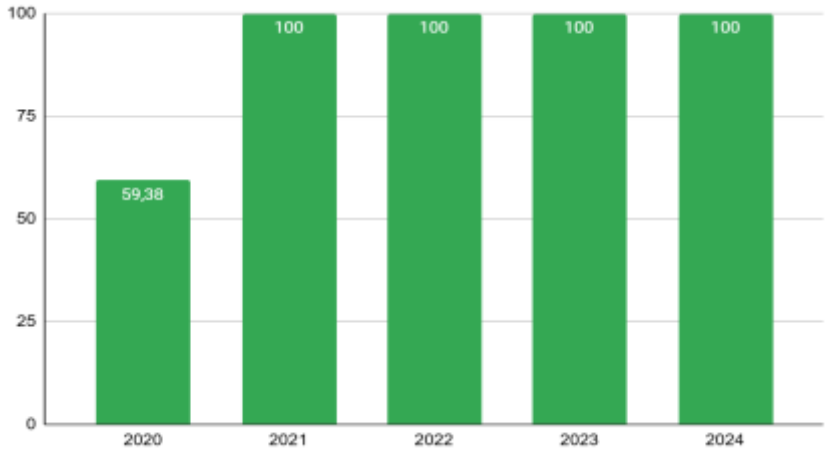

Gambar 2. 75 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngada, 2025

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Sub bab ini menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan yang ditinjau dari indikator tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan untuk Kabupaten Ngada yaitu Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan indikator untuk mengukur daya saing daerah yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD dilakukan dengan menghitung 12 pilar yaitu: (1) Institusi, (2) Infrastruktur, (3) Adopsi TK, (4) Stabilitas ekonomi makro, (5) Kesehatan, (6) Ketrampilan, (7) Pasar produk, (8) Pasar tenaga kerja, (9) Sistem keuangan, (10) Ukuran pasar, (11) Dinamisme bisnis, dan (12) Kapabilitas nasional.

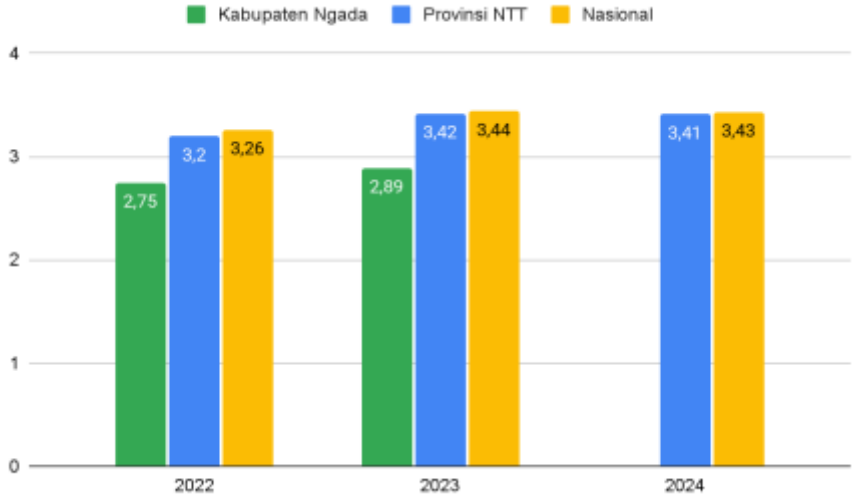

Gambar 2. 76 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022–2024

Sumber: https://brin.go.id, 2025

IDSD Kabupaten Ngada pada tahun 2024 belum tersedia karena masih adanya nilai pilar yang belum terhitung. IDSD Kabupaten Ngada pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 2,75 tahun 2022 menjadi 2,89. Meskipun mengalami peningkatan nilai tersebut masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi NTT. Hal ini mengindikasikan tingkat produktivitas daerah di Kabupaten Ngada masih rendah daripada tingkat produktivitas di Provinsi NTT dan nasional.

Apabila dicermati berdasarkan pilar-pilar penyusun maka dari tahun 2023 sampai 2024 terdapat beberapa pilar yang mengalami peningkatan di antaranya pilar 1 (institusi), 3 (adopsi TK), 4 (stabilitas ekonomi makro), 6 (ketrampilan), 9 (sistem keuangan), 10 (ukuran pasar), 11 (dinamisme bisnis), dan 12 (kapabilitas nasional). Sedangkan, pilar yang mengalami penurunan yaitu pilar 5 (kesehatan), 7 (pasar produk), dan 8 (pasar tenaga kerja). Pilar 2 tentang infrastruktur belum tersedia sehingga nilai IDSD dan kecenderungan pertumbuhan pilar 2 belum dapat dianalisis.

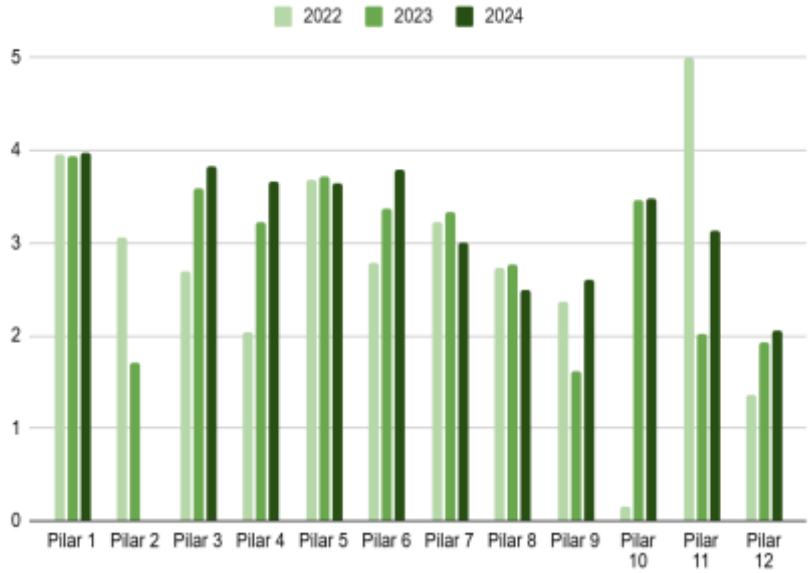

Gambar 2. 77 Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022–2024

Sumber: https://brin.go.id, 2025

2.1.4.4. Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

Indikator urusan pendidikan menggunakan indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada dan menggambarkan kondisi partisipasi sekolah, kompetensi guru dan pelayanan pendidikan lainnya.

Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD HI	Angka	tad	tad	tad	tad	tad
Angka Partisipasi Sekolah SD sederajat	Persen	99,01	98,97	98,76	98,75	98,2
Angka Partisipasi Sekolah SMP sederajat	Persen	96,91	97,32	97,01	97,15	97,16
Indeks Pemerataan Guru	Indeks	tad	tad	tad	tad	10,79
Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	tad	tad	tad	tad	20,35
Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	tad	tad	tad	tad	88
APK PAUD	Persen	17,16	17,71	20,27	21,51	21,51
Angka putus sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,374	0,348	0,184	0,187	0,187
Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,326	0,156	0,227	0,3	0,3
Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	1,028	0,652	0,49	0,54	0,54
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	88,76	99,87	76,57	83,78	83,78

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	89,68	100	85,6	78,22	78,22
Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	tad	tad	tad	tad	50,17
Rasio guru/murid sekolah pendidikan sekolah dasar	Rasio	tad	tad	tad	tad	1:11
Rasio guru terhadap murid pendidikan sekolah menengah pertama	Rasio	tad	tad	tad	tad	1:11
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	tad	tad	tad	tad	97,91

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, 2025

Kondisi pendidikan di Kabupaten Ngada mengalami kondisi yang fluktuatif dan beragam. Hal ini terlihat dari kondisi partisipasi sekolah serta putus sekolah. Angka partisipasi sekolah SD sederajat mengalami sedikit penurunan. Sedangkan angka partisipasi sekolah SMP sederajat mengalami fluktuasi dengan kondisi tahun 2023 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Ngada menunjukkan perbedaan pada tiap jenjangnya, pada jenjang SD sederajat angka putus sekolah konsisten menurun, tetapi pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat terjadi fluktuasi dan apabila dibandingkan antara tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan angka putus sekolah. Dari segi kondisi sekolah, masih terdapat sekolah dalam kondisi tidak bagus baik untuk SD, SMP, ataupun SMA sederajat. Indikator PAUD HI pada tahun 2020-2024, Kabupaten Ngada belum melakukan perhitungan dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

B. Kesehatan

Urusan kesehatan menggunakan indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada termasuk di dalamnya indikator tentang jumlah sumber daya kesehatan, kesehatan ibu, anak dan pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar	Persen	97,75	96,39	91,7	100	92,23
Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar	Persen	100	100	100	99,79	99,86
Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar	Persen	99,5	99,62	98,7	98,7	99,23
Cakupan pelayanan kesehatan pada balita sesuai standar	Persen	91,96	89,7	94	94,11	99,05
Rasio dokter	Per 1.000 penduduk	0,13	0,13	0,12	0,19	0,27
Rasio dokter gigi	Per 1.000 penduduk	0,04	0,02	0,04	0,04	0,06
Rasio perawat	Per 1.000 penduduk	1,58	2,35	2,29	3,38	3,68
Rasio bidan	Per 1.000 penduduk	1,89	2,5	2,51	3,01	3,3
Rasio tenaga promosi kesehatan	Per 1.000 penduduk	tad	tad	tad	tad	0,21
Rasio epidemiolog	Per 1.000 penduduk	tad	tad	tad	tad	0,04
Rasio perekam medik	Per 1.000 penduduk	tad	tad	tad	tad	0,08
Rasio sanitarian	Per 1.000 penduduk	0,13	0,19	0,22	0,32	0,33
Rasio nustrisionist	Per 1.000 penduduk	0,18	0,19	0,28	0,31	0,38
Rasio apoteker	Per 1.000 penduduk	0,22	0,39	0,42	0,48	0,25
Rasio asisten apoteker	Per 1.000 penduduk	0,13	0,19	0,21	0,25	0,28
Rasio analis	Per 1.000 penduduk	0,11	0,28	0,3	0,37	0,54

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan posyandu aktif	Persen	94,5	97,6	99,2	79,9	99,49
Cakupan ketersediaan obat	Persen	98,63	87,78	91,68	95,27	84
Cakupan ketersediaan BMHP	Persen	100	99,72	99,43	87,88	100
Cakupan ketersediaan alat kesehatan	Persen	35,67	37,75	tad	35	37,56
Cakupan produk makanan dan minuman yang sesuai standar	Persen	0	53,33	0	33,33	33,33
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	10,7	5,69	16,98	17,11	14,75
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio dokter umum per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,14	0,14	0,13	0,22	0,21
Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,04	0,02	0,04	0,04	0,05
Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	98	92,1	71,4	95,1	88,83
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100
Rasio puskesmas	Per 1.000 penduduk	0,11	0,12	0,12	0,14	0,14
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	4,49	5,14	4,66	5,39	17,84
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	78,03	66,31	74,66	96,93	169,97
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,002	0,005	0,008	0,008	0,009
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	73,64	63,96	73,23	39,39	20,49
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	97,75	96,39	91,7	100	90,27
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	87,2	96,2	97,1	99,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025

Data di atas menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Ngada mengalami kenaikan pada beberapa indikator dan penurunan pada indikator yang lain. Pada indikator yang terkait dengan ibu hamil dan melahirkan terjadi penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berkebalikan dengan indikator terkait bayi dan balita yang cenderung mengalami kenaikan seperti indikator pelayanan terhadap bayi baru lahir dan balita. Meskipun demikian, angka kematian bayi masih mengalami fluktuasi.

Indikator yang menunjukkan kondisi persebaran penyakit TB seperti penemuan dan penanganan serta tingkat prevalensi mengalami kenaikan. Di sisi lain, kasus TB yang terobati dan sembuh justru mengalami penurunan hampir tiap tahunnya. Sedangkan, indikator terkait rasio dokter dan tenaga kesehatan menunjukkan kondisi yang relatif membaik kecuali untuk apoteker. Meskipun kondisinya membaik, jika dibandingkan dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan rasio dokter dan tenaga kesehatan masih tergolong kurang.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan wajib dasar, khususnya pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong penyediaan infrastruktur dasar yang andal dan merata. Adapun capaian kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani air minum (SPAM)	Persen	6,4	6,64	6,11	8,26	12,56
Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persen	74,69	71,32	75,14	77,47	79,32
Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Tingkat kemantapan jalan	Persen	69,95	44,82	45,8	39,14	47,78
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang kabupaten	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	53,04	53,74	53,74	54,37	55,06
Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	69,95	71,06	71,01	75,04	76,91
Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Persen	69,95	71,06	71,01	75,04	76,91
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	69,95	44,82	45,80	39,15	47,78
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	(Km/Orang)	0,0060	0,0070	0,0070	0,0100	0,0060
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	74,69	71,32	75,14	77,47	79,32
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	45,92	48,03	49,21	50,33	53,09
Rasio jaringan irigasi	Persen	53,05	53,74	54,21	54,37	55,07
Persentase penduduk berakses air minum	Persen	92,36	94,55	95,78	95,41	97,2
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan	Persen	43,55	43,85	44,56	61,13	63,35
Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	tad	tad	tad	0,001706	0,001749
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotan	Persen	tad	tad	tad	0,007	0,0058
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	tad	tad	tad	0,008	0,0013
Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	tad	tad	tad	0,35	0,427
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada, 2025

Secara umum, capaian pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Ngada menunjukkan capaian yang positif. Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk juga menunjukkan capaian yang

cukup baik, bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar di wilayah Provinsi NTT. Namun demikian, untuk menjamin berlangsungnya berbagai kegiatan kewilayahan, peningkatan infrastruktur jalan perlu dilakukan baik berupa peningkatan kuantitas untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan peningkatan kualitas jalan sehingga seluruhnya berada pada kondisi baik.

Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi perlu ditingkatkan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, guna mendukung pencapaian misi Kabupaten Ngada sebagai kawasan agroindustri. Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi ini juga akan berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan menciptakan lahan yang lebih adaptif terhadap krisis iklim. Di sisi lain, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih memerlukan peningkatan, mengingat proporsi eksisting belum memenuhi standar minimal penyediaan ruang hijau yang ditetapkan. Capaian ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan penataan ruang serta menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, capaian pada sektor pelayanan dasar seperti pengelolaan air limbah domestik, sanitasi, dan penyediaan air minum masih memerlukan peningkatan agar sejalan dengan target nasional.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran penting dalam penyediaan hunian layak serta penataan lingkungan permukiman yang sehat dan tertata. Pemerintah Kabupaten Ngada terus berupaya meningkatkan akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman dengan capaian kinerja ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 57 Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase kawasan permukiman yang ditangani	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Rasio rumah layak huni	Unit/Orang	0,13	0,14	0,13	0,13	0,23
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	79,21	79,76	77,62	79,34	86,92
Persentase areal kawasan kumuh	Persen	6	6	6	9,06	9,06
Ketaatan terhadap RTRW	Persen	tad	tad	tad	75	75
Rasio permukiman layak huni	Rasio	tad	tad	tad	tad	tad
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase pemukiman yang tertata	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,34	0,34	0,97	1,89	1,89
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	tad	tad	tad	tad	tad
Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Orang	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan capaian yang cukup memuaskan, ditandai dengan ketersediaan rumah layak huni yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, perlu perhatian lebih terhadap penanganan kawasan kumuh yang justru mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir. Kondisi ini penting untuk segera diatasi guna

mendukung pencapaian misi pembangunan daerah yang lebih inklusif melalui penyediaan ruang wilayah yang adil dan merata.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menggunakan indikator yang relevan untuk mengukur trantibumlinmas di Kabupaten Ngada termasuk di dalamnya penegakan perda, perlindungan masyarakat, serta kesiapsiagaan pertolongan kebencanaan.

Tabel 2. 58 Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	tad	100	100	100	61,67
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase penanganan pasca bencana	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase gangguan trantibum yang ditangani	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen per desa/kelurahan	861	861	861	695	519
Jumlah POL PP	Orang	108	122	123	112	108
Jumlah aparat dan petugas linmas	Orang	1.676	1.676	1.658	1.658	1.276
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	59,38	100	100	100	100
Jumlah kasus pelanggaran K3	Kasus	64	592	89	157	151
Jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani	Kasus	38	592	89	157	151
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Lokasi	14	15	12	17	15
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	14	6,2	5,8	14,88	7,5
Jumlah kasus kebakaran	Kasus	14	15	12	17	15
Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	Kasus	13	11	12	10	14
Jumlah kasus pelanggaran perda	Kasus	12	19	7	5	5
Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani	Kasus	7	11	7	5	5

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngada, 2025

Secara umum capaian kinerja urusan penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Ngada mengalami kenaikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti menurunnya personil, kasus pelanggaran yang berulang karena kesadaran mematuhi peraturan yang belum terbentuk secara optimal. Selain itu, kondisi medan yang menantang menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus di banyak wilayah.

F. Sosial

Indikator urusan sosial menggunakan indikator yang relevan dengan penanganan urusan sosial di Kabupaten Ngada. Capaian kinerja urusan sosial secara umum mengalami fluktuasi pada hampir semua indikator yang tercantum. Kondisi demikian karena Kabupaten Ngada belum dapat memberikan pelayanan sosial ataupun ketahanan ekonomi sosial secara berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya panti yang dimiliki Kabupaten Ngada, sehingga pelaksanaan pemeliharaan penerima bantuan sosial melalui yayasan atau panti yang sudah ada belum optimal. Berikut capaian kinerja urusan sosial Kabupaten Ngada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 59 Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	137	21,3	59	86	110
Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (keluarga)	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap bencana dan pasca bencana sesuai standar (TAGANA)	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	47,3	25,98	59	66	86,77
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	17,28	29.68	65	37	100
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	27,21	21.40	55	56	48,33
Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	68	21,93	56,36	52,62	56,38
Persentase PMKS yang tertangani	Persen	18,88	99,46	8,73	8,30	4,92
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	137,00	21,30	59,00	86,00	110,00
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	60	58	214	86
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	20,9	3,1	3	4,4	103
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ngada, 2025

2.1.4.5. Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Indikator kinerja urusan tenaga kerja menggunakan indikator-indikator yang dicantumkan di Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berdasarkan data indikator kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Ngada tahun 2020–2024, terdapat beberapa tren positif dalam upaya peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Terlihat bahwa angka sengketa pengusaha-pekerja relatif kecil dengan angka fluktuatif yang cenderung membaik serta seluruh kasus perselisihan dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama. Partisipasi pekerja dalam program Jamsostek terus meningkat namun terjadi penurunan pada tahun 2024. Seluruh pendaftar pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi maupun kewirausahaan dapat diberikan pelatihan. Penempatan pencari kerja sempat mencapai puncak pada 2023, meski menurun kembali di 2024, sementara rasio lulusan pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk juga menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan perbaikan kualitas dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Ngada secara bertahap. Berikut merupakan capaian kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 60 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat	Persen	tad	tad	5,97	tad	5

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
produktivitasnya						
Persentase tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri dan luar negeri	Persen	tad	1	7	1	8
Persentase pekerja yang terlindungi dan mendapatkan hak-hak pekerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan	Persen	1226	761	36	567	237
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	3,75	1,38	0,35	4,12	3,05
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	100	100	100	100
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	tad	40,00	22,50	100,00	57,60
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	1,53	1,67	1,82	5,35	0,65
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	tad	tad	100	tad	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	tad	tad	100	tad	tad
Rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk di atas 10 tahun	Persen	8,39	8,92	8,72	9,84	8,72

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada, 2025

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggunakan indikator yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Ngada termasuk tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Secara umum capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan. Beberapa hal yang masih dapat didorong atau ditingkatkan lagi adalah partisipasi perempuan dalam kontestasi politik, kegiatan perekonomian baik formal maupun non formal, serta kesempatan yang lebih luas untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, perlindungan terhadap anak dan perempuan perlu ditingkatkan terutama pada bagian pendampingan hukum, kesehatan, serta psikologis sehingga penanganan terhadap korban tidak hanya berhenti di bagian pelaporan kasus. Belum adanya Anggaran Responsif Gender (ARG) mengindikasikan bahwa isu gender belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam penganggaraan di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 61 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	0	0	0	0	0
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	tad	46,5	57,8	59,2	tad
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	3,81	5,02	4,73	1,93	3,72
Kursi yang dididuduki perempuan di DPRD	Orang	4	4	4	4	0
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	0	0	0,79	0	0
Rasio KDRT	Kasus/ pengaduan	0,05	0,01	0,04	0,02	0,02
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	Persen	0	0	0	0	0

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	62,86	65,19	72,23	70,47	83,57
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	69,44	45,45	36,84	50	58,06
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	0	0	0	0	0
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	95,83	100
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	95,83	100
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	0,989	0,995	1,019	1,007	0,995
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	1,198	0,985	1,258	1,064	1,21
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	0,613	0,617	0,613	0,511	0,851
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Rasio	0,032	0,028	0,025	0,032	0,019
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	1	0,997	0,99	1,002	1,015
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	Persen	46,91	47,24	47,51	48,56	tad
Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	Persen	2,94	2,11	2,06	0,86	tad

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada, 2025

C. Pangan

Indikator kinerja urusan pangan menggunakan indikator-indikator yang dicantumkan di Permendagri No. 86 Tahun 2017. Ketersediaan pangan utama per kapita di Kabupaten Ngada menunjukkan tren penurunan dari 28.297 kg/jiwa/tahun pada tahun 2020 menjadi 22.857 kg/jiwa/tahun pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kecukupan pasokan pangan bagi masyarakat. Penurunan ini berpotensi berdampak negatif terhadap ketersediaan energi dan protein yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kesehatan dan produktivitas penduduk. Di sisi lain, upaya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan menunjukkan adanya peningkatan signifikan walaupun tidak diadakan pengawasan dan pembinaan pangan pada tahun 2021-2023, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga mutu dan keamanan pangan yang beredar. Berikut merupakan capaian kinerja yang terkait dengan urusan pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 62 Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Skor pola pangan harapan	Nilai	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan pangan utama	Kg/Orang/tahun	28.297	26.290	25.632	26.408	22.857
Ketersediaan energi per kapita	Kkal/Orang/Hari	tad	tad	tad	tad	tad
Ketersediaan protein per kapita	Gram/Orang/Hari	tad	tad	tad	tad	tad
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	90,3	tad	tad	tad	96,63

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

D. Pertanahan

Urusan pertanahan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Pengelolaan pertanahan yang baik menjadi dasar bagi terciptanya kepastian ruang, legalitas hak atas tanah, serta keteraturan dalam pemanfaatan wilayah. Capaian kinerja urusan pertanahan Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	m^2	na	na	na	2400	na
Persentase kejelasan hak milik atas tanah	Persen	tad	tad	tad	90	tad
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	tad	tad	tad	0,0088	tad
Penyelesaian kasus tanah negara	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Penyelesaian izin lokasi	Persen	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Ngada menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun tidak tercatat adanya kasus pertanahan dalam dua tahun terakhir, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ideal. Implikasinya, peningkatan kinerja perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum atas hak kepemilikan, mencegah konflik lahan di masa depan, serta mendukung keterpaduan antara kebijakan pertanahan dan tata ruang.

E. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup berperan penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek pelestarian alam, pengelolaan sumber daya alam secara efisien, serta pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 64 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase RTH	Persen	0,00179	0,00179	0,00179	0,00179	0,00179
Persentase limbah B3 yang terkelola	Ton	0	0	0	82.76	86
Indeks Kualitas Air	Poin	0	66,67	67,78	62,5	61,67
Indeks Kualitas Udara	Poin	0	88,11	89,62	90,33	94,91
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	Persen	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0	0	0	0	24,4
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Pengaduan	0	0	7	6	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan lingkungan hidup masih memerlukan peningkatan, ditandai dengan rendahnya persentase pengelolaan limbah B3 dan masih adanya pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Meskipun jumlah pengaduan ini menunjukkan adanya penurunan, kondisi ini mengindikasikan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dengan ketentuan lingkungan yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan masih belum optimal. Pengelolaan limbah B3 yang belum maksimal menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku serta mencegah potensi pencemaran lingkungan.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Kinerja administrasi penduduk dan pencatatan sipil secara umum mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan kesadaran tentang administrasi kependudukan di masyarakat mulai meningkat. Selain mengandalkan kesadaran masyarakat, dapat juga terjadi karena adanya sosialisasi yang masif dari pihak terkait serta kemudahan pengurusan administrasi. Berdasarkan indikator yang terdapat dalam tabel berikut diketahui administrasi terkait akta kelahiran dan akta nikah masih perlu diberikan perhatian lebih.Berikut merupakan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 65 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persen	tad	tad	tad	tad	0,38
Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Persen	tad	tad	tad	tad	23,44
Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Persen	tad	tad	tad	tad	0
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	86,12	87,89	88,59	89,94	95,13

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	69,05	71,39	86,13	86,07	87,92
Rasio pasangan berakte nikah	Persen	49,95	52,14	56,52	60,51	66,18
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	86,12	87,89	88,59	89,94	95,13
Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	34,56	36,57	41,96	43,34	46,77
Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk	Persen	34,56	36,57	41,96	43,34	46,77
Persentase penduduk meninggal berakte kematian	Persen	100	100	100	100	100
Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data	Persen	100	100	100	100	100
Rasio perekaman KTP-elektronik dan keluarga yang ber KK	Persen	92,8	93,69	94,05	94,26	97,33
Rasio perekaman KTP-elektronik, keluarga yang ber KK dan penerbitan KIA	Persen	63,08	67,19	70,02	70,6	72,88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, 2025

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator pemberdayaan masyarakat dan desa menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 66 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	0.00	25,81	0.00	0.00	0.00
Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	8,64
Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Persen	100	100	100	100	69,04
Persentase fasilitasi kerja sama desa	Persen	100	100	100	100	100
Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	27,13
Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		132	132	132	187	187
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	69,05	71,39	86,13	86,07	87,92
Persentase LPM berprestasi	Persen	49,95	52,14	56,52	60,51	66,18
Cakupan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	49,95	52,14	56,52	60,51	66,18
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	135	135	135	135	135
Cakupan kelompok binaan PKK	Persen	100	100	100	100	100
Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100
Persentase posyandu aktif	Persen	100	97,29	99,19	100	99,48
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	7,16	6	1,64	1,02	3,63

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada, 2025

Pemberdayaan masyarakat dan desa secara umum masih belum optimal. Beberapa indikator yang menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa di antaranya fasilitasi penataan desa, pemberdayaan LKD, peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD, serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Namun, di sisi lain terjadi juga upaya yang terus membaik melalui LPM. Selain itu, persentase PKK dan posyandu yang aktif juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Artinya, upaya pemberdayaan yang ada sekarang sudah ada dan berjalan baik pada beberapa sisi tetapi masih perlu pemerataan dan perbaikan sehingga bisa berjalan lebih optimal.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 67 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan pengendalian penduduk di daerah	Persen	tad	tad	tad	tad	0
Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	tad	tad	tad	tad	22,7
Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	tad	tad	tad	tad	55,45
Total Fertility Rate (TFR)	Angka	tad	3,7	1,57	1,35	1,24
Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen	tad	tad	20	20	20
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	tad	tad	1,51	1,58	1,69
Rasio akseptor KB	Persen	65,15	61,97	52,88	54,81	56,90
Jumlah peserta KB aktif	Orang	12.087	12.615	9.459	10.209	11.038
Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	Persen	65,15	43,34	52,37	54,5	55,45
Tingkat prevalensi kesertaan KB pria	Persen	1,8	tad	tad	tad	tad
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	65,15	61,97	52,88	54,81	56,9
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (permasal 15-19)	Angka	tad	12,85	12,98	10,22	7,7
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	Persen	tad	tad	1,8	0,89	1,77
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	16,88	6,32	38,64	28,1	15,75
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	56,4	tad	54,16	56	51,38
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	48	tad	65,09	60,99	71,52
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	0	tad	67,58	78,86	81,17
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	0	tad	46,65	49,64	42,3
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	0	tad	35,99	37,97	21,46
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	0	0	100	100	100
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Persen	tad	216,67	375	258,33	358,33
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	0	0	29,17	39,74	41,99
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	3	3	3	2,2	2,2

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	120,8	118,67	130,01
Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	75	100	100	100	100
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Persen	tad	5	14	32	100
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	0	0	0,02	0,02	0,006
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	48,6	63,2	64,79	64,56	71,94
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	0	0	45,88	62,53	68,65

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, 2025

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan nilai yang beragam. Namun yang perlu menjadi catatan adalah dengan TFR yang tergolong rendah bahkan lebih rendah daripada target nasional maka perlu diperhatikan bagaimana perkembangan penduduk di Kabupaten Ngada ke depan. Selain membahas tentang keluarga secara kuantitatif perlu diperhatikan juga aspek kualitas dalam membentuk keluarga yang baik. Berdasarkan data pada tabel, belum semua keluarga melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sehingga perlu adanya perhatian dalam hal ini. Sedangkan, pada bagian pengendalian penduduk perlu adanya dorongan kepada para laki-laki untuk memahami dan ikut serta dalam program KB.

I. Perhubungan

Urusan perhubungan berperan penting dalam menjamin konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas barang dan orang. Peningkatan aksesibilitas transportasi menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Capaian kinerja urusan perhubungan Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 68 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Konektivitas darat	Bobot	27,36	34,65	37,05	39,41	39,41
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	7.560	9.798	11.287	25.883	55.971
Rasio ijin trayek	Nilai	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	0	852	973	1026	1591
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	6	6	6	6	6
Persentase layanan angkutan darat	Persen	75	75	75	75	75
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	0	0	0	0	12
Pemasangan rambu-rambu	Buah	250	182,3	60	59	0
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/KM	16,71	21,27	18,9	19,47	tad
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	7.560	9.798	11.287	25.883	55.971
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Unit	tad	tad	33.367	28.476	29.900
Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	154.799	146.681	183.701	202.509	124.380
Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Unit	26.687	164.492	241.973	728.338	534.206

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan perhubungan memerlukan peningkatan, terutama dalam hal perizinan operasional angkutan umum yang masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan yang beroperasi belum terdata secara resmi, sehingga tidak diketahui kondisi teknis, pemenuhan standar keselamatan, maupun kualitas pelayanannya. Apabila tidak direspons dengan kebijakan yang tepat, hal ini dapat berdampak pada keselamatan pengguna, kepastian hukum, serta tata kelola sistem angkutan umum. akan berimplikasi pada keselamatan pelayanan dan legalitas sistem angkutan umum. Selain itu, rendahnya jumlah izin trayek juga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan operasional angkutan. Di sisi lain, keberadaan terminal di Kabupaten Ngada saat ini baru mencakup 25 persen (tiga terminal di tiga kecamatan dari total 12 kecamatan) dari total jumlah kecamatan, yang masing-masing berlokasi di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, dan Kecamatan Golewa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas terminal yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan layanan transportasi antarwilayah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan simpul transportasi berupa terminal, baik pembangunan baru maupun peningkatan fungsi terminal eksisting, perlu diarahkan pada kecamatan-kecamatan dengan peran strategis dan intensitas pergerakan yang tinggi, guna mendukung konektivitas wilayah secara merata.

J. Komunikasi dan Informatika

Indikator komunikasi dan informatika menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut merupakan capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 69 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persen	0	0	0	0	0
Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	tad	3,7	49,43	55,31	60
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	tad	17,66	14,19	14,53	11,41
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk *Facebook. Twitter. BBM. Whatsapp*) dalam 3 bulan terakhir	Persen	33,83	46,47	49,33	48,51	54,26
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir (persen)	Persen	46,51	52,93	54,43	51,8	54,4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada, 2025; BPS Kabupaten Ngada, 2025

Kondisi komunikasi dan informatika Kabupaten Ngada terutama telekomunikasi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari cakupan layanan telekomunikasi yang baru mencapai 60 persen. Selain itu, persentase penduduk yang mengakses internet juga mengalami fluktuasi dengan capaian pada tahun 2024, yaitu sebesar 54,26 persen. Nilai tersebut juga tidak berbeda jauh dengan kepemilikan HP sebesar 54,4 persen. Sedangkan, rumah tangga yang memiliki komputer pribadi cenderung menurun dan relatif terbalik dengan kepemilikan HP yang berfluktuasi meningkat. Belum optimalnya urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Ngada dapat menjadi masalah karena dapat menjadi penghambat dalam proses digitalisasi di Kabupaten Ngada baik oleh masyarakat awam, pengusaha, pemerintah, maupun yang lainnya.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah menggunakan indikator-indikator yang dicantumkan di Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berikut capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 70 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	5
Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	0,09	0,09	0,09	0,09	8,91
Pertumbuhan wirausaha	Persen	tad	tad	tad	tad	1,68
Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	41	42	43	44	45
Persentase koperasi aktif	Persen	41	42	43	44	45
Jumlah koperasi aktif	Unit	98	50	59	54	54
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	66	86	79	79	88
Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	20	40	45	42	42
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	1	3	4	4	5
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	89	196	342	343	568

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada, 2025; BPS Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2020–2024, terjadi fluktuasi jumlah koperasi aktif yang menunjukkan penurunan signifikan dari 98 unit pada tahun 2020 menjadi 54 unit pada tahun 2024. Di sisi lain, terjadi peningkatan persentase UKM non BPR/LKM aktif dari 66 persen pada tahun 2020 menjadi 88 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan peningkatan partisipasi dan keberlangsungan usaha UKM di luar lembaga keuangan mikro. Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM juga mengalami peningkatan dari 20 unit pada tahun 2020 menjadi 42 unit pada tahun 2024, meskipun sempat mencapai puncaknya di angka 45 unit pada tahun 2022. Adapun jumlah usaha mikro dan kecil meningkat secara konsisten dari 89 unit pada tahun 2020 menjadi 568 unit pada tahun 2024, mencerminkan dinamika pertumbuhan usaha kecil dan mikro di Kabupaten Ngada yang cukup signifikan. Data ini menunjukkan adanya tren positif dalam pengembangan UKM, meskipun masih perlu perhatian terhadap penguatan kelembagaan koperasi.

L. Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan penanaman modal menggunakan indikator-indikator yang dicantumkan di Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 71 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi total terhadap target Investasi	Persen	tad	5.16	3.36	2.13	10,94
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	tad	tad	tad	tad	0,48
Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	Persen	tad	tad	tad	tad	80
Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	tad	tad	tad	tad	1,25

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	tad	tad	11	32	80
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	tad	tad	tad	1	2
Nilai investasi PMA	Miliar Rupiah	Tidak Ada PMA	Tidak Ada PMA	Tidak Ada PMA	129,93	45,14
Nilai investasi PMDN	Miliar Rupiah	15,07	122,75	384,57	136,82	116,33
Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	tad	tad	2,96	2,40	2
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Miliar Rupiah	-27,23	107,68	261,83	-247,75	-20,49
Pertumbuhan investasi	Persen	-0,64	7,15	2,13	-0,31	0,18

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada, 2025

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Ngada 2020-2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Jumlah investor berskala nasional yang tercatat sebanyak 1 investor pada tahun 2023, kemudian menjadi 2 investor pada tahun 2024 dan investasi asing mulai masuk dalam dua tahun terakhir. Nilai investasi dalam negeri mengalami naik turun yang tajam, mencerminkan ketidakstabilan, dan daya serap tenaga kerja cenderung menurun. Pertumbuhan investasi juga terlihat tidak konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan perlunya strategi yang lebih berkelanjutan untuk menarik dan mengoptimalkan investasi di daerah.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Indikator kepemudaan dan olahraga menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 72 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio kewirausahaan	Rasio	0	0	0,09	0	0,2
Persentase atlet yang masuk pelatnas	Persen	0	0	0	0	0,02
Persentase partisipasi peserta didik dalam kepramukaan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Cakupan pembinaan olahraga	Persen	0	0	50	60	70
Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	35	35	40	45	45
Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	0	0	70	70	80
Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	150	176	80	80
Jumlah prestasi olahraga	Cabor	0	tad	7	1	2
Rasio lapangan olahraga	Per 1.000 penduduk	65	65	65	65	65
Jumlah organisasi olahraga	Buah	14	14	14	14	14
Jumlah kegiatan olahraga	Buah	97	98	98	99	96
Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	97	98	98	99	96
Persentase wirausaha muda	Persen	0	0,03	0,09	0	0,2

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga secara umum mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti pelatih tersertifikasi yang baru 45 persen pada tahun 2024 serta pembinaan terhadap wirausaha muda. Selain itu, terdapat indikator yang

berfluktuasi selama tahun 2020-2024 yaitu persentase organisasi pemuda yang aktif. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda perlu adanya pembinaan terhadap organisasi pemuda terutama untuk keberlanjutan organisasi yang ada.

N. Statistika

Indikator statistika menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan statistika Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 73 Indikator Kinerja Urusan Statistika Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	tad	tad	tad	tad	2,71
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	tad	tad	tad	tad	Ada
Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: https://ngadaKabupatenbps.go.id, 2025

Kabupaten Ngada telah menyediakan buku kabupaten dalam angka dan buku PDRB dari tahun 2020–2024 dan dapat diakses melalui laman resmi BPS Kabupaten Ngada. Berdasarkan nilai Indeks pembangunan statistiknya pada tahun 2024, Kabupaten Ngada termasuk baik dan mengindikasikan sistem statistik di Kabupaten Ngada cukup baik.

O. Persandian

Indikator persandian menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Persandian belum menjadi prioritas di Kabupaten Ngada. Hal ini terlihat dari penerapan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang tidak terlaksana.

Tabel 2. 74 Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada, 2025

P. Kebudayaan

Indikator kebudayaan menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 75 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	tad	tad	tad	tad	85,32
Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	tad	tad	tad	tad	0,88
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Angka	tad	tad	tad	tad	0,67
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	1	0	1	1	1
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	561	561	561	561	561
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	57	57	57	57	57
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	146	146	146	146	182
Jumlah grup kesenian	Unit	52	52	52	52	52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan kebudayaan secara umum tidak berubah kecuali jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Meskipun tidak terlihat adanya kenaikan pada indikator lainnya, kenaikan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengindikasikan mulai adanya perhatian untuk pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Ngada.

Q. Perpustakaan

Indikator perpustakaan menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 76 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	tad	tad	61,53	tad	60,30
Persentase koleksi dan naskah kuno yang dimiliki	Persen	tad	tad	tad	tad	33
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1499	1033	3170	8253	4657
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	1499	1033	3170	8253	4657
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	Persen	0.91	0,62	1,89	4,82	45,84
Jumlah perpustakaan	Unit	326	326	326	326	326
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Perpustakaan/ Orang	1,76	1,74	1,72	1,9	1,9
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah	Judul	10.000	10.700	8.688	11.661	12.028
Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	Persen	1	1	2	5	3
Jumlah koleksi eksemplar buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	21.700	21.700	21.746	21.748	23.964
Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28
Persentase perpustakaan terakreditasi	Persen	tad	tad	1,01	1,01	1,01

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan perpustakaan secara umum menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Namun, perlu adanya upaya untuk menarik perhatian masyarakat supaya datang ke perpustakaan. Selain dari pengelolaan perpustakaan secara langsung seperti upaya memenuhi akreditasi perpustakaan, adanya perpustakaan digital dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap perpustakaan. Penyelenggaraan kegiatan literasi yang interaktif juga dapat menjadi ajang untuk menarik perhatian masyarakat ke perpustakaan. Indikator seperti tingkat kegemaran membaca dan kepemilikan naskah kuno belum menunjukkan hasil yang baik karena belum dilakukannya kegiatan terkait.

R. Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan menggunakan capaian dari indikator-indikator yang yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan kearsipan Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 77 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat ketersediaan arsip	Persen	75	75	75	75	75
Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	47,61	76,19	66,6	45,2	76,19
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	tad	tad	tad	tad	5
Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan	Kegiatan	tad	tad	tad	tad	tad

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Perangkat Daerah	20	32	28	19	32

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan pengelolaan kearsipan di Kabupaten Ngada masih cenderung naik turun. Hal ini terlihat dari fluktuatifnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Sedangkan, dari sisi lain, SDM pengelola kearsipan masih belum menjadi perhatian, terlihat dari minimnya peningkatan SDM pengelola kearsipan serta kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan.

2.1.4.6. Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Capaian kinerja urusan pariwisata dilihat dengan menggunakan indikator-indikator yang dicantumkan di Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berikut capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Ngada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 78 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	tad	tad	tad	tad	32,47
Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	25.92	30.92	35.92	40.92	45.92
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	24.72	28.19	29, 35	31.74	32.47
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	25.92	30.92	35.92	40.92	45.92
Kunjungan wisata	Orang	70.675	57.603	126.384	122.988	126.049
Lama kunjungan wisata	Hari	tad	tad	tad	tad	tad
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	3,89	4,61	5,68	5,33	8,23
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	7,89	0,06	5,85	20,24	43,5
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Ngada	Persen	1,23	4,35	18,09	19,81	16,45

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025; Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2021-2026

Capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Ngada selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang positif. Jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah masa pemulihan dari pandemi, yang turut mendorong kontribusi sektor ini terhadap pendapatan asli daerah. Pertumbuhan wisatawan mancanegara menunjukkan lonjakan yang cukup tajam, mencerminkan meningkatnya daya tarik destinasi lokal bagi wisatawan global. Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara juga mencerminkan efektivitas promosi dan pengembangan destinasi. Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perlu terus didukung melalui penguatan infrastruktur, promosi, serta peningkatan kualitas layanan kepariwisataan.

B. Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian dilihat melalui indikator-indikator yang dicantumkan di Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berikut capaian kinerja urusan pertanian Kabupaten Ngada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 79 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Modal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan produksi tanaman pangan:						
- Padi	Ton	58.509	50.115	43.012	37.674	47.285
- Jagung	Ton	23.130	18.527	20.109	20.691	14.226
- Kedelai	Ton	tad	43	37	262	12
- Hortikultura	Ton	12	14	16	18	20
Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	tad	tad	tad	tad	2
Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar	7.318	7.318	7.318	7.318	14.880,33
Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	43	47	50	55	65
Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	0	0	5	10	15
Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	0	0	0	0	0
Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	60	65	70	75	76
Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	4,43	3,54	5,1	10,17	6,95
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/ha	56	54	54	54	53
Cakupan bina kelompok petani	Persen	85	87	90	90	92

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan capaian kinerja urusan pangan pada periode 2020-2024, aspek kelembagaan petani memiliki tren positif dengan meningkatnya cakupan bina kelompok petani. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani secara berkelanjutan sebagai landasan penting untuk mendorong peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan daerah di masa mendatang. Di sisi lain produktivitas bahan pangan utama mengalami sedikit penurunan, yang mengindikasikan perlunya perhatian terhadap peningkatan kualitas lahan, teknologi budidaya, dan dukungan sarana produksi.

Sebagai pelengkap sektor pertanian yang menjadi tumpuan utama ketahanan pangan daerah, capaian kinerja urusan peternakan juga memegang peranan penting dalam mendukung diversifikasi sumber pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian kinerja urusan peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 80 Indikator Kinerja Urusan Peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi peternakan:						
a. Sapi	Ton	tad	tad	432,2	313,7	313,1
b. Kambing	Ton	tad	tad	12	13	8,4
c. Ayam	Ton	tad	tad	22	25,1	29
d. Babi	Ton	tad	tad	559	311,7	246
e. Telur	Butir	tad	tad	37.450	54.000	627.594
Persentase kelompok ternak yang menerapkan IPTEK produksi	Persen	0	0	7	15,13	19,7
Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai	Persen	0	0	40	60,05	65,7
Tingkat kematian ternak	Persen	0	0	0,09	0,03	0,41
Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul	Persen	0	0	40	50	60

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kelahiran ternak	Ekor	0	0	393	137	105
Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/mencukupi	Persen	0	0	3	4,6	65,7
Persentase toko pakan ternak yang terdaftar	Persen	0	0	20	30	60
Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis	Persen	0	0	tad	17,7	24
persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP	Persen	0	0	23	17,7	24
Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASUH	Persen	0	4	4	4,6	4,6
Persentase peningkatan populasi ternak (ternak besar dan unggas)	Persen	tad	0	27,8	29,35	31
Persentase produk hasil ternak yang bersertifikat ASUH	Persen	0	10	9,86	9,86	9,90

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Ngada, 2025; Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

Capaian kinerja urusan peternakan menunjukkan perkembangan positif dalam aspek kelembagaan, manajemen budidaya, dan penerapan standar mutu. Meskipun produksi beberapa komoditas ternak mengalami penurunan, capaian lain seperti peningkatan populasi ternak, penerapan teknologi produksi, serta standar keamanan pangan dan kesehatan hewan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ketersediaan pakan yang memadai, peningkatan akses sarana, dan pengelolaan berbasis SOP turut mencerminkan peningkatan kapasitas peternak lokal. Hal ini menjadi indikasi bahwa penguatan sistem peternakan telah berjalan ke arah yang lebih baik dan perlu terus didorong untuk mendukung ketahanan pangan hewani serta kesejahteraan peternak di tingkat lokal.

C. Perdagangan

Capaian kinerja urusan perdagangan dilihat dari indikator-indikator yang tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berikut capaian kinerja yang terkait dengan urusan perdagangan Kabupaten Ngada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 81 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	72,77	76,18	76,18	76,18	76,18
Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	5,67	5,77	5,82	5,77	4,23
Nilai ekspor barang	Rupiah	4.419.000.000	19.802.000.000	7.600.000.000	5.500.000.000	5.000.000.000
Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	10,52	11,05	11,10	12,27	13,15
Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	0,65	1,61	2,58	2,58	0,65
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	1.370	1.210	1.250	1.300	1.375

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, 2025; Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

Capaian kinerja urusan perdagangan menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha, khususnya kelompok pedagang dan sektor informal. Jumlah cakupan bina kelompok pedagang terus meningkat selama periode evaluasi, yang mencerminkan penguatan kapasitas pelaku usaha kecil dalam mendukung distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Ngada.

D. Perindustrian

Capaian kinerja urusan perindustrian menunjukkan tren yang relatif positif, ditandai dengan peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang cukup konsisten selama lima tahun terakhir. Meskipun cakupan bina kelompok pengrajin mengalami fluktuasi, namun secara umum terdapat upaya pembinaan yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pelaku industri lokal. Hal ini mengindikasikan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan sektor industri kreatif dan kerajinan sebagai salah satu potensi unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut capaian kinerja yang terkait dengan urusan perindustrian Kabupaten Ngada tahun 2020-2024,

Tabel 2. 82 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	4,56	4,78	5,12	5,23	5,26
Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Persen	0	0,06	0,06	0,32	2,42
Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	2,42	2,5	7,4	3,3	5,65
Jumlah IKM	Unit	2478	2403	2434	2726	3097

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, 2025; Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

E. Transmigrasi

Capaian kinerja urusan transmigrasi yang dilihat dari persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan menunjukkan sebesar 0,24 persen pada tahun 2024. Sementara luas kawasan transmigrasi yang berkembang mencapai 0,0018 persen. Sementara itu, data untuk persentase program transmigrasi yang dilaksanakan belum tersedia.

Tabel 2. 83 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persen	tad	tad	tad	tad	0,24
Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen	tad	tad	tad	tad	0,0018

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada, 2025

F. Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Ngada selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di berbagai aspek. Produksi perikanan, baik budidaya maupun tangkap, mengalami peningkatan tajam, yang mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan dan dukungan terhadap pelaku usaha perikanan lokal. Peningkatan angka konsumsi ikan per kapita menunjukkan perbaikan pola konsumsi masyarakat menuju gizi yang lebih baik. Selain itu, cakupan pembinaan kelompok nelayan meningkat secara konsisten, mengindikasikan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan. Nilai tukar nelayan yang cenderung stabil juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nelayan relatif terjaga, yang penting untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan daerah. Berikut capaian kinerja yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Ngada tahun 2020-2024,

Tabel 2. 84 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg	579.196	138.909	523.921	1.589.004	1.735.000
Jumlah produksi perikanan tangkap	Kg	2.402.345	5.805.309	1.649.314	772.274	1.410.206

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/ Tahun	16,78	19,25	25,36	36,19	37,25
Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	20	23	51,6	51,6	93,3
Nilai tukar nelayan	Nilai	91,58	93,95	94,2	95	92,75

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Ngada, 2025

2.1.4.7. Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Indikator perencanaan pembangunan menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan situasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngada. Berikut merupakan capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 85 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
Penjabaran konsisten program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	99	99	98	98	98

Sumber: Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngada, 2025

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngada sudah konsisten dari tahun ke tahun dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan yang dibutuhkan. Kemudian ditinjau dari penjabaran konsistensinya sudah cukup baik dengan nilai yang sudah 100 untuk penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, dan mendekati 100 untuk penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD.

B. Keuangan

Indikator keuangan menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 86 Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	tad	tad	tad	tad	30,5

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	tad	tad	tad	tad	21,61
Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	tad	tad	tad	tad	89,66
Persentase penurunan SILPA	Persen	tad	tad	tad	tad	-1,3
Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	tad	tad	tad	tad	88,9
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	tad	tad	tad	tad	4,26
Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	tad	tad	tad	tad	4 objek PAD
Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	tad	tad	tad	tad	95,9
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (Realisasi)	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase belanja pendidikan (20%) (Realisasi)	Persen	12,47	25,27	26,74	29,41	tad
Persentase belanja kesehatan (10%) (Realisasi)	Persen	11,08	18,05	19,15	19,22	tad
Perbandingan antara belanja langsung (BL) dengan belanja tidak langsung (BTL) (Realisasi)	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber: LKPD Kabupaten Ngada 2020-2023 Audited; DJPK Kementerian Keuangan, 2025; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada, 2025

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan situasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 87 Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	Persen	0	65,74	0	100	100,00
Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	100	100	100	100	100
Persentase ASN berpendidikan minimal S1	Persen	54,29	57,96	59,68	61,49	62,35
Persentase ASN dengan SKP minimal bernilai baik	Persen	tad	43,86	62,49	89,26	67,24
Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	Persen	0,32	0,16	0,00	0,06	0,13
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	tad	tad	tad	tad	tad
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	31	28	28	32	29
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	121	139	139	148	138
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.825	1.953	1.911	1.817	2.004
Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	62,82	59,04	59,23	60,41	66,75
Persentase pejabat struktural yang lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP	Persen	48,21	48,21	48,04	46,39	50,68
Persentase ASN yang lulus Diklat Dasar (LATSAR)	Persen	100	100	100	100	100
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Pelajaran	908	908	908	511	511
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	48,21	48,21	48,04	46,39	50,68
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	49,15	54,95	44,99	44,22	44,33

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan menunjukkan peningkatan meskipun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih naik turunnya capaian terkait ASN yang

mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun struktural. Selain itu, belum sepenuhnya ASN yang memiliki SKP bernilai baik serta masih adanya pelanggaran disiplin yang terjadi walaupun semakin berkurang.

D. Penelitian dan Pengembangan

Indikator penelitian dan pengembangan menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan kondisi kelitbangan di Kabupaten Ngada. Berikut capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Ngada tahun 2020–2024.

Tabel 2. 88 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Persen	tad	tad	tad	tad	0
Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	tad	tad	tad	tad	0
Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Persen	tad	tad	tad	tad	7,69
Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah		tad	tad	tad	tad	0
Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	0	0	0	0	0
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	10	0	0	0
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	0	0	100	100	100
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	0	0	20	20	10
Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100	100
Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber: Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngada, 2025

Kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Ngada secara kuantitas masih tergolong rendah dengan penerapan hasil kelitbangan yang hampir selalu nol. Kemudian, kebijakan inovasi yang diterapkan juga masih rendah. Sedangkan, di sisi fasilitasi sebenarnya cukup bagus dengan 100 persen fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah.

E. Pengawasan

Pengawasan di pemerintah Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih adanya celah-celah tertentu pada penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya konsistensi kinerja sehingga pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan temuan-temuan kesalahan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Adapun indikator berkaitan dengan WBK-WBMM masih bernilai 0 karena belum dilaksanakan pada periode tahun 2020-2024.

Tabel 2. 89 Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	75	75	72	70	70
Persentase unit kerja yang mendapatkan predikat WBK-WBBM	Level	0	0	0	0	0
Persentase tindak lanjut temuan	Persen	55	55	70	69	72,4
Jumlah temuan BPK	Temuan	11	8	7	22	9

Sumber: Inspektorat Kabupaten Ngada, 2025

F. Sekretariat Dewan

Sekretariat dewan Kabupaten Ngada menunjukkan kinerja yang baik dengan selalu tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait. Berikut capaian kinerja urusan sekretariat dewan Kabupaten Ngada tahun 2020-2024

Tabel 2. 90 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ketepatan penetapan perda APBD tahun N	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
Persentase penetapan ranperda tahun N	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persen	tad	tad	tad	tad	100
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Laporan	ada	ada	ada	ada	ada
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Program	ada	ada	ada	ada	ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD	Program	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, 2025

G. Sekretariat Daerah

Indikator sekretariat daerah menggunakan indikator-indikator yang telah disesuaikan dengan fungsi dan tugas yang berkaitan. Indikator yang berkaitan dengan urusan sekretariat daerah menunjukkan hasil yang membaik dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, masih terdapat indikator yang dapat ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang seperti indikator kematangan organisasi, efektifitas pelaksanaan administrasi pembangunan, serta tingkat kematangan UKPBJ.

Tabel 2. 91 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kematangan organisasi	Skor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase produk hukum yang dihasilkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	98,2
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan otonomi daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Terlaksananya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Status	tad	tad	tad	tad	tad
Efektivitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	91
Efektivitas pemantauan kebijakan sumber daya alam	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan	Persen	36,35	41,15	48,55	68,22	69,62
Tingkat kematangan UKPBJ	Level	1	1	2	2	2

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, 2025

H. Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator urusan kesatuan bangsa dan politik menggunakan indikator-indikator yang disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik sosial, pembinaan partai politik, dsb.

Tabel 2. 92 Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	tad	100	100	100	100
Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah	tad	tad	tad	tad	tad

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Partai	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	100	89	77,19
Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayatan kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada, 2025

Secara umum urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari semakin menurunnya jumlah konflik sosial, meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi sosial dan politik. Meskipun demikian, masih adanya konflik sosial yang terjadi mengindikasikan masih adanya celah di masyarakat yang bisa menjadi konflik.

2.1.5. Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026

2.1.5.1. Capaian Misi

Secara umum pencapaian kinerja indikator sasaran dan indikator kinerja per misi RPJMD periode 2021-2023 dibandingkan target akhir RPJMD termasuk cukup baik dimana kelima misi dicapai dengan nilai rata–rata 86,94 persen atau mencapai kategori tinggi. Dengan capaian masing-masing misi sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Capaian Misi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

No	Misi	Capaian Indikator					Persentase
		SR	R	S	T	ST	
1	Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	2	0	1	2	3	91,52
2	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	3	0	3	4	11	79,4
3	Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pelayanan dasar	3	0	1	1	9	90,41
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani	3	0	2	3	2	72,39
5	Memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui transformasi institusi budaya	2	0	0	1	4	100,98
Rata-rata capaian misi							**86,94**

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026, 2025

Keterangan:

SR : Sangat Rendah
R : Rendah
S : Sedang
T : Tinggi
ST : Sangat Tinggi

Selama periode pelaksanaan RPJMD tahun 2021–2026, Pemerintah Kabupaten Ngada telah mengupayakan pencapaian lima misi pembangunan daerah. Upaya tersebut difokuskan pada pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta penguatan kelembagaan dan ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi pertama, pengembangan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata (TANTE NELA PARIS), menunjukkan capaian rata-rata sebesar 91,52 persen yang termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini ditopang oleh pencapaian indikator tujuan yang sebagian besar berada pada kategori sangat tinggi hingga sedang, meskipun masih terdapat kendala pada indikator nilai tukar nelayan, investasi, dan kontribusi sektor pariwisata akibat dampak pandemi

dan terbatasnya data statistik. Indikator dengan capaian Sangat Rendah adalah indikator yang terkait dengan:

a. Pencapaian nilai tukar nelayan, dimana data capaian tidak dilakukan penghitungan oleh BPS selama 3 tahun berturut-turut sehingga data yang digunakan masih menggunakan data awal tahun 2020;
b. Pencapaian realisasi investasi dalam dan luar negeri tidak mencapai target disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak investasi yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022 sehingga berdampak pada capaian kinerja akhir;
c. Pencapaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ada 2 faktor yang sangat berpengaruh yakni kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kunjungan wisatawan pada tahun 2021 dan 2022 yang menurun tajam juga terkait tidak dilakukan perhitungan nilai kontribusi sektor pariwisata oleh BPS pada 3 tahun berturut – turut sehingga perhitungan menggunakan data dasar tahun 2020.

Misi kedua berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan rata-rata capaian sebesar 79,40 persen dan masuk kategori tinggi. Peningkatan ini ditunjukkan oleh kemajuan pada indikator pendidikan dan kesehatan yang menjadi penopang Indeks Pembangunan Manusia. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam penguatan partisipasi pemuda, khususnya pada indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi serta pencapaian Kabupaten Layak Anak yang belum optimal. Untuk misi 2 terdapat 3 Indikator yang pencapaian Sangat Rendah yang disebabkan oleh:

a. Pencapaian sangat rendah untuk peringkat pada *event* olahraga daerah (PORPROV) dan tingkat/persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri disebabkan karena pada tahun 2021 dan 2022 terjadi pandemi Covid-19 sehingga banyak *event* olahraga yang tidak diselenggarakan dan kegiatan ekonomi mandiri yang melibatkan pemuda belum banyak dilakukan karena pembatasan kegiatan masyarakat.
b. Terkait pencapaian Kabupaten Layak Anak terkendala dalam urusan pembentukan Perda Kabupaten Layak anak yang baru dilakukan pada tahun 2024 sehingga tahun 2021-2023 belum ada perubahan signifikan terkait level Kabupaten Layak anak.

Misi ketiga mengedepankan pengembangan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pelayanan dasar, menunjukkan capaian tinggi sebesar 90,41 persen. Sebagian besar indikator yang mendasari tujuan misi ini berhasil mencapai kategori sangat tinggi. Namun, indikator terkait pemanfaatan ruang dan penyediaan prasarana dasar permukiman masih menghadapi hambatan implementasi karena relokasi anggaran serta belum terselesaikannya penyusunan dokumen tata ruang. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam perencanaan serta penguatan koordinasi lintas sektor. Penyebab pencapaian 3 indikator sangat rendah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator persentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak pencapaiannya sangat rendah hal ini disebabkan program ini tidak dilaksanakan selama 2 tahun 2021 sampai 2022 akibat relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19;
b. Indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan selama kurun waktu 3 tahun belum optimal dilaksanakan disebabkan karena proses penyusunan dokumen RTRW dan RDTR yang belum selesai dilakukan pada saat proses evaluasi RPJMD dilakukan;

c. Indikator angka korban bencana sangat terkait dengan kesediaan data korban bencana yang belum terdata secara baik dan berkelanjutan sehingga berdampak pada kesulitan pengukuran pencapaian kinerja.

Pada misi keempat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menunjukkan capaian sedang dengan rata-rata sebesar 72,39 persen. Meskipun terdapat indikator dengan pencapaian sangat tinggi dan tinggi, kendala signifikan masih terjadi pada indikator yang mengukur integritas birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbukaan informasi publik. Tiga indikator yang sangat rendah disebabkan oleh:

a. Indikator nilai survei penilaian integritas pencapaian masih sangat rendah disebabkan oleh belum dilakukan pengukuran secara detail tekait pencapaian indeks ini karena keterbatasan SDM dan materi pengukur.
b. Indikator yang pencapaiannya sangat rendah berikut terkait dengan pencapaian tujuan Meningkatnya transparansi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi yang terbagi dalam 2 indikator yakni indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan indikator indeks keterbukaan informasi publik. Kedua indikator ini belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan, sumber daya, dan peralatan kerja.

Misi kelima, yang bertujuan memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui transformasi institusi budaya, mencapai capaian sangat tinggi sebesar 100,98 persen. Keberhasilan ini menunjukkan kuatnya kohesi sosial dan nilai budaya lokal sebagai modal sosial pembangunan. Meski demikian, pengelolaan budaya benda dan tak benda serta pengukuran penurunan biaya sosial masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan regulasi dan pendataan berbasis komunitas. Dua indikator dengan pencapaian sangat rendah disebabkan oleh:

a. Indikator persentase penurunan biaya sosial belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan materi pengukur dimana perda terkait ini belum dihasilkan sehingga berdampak pada proses pengukuran.
b. Sedangkan terkait indikator persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan masih terkait dengan ketersediaan database yang belum optimal dihasilkan sehingga masih terdapat budaya yang belum teridentifikasi dan didata dengan baik.

2.1.5.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah

Pencapaian indikator Kinerja Utama Kepala Daerah masuk dalam kategori atau level tinggi dengan nilai capaian 112,67 persen. Terdapat 10 indikator dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator dengan capaian tinggi, 2 indikator dengan capaian rendah, dan 1 indikator dengan capaian sangat rendah.

Tabel 2. 94 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

	Capaian Indikator					Persentase
	SR	R	S	T	ST	
15 IKU Kepala Daerah	1	2	0	2	10	112,67

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026, 2025

Keterangan:
SR : Sangat Rendah
R : Rendah
S : Sedang
T : Tinggi
ST : Sangat Tinggi

Indeks Gini merupakan indikator kinerja utama kepala daerah uang memiliki capaian sangat rendah. Berdasarkan data yang dirilis dari Biro Pusat Statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten

Ngada diukur hanya pada tahun 2020 dengan angka ketimpangan 0,326. Pada akhir tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Ngada mencapai 0,326 sementara di Provinsi NTT Indeks Gini sebesar 0,356, dan nasional sebesar 0,385. Ini menunjukkan Kabupaten Ngada masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Jika dibandingkan Provinsi NTT dan nasional, ketimpangan Kabupaten Ngada lebih rendah. Tetapi jika berdasarkan pengukuran atas target pencapaian, Indeks Gini dikategorikan memilki capaian sangat rendah. Hal ini disebabkan tidak adanya pengukuran Indeks Gini yang dilakukan pada tahun 2021-2024 untuk Kabupaten Ngada.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kinerja utama kepala daerah yang memiliki capaian rendah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Ngada pada tahun 2020 dan 2021 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,01 persen. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang dialami seluruh dunia. Perekonomian Kabupaten Ngada pasca Covid-19 berangsur pulih seiring dengan diterapkannya berbagai kebijakan penanganan pandemi dan kebijakan ekonomi lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat evaluasi RPJMD dilakukan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi daerah masih konstan sebesar 3,49 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh hingga 5,31 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga merupakan indikator kinerja utama kepala daerah yang memiliki capaian rendah. TPT Kabupaten Ngada mengalami tren fluktuatif selama tahun 2021-2023. Demikian halnya dengan TPT Provinsi NTT dan Indonesia yang juga mengalami tren pertumbuhan fluktuatif yang cenderung naik pada tahun 2021-2023. TPT Kabupaten Ngada lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi NTT dan Indonesia dalam kurun waktu 2021-2023, namun TPT Kabupaten Ngada lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Indonesia. TPT Kabupaten Ngada paling tinggi mencapai 4 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Ngada mencapai angka 2,99 persen atau naik sebesar 100,67 persen pada tahun 2020. Setelah itu, TPT berhasil diturunkan ke angka 2,81 persen atau turun sebesar 6,02 persen pada tahun 2022. Namun demikian, TPT Kabupaten Ngada naik secara drastis sebesar 42,35 persen pada tahun 2023. Jika ditinjau dari capaian target RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026, TPT Kabupaten Ngada termasuk dalam capaian rendah. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya lapangan kerja secara memadai bagi angkatan kerja di Kabupaten Ngada. Artinya, pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dibandingkan dengan ketersediaan angkatan kerja. Selain itu, para pencari kerja belum dapat berkompetisi secara optimal dalam dunia kerja dikarenakan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh pencari kerja.

2.1.5.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian kinerja urusan pemerintahan di Kabupaten Ngada bervariasi antar bidang, yang mencerminkan keberagaman tantangan pembangunan daerah. Perbedaan ini dapat dilihat sebagai gambaran nyata atas kapasitas kelembagaan, efektivitas pelaksanaan program, serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat seperti tabel di bawah. Capaian ini dikelompokkan ke dalam urusan sebagai berikut.

Tabel 2. 95 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

No	IKU Perangkat Daerah	Capaian Indikator					Persentase
		SR	R	S	T	ST	
1	Pendidikan					2	91
2	Kebudayaan	1					50

No	IKU Perangkat Daerah	Capaian Indikator					Persentase
		SR	R	S	T	ST	
3	Kesehatan			1		3	167
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1				2	67
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1		1	1	71
6	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					3	174
7	Sosial					1	97
8	Tenaga Kerja					1	90
9	Pemberdayaan Desa	1				1	46
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3					9
11	Pangan			1		3	92
12	Lingkungan Hidup					4	104
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1		72
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1					54
15	Perhubungan		1			1	79
16	Komunikasi dan Informatika	2					39
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1		2	123
18	Penanaman Modal	1				1	64
19	Kepemudaan dan Olahraga	1			1		56,5
20	Pariwisata	1					43
21	Kearsipan	1					14
22	Perpustakaan			1	1		77
23	Kelautan dan Perikanan	1			1	1	98
24	Pertanian	11	3	2	4		55
25	Perindustrian	2	1				37
26	Perdagangan	2			1		45
27	Sekretariat Daerah		1	2		1	80
28	Sekretariat DPRD		1				60
29	Perencanaan					1	115
30	Keuangan		1		1	1	73
31	Kepegawaian			1			68
32	Pengawasan	1		1			60
33	Kecamatan	1		1			51,6
34	Kesatuan Bangsa dan Politik					1	94

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026, 2025

Keterangan:
SR : Sangat Rendah
R : Rendah
S : Sedang
T : Tinggi
ST : Sangat Tinggi

A. Sosial dan Kependudukan

Urusan sosial memiliki capaian target sebesar 97 persen yang diukur melalui satu indikator utama yang masuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Indikator tersebut merupakan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berdaya yang persentasenya terus mengalami peningkatan hingga 49 persen pada tahun 2023. Adapun urusan kepemudaan dan olahraga memiliki capaian sebesar 56,5 persen. Capaian ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu peringkat PORPROV

dengan kategori capaian tinggi dan persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dengan kategori capaian sangat rendah.

Urusan pemberdayaan desa pada periode sebelumnya menunjukkan capaian yang kurang memuaskan, yaitu sebesar 46 persen. Diukur melalui dua indikator, yaitu Indeks Desa Membangun dengan capaian sangat tinggi dan persentase penurunan biaya sosial dengan capaian yang sangat rendah karena belum tersedianya Peraturan Daerah terkait penurunan biaya sosial.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki capaian sebesar 9 persen dengan tiga indikator berada pada kategori capaian sangat rendah. Indikator status kabupaten layak anak belum optimal karena Perda terkait baru disusun dan ditetapkan. Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga masih belum optimal karena masih rendahnya kesadaran, upaya, dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan gender bagi pekerja perempuan. Selain itu, indikator penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius karena kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki capaian yang baik, yaitu sebesar 72 persen. Urusan ini diukur melalui satu indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang termasuk dalam kategori capaian tinggi. Adapun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan capaian yang cukup baik, yaitu sebesar 54 persen yang diukur melalui satu indikator utama, yaitu Total Fertility Rate (TFR) yang masih lebih rendah dari angka ideal.

Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki capaian target yang sangat baik yaitu sebesar 174 persen dengan dua indikator yang seluruhnya masuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Dua indikator tersebut, yakni persentase penurunan gangguan K3 dan angka korban bencana.

B. Ekonomi dan Investasi

Urusan tenaga kerja memiliki capaian sebesar 90 persen dari angka yang ditargetkan. Capaian tersebut diukur melalui satu indikator, yaitu tingkat kesempatan kerja yang memiliki capaian yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara itu, urusan penanaman modal memiliki capaian sebesar 64 persen. Terdapat satu indikator dengan kategori capaian sangat tinggi, yaitu IKM Perizinan. Sementara itu indikator persentase peningkatan investor memiliki capaian sangat rendah.

Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki capaian yang berada pada kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 123 persen. Terdapat satu indikator utama yang memiliki capaian sedang, yaitu persentase peningkatan koperasi aktif (koperasi produsen). Sedangkan dua indikator dengan capaian sangat tinggi, yaitu persentase peningkatan omzet UKM dan persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

Urusan pariwisata menunjukkan capaian kinerja sebesar 43 persen. Capaian ini diukur melalui indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan *spend of money* dengan capaian sangat rendah. Sementara itu, urusan kelautan dan perikanan memiliki capaian yang sangat baik, yaitu sebesar 98 persen. Terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yaitu produksi perikanan budidaya dengan capaian sangat tinggi, produksi perikanan tangkap dengan memiliki capaian tinggi, dan persentase produk perikanan yang bersertifikat dengan capaian kinerja yang sangat rendah.

Urusan pangan memiliki capaian yang cukup memuaskan, yaitu sebesar 92 persen yang diukur melalui empat indikator. Terdapat satu indikator dengan capaian yang sedang, yaitu persentase pangan yang memenuhi standar toleransi ambang batas. Tiga indikator lainnya yang memiliki capaian

sangat tinggi, meliputi Indeks Ketersediaan Pangan, Indeks Keterjangkauan Pangan, dan Indeks Pemanfaatan Pangan yang ketiganya menunjukkan ketahanan pangan suatu daerah. Sementara itu, urusan pertanian memiliki capaian sebesar 55 persen. Terdapat 11 indikator dengan kategori capaian sangat rendah, tiga indikator dengan kategori capaian rendah, dua indikator dengan capaian sedang, dan empat indikator dengan capaian tinggi. Penurunan produksi tanaman perkebunan sangat terkait dengan masih maraknya isu alih fungsi lahan pertanian umur panjang menjadi lahan pertanian umur pendek dan perumahan.

Urusan perindustrian memiliki capaian sebesar 37 persen dengan dua indikator memiliki capaian sangat rendah, mencakup persentase produk pertanian yang meningkat nilai tambahnya dan persentase produk perikanan yang meningkat nilai tambahnya. Selain itu, terdapat satu indikator dengan capaian rendah, yaitu persentase peningkatan nilai produksi IKM. Adapun urusan perdagangan memiliki capaian sebesar 45 persen dengan dua indikator memiliki capaian yang sangat rendah dan satu indikator dengan capaian tinggi. Adapun indikator dengan capaian sangat rendah, meliputi persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan pertanian, dan persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan perikanan. Sedangkan indikator tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting memiliki capaian yang tinggi.

C. Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator utama yang diukur pada urusan pendidikan memiliki capaian yang sangat tinggi, yaitu 91 persen. Dari capaian tersebut diketahui bahwa Kabupaten Ngada memiliki rata-rata lama sekolah 8,82 tahun. Namun demikian, peningkatan pendidikan masyarakat masih perlu dilakukan sekurang-kurangnya menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau pada jenjang kelas 3 SMP. Indikator lain yang diukur, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menunjukkan capaian yang baik dengan peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, urusan kebudayaan dalam rentang tahun 2021-2023 capaian indikator persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan hanya sebesar 40 persen. Oleh karena itu, urusan kebudayaan memiliki capaian indikator yang masih tergolong dalam kategori sangat rendah, yaitu sebesar 50 persen.

Urusan kearsipan memiliki capaian yang rendah, yaitu sebesar 14 persen. Capaian tersebut diukur melalui indikator IKM Kearsipan yang memiliki capaian sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan, penataan arsip perangkat daerah yang belum optimal, kurangnya SDM Kearsipan, dan kurangnya sarana dan prasarana kearsipan. Urusan perpustakaan memiliki capaian sebesar 77 persen yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian yang tinggi dan SKM Layanan Perpustakaan dengan capaian pada kategori sedang.

D. Kesehatan

Urusan kesehatan memiliki capaian yang sangat baik, yaitu sebesar 167 persen. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) yang memiliki capaian yang fluktuatif pada rentang 2019-2023 dan masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, tiga indikator lainnya, yaitu angka kematian bayi, angka kesakitan, dan angka kematian balita memiliki capaian yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Baiknya capaian ini didukung dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait risiko kehamilan dan melahirkan, peningkatan pelayanan dan kapasitas sumber daya kesehatan, dan kerja sama lintas sektor.

E. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki capaian kinerja sebesar 67 persen dengan satu indikator yang termasuk dalam kategori sangat rendah dan dua indikator dalam kategori sangat tinggi. Indikator dengan capaian sangat tinggi mencakup persentase panjang jalan ruas prioritas dalam kondisi baik dan persentase bangunan gedung sesuai dengan standar. Adapun indikator persentase pemanfaatan ruang dengan sesuai peruntukan memiliki capaian yang sangat rendah karena belum tersedianya Perda RDTR Kota di seluruh wilayah Kabupaten Ngada. Adapun urusan perumahan dan kawasan permukiman memiliki capaian target dengan persentase sebesar 71 persen. Hal tersebut diukur melalui empat indikator dengan capaian yang beragam, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Indikator utama dengan capaian sangat tinggi adalah rasio rumah layak huni dan indikator dengan capaian sangat rendah, yaitu persentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak.

Urusan lingkungan hidup memiliki capaian yang sangat baik sebesar 104 persen dengan empat indikator pengukuran yang seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Indikator tersebut mencakup Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan persentase volume sampah yang tertangani.

Urusan perhubungan memiliki capaian yang sebesar 79 persen yang diukur melalui dua indikator utama. Indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik memiliki capaian yang rendah dan memerlukan perbaikan terutama pada sarana dan prasarana untuk tiga pelabuhan laut (pariwisata, barang, dan penumpang). Selain itu, Indikator Persentase peningkatan akses angkutan umum telah memiliki capaian yang sangat tinggi, tetapi perlu dilakukan penataan pada terminal dan jalur trayek angkutan perdesaan dan perkotaan yang belum terkoneksi dengan baik.

Urusan komunikasi dan informatika memiliki capaian yang berada pada kategori rendah, yaitu sebesar 39 persen. Capaian tersebut diukur melalui dua indikator, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki capaian sangat rendah.

F. Pemerintahan dan Kelembagaan

Urusan sekretariat daerah memiliki capaian sebesar 80 persen. Indikator dengan capaian yang rendah merupakan Nilai SAKIP, sedangkan indikator dengan capaian sangat tinggi adalah persentase kebijakan daerah yang diimplementasikan. Urusan sekretariat DPRD memiliki capaian sebesar 60 persen yang diukur melalui satu indikator, yaitu IKM pelayanan dukungan tigas dan fungsi DPRD yang memiliki capaian rendah.

Urusan perencanaan memiliki capaian sebesar 115 persen dengan indikator utama, yaitu Indikator Kualitas Perencanaan memiliki kategori capaian sangat tinggi. Adapun urusan keuangan memiliki capaian sebesar 73 persen dengan indikator yang termasuk dalam kategori sangat rendah, yaitu kontribusi PAD. Sedangkan, indikator dengan capaian yang sangat tinggi adalah Opini BPK. Urusan Kepegawaian memiliki capaian sebesar 68 persen dengan indikator utama, yaitu profesionalitas aparatur dengan kategori capaian sedang. Pada urusan pengawasan memiliki capaian sebesar 60 persen dengan indikator Maturitas SPIP memiliki kategori capaian yang sangat rendah.

Kinerja urusan penunjang kecamatan memiliki capaian sebesar 51,6 persen dengan indikator rata-rata jumlah desa maju/mandiri di setiap kecamatan memiliki kategori capaian sangat rendah. Urusan kesatuan bangsa dan politik memiliki capaian yang tinggi, yaitu sebesar 94 persen dengan indikator utama angka konflik sosial memiliki kategori capaian sangat tinggi.

2.1.5.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD periode 2021 sampai 2023 terdiri dari 3 aspek yaitu kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan daya saing. Capaian IKK secara kumulatif dari tiga aspek tersebut adalah 72,5 persen. Aspek daya saing memiliki capaian terbesar dengan nilai 81,5 persen diikuti aspek kesejahteraan rakyat sebesar 80,5 persen dan aspek pelayanan umum sebesar 55,29 persen.

Tabel 2. 96 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator Kinerja Kunci	Capaian Indikator					Persentase
	SR	R	S	T	ST	
Aspek Kesejahteraan Rakyat	3	0	0	3	9	80,5
Aspek Pelayanan Umum	68	8	5	9	38	55,29
Aspek Daya Saing	3	1	1	2	5	81,58

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2023, 2025

Keterangan:

SR : Sangat Rendah
R : Rendah
S : Sedang
T : Tinggi
ST : Sangat Tinggi

Aspek kesejahteraan rakyat memiliki 15 indikator dengan total capaian sebesar 80,5 persen. Tiga indikator di antaranya memiliki capaian sangat rendah yaitu indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), indeks gini, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Sembilan indikator memiliki capaian sangat tinggi dan tiga lainnya memiliki capaian tinggi. Ketiga indikator dengan capaian rendah tersebut memiliki berbagai penyebab di antaranya PAD yang berkaitan dengan belum optimalnya daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan, penerimaan pajak dan retribusi daerah belum optimal, SDM serta pengawasan pajak yang masih longgar serta rendahnya kontribusi BUMD. Sedangkan, indikator indeks gini yang memiliki capaian sangat rendah karena pengukuran belum dilakukan oleh BPS setempat. Berikutnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan capaian sangat rendah disebabkan Pandemi COVID-19 dan belum dilakukannya perhitungan nilai kontribusi sektor pariwisata.

Aspek pelayanan umum terdiri dari 33 urusan dan 131 indikator. Secara total capaian aspek pelayanan umum sebesar 55,29 persen. Sebanyak 68 indikator masih memiliki capaian sangat rendah. Kemudian, 8 indikator memiliki capaian rendah, 5 indikator dengan capaian sedang, 9 indikator capaian tinggi, dan 38 indikator memiliki capaian sangat tinggi. Rendahnya capaian pada aspek ini disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi pada masing-masing urusan. Namun, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas, infrastruktur yang belum memadai, akses terhadap layanan dasar yang belum merata, terbatasnya keberadaan data dan sumber daya pendukung program, kurangnya integrasi dan koordinasi antar sektor, serta terbatasnya kemampuan dan pemahaman masyarakat untuk mendukung terwujudnya program yang dibuat. Selain permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan penurunan kualitas lingkungan, belum optimalnya pengembangan terkait hilirisasi, investasi, dan pariwisata, belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan sosial, serta penegakan, perlindungan, dan pengawasan hukum yang belum maksimal.

Aspek daya saing terdiri dari 4 fokus dan 12 indikator. Secara kumulatif capaian pada aspek ini adalah sebesar 81,58 persen dengan 3 indikator memiliki capaian sangat rendah, 1 indikator dengan capaian rendah, 1 indikator dengan capaian sedang, 2 indikator dengan capaian tingi dan 5 indikator dengan capaian sangat tinggi. Tiga indikator dengan capaian sangat rendah tersebut yaitu indikator ketaatan terhadap RTRW, persentase rumah tangga menggunakan air bersih, dan indeks kepuasan masyarakat. Penyebab tiga indikator tersebut memiliki capaian sangat rendah yaitu karena belum

adanya RDTR Kota Bajawa, perhitungan rumah tangga menggunakan air bersih yang hanya memasukkan rumah tangga yang dilayani oleh PDAM, dan belum optimalnya pelayanan umum yang sesuai dengan standar pelayanan.

2.1.6. Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana

Salah satu aspek esensial dalam proses pembangunan untuk mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat adalah ketersediaan sarana prasarana. Sarana prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Sarana prasarana yang dimaksudkan memuat kebutuhan hunian, air bersih, energi/kelistrikan, pengelolaan persampahan, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan.

2.1.6.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Ngada tentu berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan perluasan lahan. Proyeksi kebutuhan tempat tinggal menggunakan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 5 (lima) jiwa yakni ayah, ibu, dan 3 anak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SNI 03-1733-2004 tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Tabel 2. 97 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Uraian	Kondisi Tahun 2020	Proyeksi Tahun	
		2025	2030
Proyeksi jumlah penduduk (ribu jiwa)	164,71	176,46	188,36
Proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal (unit)	27.273	35.292	37.672

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD, 2024

Berdasarkan proyeksi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, diketahui bahwa kebutuhan akan tempat tinggal di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Apabila dibandingkan antara kondisi tahun 2020 dengan proyeksi pada tahun 2025 dan 2030, terdapat gap yang cukup besar antara proyeksi kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal. Hal ini perlu direspon dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan didukung oleh ketersediaan PSU yang memadai untuk menghindari semakin parahnya kondisi kawasan kumuh.

2.1.6.2. Proyeksi Timbulan Sampah

Bentuk respon peningkatan ketersediaan PSU lainnya dari adanya peningkatan jumlah penduduk adalah perencanaan infrastruktur persampahan. Mengingat timbulan sampah adalah hal yang krusial bagi suatu kota yang apabila tidak terkelola dengan baik akan berpengaruh pada wajah suatu kawasan, kualitas lingkungan, kenyamanan, bahkan timbulnya penyakit. Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Ngada menggunakan standar acuan SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 98 Standar Acuan Timbulan Sampah

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Volume (L/Org/hari)	Berat (Kg/Org/hari)
Kota Kecil	<100.000	2,75 - 3,00	0,60 – 0,75
Kota Sedang	100.000-500.000		
Kota Besar	500.000-1.000.000	3,00 - 3,60	0,65 – 0,80
Kota Metropolitan	>1.000.000		

Sumber: SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Mengacu pada tabel di atas, Kabupaten Ngada dengan jumlah penduduk 174.088 jiwa pada tahun 2024 termasuk dalam klasifikasi Kota Sedang. Oleh karena itu, setiap penduduk diasumsikan menghasilkan sampah dengan volume kurang lebih 2,75-3 L/hari dan berat 0,60-0,75 kg per hari untuk setiap orangnya. Berdasarkan asumsi tersebut, didapatkan proyeksi timbulan sampah Kabupaten Ngada yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 99 Proyeksi Volume Timbulan Sampah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Keterangan	Tahun 2025			Tahun 2030		
	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)	Volume (m^3/hari)	Berat (Ton/hari)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)	Volume (m^3/hari)	Berat (Ton/hari)
Jumlah	176,46	529,38	132,34	188,36	565,08	141,27

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD, 2024

Proyeksi timbulan sampah yang telah dilakukan juga akan berimplikasi pada penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai agar sampah tersebut tidak tertimbun dan menjadi masalah. Mengacu pada ketentuan dalam SNI 19-2454-2002, standar kebutuhan TPA ditetapkan sebesar 1 (satu) unit untuk setiap jumlah penduduk lebih dari 480.000 jiwa, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah. Walaupun demikian, pembangunan TPAS baru juga harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan lingkungan, mencakup daya tampung lahan yang cukup luas, hingga pertimbangan jarak aman dari permukiman penduduk guna meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Tabel 2. 100 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi			
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m^3	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m^3		
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m^3		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m^3		
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/ TPA Lokal	-		Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		25 m^3		
Kota (>480.000 jiwa)	Bak sampah besar	TPA			
	Tempat daur ulang sampah				

Sumber: SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan

Apabila dilihat dari proyeksi penduduk Kabupaten Ngada hingga tahun 2030 sebesar 188.360 jiwa, oleh karena itu skenario yang lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam upaya pengelolaan sistem persampahan, yaitu dengan memaksimalkan adanya TPS di setiap kecamatan yang melakukan pemilahan, sehingga meminimalisasi penimbunan sampah ke TPA. Berdasarkan hal ini, hingga tahun 2030, Kabupaten Ngada cukup menyediakan satu TPA untuk seluruh kabupaten tetapi dilengkapi dengan TPS per tiga atau 4 kecamatan untuk pemilahan, agar tidak semua timbulan sampah tertimbun di TPA.

2.1.6.3. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air bersih menjadi salah satu komponen esensial yang perlu dipertimbangkan untuk merespon peningkatan jumlah penduduk. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan layanan dasar yang

memadai dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, proyeksi kebutuhan air bersih merujuk pada standar yang tertuang dalam SNI 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 101 Standar Kebutuhan Air Bersih

Air Bersih	Jumlah Jiwa Penduduk	Kebutuhan air Bersih (L/org/hari)
Semi Urban	3.000 - 20.000	60 - 90
Kota Kecil	20.000-100.000	90 - 110
Kota Sedang	100.000 - 500.000	110 - 125
Kota Besar	500.000-1.000.000	125 - 150
Metropolitan	>1.000.000	150 - 200

Sumber: SNI: 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam

Berdasarkan standar tersebut, diketahui bahwa kebutuhan air bersih Kabupaten Ngada sebesar 110-125 liter per orang untuk setiap harinya. Adapun hasil proyeksi kebutuhan air bersih Kabupaten Ngada diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 102 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

2025		2030	
Proyeksi Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (m^3/hari)	Proyeksi Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (m^3/hari)
176.46	19,411	188.36	20,719

Sumber: Olah Data (2024) dalam Rantek RPJMD, 2024

Kebutuhan air bersih yang meningkat ini perlu direspon dengan peningkatan pelayanan air bersih, kualitas air, dan perlindungan daya dukung sumber daya air. Perlindungan kawasan sistem hidrologis menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya air di Kabupaten Ngada mengingat ketersediaan sumber air baku bergantung pada kapasitas daya dukung sumber daya air. Walaupun demikian, pemanfaatan air ini juga perlu dikontrol dengan konsep keberlanjutan supaya tidak terjadi eksploitasi air secara berlebihan dan berujung pada kerusakan sistem hidrologis.

2.1.6.4. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

Proyeksi kebutuhan akan energi listrik juga menjadi bagian dari respon peningkatan jumlah penduduk. Mengingat bahwa energi listrik mendukung berlangsungnya berbagai kegiatan baik untuk keperluan domestik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun industri. Berdasarkan standar Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita.

Adapun hasil proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Ngada tahun 2025-2030 diuraikan pada tabel berikut. Peningkatan kebutuhan listrik juga harus direspon dengan penyediaan pasokan listrik yang bersumber dari energi bersih dan ramah lingkungan. Di samping itu, dari sisi konsumsi energi listrik juga perlu dikontrol dengan inovasi pembangunan yang mengedepankan efisiensi penggunaan energi untuk menghemat cadangan pasokan energi daerah.

Tabel 2. 103 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

	2025		2030	
	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh
Kabupaten Ngada	176,46	247.044	188,36	263.704

Sumber: Olah Data (2024) dalam Rantek RPJMD, 2024

2.1.6.5. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu komponen esensial untuk dipertimbangkan sebagai respon dari peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut karena RTH berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena berfungsi untuk mengatur kualitas udara, limpasan air permukaan, dan *cooling area* pada kawasan perkotaan, sekaligus berfungsi sebagai ruang komunal bagi masyarakat. Penghitungan proyeksi ruang terbuka hijau untuk unit RT dan unit RW didasarkan pada SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 2. 104 Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga	
	2025	2030
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	176.46	188.36
Proyeksi Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga		
1. Taman untuk unit RT (unit)	706	753
2. Taman untuk unit RW (unit)	71	75
3. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan (unit)	6	6
4. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan (unit)	1	2
5. Kuburan/TPU (unit)	1	2

Sumber: Olah Data (2024) dalam Rantek RPJMD, 2024

Proyeksi jumlah ruang terbuka Kabupaten Ngada untuk tahun 2025 dan 2030 dapat dilihat pada tabel di atas. Pemenuhan sarana ruang terbuka hijau harus diimbangi dengan fasilitas yang aman dan inklusif agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkannya secara nyaman dan produktif.

2.1.6.6. Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi jumlah murid menurut jenjang pendidikan didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngada tahun 2025-2030 dengan asumsi Angka Partisipasi Kasar mencapai 100 persen. Jumlah murid pada jenjang TK didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 4 hingga 6 tahun pada tahun berkenaan; jumlah murid pada jenjang SD didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk pada usia 7 hingga 12 tahun; dan jumlah murid pada jenjang SMP didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 13 hingga 15 tahun.

Tabel 2. 105 Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Proyeksi Kebutuhan	2025			2030		
	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Jumlah Siswa/Murid	8,865	18,250	8,912	10,528	18,130	9,178
Jumlah Guru	591	652	279	702	648	287
Jumlah Sekolah (Unit)	98	109	31	117	108	32

Sumber: Olah Data (2024) dalam Rantek RPJMD, 2024

Proyeksi kebutuhan jumlah gedung sekolah selaras dengan tren jumlah murid, yakni terjadi tren peningkatan pada jenjang TK dan SMP serta tren menurun pada jenjang SD. Namun demikian, proyeksi jumlah kebutuhan gedung sekolah perlu dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan jarak serta kondisi gedung sekolah eksisting. Peningkatan kebutuhan jumlah gedung sekolah berdasarkan hasil proyeksi ini tidak selalu harus direspon dengan pembangunan gedung sekolah baru namun juga dapat direspon dengan menambah jumlah ruang kelas atau penyesuaian rombongan belajar.

2.1.6.7. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Kebutuhan dasar selanjutnya yang memerlukan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan adalah aspek kesehatan. Dalam menciptakan pembangunan yang inklusif diperlukan upaya penyediaan layanan yang setara dalam hal ini akses pelayanan kesehatan. Untuk menjamin pelayanan yang berkualitas diperlukan rencana proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan yang disajikan pada tabel di bawah. Proyeksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang menguraikan tentang rasio antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan terutama pada kebutuhan sarana kesehatan.

Tabel 2. 106 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030

Proyeksi Kebutuhan	2025	2030
Tempat Tidur RS (unit)	176	188
Puskesmas/Pustu (unit)	12	12
Posyandu (unit)	141	151
BKIA/Klinik Bersalin (unit)	6	6
Apotik/Rumah Obat (unit)	6	6
Tempat Praktek Dokter	35	38
Dokter (orang)	176	188
Perawat (orang)	424	452

Sumber: Olah Data (2024) dalam Rantek RPJMD, 2024

2.1.7. Standar Pelayanan Minimal

2.1.7.1. Pendidikan

SPM pendidikan diatur dalam Permendagri No. 51 Tahun 2021 dan secara lebih rinci terdapat dalam Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022. Berikut merupakan capaian SPM urusan pendidikan Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 107 Indikator SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	tad	tad	tad	tad	tad
Rata-rata skor capaian kemampuan literasi siswa jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	57,28	65,87	76,38
Rata-rata skor capaian kemampuan literasi siswa jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	53,06	66,9	74,47
Rata-rata skor capaian kemampuan literasi siswa jenjang pendidikan sekolah menengah Atas (SMA) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	66,31	58,1	75,77
Rata-rata skor capaian kemampuan literasi siswa jenjang pendidikan sekolah menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	33,33	30,51	55,78
Rata-rata skor capaian kemampuan numerasi siswa jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	38,43	49,6	69,58
Rata-rata skor capaian kemampuan numerasi siswa jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	34,47	42,78	72,77

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	tad	tad	tad	tad	tad
Rata-rata skor capaian kemampuan numerasi siswa jenjang pendidikan sekolah menengah Atas (SMA) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	37,57	51,32	56,93
Rata-rata skor capaian kemampuan numerasi siswa jenjang pendidikan sekolah menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka (1-100)	tad	tad	19,52	20,18	53,47
Iklim Keamanan SD/MI/Sederajat	Angka (1-100)	tad	60,24	63,86	69,77	75,74
Iklim Keamanan SMP/MTs/Sederajat	Angka (1-100)	tad	63,42	67,29	65,91	71,92
Iklim Kebinekaan SD/MI/Sederajat	Angka (1-100)	tad	tad	tad	68,9	76,79
Iklim Kebinekaan SMP/MTs/Sederajat	Angka (1-100)	tad	tad	tad	66,84	75,75
Iklim Inklusivitas SD/MI/Sederajat	Angka (1-100)	tad	tad	tad	56,44	59,1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, 2025

Indikator SPM pendidikan secara umum mengalami peningkatan. Meskipun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan terutama pada kemampuan numerasi semua siswa di semua jenjang pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi siswa SMK, serta pembentukan karakter untuk siswa SD sederajat dan SMP sederajat. Selain itu, iklim inklusivitas baik SD sederajat maupun SMP sederajat masih perlu diperhatikan.

2.1.7.2. Kesehatan

SPM kesehatan diatur dalam Permendagri No. 51 Tahun 2021 dan secara lebih rinci terdapat dalam Permenkes No. 6 Tahun 2024. Berikut merupakan capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 108 Indikator SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	97,75	96,29	91,69	100.00	90,27
Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100.00	100.00	100.00	99,79	99,83
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	99,47	99,62	98,71	98,70	99,04
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	90,74	96,58	94,00	94,11	99,72
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	72,57	71,01	96,24	97,08	99,42
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	57,01	76,93	57,45	48,09	62,42
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	78,48	77,54	83,53	88,33	80,47
Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,56	95,40	95,81	84,38	64,44
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	21,98	18,33	42,29	50,73	63,67
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	86,64	100.00	36,40	94,62	85,43
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	69,85	44,37	31,29	71,92	84,32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025

Capaian kinerja bidang kesehatan yang dilihat dari SPM menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai bidang. Di antara yang menurun khususnya

pada tahun 2024 yaitu pelayanan terhadap ibu hamil, lansia, dan penderita TBC. Hal ini menunjukkan secara umum pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngada sudah mengalami perbaikan.

2.1.7.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki capaian yang cukup baik diikuti dengan peningkatan setiap tahunnya. Capaian yang terlihat pada tabel terlampir terdiri atas empat indikator, yaitu terkait ketersediaan air minum, layanan air limbah, cakupan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi. Walaupun demikian, capaian ini masih perlu ditingkatkan pada periode selanjutnya mengingat target capaian SPM pada urusan ini adalah sebesar 100 persen. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan peningkatan untuk bisa memberikan pelayanan dasar yang prima bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 109 Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	tad	91,425	96,325	100,760	108,240
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	73,51	74,78	tad	tad	tad

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada, 2025

2.1.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belum ada data yang tercatat untuk capaian SPM untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada dari tahun 2020-2024.

Tabel 2. 110 Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	tad	tad	tad	tad	tad
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada, 2025

2.1.7.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan diatur dalam Permendagri No. 51 Tahun 2021. Berikut merupakan capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Kabupaten Ngada:

Tabel 2. 111 Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten	Orang	64	592	89	157	151

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	tad	100	100	100	tad
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	tad	50	50	50	tad
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	tad	70	70	75	tad
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	70	75	60	85	75
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngada, 2025

Penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan berdasarkan SPM memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan kinerja yang baik dalam urusan ini. Meskipun demikian, perlu adanya peningkatan dan perbaikan dalam beberapa hal seperti perluasan area pelayanan termasuk pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bukan hanya pada penyelamatan dan evakuasi.

2.1.7.6. Sosial

SPM urusan sosial diatur dalam Permendagri No. 51 Tahun 2021. Indikator SPM urusan sosial Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi yang mengindikasikan keberlanjutan program-program terkait sosial belum dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam hal rehabilitasi sosial baik untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun lansia.

Tabel 2. 112 Indikator SPM Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	211	212	809	835	1
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	14	19	149	143	8
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	1.849	1	4	5.926	5
Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	tad	tad	tad	tad	tad
Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Orang	13	12	37	14	1080
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
persentase warga negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	26,42	21,95	56	56	72

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ngada, 2025

2.1.8. Potensi Daerah

Potensi perkebunan menjadi salah satu potensi Kabupaten Ngada dalam meningkatkan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai komoditas yang ada terdapat beberapa komoditas unggulan yaitu kopi, kelapa, kakao, kemiri dan jambu mete yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Tabel 2. 113 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Ngada (ton) 2020–2024

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	1.337	1.331,4	1.331,4	1.216,06	1.216,06
Kopi	3.219,4	2.602,4	2.602,4	666,41	736,41
Kakao	209,04	419	419	1.461,74	1.461,74
Jambu Mete	659,5	657,5	657,5	1.258,82	1.258,82
Kemiri	1.814	717	717	3.765,14	3.765,14

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ngada, 2025

Kopi terutama Kopi Bajawa menjadi salah satu komoditas unggulan dan sudah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi petani di Kecamatan Bajawa, Golewa, dan Golewa Barat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa, Kabupaten Ngada memiliki lahan baku untuk tanaman kopi Arabika seluas 11.085 ha. Selain itu, Kopi Bajawa telah diakui memiliki cita rasa khas yang berbeda dari daerah lain. Akan tetapi, terjadi penurunan produksi yang terjadi hampir setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2024. Bahkan, pada tahun 2023 dan 2024 produksi kopi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti kakao, kelapa, jambu mete, dan kemiri.

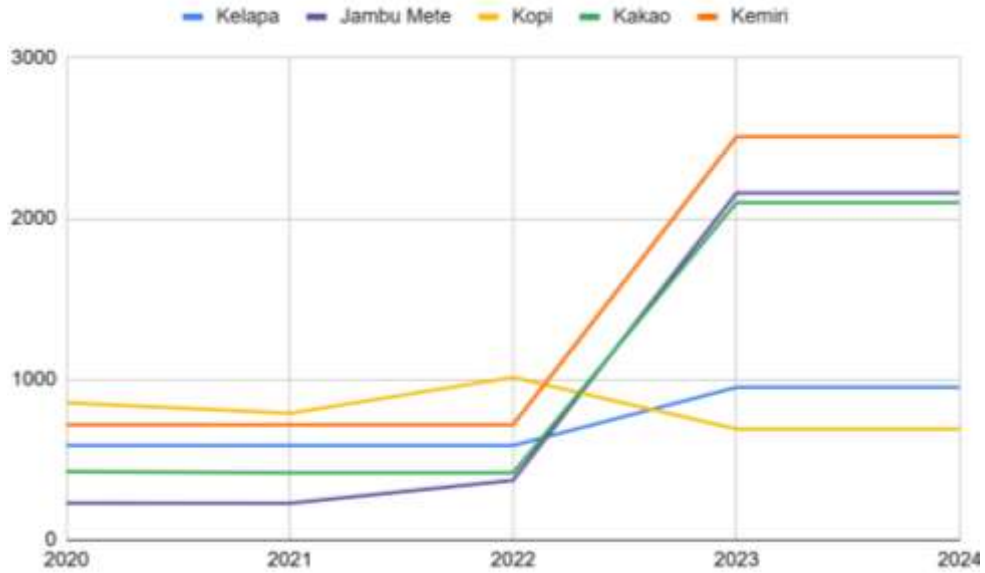

Gambar 2. 78. Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Ngada, 2025

Apabila dilihat dari tingkat produktivitas, sebagian besar komoditas mengalami peningkatan yang positif kecuali komoditas kopi. Kemiri menjadi komoditas dengan produktivitas tertinggi setelah tahun 2021 dimana sebelumnya kopi merupakan komoditas dengan produktivitas tertinggi. Hal ini terjadi karena tingkat produksi kopi yang menurun cukup signifikan dimungkinkan karena usia tanaman kopi sudah cukup tua dan perlu adanya peremajaan.

Potensi pariwisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah wisata budaya. Wisata budaya merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berfokus pada eksplorasi, pemahaman dan apresiasi terhadap warisan budaya, tradisi, seni dan sejarah suatu daerah. Wisata budaya ini mengundang wisatawan untuk mengalami pengalaman otentik melalui interaksi langsung dengan komunitas lokal, partisipasi dalam upacara adat, serta kunjungan ke situs-situs budaya dan sejarah. Melalui wisata budaya, wisatawan mendapatkan tambahan wawasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai lokal yang membentuk identitas suatu masyarakat.

Daya tarik wisata berbasis budaya yang terutama dibangun dari nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi, antara lain dalam bentuk rumah adat, tenun ikat, upacara adat, tarian maupun musik tradisional. Wisata budaya membawa interaksi langsung dengan masyarakat lokal memperkaya dimensi pariwisata, tidak hanya sebagai perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan edukatif.

Desa Bena merupakan salah satu wisata budaya yang terkenal dengan arsitektur tradisional, tatanan sosial berbasis adat, dan praktik kehidupan berkomunitas yang lestari. Pengembangan wisata budaya tersebut harus didukung dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama, serta menjaga nilai-nilai budaya agar tidak menyimpang atau terbawa arus komersialisasi yang membawa perubahan yang tidak diinginkan bagi masyarakat adat setempat. Selain itu relasi antara budaya dan pariwisata yang akan dikembangkan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan sehinga nilai budaya tetap terpelihara dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat setempat.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam upaya mengatur keuangan daerah agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka dibutuhkan suatu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dengan APBD. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

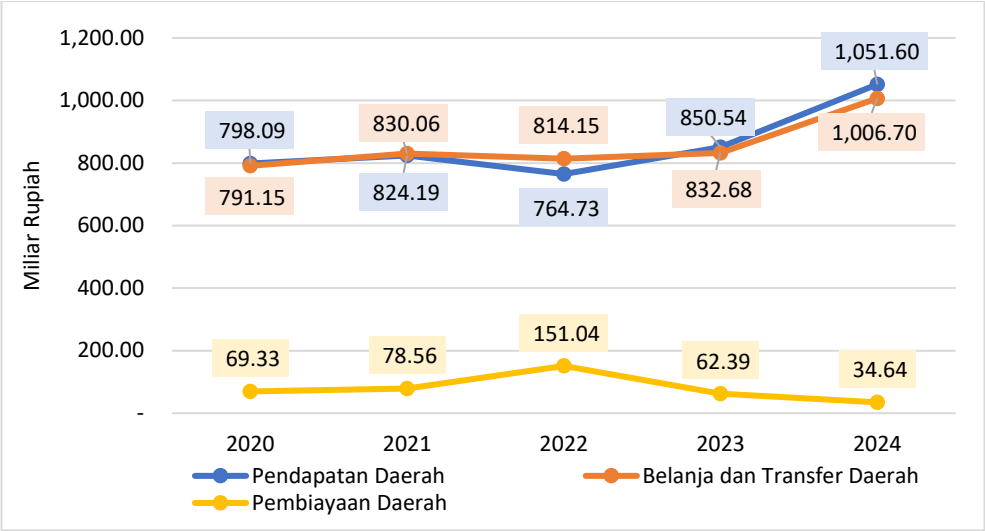

Gambar 2. 79 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Berdasarkan realisasi pendapatan, total pendapatan daerah Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,14 persen per tahun. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 798,09 miliar, yang kemudian meningkat hingga mencapai Rp 1.051,60 miliar di tahun 2024. Sementara itu, total belanja dan transfer daerah di Kabupaten Ngada juga mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,21 persen per tahun. Pada tahun 2020, belanja daerah berada di angka Rp 791,15 miliar, dan meningkat menjadi Rp 1.006,70 miliar pada tahun 2024. Dari sisi pembiayaan daerah, jumlah pembiayaan netto menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Rata-rata penurunan selama lima tahun terakhir mencapai sekitar 15,93 persen per tahun. Pada tahun 2020, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 69,33 miliar, dan mengalami penurunan hingga mencapai Rp 34,64 miliar pada tahun 2024, meskipun sempat meningkat cukup signifikan pada tahun 2022.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen pendapatan transfer memiliki komposisi yang paling besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan rata-rata kontribusinya, pendapatan transfer memiliki rata-

rata kontribusi sebesar 92,64 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Ngada, sementara rata-rata kontribusi PAD tercatat sebesar 5,54 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,83 persen. Dari sisi pertumbuhan, pendapatan transfer mencatatkan rata-rata pertumbuhan tahunan tertinggi, yaitu sebesar 8,23 persen. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kenaikan signifikan pada dana alokasi khusus, serta peningkatan pada transfer antar daerah. Sementara itu, PAD justru mengalami kontraksi dengan rata-rata penurunan sebesar 2,08 persen per tahun, disebabkan oleh penurunan pada beberapa komponennya, khususnya lain-lain PAD yang sah dan pendapatan dari pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, meskipun pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. Adapun komponen lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan paling tajam, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan negatif 23,00 persen per tahun, yang mencerminkan menurunnya penerimaan dari hibah dan pendapatan lainnya.

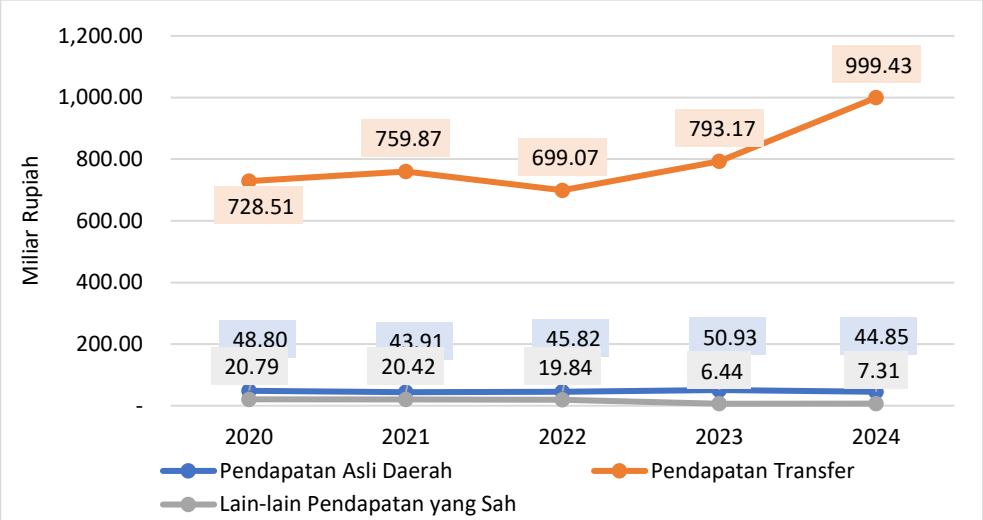

Gambar 2. 80 Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

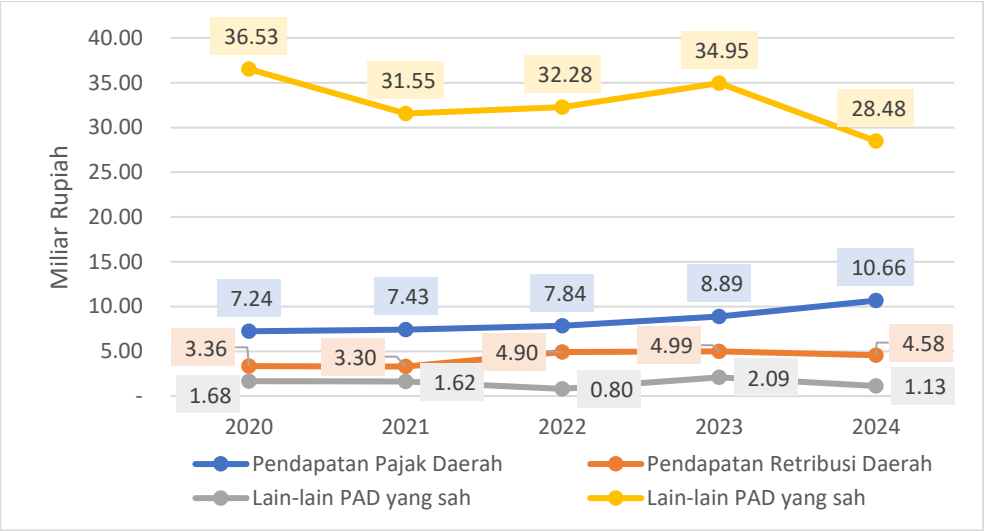

Gambar 2. 81 Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Pada tahun 2020, besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 48.795.069.323,51. Namun demikian, PAD mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024 dan tercatat sebesar Rp 44.852.561.375,75 pada tahun 2024. Secara rata-rata, PAD menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 2,08 persen per tahun. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, terdapat dinamika pertumbuhan yang berbeda-beda. Pendapatan pajak daerah menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,18 persen per tahun. Komponen ini tercatat sebesar Rp 7.235.589.784 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 10.663.409.255 pada tahun 2024. Pendapatan retribusi daerah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05 persen per tahun. Pada tahun 2020, pendapatan ini tercatat sebesar Rp 3.357.688.230 dan meningkat menjadi Rp 4.576.661.789 pada tahun 2024. Berbeda halnya dengan dua komponen tersebut, pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan justru mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 9,33 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen ini tercatat sebesar Rp 1.676.218.384 dan menurun menjadi Rp 1.132.734.946 pada tahun 2024. Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan kecenderungan menurun, dengan rata-rata penurunan sebesar -6,03 persen per tahun. Komponen ini tercatat sebesar Rp 36.525.572.926 pada tahun 2020 dan menjadi Rp 28.479.755.385,75 pada tahun 2024.

Berdasarkan proporsinya terhadap total PAD selama periode 2020–2024, komponen lain-lain PAD yang sah menjadi kontributor terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 69,86 persen, diikuti oleh pendapatan pajak daerah sebesar 18,02 persen, pendapatan retribusi daerah sebesar 9,02 persen, dan pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 3,10 persen.

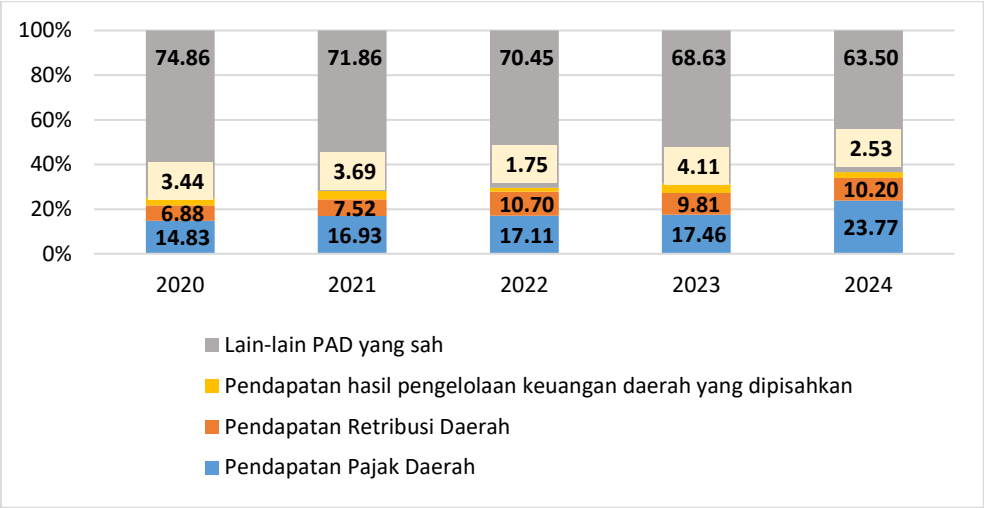

Gambar 2. 82 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Selanjutnya, kebijakan transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan transfer pemerintah pusat yang merupakan dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer antar daerah. Hingga tahun 2024, pendapatan transfer masih menjadi kontributor utama dalam penerimaan daerah di Kabupaten Ngada atau dengan rata-rata kontribusi dalam lima tahun terakhir yang tercatat sebesar 92,64 persen. Besaran tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Ngada terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Berdasarkan nominalnya, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, seluruh komponen pendapatan transfer di kabupaten ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan yang bertumbuh positif.

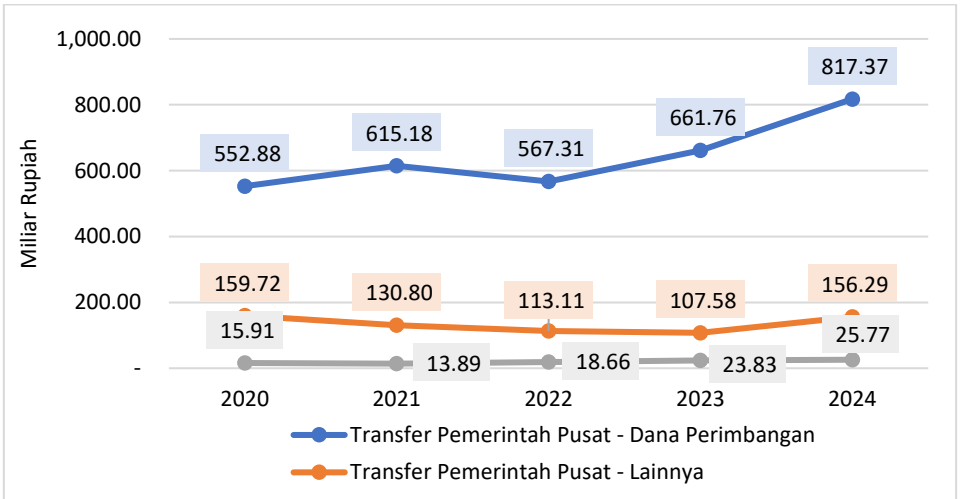

Gambar 2. 83 Perkembangan Komponen Pendapatan Transfer Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Komponen transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan

daerah. Pada tahun 2020, besaran pendapatan transfer di Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 728.505.410.620,41 dan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 8,23 persen per tahun hingga mencapai Rp 999.434.645.879,00 pada tahun 2024. Komponen utama dari pendapatan transfer ini terdiri atas transfer pemerintah pusat (dana perimbangan dan lainnya) serta transfer antar daerah.

Dalam periode 2020 hingga 2024, pendapatan dari dana perimbangan menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,27 persen per tahun. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam struktur dana perimbangan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 72,18 persen dari total dana perimbangan. DAU yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah ini tercatat sebesar Rp 445.805.432.000,00 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 502.389.992.818,00 pada tahun 2024, atau tumbuh dengan rata-rata 3,03 persen per tahun. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen kedua terbesar dalam struktur dana perimbangan, memiliki rata-rata kontribusi sebesar 29,55 persen. DAK tercatat sebesar Rp 99.979.860.476,00 di tahun 2020 dan meningkat signifikan menjadi Rp 309.770.210.572,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,67 persen per tahun. Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, memiliki kontribusi relatif kecil, yaitu rata-rata 1,32 persen dari dana perimbangan. Dana ini justru menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 7,14 persen per tahun, dengan jumlah sebesar Rp 7.094.669.575 pada tahun 2020 dan menjadi Rp 5.213.957.980,00 pada tahun 2024 dengan catatan beberapa tahun tidak pendapatan transfer dari DBH sumber daya alam.

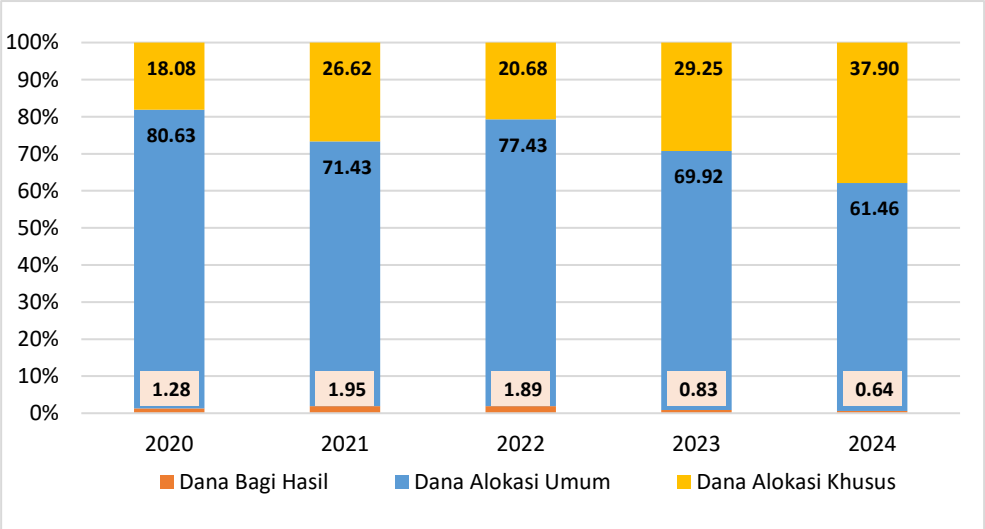

Gambar 2. 84 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Komponen transfer pemerintah pusat lainnya meliputi dana insentif daerah (DID) dan dana desa. Secara keseluruhan, komponen ini berfluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 0,54 persen per tahun, yaitu dari Rp 159.717.361.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 156.288.007.000,00 pada tahun 2024.

Pendapatan transfer dari Dana Insentif Daerah (DID) mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2020, Kabupaten Ngada menerima alokasi DID sebesar Rp 48.960.134.000,00, namun alokasi ini menurun drastis hingga tidak tercatat sama sekali pada tahun 2023, dan hanya sebesar Rp 2.867.330.000,00 pada tahun 2024. Penurunan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan dapat terjadi karena menurunnya capaian

kinerja Pemda dalam memenuhi indikator penilaian, seperti pengelolaan keuangan, kualitas layanan publik, dan inovasi daerah. Selain itu, kebijakan seleksi DID yang semakin ketat serta kemungkinan kendala administratif seperti keterlambatan pelaporan kinerja turut memengaruhi. Sebaliknya, dana desa menunjukkan tren yang positif, dari Rp 110.757.227.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 153.420.677.000,00 di tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,49 persen per tahun. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Transfer antar daerah, yang seluruhnya terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, juga menunjukkan tren positif melalui pendapatan bagi hasil pajak. Besarannya tumbuh dari Rp 15.908.087.569,41 pada tahun 2020 menjadi Rp 25.772.477.509,00 pada tahun 2024.

Terakhir, komponen lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Ngada menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 23 persen per tahun. Pendapatan yang bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya ini tercatat sebesar Rp 20.792.800.600,00 di tahun 2020 dan terjadi penurunan sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar Rp 7.309.448.804,00.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat adalah indeks kemandirian fiskal. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang kondisi kemandirian fiskal daerahnya menunjukkan predikat belum mandiri dengan capaian di bawah 0,25. Pada tahun 2024, Kabupaten Ngada memiliki indeks kemandirian fiskal sebesar 0,04, di mana capaian tersebut memiliki arti bahwa baru sebesar 4 persen belanja daerah di kabupaten ini yang dapat dibiayai oleh PAD.

Tabel 2. 114. Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Komponen A	**679.545.276.620,41**	**739.829.253.323,00**	**690.584.919.331,00**	**793.172.440.815,00**	**996.567.315.879,00**
DAU	445.805.432.000,00	439.418.102.000,00	439.279.612.711,00	462.715.625.000,00	502.389.992.818,00
Dana Desa	110.757.227.000,00	110.760.227.000,00	104.618.864.598,00	107.579.648.000,00	153.420.677.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	15.908.087.569,41	13.887.428.490,00	18.660.247.038,00	23.829.255.275,00	25.772.477.509,00
DAK	99.979.860.476,00	163.785.022.365,00	117.305.781.540,00	193.537.928.984,00	309.770.210.572,00
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
DBH	7.094.669.575,00	11.978.473.468,00	10.720.413.444,00	5.509.983.556,00	5.213.957.980,00
Komponen B	**728.340.345.943,92**	**783.736.151.629,24**	**736.403.935.407,29**	**844.099.826.208,61**	**1.041.419.877.254,75**
PAD	48.795.069.323,51	43.906.898.306,24	45.819.016.076,29	50.927.385.393,61	44.852.561.375,75
DAU	445.805.432.000,00	439.418.102.000,00	439.279.612.711,00	462.715.625.000,00	502.389.992.818,00
Dana Desa	110.757.227.000,00	110.760.227.000,00	104.618.864.598,00	107.579.648.000,00	153.420.677.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	15.908.087.569,41	13.887.428.490,00	18.660.247.038,00	23.829.255.275,00	25.772.477.509,00
DAK	99.979.860.476,00	163.785.022.365,00	17.305.781.540,00	193.537.928.984,00	309.770.210.572,00
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
DBH	7.094.669.575,00	11.978.473.468,00	10.720.413.444,00	5.509.983.556,00	5.213.957.980,00
A-B	**0,93**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,96**
Indeks Kemandirian Fiskal	**0,07**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,04**
Kondisi Kemandirian Fiskal	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD, apakah telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dimana hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

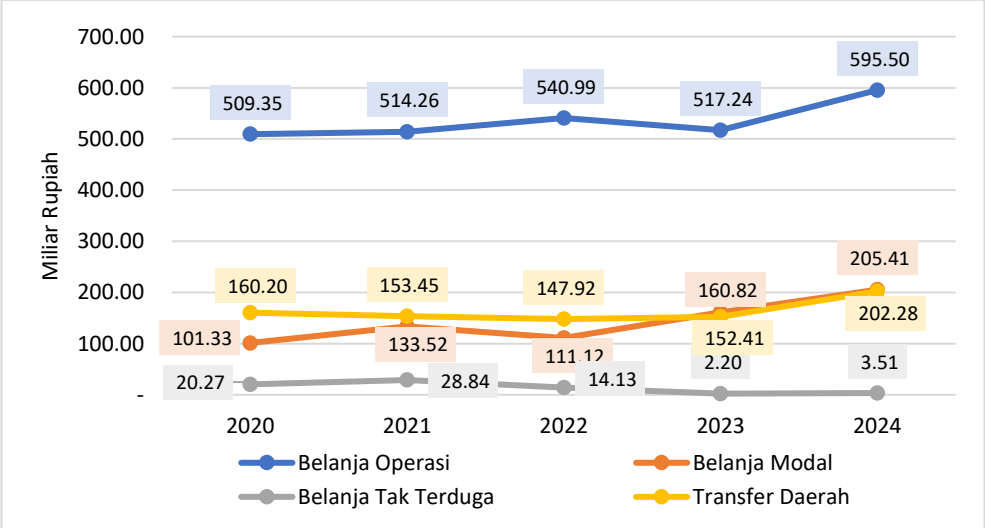

Gambar 2. 85 Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran belanja daerah Kabupaten Ngada tercatat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 6,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran belanja daerah Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 630.954.091.298,28 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 804.426.161.970,85. Perhitungan pertumbuhan belanja daerah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun, di mana pada umumnya besaran nilai belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs, penyesuaian kondisi makro ekonomi, dan lainnya. Meskipun umumnya besarannya meningkat, namun

berkaitan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran.

Berdasarkan proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, belanja operasi merupakan komponen belanja dengan kontribusi terbesar dalam struktur belanja daerah Kabupaten Ngada, yakni dengan rata-rata kontribusi mencapai 62,81 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen transfer ke daerah (19,06 persen), belanja modal (16,45 persen), dan belanja tak terduga (1,68 persen). Sementara itu, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sementara komponen belanja tak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif (menurun).

Dalam lima tahun terakhir, komponen belanja operasi dalam struktur belanja daerah di Kabupaten Ngada menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,98 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 besaran komponen belanja tersebut tercatat sebesar Rp 509.354.987.879,64 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 595.499.445.185,20. Secara lebih detail, komponen belanja pegawai menunjukkan rata-rata kontribusi tertinggi dalam struktur belanja operasi di kabupaten ini, yakni mencapai 56,91 persen. Apabila dibandingkan dengan total belanja daerah, maka besaran rata-rata rasio belanja pegawai di kabupaten ini tercatat sebesar 44,11 persen dengan besaran capaian di tahun 2024 sebesar 45,26 persen. Capaian tersebut menandakan bahwa porsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Ngada hingga tahun 2024 masih relatif tinggi. Komponen belanja operasi dengan kontribusi terbesar selanjutnya adalah komponen belanja barang dan jasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,15 persen, yang diikuti oleh komponen belanja hibah sebesar 4,11 persen, dan komponen belanja bantuan sosial sebesar 1,56 persen.

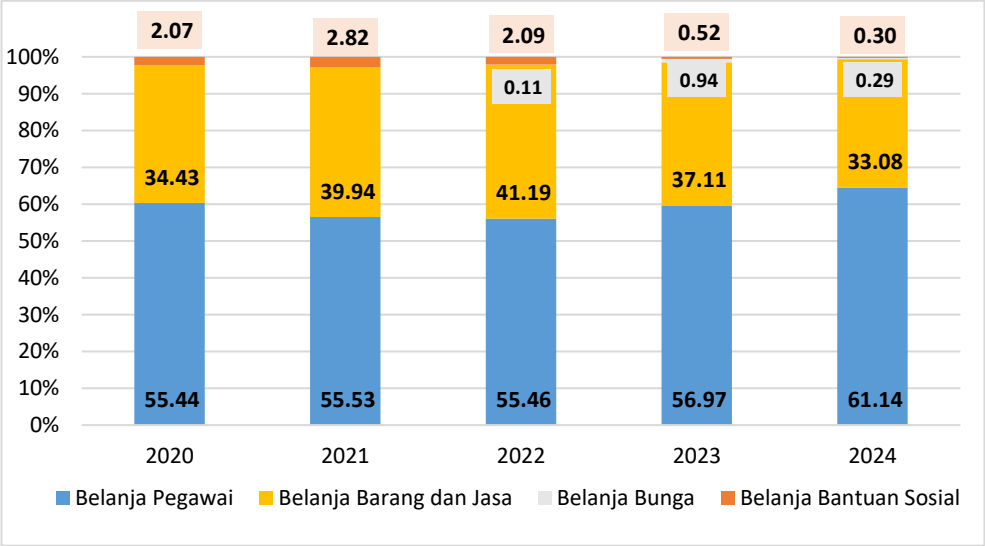

Gambar 2. 86 Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung rasio belanja pegawai, di mana rasio tersebut digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin turunnya porsi belanja pegawai dalam APBD mengindikasikan semakin membaiknya kualitas belanja daerah, hal tersebut terjadi karena semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2020, komponen belanja

pegawai di Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 282.387.891.380,00 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,56 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 364.084.945.380,04 di tahun 2024. Alokasi belanja pegawai ini diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN–tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta belanja pegawai BLUD.

Selanjutnya, proporsi terbesar kedua dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Ngada adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, serta belanja barang dan jasa BLUD. Berdasarkan nominalnya, komponen belanja barang dan jasa di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 175.392.987.552,64 di tahun 2020, dan bertumbuh menjadi Rp 197.006.043.622,16 di tahun 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,95 persen per tahun.

Belanja hibah sebagai komponen belanja operasi dengan rata-rata proporsi terbesar ketiga ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020, komponen belanja hibah di Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 41.053.024.700,00, dan menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 6,84 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 30.916.949.933,00 di tahun 2024.

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja operasi yang kontinyu tercatat hingga tahun 2024. Realisasi belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat baik secara individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, komponen belanja bantuan sosial di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 10.521.084.247,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 35,91 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 1.775.100.000,00 di tahun 2024.

Pada tahun 2022 hingga 2024 terdapat komponen belanja bunga yang merujuk pada pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar bunga atas utang daerah yang dimiliki. Belanja bunga ini dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang sesuai dengan perjanjian pinjaman yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Nilai belanja bunga berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp 597.830.246,36, Rp 4.885.156.250,00, dan Rp 1.716.406.250,00.

Selanjutnya, dalam lima tahun terakhir, komponen belanja modal di Kabupaten Ngada yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, begitu pula yang tercatat pada sebagian besar komponennya yang juga menunjukkan

kecenderungan meningkat dengan komponen belanja modal tanah dan komponen belanja aset tetap lainnya cenderung menurun.

Pada tahun 2020, komponen belanja modal di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 101.328.305.739,64, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 205.413.683.785,65, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,32 persen per tahun. Sementara itu, berdasarkan rata-rata proporsinya, dalam kurun waktu yang sama, struktur pembentuk belanja modal terbesar di Kabupaten Ngada adalah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yakni sebesar 35,52 persen; diikuti komponen belanja modal gedung dan bangunan (32,81 persen), belanja modal peralatan dan mesin (25,89 persen); belanja aset tetap lainnya (3,57 persen); belanja aset lainnya (aset tak berwujud) sebesar 2,09 persen; belanja modal tanah (1,37 persen).

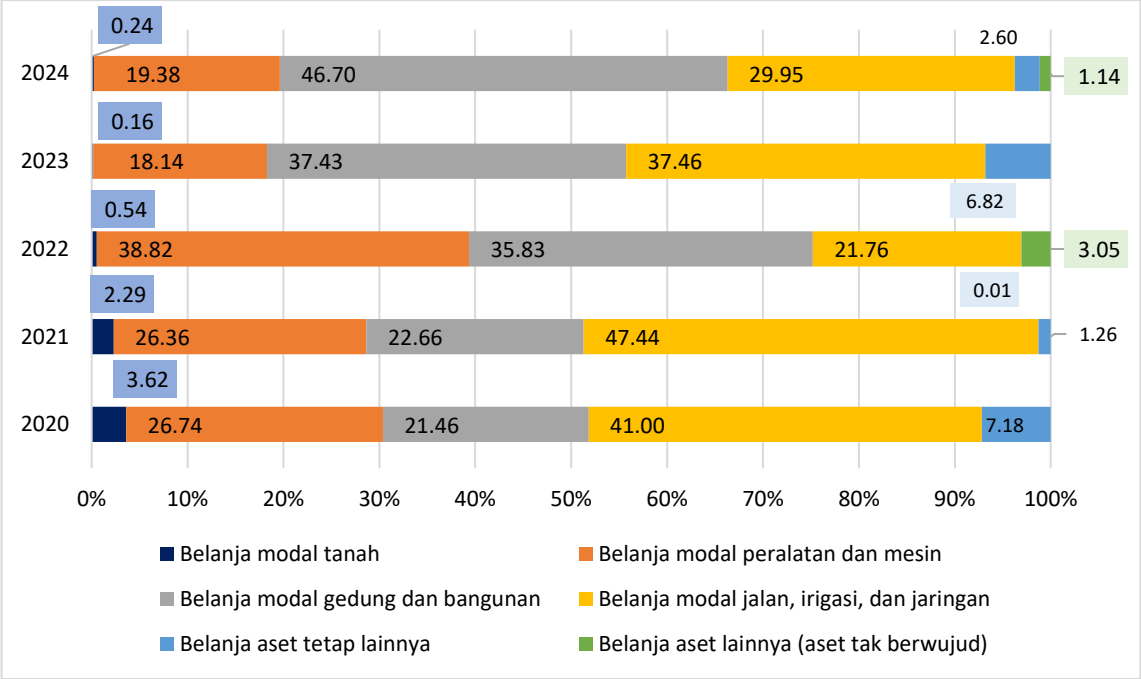

Gambar 2. 87 Proporsi Belanja Modal Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Secara lebih detail, komponen belanja tanah dalam struktur belanja modal di Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 3.667.524.256,00 di tahun 2020 dan mengalami penurunan yang cukup besar hingga tahun 2024 dengan rata-rata penurunan sebesar 39,45 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 493.108.795,00. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen belanja peralatan dan mesin menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,09 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 27.094.716.469,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 39.803.093.054,20.

Komponen belanja selanjutnya dalam struktur belanja modal Kabupaten Ngada adalah komponen belanja gedung dan bangunan. Pada tahun 2020, komponen belanja modal tersebut tercatat sebesar Rp 21.746.218.479,11 dan menunjukkan besaran yang terus meningkat ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 44,92 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 95.922.204.919,42 di tahun 2024. Selanjutnya, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,31 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 besaran belanja modal ini tercatat sebesar Rp 41.547.508.262,53 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 menjadi Rp 61.513.044.587,03.

Belanja aset tetap lainnya merupakan satu-satunya komponen belanja modal yang dalam lima tahun terakhir tercatat menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 7,41 persen per tahun. Pada tahun 2020 komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 7.272.338.273,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 5.344.238.480,00 di tahun 2024. Selanjutnya, komponen terakhir dalam struktur belanja modal Kabupaten Ngada adalah belanja aset lainnya (aset tak berwujud), yang hanya terdapat pada tahun 2022 dan 2024. Pada tahun 2022, komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 3.384.674.452,00 dan Rp 2.337.993.950,00 di tahun 2024.

Komponen belanja selanjutnya adalah belanja tak terduga, di mana dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 merupakan komponen belanja daerah dengan besaran rata-rata penurunan tertinggi apabila dibandingkan dengan komponen belanja daerah lainnya. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 20.270.797.679,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp 3.513.033.000,00, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 35,48 persen per tahun.

Selanjutnya, komponen belanja yang terakhir yakni belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Berdasarkan nominalnya, pada tahun 2020 besaran belanja transfer di Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 160.199.548.557,00, dan berfluktuasi menjadi Rp 202.278.333.242,00 di tahun 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,00 persen per tahun. Komposisi belanja transfer bantuan keuangan memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen belanja transfer/bagi hasil pendapatan. Besarnya komponen belanja transfer bantuan keuangan di Kabupaten Ngada paling besar dialokasikan untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa.

Selanjutnya, beberapa urusan yang dapat dihitung proporsinya diantaranya adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan *mandatory spending* atau belanja wajib. Belanja pendidikan merupakan satu dari empat *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, beberapa urusan yang dapat dihitung proporsinya di antaranya adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan *mandatory spending* atau belanja wajib. Dua di antaranya adalah belanja urusan pendidikan dan kesehatan yang menjadi komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Berdasarkan data realisasi belanja fungsi pendidikan dan kesehatan pada kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 yang bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan, terlihat adanya dinamika yang menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya pada belanja fungsi pendidikan. Realisasi belanja fungsi pendidikan menunjukkan tren meningkat dari 12,62 persen pada tahun 2019 menjadi 29,41 persen pada tahun 2023. Peningkatan tajam terjadi antara tahun 2020 ke 2021, dari 12,47 persen menjadi 25,27 persen, yang menandakan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak dasar pendidikan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni alokasi anggaran minimal 20 persen dari total belanja daerah.

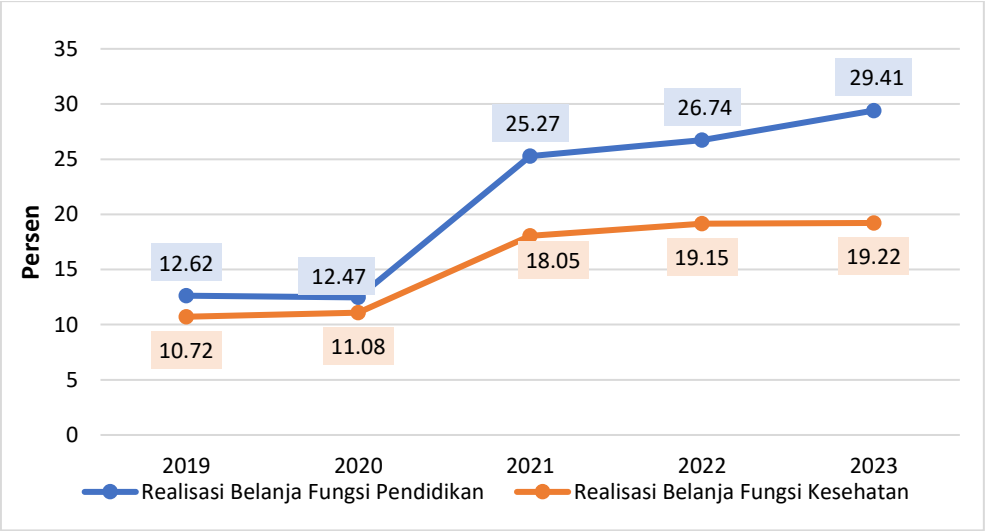

Gambar 2. 88 Proporsi Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap total Belanja Kabupaten Ngada Tahun 2019-2023

Sumber: Realisasi APBD DJPK Kementerian Keuangan 2019-2023, Diolah

Sama dengan belanja pendidikan, belanja kesehatan juga merupakan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari APBD di luar gaji. Adapun besaran anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Berdasarkan alokasi anggarannya, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, anggaran belanja kesehatan di Kabupaten Ngada menunjukkan tren yang selalu meningkat. Berdasarkan proporsi tersebut, dalam lima tahun terakhir, besaran alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Ngada telah mampu melampaui target 10 persen yang ditetapkan.

C. Pembiayaan Daerah

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, dimana dalam kondisi surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, sementara ketika APBD dalam kondisi defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali, sementara pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutup APBD Kabupaten Ngada bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sementara itu, dalam hal pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, anggaran defisit atau dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan besarnya komponen belanja daerah, ditemukan pada tahun

anggaran 2021 dan 2022, yang berturut-turut tercatat sebesar -Rp 5.868.949.934,46, dan -Rp 49.418.565.339,27, sementara pada tahun 2020, 2023, dan 2024 tercatat surplus. Rasio defisit terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besaran yang semakin membaik, hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang dapat ditutup dari pendapatan daerah. Selanjutnya, dilihat dari besaran defisit anggaran dan pembiayaannya maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan daerah telah mampu menutup defisit anggaran, dikarenakan nilai pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan defisitnya. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total pembiayaan daerah di Kabupaten Ngada tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, atau ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 15,93 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 69.326.503.649,83 dan berfluktuasi menjadi Rp 34.635.492.067,87 di tahun 2024.

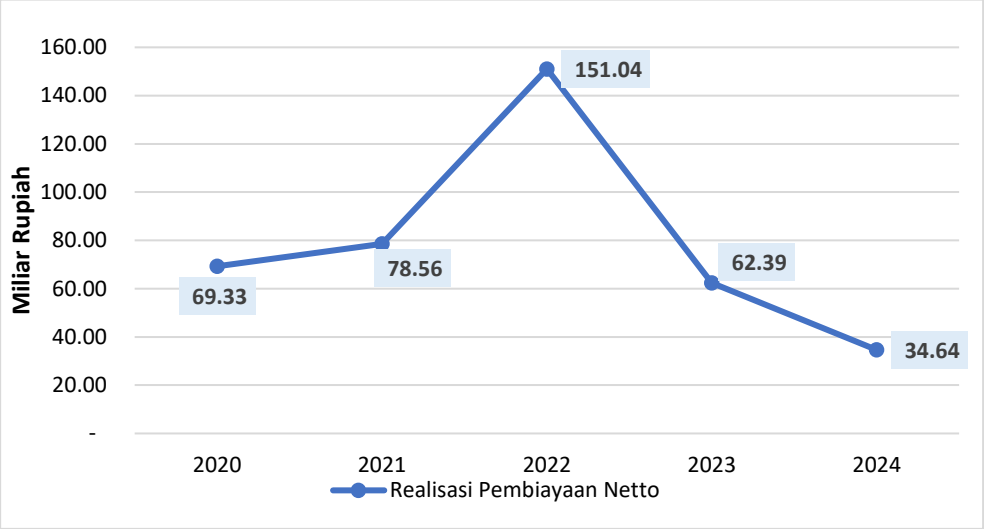

Gambar 2. 89 Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Secara lebih detail, pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana yang disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Secara umum, dalam lima tahun terakhir, kondisi SiLPA Kabupaten Ngada menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,05 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 76.266.144.338,47, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 79.527.652.913,77.

Fluktuatifnya besaran komponen SiLPA dan belanja daerah Kabupaten Ngada menghasilkan capaian persentase SiLPA terhadap total belanja dengan besaran yang fluktuatif pula. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 2,21 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah di Kabupaten Ngada tercatat sebesar 8,76 persen yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi 8,01 persen. Secara ideal, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja memiliki kinerja yang baik apabila menunjukkan kecenderungan yang menurun, di mana kecenderungan yang menurun

mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin membaik. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam lima tahun terakhir, capaian kinerja pemerintah Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran tercatat semakin membaik.

Selanjutnya, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) di Kabupaten Ngada menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,05 persen per tahun. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol, artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada tahun 2020, besaran SILPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 76.266.144.338,47 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 79.527.652.913,77. Besaran SILPA tersebut menunjukkan SILPA Positif, yang diartikan bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Besaran SILPA pada akhir tahun akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah, khususnya dialokasikan untuk belanja modal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui besaran kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah berasal dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua komponen tersebut seharusnya dapat mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mendanai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran kemampuan mendanai belanja daerah di Kabupaten Ngada menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau masih pada besaran di sekitar rata-ratanya. Pada tahun 2020, kondisi kemampuan mendanai belanja daerah di kabupaten ini tercatat sebesar 1,37 dan menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 1,33. Berdasarkan capaian rasio kemampuan mendanai belanja daerah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Ngada memiliki daya fiskal yang stabil, tanpa kekurangan dana untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja dan pembiayaan lainnya.

Tabel 2. 115 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)+(b)	(c)+(d)	((a)+(b))/((c)+(d))
2020	798.093.280.543,92	69.326.503.649,83	630.954.091.298,28	-	867.419.784.193,75	630.954.091.298,28	1,37
2021	824.193.240.129,24	78.559.772.539,59	676.612.961.818,70	-	902.753.012.668,83	676.612.961.818,70	1,33
2022	764.730.433.293,29	157.042.247.619,36	666.232.038.435,56	-	921.772.680.912,65	666.232.038.435,56	1,38
2023	850.542.965.209,61	104.640.952.763,51	680.263.261.957,69	42.249.999.999,96	955.183.917.973,12	722.513.261.957,65	1,32
2024	1.051.596.656.058,75	80.683.271.400,91	804.426.161.970,85	46.047.779.333,04	1.132.279.927.459,66	850.473.941.303,89	1,33

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, diolah

Tabel 2. 116 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**48.795.069.323,51**	**43.906.898.306,24**	**45.819.016.076,29**	**50.927.385.393,61**	**44.852.561.375,75**	**(2,08)**
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	7.235.589.784	7.431.846.137	7.838.338.574	8.890.817.320	10.663.409.255,00	10,18
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	3.357.688.230	3.300.018.779	4.902.152.190	4.993.580.690	4.576.661.789,00	8,05
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.676.218.384	1.621.898.611	801.255.539	2.092.317.064	1.132.734.946,00	(9,33)
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	36.525.572.926	31.553.134.779	32.277.269.773	34.950.670.320	28.479.755.385,75	(6,03)
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**728.505.410.620,41**	**759.871.223.323,00**	**699.073.182.331,00**	**793.172.440.815,00**	**999.434.645.879,00**	**8,23**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**552.879.962.051,00**	**615.181.597.833,00**	**567.305.807.695,00**	**661.763.537.540,00**	**817.374.161.370,00**	**10,27**
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	6.203.242.361,00	11.978.473.468,00	8.577.833.872,00	3.574.863.556,00	5.213.957.980,00	(4,25)
1.2.1.2	Dana bagi hasil sumber daya alam	891.427.214,00	-	2.142.579.572,00	1.935.120.000,00		
1.2.2.2	Dana Alokasi Umum	445.805.432.000,00	439.418.102.000,00	439.279.612.711,00	462.715.625.000,00	502.389.992.818,00	3,03
1.2.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.979.860.476,00	163.785.022.365,00	117.305.781.540,00	193.537.928.984,00	309.770.210.572,00	32,67
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**159.717.361.000,00**	**130.802.197.000,00**	**113.107.127.598,00**	**107.579.648.000,00**	**156.288.007.000,00**	**(0,54)**
1.2.2.1	Dana penyesuaian/Dana Insentif Daerah	48.960.134.000,00	20.041.970.000,00	8.488.263.000,00	-	2.867.330.000,00	
1.2.2.2	Dana Desa	110.757.227.000,00	110.760.227.000,00	104.618.864.598,00	107.579.648.000,00	153.420.677.000,00	8,49
1.2.3	**Transfer Antar Daerah**	**15.908.087.569,41**	**13.887.428.490,00**	**18.660.247.038,00**	**23.829.255.275,00**	**25.772.477.509,00**	**12,82**
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	15.908.087.569,41	13.887.428.490,00	18.660.247.038,00	23.829.255.275,00	25.772.477.509,00	12,82
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya						
1.2.3.3	Bantuan keuangan						
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**20.792.800.600,00**	**20.415.118.500,00**	**19.838.234.886,00**	**6.443.139.001,00**	**7.309.448.804,00**	**(23,00)**
1.3.1	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan			19.838.234.886,00	6.443.139.001,00	7.309.448.804,00	

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.2	Pendapatan dana darurat						
1.3.3	Pendapatan hibah	20.792.800.600,00	20.415.118.500,00				
	JUMLAH PENDAPATAN	**798.093.280.543,92**	**824.193.240.129,24**	**764.730.433.293,29**	**850.542.965.209,61**	**1.051.596.656.058,75**	**7,14**
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**509.354.987.879,64**	**514.259.830.038,93**	**540.990.665.355,27**	**517.237.495.910,64**	**595.499.445.185,20**	**3,98**
2.1.1	Belanja pegawai	282.387.891.380,00	285.581.252.245,19	300.008.786.621,00	294.673.584.637,00	364.084.945.380,04	6,56
2.1.2	Belanja barang dan jasa	175.392.987.552,64	205.397.434.158,74	222.850.316.187,91	191.962.733.223,64	197.006.043.622,16	2,95
2.1.3	Belanja bunga	-	-	597.830.246,36	4.885.156.250,00	1.716.406.250,00	
2.1.4	Belanja hibah	41.053.024.700,00	8.755.493.635,00	6.217.859.600,00	23.019.521.800,00	30.916.949.933,00	(6,84)
2.1.5	Belanja bantuan sosial	10.521.084.247,00	14.525.650.000,00	11.315.872.700,00	2.696.500.000,00	1.775.100.000,00	(35,91)
2.2	**Belanja Modal**	**101.328.305.739,64**	**133.515.610.522,77**	**111.116.199.650,84**	**160.823.228.382,05**	**205.413.683.785,65**	**19,32**
2.2.1	Belanja modal tanah	3.667.524.256,00	3.058.169.789,00	604.813.505,00	250.000.000,00	493.108.795,00	(39,45)
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	27.094.716.469,00	35.188.301.251,00	43.130.899.063,03	29.169.514.601,00	39.803.093.054,20	10,09
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	21.746.218.479,11	30.253.613.108,08	39.807.384.890,71	60.193.530.455,62	95.922.204.919,42	44,92
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	41.547.508.262,53	63.337.381.783,69	24.173.947.740,10	60.246.132.795,43	61.513.044.587,03	10,31
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	7.272.338.273,00	1.678.144.591,00	14.480.000,00	10.964.050.530,00	5.344.238.480,00	(7,41)
2.2.6	Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)			3.384.674.452,00	-	2.337.993.950,00	
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**20.270.797.679,00**	**28.837.521.257,00**	**14.125.173.429,45**	**2.202.537.665,00**	**3.513.033.000,00**	**(35,48)**
2.3.1	Belanja tak terduga	20.270.797.679,00	28.837.521.257,00	14.125.173.429,45	2.202.537.665,00	3.513.033.000,00	(35,48)
	JUMLAH BELANJA	**630.954.091.298,28**	**676.612.961.818,70**	**666.232.038.435,56**	**680.263.261.957,69**	**804.426.161.970,85**	**6,26**
3	**TRANSFER**						
3.1	**Transfer Bagi Hasil**	**371.399.034,00**	**529.212.182,00**	**629.356.735,00**	**780.881.256,00**	658.216.937,00	**15,38**
3.2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**159.828.149.523,00**	**152.920.016.063,00**	**147.287.603.462,00**	**151.632.432.889,00**	201.620.116.305,00	**5,98**
	JUMLAH TRANSFER	**160.199.548.557,00**	**153.449.228.245,00**	**147.916.960.197,00**	**152.413.314.145,00**	**202.278.333.242,00**	**6,00**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**791.153.639.855,28**	**830.062.190.063,70**	**814.148.998.632,56**	**832.676.576.102,69**	**1.006.704.495.212,85**	**6,21**
	SURPLUS/DEFISIT	**6.939.640.688,64**	**- 5.868.949.934,46**	**- 49.418.565.339,27**	**17.866.389.106,92**	**44.892.160.845,90**	
4	**PEMBIAYAAN**						
4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**69.326.503.649,83**	**78.559.772.539,59**	**157.042.247.619,36**	**104.640.952.763,51**	**80.683.271.400,91**	**3,87**
4.1.1	Penggunaan SiLPA	69.326.503.649,83	78.559.772.539,59	72.542.247.619,36	101.640.952.763,51	80.683.271.400,91	3,87

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.1.2	Pencairan dana cadangan			0	3.000.000.000,00		
4.1.3	Pinjaman dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank			84.500.000.000,00			
4.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah						
4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**6.000.000.000,00**	**42.249.999.999,96**	**46.047.779.333,04**	
4.2.1	Pembentukan dana cadangan		-	3.000.000.000,00			
4.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		-	3.000.000.000,00		3.797.779.333,00	
4.2.3	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank			0	42.249.999.999,96	42.250.000.000,04	
	PEMBIAYAAN NETTO	**69.326.503.649,83**	**78.559.772.539,59**	**151.042.247.619,36**	**62.390.952.763,55**	**34.635.492.067,87**	**(15,93)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**76.266.144.338,47**	**72.690.822.605,13**	**101.623.682.280,09**	**80.257.341.870,47**	**79.527.652.913,77**	**1,05**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, diolah

B. Neraca Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, di mana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas meliputi rasio lancar (*current ratio*) dan rasio *quick*.

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1, atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancarnya, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 rasio lancar Kabupaten Ngada menunjukkan besaran lebih dari ukuran baku yang ditetapkan atau di atas satu, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten ini memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Selanjutnya, rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, dimana indikator ini mengindikasikan pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya dengan cepat. Rasio *quick* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk rasio *quick* adalah sebesar >1, semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas. Secara umum dalam lima tahun terakhir, capaian rasio *quick* di Kabupaten Ngada dapat dikatakan sehat karena memiliki besaran nilai >1, hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aktiva lancar di kabupaten ini masih mampu menutupi utang lancarnya.

Tabel 2. 117 Rasio Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar	25,35	14,37	2,39	2,05	11,52
2	Rasio Quick	19,46	11,78	2,00	1,74	9,68
	Rasio Solvabilitas					
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,002	0,004	0,060	0,030	0,005
4	Rasio hutang terhadap modal	0,002	0,004	0,064	0,031	0,003

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka

panjang. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah yakni rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa proporsi utang daerah lebih kecil dibandingkan dengan aktivanya, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pemerintah dapat ditutupi oleh aktivanya (*solvable*) yang berarti pengaruh utang terhadap aktiva adalah sangat kecil.

Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap aset modal, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap total aset modal atau aset tetap pemerintah Kabupaten Ngada dalam lima tahun terakhir menunjukkan besaran di bawah standar yang ditetapkan (≤0,45). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui aset tetapnya sudah baik.

Selanjutnya, rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Indikator rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara total utang dengan jumlah ekuitas dana. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran kurang dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik, atau dengan kata lain rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah kabupaten ini mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya dengan modal yang dimilikinya.

Tabel 2. 118 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ngada 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	67.107.479.137,17	65.932.301.628,26	100.200.483.750,20	67.957.791.333,78	68.959.854.602,29	0,68
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	112.383.200,64	29.743.552,28	39.071.756,00	366.448.679,18	54.217.000,00	(16,66)
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	23.761.235,00	351.253.763,15	94.638,00	745.309,79	44.011.000,00	16,66
1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	1.738.493.290,55	511.380.045,51	3.635.753.662,59	7.442.430.514,75	5.885.620.334,21	35,65
1.1.5	Kas di Bendahara BOS	6.143.506.016,00	5.485.557.280,00	1.147.267.691,00	395.800.091,00	107.933.058,00	(63,59)
1.1.6	Kas di Bendahara FKTP	1.291.183.235,20	643.101.492,20	884.935.580,76	681.632.074,64	1.097.281.980,19	(3,99)
1.1.7	Kas Lainnya		1.699.884.615,00	4.162.717.346,00	5.495.760.796,89	5.064.672.607,74	
1.1.8	Piutang Pajak Daerah	1.547.707.272,43	2.170.231.551,43	3.107.663.858,93	4.122.819.105,93	5.316.948.996,93	36,14
1.1.9	Piutang Retribusi Daerah	651.935.700,00	555.891.750,00	593.984.300,00	659.565.050,00	267.329.550,00	(19,98)
1.1.10	Piutang Lain lain PAD yang sah	3.071.586.828,16			2.398.763.016,03	2.619.880.014,03	
1.1.11	Piutang Transfer	4.211.023.041,00	2.596.060.755,00	4.710.634.278,00	2.745.006.713,00	0,00	(100,00)
1.1.12	Piutang Pendapatan Lainnya		5.057.715.626,70	6.008.382.106,03		0,00	
1.1.13	Piutang Lainnya	613.426.879,99	577.076.879,99	602.319.959,69	577.076.879,99	705.557.879,97	3,56
1.1.14	Penyisihan Piutang	-1.756.288.615,56	-5.573.156.754,41	-2.009.645.141,53	-2.874.266.132,72	-2.501.983.513,72	9,25
1.1.15	Beban Dibayar Di Muka					0,00	
1.1.16	Persediaan	25.682.890.082,40	17.622.046.003,53	24.045.457.963,85	15.798.963.853,70	16.710.369.523,22	(10,19)
	Jumlah Aset Lancar (1.1.1 s.d. 1.1.16)	**110.439.087.302,98**	**97.659.088.188,64**	**147.129.121.749,52**	**105.768.537.285,96**	**104.331.693.032,86**	**(1,41)**
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
1.2.1.1	Dana Bergulir	4.989.480.185,00	4.989.480.185,00	927.534.313,00	927.534.313,00	927.534.313,00	(34,34)
1.2.1.2	Penyisihan Dana Bergulir	-3.401.137.138,00	-3.486.887.658,00	-927.534.313,00	-927.534.313,00	-927.534.313,00	
1.2.1	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.588.343.047,00	1.502.592.527,00	0,00	0	0	(100,00)
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	53.644.599.469,00	52.593.230.811,00	62.045.872.941,00	61.865.078.887,00	65.662.858.220,00	5,18

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Jumlah Investasi Jangka Panjang (1.2.1 + 1.2.2)	**55.232.942.516,00**	**54.095.823.338,00**	**62.045.872.941,00**	**61.865.078.887,00**	**65.662.858.220,00**	**4,42**
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	292.666.918.724,94	298.220.084.283,93	296.288.243.404,33	296.942.266.904,33	297.435.375.699,33	0,40
1.3.2	Peralatan dan Mesin	291.232.837.639,15	323.248.771.301,73	366.073.441.774,76	398.032.249.623,78	437.540.942.865,90	10,71
1.3.3	Gedung dan Bangunan	472.074.834.818,27	500.284.783.006,24	524.256.795.694,70	610.620.476.034,83	637.146.791.071,96	7,78
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.300.938.029.654,00	1.358.379.313.084,44	1.380.658.602.516,39	1.454.848.093.359,72	1.516.013.302.617,62	3,90
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	46.331.767.285,19	47.448.475.185,19	49.937.981.455,17	56.938.586.070,83	61.477.104.200,82	7,33
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	19.013.948.624,64	22.079.040.031,74	41.967.564.751,68	6.705.606.062,93	76.799.122.432,37	41,77
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-913.608.149.040,01	-1.023.927.814.701,70	-1.205.120.124.517,55	-1.330.273.992.734,87	-1.353.071.302.938,76	10,32
	Jumlah Aset Tetap (1.3.1 s.d. 1.3.7)	**1.508.650.187.706,18**	**1.525.732.652.191,57**	**1.454.062.505.079,48**	**1.493.813.285.321,55**	**1.673.341.335.949,25**	**2,62**
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	3.000.000.000,00		-	
	Jumlah Dana Cadangan (1.4.1)	**-**	**-**	**3.000.000.000,00**	**-**	**-**	
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	377.638.825,00	341.288.825,00	339.788.825,00	339.788.825,00	339.788.825,00	(2,61)
1.5.2	Aset Tak Berwujud	9.428.474.800,00	9.938.824.800,00	10.436.526.800,00	13.897.064.800,00	18.264.406.948,48	17,98
1.5.3	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-3.747.749.050,00	-4.872.340.100,00	-7.425.202.600,00	-9.601.553.650,00	-10.084.082.671,00	
1.5.4	Aset Lain-Lain	94.186.600.047,72	46.231.753.648,14	68.206.388.685,62	70.500.678.490,33	52.153.462.965,85	(13,74)
1.5.5	Penyusutan Aset Lain-Lain	-11.019.132.711,18	-7.807.640.574,62	-14.505.297.675,90	-14.505.297.675,90	-7.752.736.385,62	
	Jumlah Aset Lainnya (1.5.1 s.d. 1.5.5)	**89.225.831.911,54**	**43.831.886.598,52**	**57.052.204.034,72**	**60.630.680.789,43**	**52.920.839.682,71**	**(12,24)**
	JUMLAH ASET (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	**1.763.548.049.436,70**	**1.721.319.450.316,73**	**1.723.289.703.804,72**	**1.722.077.582.283,94**	**1.896.256.726.884,81**	**1,83**
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	150.661.776,09	1.962.399.772,02	8.446.642.144,46	2.083.266.929,56	1.776.902.890,41	85,32
2.1.2	Utang Bunga	-	-	4.885.156.250,00	0		

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	42.250.000.000,00	42.250.000.000,04		
2.1.4	Pendapatan Diterima Di Muka	-	-	629.193.656,26	483.863.210,66	340.247.581,86	
2.1.5	Utang Belanja	-	-	650.811.415,03	2.374.903.517,05	2.521.421.783,85	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.205.320.314,87	4.834.636.173,49	4.708.886.916,74	4.503.365.521,48	4.417.874.714,88	1,24
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (2.1.1 s.d. 2.1.6)	**4.355.982.090,96**	**6.797.035.945,51**	**61.570.690.382,49**	**51.695.399.178,79**	**9.056.446.971,00**	**20,08**
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0	0	42.250.000.000,00		0	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (2.2.1)	**0,00**	**0,00**	**42.250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	JUMLAH KEWAJIBAN (2.1+2.2)	**4.355.982.090,96**	**6.797.035.945,51**	**103.820.690.382,49**	**51.695.399.178,79**	**9.056.446.971,00**	**20,08**
3	EKUITAS						
	Ekuitas	1.759.192.067.345,72	1.714.522.414.371,23	1.619.469.013.422,23	1.670.382.183.105,15	2.633.776.767.709,42	10,62
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (2+3)	**1.763.548.049.436,68**	**1.721.319.450.316,74**	**1.723.289.703.804,72**	**1.722.077.582.283,94**	**2.642.833.214.680,42**	**10,64**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 masih menggunakan istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung, di mana belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, serta belanja pemungutan pajak daerah. Sementara itu belanja langsung di antaranya terdiri dari belanja honorarium PNS; beasiswa pendidikan PNS; kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; makan dan minuman pegawai; pakaian dinas dan pakaian khusus; perjalanan dinas serta belanja modal (kantor, mobil dinas, meubel, air, peralatan dan perlengkapan, dll).

Berdasarkan data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ngada tahun 2020 hingga 2024, secara umum terjadi tren pertumbuhan anggaran yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,05 persen per tahun. Perkembangan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Ngada dalam menjaga kesinambungan pembiayaan terhadap kebutuhan aparatur, baik melalui komponen belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Pada belanja tidak langsung, Belanja Gaji dan Tunjangan yang merupakan komponen terbesar menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 6,79 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan penyesuaian terhadap dinamika pegawai, baik dari sisi jumlah ASN, kenaikan pangkat, maupun kebijakan tunjangan. Di sisi lain, Belanja Tambahan Penghasilan mengalami penurunan sebesar 10,24 persen, yang menunjukkan adanya kebijakan pengendalian atau penyesuaian terhadap pemberian TPP berdasarkan evaluasi kinerja dan kemampuan fiskal daerah.

Pada belanja langsung, terdapat beberapa komponen dengan tren pertumbuhan signifikan. Belanja Honorarium ASN meningkat rata-rata 8,11 persen, sementara Belanja Uang Lembur mencatat pertumbuhan sebesar 42,06 persen, yang menunjukkan intensitas kegiatan yang membutuhkan keterlibatan aparatur di luar jam kerja reguler. Sementara itu, Belanja Beasiswa Pendidikan ASN mengalami penurunan tajam sebesar 30,45 persen, yang menunjukkan adanya penurunan prioritas pada pengembangan kapasitas individu secara formal dalam jangka pendek. Sebaliknya, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis justru mengalami lonjakan tajam dengan pertumbuhan rata-rata 118,36 persen, mengindikasikan penguatan pada aspek pengembangan kompetensi teknis secara langsung.

Komponen belanja operasional seperti Belanja Makanan dan Minuman Pegawai relatif stabil dengan pertumbuhan minimal (0,13 persen), mencerminkan pengendalian yang konsisten terhadap belanja rutin non-produktif. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan tajam di tahun 2024 yang perlu dicermati dalam konteks efektivitas dan urgensi belanja. Sementara itu, Belanja Perjalanan Dinas menunjukkan tren penurunan sebesar 11,02 persen, yang mencerminkan upaya efisiensi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,68 persen, yang merefleksikan adanya investasi pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Tabel 2. 119 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	**Belanja Tidak Langsung**						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan[1]	224.444.682.339,00	213.466.532.801,00	226.965.189.015,00	245.161.165.055,00	291.950.907.737,00	6,79
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	23.464.511.366,00	23.917.282.715,19	25.490.704.036,00	39.544.371.420,00	15.233.661.142,64	-10,24
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.058.700.000,00					
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)		198.350.000,00	106.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
B	**Belanja Langsung**						
1	Belanja Honorarium PNS**)	3.409.210.836,00	4.094.594.496,00	4.792.959.100,00	3.148.902.000,00	4.657.602.000,00	8,11
2	Belanja Uang Lembur**)	139.195.000,00		518.824.310,00	417.875.000,00	566.930.000,00	42,06
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.458.092.000,00	2.657.000.000,00	412.000.000,00	340.000.000,00	575.000.000,00	-30,45
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	69.163.000,00	1.556.410.000,00	230.034.500,00	3.658.876.636,00	1.572.521.226,00	118,36
5	Belanja premi asuransi kesehatan						
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	7.782.568.696,00	7.984.334.985,00	9.208.167.655,00	9.880.412.657,00	7.824.307.720,00	0,13
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	293.022.040,00	43.011.100,00	158.871.100,00	67.750.000,00	853.190.000,00	30,63
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	122.209.140,00					
9	Belanja perjalanan dinas**)	39.166.991.405,00	33.024.068.319,00	34.267.326.333,00	33.082.116.235,00	24.547.505.714,00	-11,02
10	Belanja perjalanan pindah tugas						
11	Belanja Pemulangan Pegawai						
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubel, air, peralatan dan perlengkapan dll)	27.094.616.469,00	35.188.301.251,00	43.130.899.063,03	29.169.514.601,00	39.202.740.339,00	9,68

No	Uraian	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	TOTAL	**330.502.962.291,00**	**322.129.885.667,19**	**345.280.975.112,03**	**364.770.983.604,00**	**387.384.365.878,64**	**4,05**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada, 2025

Keterangan:

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

****) Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi*

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, besaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ngada menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,32 persen per tahun. Pada tahun 2020, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah di kabupaten ini menunjukkan besaran 35,69 persen, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi 36,17 persen. Dari besaran tersebut dapat dikatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, belanja daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan memiliki proporsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparaturnya.

Tabel 2. 120 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngada 2020-2024

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2020	282.387.891.380,00	791.153.639.855,28	35,69
2	Tahun Anggaran 2021	285.581.252.245,19	830.062.190.063,70	34,40
3	Tahun Anggaran 2022	300.008.786.621,00	814.148.998.632,56	36,85
4	Tahun Anggaran 2023	294.673.584.637,00	832.676.576.102,69	35,39
5	Tahun Anggaran 2024	364.084.945.380,04	1.006.704.495.212,85	36,17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, dan belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran nilai pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Ngada memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,40 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp230.857.429.465,00 dan bertumbuh menjadi Rp342.984.926.780,24 di tahun 2024.

Tabel 2. 121 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**226.874.781.373,00**	**213.995.744.983,00**	**228.192.375.996,36**	**250.827.202.561,00**	**294.325.530.924,00**	**6,72**
1	Belanja gaji dan tunjangan	224.444.682.339,00	213.466.532.801,00	226.965.189.015,00	245.161.165.055,00	291.950.907.737,00	6,79
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	2.058.700.000,00					-100,00
3	Belanja bunga			597.830.246,36	4.885.156.250,00	1.716.406.250,00	
4	Belanja bagi hasil (*pos transfer/bagi hasil pendapatan ke desa - LRA*)	371.399.034,00	529.212.182,00	629.356.735,00	780.881.256,00	658.216.937,00	15,38
B	**Belanja Langsung**	**3.982.648.092,00**	**3.913.760.294,00**	**1.991.660.068,00**	**1.939.410.483,00**	**2.611.616.523,20**	**-10,01**
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.						
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	2.458.092.000,00	2.657.000.000,00	412.000.000,00	340.000.000,00	575.000.000,00	-30,45
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) - *pos belanja jasa kantor*	1.426.556.092,00	1.067.480.294,00	1.330.415.068,00	1.214.833.483,00	1.465.819.523,20	0,68
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	98.000.000,00	189.280.000,00	249.245.000,00	384.577.000,00	570.797.000,00	55,35
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)						
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**-**	**-**	**6.000.000.000,00**	**42.249.999.999,96**	**46.047.779.333,04**	
1	Pembentukan dana cadangan			3.000.000.000,00			
2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			3.000.000.000,00		3.797.779.333,00	

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - pemerintah pusat				42.249.999.999,96	42.250.000.000,04	
	TOTAL (A+B+C)	**230.857.429.465,00**	**217.909.505.277,00**	**236.184.036.064,36**	**295.016.613.043,96**	**342.984.926.780,24**	**10,40**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada, 2025

2.2.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa analisis pembiayaan adalah analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah ini dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil anggaran, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Analisis sumber penutup defisit ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai defisit ril anggaran, yang kemudian dilihat ada atau tidaknya penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil anggaran tersebut, sehingga akan diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran. Defisit riil anggaran dihitung dari jumlah realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam lima tahun terakhir, defisit riil anggaran di Kabupaten Ngada terjadi berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2024, dengan besaran Rp6.939.640.688,64 di tahun 2020; -Rp5.868.949.934,46 di tahun 2021; -Rp55.418.565.339,27 di tahun 2022; dan -Rp24.383.610.893,04 di tahun 2023, dan - Rp1.155.618.487,14 di tahun 2024.

Dalam kurun waktu yang sama, penutup defisit riil anggaran di Kabupaten Ngada bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Defisit anggaran yang terjadi di kabupaten ini dapat ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah. Meskipun telah digunakan untuk menutup defisit riil anggarannya, namun masih terdapat sisa penerimaan pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan lainnya. Komposisi penerimaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti berikut.

Tabel 2. 122 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Realisasi pendapatan daerah	798.093.280.543,92	824.193.240.129,24	764.730.433.293,29	850.542.965.209,61	1.051.596.656.058,75	7,14
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja daerah (*pos belanja dan transfer*)	791.153.639.855,28	830.062.190.063,70	814.148.998.632,56	832.676.576.102,69	1.006.704.495.212,85	6,21
3.	Pengeluaran pembiayaan daerah	-	-	6.000.000.000,00	42.249.999.999,96	46.047.779.333,04	
A	**Defisit riil**	**6.939.640.688,64**	**- 5.868.949.934,46**	**- 55.418.565.339,27**	**- 24.383.610.893,04**	**- 1.155.618.487,14**	
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:						
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	69.326.503.649,83	78.559.772.539,59	72.542.247.619,36	101.640.952.763,51	80.683.271.400,91	3,87
5.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	3.000.000.000,00	-	-
6	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	84.500.000.000,00	-	-	
7	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**69.326.503.649,83**	**78.559.772.539,59**	**157.042.247.619,36**	**104.640.952.763,51**	**80.683.271.400,91**	3,87
A+B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA)**	**76.266.144.338,47**	**72.690.822.605,13**	**101.623.682.280,09**	**80.257.341.870,47**	**79.527.652.913,77**	1,05

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran anggara (belanja) selama satu periode anggaran. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran, di mana dengan mengetahui besaran SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam lima tahun terakhir, besaran SiLPA Kabupaten Ngada menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,87 persen per tahun. Besaran SiLPA pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat dipertahankan untuk semakin menurun, hal tersebut perlu diupayakan oleh pemerintah kabupaten karena semakin kecil nilai SiLPA mengindikasikan semakin baik dan sinergisnya perencanaan penganggaran dengan realisasinya.

Tabel 2. 123 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	69.326.503.649,83	99,78	78.559.772.539,59	98	72.542.247.619,36	88	101.640.952.763,51	98	80.683.271.400,91	98	3,87
2.	Pelampauan penerimaan PAD											
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan											
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah											
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya											
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	150.661.776,09	0,22	1.962.399.772,02	2,50	8.446.642.144,46	11,64	1.776.902.890,41	2,05	1.776.902.890,41	2,20	85,32
7.	Kegiatan lanjutan											

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis SILPA bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Besaran sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Ngada didapatkan dari selisih saldo kas neraca daerah yang dihitung berdasarkan jumlah kas dan setara kas daerah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Dalam lima tahun terakhir, besaran sisa lebih (riil) pembiayaan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08 persen per tahun.

Tabel 2. 124 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Saldo kas neraca daerah	67.107.479.137,17	65.932.301.628,26	100.200.483.750,20	67.957.791.333,78	68.959.854.602,29	0,68
	Dikurangi:						
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	150.661.776,09	1.962.399.772,02	8.446.642.144,46	2.083.266.929,56	1.776.902.890,41	85,32
3.	Kegiatan lanjutan						
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**66.956.817.361,08**	**63.969.901.856,24**	**91.753.841.605,74**	**65.874.524.404,22**	**67.182.951.711,88**	**0,08**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 (Audited) dan 2024 Unaudited, Diolah

2.2.3. Kerangka Pendanaan

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025-2030

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Ngada berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan wilayah, kegiatan pembangunan di kabupaten ini masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, dimana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Perhitungan proyeksi APBD Kabupaten Ngada disusun berdasarkan histori penerimaan daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Proyeksi penerimaan daerah tersebut ini juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran dana perimbangan yang merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Ngada sebesar 2,2 persen, sedangkan belanja sebesar 2,4 persen. Pada komponen pendapatan rata-rata pertumbuhan tahunan tertinggi disumbang oleh komponen Transfer Pemerintah Provinsi, menyusul Komponen Pendapatan Asli Daerah. Pada sisi belanja pertumbuhan tertinggi disumbang oleh belanja tidak terduga, Belanja bangunan dan gedung. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan lima tahunan dilakukan proyeksi pendapatan dan belanja untuk lima tahun ke depan, dengan beberapa asumsi antara lain: (1) Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat, khususnya terkait dana transfer umum, diarahkan secara kondusif untuk mendukung dan merespons kebutuhan serta prioritas pembangunan di daerah, (2) Proyeksi tersebut disusun berdasarkan asumsi *ceteris paribus*, yakni dengan mengandaikan bahwa variabel-variabel lain di luar model tetap konstan selama periode perencanaan. Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Ngada tahun 2026-2030, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 125 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026-2030

No.	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	Proyeksi (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**45.074.168.361,00**	**67.680.982.479,42**	**70.529.997.801,34**	**73.600.835.515,27**	**76.913.429.631,29**	**80.489.547.327,48**
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	10.663.409.255	25.134.854.786	27.457.021.830	29.993.729.990	32.764.800.361	35.791.885.270
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	4.403.652.699	32.557.602.049	32.884.679.814	33.215.043.445	33.548.725.949	33.885.760.669
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.132.734.946	3.903.132.000	3.981.194.640	4.060.818.533	4.142.034.903	4.224.875.601
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	28.874.371.461	6.085.393.644	6.207.101.517	6.331.243.547	6.457.868.418	6.587.025.787
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**998.054.115.879,00**	**924.290.016.514**	**952.676.382.809**	**982.206.254.166**	**1.012.931.331.148**	**1.044.905.975.334**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**815.993.631.370,00**	**758.871.510.630**	**785.678.521.171**	**813.498.963.823**	**842.373.702.638**	**872.345.350.647**
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	5.213.957.980,00	4.785.689.000	4.785.689.000	4.785.689.000	4.785.689.000	4.785.689.000
1.2.1.2	Dana bagi hasil sumber daya alam						
1.2.2.2	Dana alokasi umum	502.389.992.818	544.864.027.030	561.209.947.841	578.046.246.276	595.387.633.664	613.249.262.674
1.2.2.3	Dana alokasi khusus	308.389.680.572	209.221.794.600	219.682.884.330	230.667.028.547	242.200.379.974	254.310.398.973
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**156.288.007.000,00**	**153.259.622.265**	**153.763.834.027**	**154.303.049.600**	**154.879.699.048**	**155.496.381.136**
1.2.2.1	Dana penyesuaian/ Dana Insentif Daerah	2.867.330.000,00	7.262.909.265,00	7.767.121.027,00	8.306.336.600,00	8.882.986.048,00	9.499.668.136,00
1.2.2.2	Dana Desa	153.420.677.000	145.996.713.000	145.996.713.000	145.996.713.000	145.996.713.000	145.996.713.000
1.2.3	**Transfer Antar Daerah**	**25.772.477.509,00**	**12.158.883.619**	**13.234.027.611**	**14.404.240.743**	**15.677.929.462**	**17.064.243.552**
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	25.772.477.509	12.158.883.619	13.234.027.611	14.404.240.743	15.677.929.462	17.064.243.552
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya						
1.2.3.3	Bantuan keuangan						
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**7.329.530.367,00**	**7.769.735.698**	**7.925.130.412**	**8.083.633.020**	**8.245.305.680**	**8.410.211.794**
1.3.1	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	7.329.530.367	7.769.735.698	7.925.130.412	8.083.633.020	8.245.305.680	8.410.211.794

No.	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	Proyeksi (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2	Pendapatan dana darurat						
1.3.3	Pendapatan hibah						
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.050.457.814.607,00**	**999.740.734.691,42**	**1.031.131.511.022,34**	**1.063.890.722.701,27**	**1.098.090.066.459,29**	**1.133.805.734.456,48**
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**594.101.079.738,00**	**649.232.373.929,00**	**669.547.800.763,00**	**686.793.320.017,00**	**704.274.305.209,00**	**717.759.247.519,00**
2.1.1	Belanja pegawai	364.195.201.081	462.657.161.687	475.557.907.952	485.120.580.499	494.640.828.633	499.877.845.381
2.1.2	Belanja barang dan jasa	195.497.422.474	182.440.851.122	189.795.468.469	197.417.276.929	205.315.983.478	213.501.647.743
2.1.3	Belanja bunga	1.716.406.250					
2.1.4	Belanja hibah	30.916.949.933	1.871.961.120	1.909.400.342	1.947.588.349	1.986.540.116	2.025.491.883
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.775.100.000	2.262.400.000	2.285.024.000	2.307.874.240	2.330.952.982	2.354.262.512
2.2	**Belanja Modal**	**205.532.074.479,00**	**136.524.115.448,42**	**141.179.937.585,34**	**150.081.516.829,27**	**159.989.398.820,29**	**175.205.333.635,48**
2.2.1	Belanja modal tanah	493.108.795	2.000.000.000	2.040.000.000	2.080.800.000	2.122.416.000	2.164.864.320
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	39.202.740.339	19.329.500.273	19.397.100.033	19.950.525.308	20.519.740.549	21.105.196.264
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	96.610.152.835	16.300.895.000	16.954.181.988	17.140.167.467	17.329.479.866	18.138.969.051
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	61.518.024.280	94.251.232.785	97.816.526.512	105.582.761.798	114.307.768.457	128.270.661.989
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	4.888.054.280	2.341.917.585	2.459.013.464	2.581.964.137	2.711.062.344	2.846.615.462
2.2.6	Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)	2.819.993.950	2.300.569.805	2.513.115.588	2.745.298.119	2.998.931.604	2.679.026.549
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**3.513.033.000,00**	**4.635.000.000**	**4.774.050.000**	**4.917.271.500**	**5.064.789.645**	**5.216.733.334**
2.3.1	Belanja tak terduga	3.513.033.000	4.635.000.000	4.774.050.000	4.917.271.500	5.064.789.645	5.216.733.334
	JUMLAH BELANJA	**803.146.187.217,00**	**805.774.109.621**	**826.062.191.948**	**847.397.565.787**	**870.044.830.413**	**898.910.322.059**
3	**TRANSFER**						
3.1	**Transfer Bagi Hasil**	**658.216.937,00**	**1.144.831.404**	**1.179.176.346**	**1.214.551.637**	**1.250.988.186**	**1.288.517.831**
3.2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**201.617.866.305,00**	208.204.413.910	214.450.546.328	220.884.062.718	227.510.584.599	234.335.902.137
	JUMLAH TRANSFER	**202.276.083.242,00**	**209.349.245.314**	**215.629.722.674**	**222.098.614.354**	**228.761.572.785**	**235.624.419.968**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**1.005.422.270.459,00**	**999.740.734.691,42**	**1.031.131.511.022,34**	**1.063.890.722.701,27**	**1.098.090.066.459,29**	**1.133.805.734.456,48**
	SURPLUS/DEFISIT	**45.035.544.148,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**PEMBIAYAAN**						

No.	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	Proyeksi (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**80.683.271.400,91**	-	-	-	-	-
4.1.1	Penggunaan SiLPA	80.683.271.400,91					
4.1.2	Pencairan dana cadangan						
4.1.3	Pinjaman dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank						
4.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah						
4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**46.047.779.333,04**	-	-	-	-	-
4.2.1	Pembentukan dana cadangan						
4.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	3.797.779.333,00					
4.2.3	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank	42.250.000.000,04					
	PEMBIAYAAN NETTO	**34.635.492.067,87**	**15.853.093.808**	**11.050.681.637**	**6.117.081.918**	**1.250.988.186**	**1.288.517.831**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**79.671.036.215,87**					

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada, 2025

2.2.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat. Belanja wajib dan mengikut antara lain belanja operasional berupa belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa, serta pengeluaran pembiayaan.

Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2026-2030 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 126 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada

No	Uraian	Proyeksi (Rupiah)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	999.740.734.691	1.031.131.511.022	1.063.890.722.701	1.098.090.066.459	1.133.805.734.456
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran					
	Total Penerimaan	**999.740.734.691**	**1.031.131.511.022**	**1.063.890.722.701**	**1.098.090.066.459**	**1.133.805.734.456**
	Dikurangi					
4	Belanja pegawai dan transfer ke desa	672.006.407.001	691.187.630.626	707.219.194.854	723.402.401.418	735.502.265.349
5	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**327.734.327.690**	**339.943.880.396**	**356.671.527.847**	**374.687.665.041**	**398.303.469.107**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025, Diolah

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2026-2030 berkisar pada angka Rp302,3 miliar sampai Rp393,8 miliar. Penggunaan anggaran yang tersedia tersebut diklasifikasi untuk membiayai Prioritas I yakni urusan wajib pelayanan dasar dan Prioritas Daerah, serta Prioritas II untuk program kegiatan operasional kantor dan penunjang. Pembagiannya diasumsikan 65 persen dari kapasitas riil untuk Prioritas I dan 35 persen untuk Prioritas kedua.

Tabel 2. 127 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada

No	Uraian	Proyeksi (Rupiah)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	327.734.327.690	339.943.880.396	356.671.527.847	374.687.665.041	398.303.469.107
a	Prioritas 1	213.027.312.999	220.963.522.258	231.836.493.101	243.546.982.277	258.897.254.920
b	Prioritas 2	114.707.014.692	118.980.358.139	124.835.034.747	131.140.682.764	139.406.214.188

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025, Diolah

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan pernyataan kondisi atau realita yang disimpulkan berdasarkan kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Ngada didasarkan pada hasil identifikasi gambaran umum kondisi daerah yang telah dijabarkan dalam Bab II. Berikut adalah identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Ngada yang perlu mendapatkan perhatian selama pembangunan 5 tahun mendatang. Permasalahan pembangunan daerah berikut ini dikelompokkan dalam empat aspek pembangunan yakni aspek demografi dan geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum.

2.3.1.1. Aspek Demografi dan Geografi

Permasalahan pembangunan dari aspek geografi adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak sebagai kerangka pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dengan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Melalui pendekatan tersebut, diperlukan pengelolaan lingkungan yang kolaboratif, terintegrasi dan terpadu dari hulu ke hilir baik dalam upaya penguatan perencanaan perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan persampahan.

Tabel 2. 128 Permasalahan Aspek Geografi di Kabupaten Ngada

Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam
	Adanya potensi pencemaran dan degradasi lingkungan
	Kurangnya pengendalian pencemaran lingkungan
Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Masih rendahnya ketahanan masyarakat terhadap bencana
	Belum optimalnya tanggap darurat bencana

2.3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah aktivitas ekonomi masyarakat belum memberikan nilai tambah yang tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dari nilai PDRB yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTT. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada, yang dicerminkan melalui PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, Indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka, masih termasuk kategori rendah. Hal tersebut mengindikasikan kegiatan ekonomi daerah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Permasalahan ekonomi lainnya yang juga dihadapi oleh Kabupaten Ngada adalah pembangunan ekonomi yang belum berkelanjutan di mana kegiatan ekonomi masih berjalan secara tradisional dan bersifat ekstraktif.

Permasalahan bidang sosial dan sumber daya manusia adalah terkait sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing serta perlindungan sosial yang adaptif. Terdapat beberapa faktor utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan SDM di Kabupaten Ngada di antaranya berkaitan dengan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar serta pembangunan dan perlindungan sosial yang adaptif.

Tabel 2. 129 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ngada

Masalah	Akar Masalah
Perekonomian daerah masih bernilai tambah rendah	Dominasi sektor pertanian yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambah
	Kegiatan hilirisasi yang belum berjalan dengan optimal

Masalah	Akar Masalah
	Iklim investasi belum kondusif
	Masih rendahnya daya saing dan potensi ketenagakerjaan di daerah
	Masih rendahnya peran UMKM
	Belum optimalnya manajemen wisata daerah
	Masih rendahnya kontribusi sektor industri dan perdagangan
	Belum berkembangnya kelembagaan ekonomi
Perekonomian daerah masih belum berkelanjutan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi di desa
	Belum optimalnya ketersediaan pangan berkelanjutan
Pemenuhan akses dan kualitas pendidikan belum optimal	Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai belum merata
	Belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
	Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
	Pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) masih perlu ditingkatkan baik secara data maupun kondisi di lapangan
	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) perlu ditekan ke angka yang paling minimal
	Penanganan prevalensi stunting perlu ditingkatkan
	Belum optimalnya gerakan PHBS
	Pernikahan dini cukup tinggi (ASFR 15-19 tahun tinggi)
Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif	Masih rendahnya perlindungan terhadap anak
	Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
	Masih tingginya angka PPKS khususnya ODGJ, orang terlantar, lansia dan anak yang bermasalah dengan hukum, pengemis
	Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran
	Masih rendahnya keberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan
	Masih rendahnya kewirausahaan pemuda
	Belum optimalnya penanganan kemiskinan daerah

2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pembangunan aspek daya saing daerah dapat dilihat dari daya saing sumber daya manusia yang rendah, yang tercermin dari masih rendahnya daya saing dan potensi ketenagakerjaan di daerah, rasio kewirausahaan juga masih rendah, angka ketergantungan relatif tinggi, persentase desa mandiri yang masih rendah. Selain masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar permukiman menjadi salah satu permasalahan dalam aspek daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, merata, dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan Kabupaten Ngada untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 130 Permasalahan Aspek Daya Saing di Kabupaten Ngada

Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia	Masih rendahnya daya saing dan potensi ketenagakerjaan
	Rendahnya minat kewirausahaan
	Masih terbatasnya lapangan kerja
Masih sedikitnya desa mandiri	Masih kurangnya infrastruktur dasar
	Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia
	Keterbatasan akses ekonomi
Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terdampak bencana
	Belum optimalnya ketersediaan utilitas lingkungan permukiman (drainase, sanitasi komunal)

	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan beserta utilitas dalam mendukung konektivitas daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku
	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Transformasi tata kelola pemerintahan sangat urgen di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bidang ini berfungsi sebagai landasan dalam pembangunan daerah terutama merespon kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Hasil analisis data bidang tata kelola menunjukkan terdapat dua permasalahan mendasar di Kabupaten Ngada, yaitu penerapan reformasi birokrasi belum optimal dan kualitas pelayanan publik belum optimal.

Tabel 2. 131 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum di Kabupaten Ngada

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah daerah
	Belum optimalnya penguatan integritas kelembagaan dan aparatur
	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal
Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Digitalisasi pelayanan publik belum optimal
	Belum optimalnya manajemen pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di daerah
Belum optimalnya kinerja Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya penambahan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah
	Belum optimalnya penagihan pajak dan retribusi daerah

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Penentuan isu strategis Kabupaten Ngada dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2025-2029. Berikut ini penjabaran mengenai telaah isu strategis pada level internasional, nasional, dan regional serta rumusan isu strategis Kabupaten Ngada.

2.3.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis internasional atau global adalah isu pada level makro yang memiliki dampak secara global yang perlu direspon dengan baik oleh pemerintah baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Isu internasional tersebut sering kali disebut sebagai megatren global karena menggambarkan terjadinya pergeseran isu dan tantangan global di masa mendatang dan memiliki dampak pada sistem global dalam berbagai aspek. Berikut merupakan gambaran mengenai megatren global 2045.

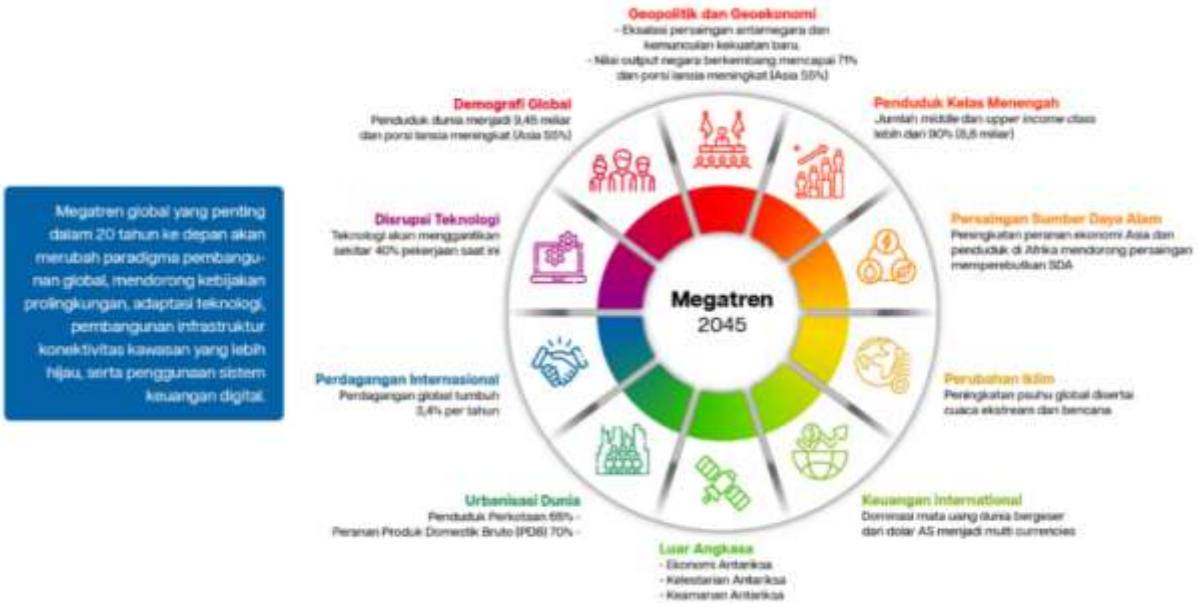

Gambar 2. 90 Megatren Global

Sumber: RPJPN 2025-2045

Tren global tersebut menjadi tantangan yang perlu direspon dengan bijak dan cermat oleh seluruh *stakeholder* pembangunan baik masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta di Kabupaten Ngada untuk lima tahun ke depan, khususnya terkait dengan demografi global, perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, dan disrupsi teknologi. Proses perencanaan perlu disusun dengan komprehensif, kontekstual dan berkelanjutan agar pergeseran tersebut dapat direspon dengan baik melalui berbagai arah kebijakan pembangunan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPN 2025-2045 perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis di Kabupaten Ngada. Hal ini menjadi penting sebagai upaya mendorong sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Berikut ini merupakan isu strategis yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 yang terkait dengan Kabupaten Ngada:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rendahnya tingkat produktivitas terkait dengan permasalahan perekonomian daerah yang masih bernilai tambah rendah.
2. Lemahnya kapasitas Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN). Hal ini terkait dengan permasalahan sumber daya manusia yang belum produktif.
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Hal ini terkait dengan permasalahan dominasi sektor pertanian yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambah dan kegiatan hilirisasi yang belum berjalan dengan optimal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata. Hal ini terkait dengan permasalahan belum optimalnya manajemen wisata daerah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut. Selama ini potensi ekonomi laut belum dimanfaatkan dengan optimal di Kabupaten Ngada.
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan nilai tambah ekonomi. Isu strategis ini terkait dengan permasalahan rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam

menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat berperan sebagai tiang penyangga ketahanan ekonomi daerah dan memberdayakan masyarakat Ngada.

7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif rendah. Hal ini terkait dengan masih relatif rendahnya sumber daya manusia serta etos kerja yang masih relatif rendah di Kabupaten Ngada.
8. Masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Penggunaan energi terbarukan di Kabupaten Ngada belum berjalan, masih dalam rencana pengembangan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Ngada tahun 2023-2043.
9. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini terkait permasalahan adanya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa limbah dan sampah serta berbagai aktivitas pembangunan lain.
10. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas. Hal ini terkait dengan permasalahan jaringan internet di Kabupaten Ngada yang belum sepenuhnya menjangkau semua wilayah.
11. Integrasi ekonomi domestik masih terbatas. Dalam hal ini integrasi domestik diartikan sebagai proses penyatuan ekonomi Kabupaten Ngada dalam satu kesatuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
12. Akses dan kualitas yang belum merata pada sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Hal ini merupakan permasalahan utama yang terdapat di Kabupaten Ngada.
13. Kepastian dan penegakan hukum masih rendah. Permasalahan kepastian dan penegakan hukum masih menjadi permasalahan di Kabupaten Ngada.
14. Tata kelola pemerintahan belum optimal. Hal ini terkait dengan permasalahan belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi.
15. Demokratisasi belum optimal.
16. Kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa.

Isu-isu strategis tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Ngada.

2.3.2.3. Isu Strategis Regional

Isu strategis regional perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis di Kabupaten Ngada. Isu Regional tersebut dapat meliputi isu regional yang berkembang di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Provinsi NTT. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedua isu regional tersebut.

A. Regional Bali - Nusa Tenggara

Dalam kerangka pembangunan nasional, Kabupaten Ngada termasuk dalam koridor pembangunan Bali -Nusa Tenggara. Dengan demikian, isu strategis pada wilayah regional Bali-Nusa Tenggara memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kabupaten Ngada di masa yang akan datang. Berdasarkan Dokumen RPJPN 2025-2045 beberapa isu strategis yang menjadi tantangan untuk Wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan Pariwisata Wilayah Bali-Nusa Tenggara**

   Pengembangan pariwisata wilayah Bali-Nusa Tenggara belum optimal. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah wisatawan di wilayah Nusa Tenggara yang masih belum optimal. Terbatasnya

kapasitas masyarakat menjadi salah satu penyebab pengembangan pariwisata yang belum optimal.

2. **Kinerja Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

   Kinerja desentralisasi dan otonomi daerah masih belum optimal. Kondisi ini ditandai dengan Indeks Integritas di Provinsi NTB dan NTT masih berada di bawah capaian nasional. Capaian SPM terutama di Provinsi NTT masih perlu untuk ditingkatkan.

3. **Kualitas Lingkungan Hidup dan Potensi Bencana**

   Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa limbah dan sampah serta berbagai aktivitas pembangunan lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi agenda penting untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan untuk generasi mendatang. Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara. Di samping itu, sarana dan prasarana mitigasi bencana masih terbatas, khususnya di daerah tertinggal bagian selatan dan timur wilayah Nusa Tenggara.

4. **Sosial**

   Angka kemiskinan Provinsi NTT berada pada peringkat tertinggi ke-3 secara nasional. Di Provinsi NTT juga masih terdapat daerah tertinggal. Selain itu IPM Provinsi NTT masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah masih berada di bawah rata-rata capaian nasional. Prevalensi stunting di Provinsi NTT masih tergolong tinggi yakni mencapai 35,3 persen pada tahun 2022.

5. **Akses dan Kualitas Sarana dan Prasarana**

   Konektivitas laut dan penyeberangan di Bali Nusa-Tenggara masih belum optimal. Pembangunan jalan Trans Flores dan jalan trans lainnya belum tuntas. Sementara itu ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah masih rendah. Masalah akses air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pariwisata juga masih perlu menjadi perhatian.

6. **Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**

   Masih banyak terjadi kasus *illegal fishing* di perairan wilayah Bali-Nusa Tenggara terutama di daerah-daerah perbatasan laut negara dengan Timor Leste dan Australia (WPP 573) yang menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sehingga perlu dijaga kedaulatannya.

B. Regional Nusa Tenggara Timur

Isu strategis regional Nusa Tenggara Timur merupakan isu strategis di Provinsi NTT yang juga perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan perumusan isu strategis di Kabupaten Ngada. Berikut ini merupakan isu strategis Provinsi NTT berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi NTT 2025-2045:

1. **Kemiskinan**

   Kemiskinan merupakan isu global yang juga masih menjadi isu strategis di Provinsi NTT. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka, pemerintah pusat telah menargetkan tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045. Angka kemiskinan Provinsi NTT mencapai 19,96 persen per Maret 2023. Secara nasional, Provinsi NTT menempati peringkat ke tiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Provinsi NTT.

2. **Kesenjangan dan ketertinggalan daerah**

   Pembangunan wilayah di Provinsi NTT masih belum merata. Hal ini diindikasikan dengan nilai Indeks Williamson yang mencapai 0,632. Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 13 kabupaten di Provinsi NTT merupakan daerah tertinggal yang tersebar di berbagai gugus pulau.

3. **Rendahnya kualitas dan daya saing SDM serta kemerosotan nilai-nilai budaya**

   IPM Provinsi NTT pada tahun 2023 mencapai 68,40. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional dan berada pada peringkat 32 secara nasional. Capaian IPM Provinsi NTT disebabkan oleh permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. Isu strategis sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi "kebhinekatunggalikaan", serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambah ke Provinsi NTT.

4. **Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta rendahnya pemanfaatan teknologi (hilirisasi)**

   Struktur perekonomian Provinsi NTT selama ini didominasi oleh sektor dengan nilai tambah rendah yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2022 dan sebesar 29,31 persen pada tahun 2023. Provinsi NTT belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di Provinsi NTT saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Hilirisasi menjadi penting untuk dilakukan guna meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

5. **Belum optimalnya pengembangan pariwisata**

   Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik wisatawan nusantara dan mancanegara. Kawasan pariwisata yang dikembangkan yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan di Provinsi NTT hanya 744 ribu wisatawan nusantara dan 58 ribu wisatawan mancanegara, jauh lebih rendah dibandingkan Bali yang jumlah wisatawan nusantara mencapai 8,1 juta dan 2,2 juta wisatawan mancanegara. Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT menjadi agenda penting untuk mendorong pembangunan ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara.

6. **Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau**

   Pembangunan berkelanjutan mentitikberatkan pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Konsep pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi alam NTT perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

7. **Perubahan iklim, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana**

   Perubahan iklim menjadi tantangan yang sangat serius di masa yang akan datang. Kenaikan suhu global pada tahun 2022 telah mencapai 0,89 derajat celcius dibandingkan dengan suhu pada tahun 1990 (NOAA, 2023). Perubahan iklim yang cukup ekstrim berpotensi mengakibatkan gagal panen atau puso semakin luas. Kondisi ini berkaitan dengan ketahanan pangan lebih dari itu prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi NTT sebesar 13,74 persen,

lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Di samping itu, penanggulangan bencana juga perlu menjadi perhatian. Indeks Risiko Bencana Provinsi NTT mencapai 139,23 dan termasuk dalam kategori sedang.

8. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan**

   Isu tata kelola pemerintahan di Provinsi NTT berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan, ASN yang berkualitas dan profesional, penguatan kelembagaan pemerintahan baik dari level pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.

2.3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya secara bijak dalam pembangunan, tanpa mengorbankan kebutuhan sumber daya bagi generasi mendatang. Pola pendekatan pembangunan berkelanjutan mengarahkan bahwa perencanaan pembangunan diselaraskan dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diukur melalui pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan telah selaras dengan pembangunan berkelanjutan maka penyusunan dokumen RPJMD perlu diselaraskan dengan dokumen KLHS RPJMD yang memuat tentang capaian pembangunan berkelanjutan.

Salah satu bentuk keselarasan ini tercermin dalam perumusan isu strategis RPJMD yang perlu untuk merujuk kepada hasil identifikasi isu strategis KLHS RPJMD yang didasarkan pada capaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ngada. Berikut ini merupakan hasil identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ngada.

1. **Belum optimalnya pelindungan sosial**

   Masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama. Persentase penduduk miskin Kabupaten Ngada tahun 2023 (12,06 persen) masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional (9,36 persen) dan target nasional (6-7 persen). Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

   Selain itu pemberdayaan perempuan di berbagai sektor baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan maupun ekonomi serta upaya yang dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan. Ketimpangan gender masih tinggi dan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan kenaikan dari 0,26 persen tahun 2021 menjadi 0,67 persen tahun 2023. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan masih mengalami kenaikan dari 11 persen tahun 2022 menjadi 14 persen tahun 2023.

2. **Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan**

   Pelayanan pendidikan masih belum optimal ditunjukkan dengan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah yakni 61,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun Kabupaten Ngada sebanyak 38,69 persen dari total penduduk Kabupaten Ngada tidak berpartisipasi pada jenjang sekolah yang seharusnya, yakni SMA/SMK/MA. Demikian pulan APK jenjang SMA/SMK/MA masih rendah sebesar 84,73 persesn, dan APK SMP/MTs/Sederajat 93,97 persen.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Ngada belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena tidak semua fasilitas kesehatan yang ada didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai. Di dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas diperlukan sarana dan prasarana pendukung termasuk tenaga kesehatan yang memadai. Data sumber daya manusia kesehatan per 31 Desember 2022 terdapat 1.200 orang tenaga yang bekerja di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Tenaga yang bekerja di bidang kesehatan ini terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya. Tenaga yang bekerja di Dinas Kesehatan sebanyak 84 orang, Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 408 orang dan Puskesmas sebanyak 708 orang. Jika dilihat dari rasio kebutuhan pelayanan tenaga kesehatan, rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Ngada belum mencukupi jika dibandingkan dengan rasio tenaga secara nasional.

3. Belum optimalnya peningkatan ekonomi wilayah

Perekonomian Kabupaten Ngada merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian. Perekonomian Kabupaten Ngada memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pertanian. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Ngada masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Ngada dari tahun 2019-2023.

Pada tahun 2023, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur ekonomi NTT (847,51 Milyar Rupiah), kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (449,00 miliar Rupiah); dan Konstruksi (336,76 miliar Rupiah). Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar nilai PDRB di Kabupaten Ngada, kategori ini mencakup sub kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri dari golongan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan; sub kategori usaha kehutanan dan penebangan kayu; dan sub kategori perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perwujudan tata kelola yang baik antara lain dapat dilihat dari persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), tahun 2023 tercatat memiliki nilai CC (50-60), sementara SAKIP tingkat kabupaten B. Ini menunjukkan SAKIP Kabupaten Ngada belum tercapai. Indeks Reformasi Birokrasi tercatat bernilai C dan Indeks Pelayanan Publik bernilai D tahun 2022. Hal ini menunjukkan sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintah yang optimal belum mencapai target. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu wilayah. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih efisien, serta membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif sehingga berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan dapat ditangani dengan baik.

5. Ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan

Data InaRISK mencatat terdapat 10 jenis bencana yang diidentifikasi rawan di Kabupaten Ngada, yakni bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan dan kekeringan, tanah longsor dan tsunami. Jenis bencana tersebut termasuk dalam klasifikasi rawan sedang, rendah hingga tinggi. Kondisi rawan bencana alam yang termasuk dalam klasifikasi tinggi meliputi: banjir (4.608,55 hektar); banjir bandang (2.922,24 hektar); cuaca ekstrem (19,661,97 hektar); abrasi (1.155,13 hektar); gempa bumi (29.969,55 hektar); kebakaran hutan dan lahan (65.221,78 hektar); kekeringan (44.440,64 hektar); letusan gunung api (2.442,29 hektar); tanah longsor (31.099,48 hektar); dan tsunami (868,29 hektar). Sementara data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022, tercatat Kabupaten Ngada memiliki indeks 128,63, artinya masuk kategori sedang.

Terjadinya bencana dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Dalam Indeks Risiko Bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Dengan target nasional yang diberikan yaitu 118,6 tentunya menjadikan upaya penanggulangan bencana harus lebih dioptimalkan di Kabupaten Ngada sehingga dapat menekan angka kerugian baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan merupakan indikasi degradasi lingkungan. Menurunnya fungsi komponen-komponen tersebut antara lain disebabkan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berlebih. Degradasi lingkungan hidup dapat dilihat dari kondisi lahan kritis yang ada, yakni lahan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya telah atau sedang mengalami proses kerusakan yang diakibatkan degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan proses perubahan kondisi lingkungan fisik akibat kegiatan manusia ketika melakukan pengolahan lahan. Pembakaran, perambahan dan *illegal logging* merupakan dampak kerusakan hutan yang menjadi penyebab terbentuknya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan. Data menunjukkan bahwa tahun 2024, lahan kritis di Kabupaten Ngada terbagi dalam beberapa kategori yaitu agak kritis seluas 89.833,07 hektar, kritis seluas 18.142,05 hektar, sangat kritis seluas 479,59 hektar, dan potensial kritis seluas 33.176,59 hektar.

2.3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Ngada

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis merupakan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal Kabupaten Ngada sebagai berikut:

A. Pengurangan angka kemiskinan

Masih tingginya angka kemiskinan merupakan isu utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Ngada, sehingga pengurangan angka kemiskinan menjadi isu strategis pertama yang perlu diupayakan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor maupun koordinasi lintas tingkatan pemerintahan dan koordinasi lintas sumber dana. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peran serta aktif masyarakat menjadi hal yang mutlak, tanpa dukungan peran serta aktif masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, maka apapun upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, tidak akan efektif.

Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Iklim usaha yang kondusif akan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar (berdaya saing) dengan tingkat pertumbuhan yang memadai. Akan tetapi penciptaan iklim usaha tersebut juga perlu peka terhadap pemecahan masalah-masalah sosial dalam kerangka memadukan prinsip-prinsip pasar bebas dan persaingan yang efisien. Selain itu perlu diperkuat dengan jaminan kehidupan bermartabat bagi semua warga masyarakat termasuk kelompok masyarakat dengan kemampuan yang terbatas dan terpinggirkan, tersedianya kesempatan yang merata dan adil di dalam mengakses sumber daya demi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga akan mengurangi ketimpangan antar wilayah, antar golongan dan antar gender.

Demikian pula dengan kelembagaan ekonomi maupun sosial yang ada perlu didorong untuk dapat menciptakan kemandirian dan ketangguhan masyarakat yang dapat menumbuhkan jaring pengaman sosial. Permasalahan sosial yang muncul akibat dari angka kemiskinan yang tinggi antara lain muncul kekerasan pada anak dan ketimpangan gender. Sementara itu di kalangan pemuda perlu menumbuhkan dan mendorong pemuda untuk melakukan kegiatan kewirausahaan agar tercipta lapangan kerja.

B. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Ngada masih cenderung bersumber dari kegiatan perekonomian di sektor primer. Sementara itu kegiatan perekonomian di sektor pertanian belum memiliki keterkaitan dengan sektor industri. Artinya, sektor tersebut sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah atau belum terolah dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat lokal. Sebagian dari produk sektor primer yang potensial belum optimal pengolahannya, sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor primer khususnya pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perkebunan belum dimanfaatkan dengan optimal. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian antara lain karena rendahnya produktivitas tanaman pangan, suplai produk pertanian dari luar wilayah, belum berkembangnya industri pengolahan berbasis produk pertanian, yang diperburuk dengan kondisi infrastruktur jalan yang mempengaruhi kelancaran distribusi sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian masih mendatangkan dari luar. Kondisi sarana prasarana transportasi yang kurang memadai membuat distribusi sarana produksi pertanian menjadi mahal, di lain pihak biaya angkut hasil pertanian untuk pemasaran juga mahal. Bahkan terdapat beberapa wilayah pertanian (dalam arti luas) terisolir karena keterbatasan infrastruktur transportasi.

Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang diharapkan mengarah pada konsep ekonomi hijau yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Lingkup ekonomi hijau merupakan *renewable resources* (sumber daya berkelanjutan) berbasis lahan (pertanian, perkebunan, kehutanan serta menyentuh wilayah pesisir dan kelautan) serta turunannya melalui peningkatan produktivitas pertanian dan kehutanan dengan menjaga dan memperbaiki serta memperkuat kemitraan antara *private sector*, petani, masyarakat, penggiat lingkungan dan lain-lain. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan peluang kerja dan pengembangan produk-produk hijau. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan penerapan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi berwawasan lingkungan.

Sementara potensi ekonomi lokal lain khususnya sektor pariwisata berbasis komunitas dan sumber daya lokal yang berkelanjutan belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Demikian pula dengan UMKM, industri kreatif dan hilirisasi produk lokal belum berkembang dengan baik dan memadai. Kelembagaan ekonomi daerah yang dapat mengelola potensi lokal daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya belum terbentuk.

Hingga saat ini potensi sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing wilayah di pasar.

C. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia diwujudkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan penyelenggaraan sistem pendidikan yang bermutu dan berkarakter budaya. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP dan pengembangan sekolah unggul. Hal ini tentunya didukung oleh peningkatan aksesibilitas menuju sarana pendidikan, peningkatan sarana pendidikan yang representatif, pengembangan manajemen berbasis sekolah, penataan kurikulum pendidikan, dan peningkatan kualitas guru. Kebutuhan pelayanan dasar pendidikan berupa fasilitas, sarana dan prasarana harus mampu disediakan oleh pemerintah. Selain itu partisipasi masyarakat, khususnya orang tua murid, sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas anak didik. Permasalahan pendidikan tidak semata pada ketersediaan sarana dan prasarana saja tetapi lebih dari itu adalah kualitas sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta tata kelola pendidikan yang baik. Penyediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan pada hampir semua wilayah dan peningkatan kualitas manajemen diharapkan juga dapat menekan angka *drop-out* siswa usia sekolah.

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk segala usia merupakan tujuan yang ingin dicapai bersama. Untuk mewujudkan tujuan itu diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak yaitu pemerintah, swasta (organisasi non-pemerintah) dan masyarakat. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta program-program inovatif di bidang kesehatan, pihak organisasi non-pemerintahan diperlukan untuk bersama-sama pemerintah memotivasi masyarakat agar berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Keaktifan masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, aktivitas fisik secara teratur, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kehamilan,

asupan gizi, dan deteksi tumbuh kembang anak, serta pemberantasan penyakit menular, dan ikut serta program pembangunan kesehatan yang ada. Peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjadi lebih representatif, peningkatan sarana prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga dokter, dokter spesialis, tenaga medis dan paramedis. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan baik melalui jenjang pendidikan formal maupun melalui diklat-diklat teknis dan fungsional, merupakan hal yang paling mendasar dalam upaya menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas.

D. Pembangunan infrastruktur wilayah

Tantangan pengembangan wilayah Kabupaten Ngada adalah aksesibiltas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka mengembangkan potensi pertanian, pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir utara dan selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses ke pelabuhan barang dan bandara. Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI). Sementara itu, pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternatif dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.

E. Ketersediaan pangan dan ketersediaan air

Kemandirian dan ketahanan pangan perlu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Kemandirian dan ketahanan pangan juga harus didukung dengan kebijakan pengendalian penggunaan lahan. Untuk mendukung sektor pertanian, pengelolaan jaringan irigasi perlu ditingkatkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu. Ketersediaan air merupakan kondisi yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan dasar *(basic need)*. Selain itu diperlukan pemenuhan kebutuhan air masyarakat melalui manajemen pengelolaan air dari hulu sampai ke hilir. Pola kemitraan menjadi hal yang harus dilakukan dalam konteks penyediaan air secara menyeluruh bagi masyarakat. Upaya mempertahankan kondisi kualitas air serta pemulihan air yang tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. Demikian juga akses terhadap air minum juga masih merupakan masalah penting di Kabupaten Ngada.

F. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan

Tujuan pembangunan di samping membentuk manusia seutuhnya juga mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pembangunan harus tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan sumber daya diarahkan menuju keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaannya. Pemanfaatan sumber daya yang seimbang selain mendukung pembangunan berkelanjutan, juga mampu mencegah terjadinya bencana baik alam maupun non alam. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan tujuan mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, mengingat Kabupaten Ngada memiliki potensi rawan bencana kategori tinggi untuk

beberapa jenis bencana. Oleh karena itu upaya pelestarian lingkungan tetap diikuti dengan upaya mitigasi bencana serta akibat dari perubahan iklim, sehingga setiap hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

G. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel merupakan prasyarat mutlak dalam Era Otonomi Daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik, bukan semata memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance*, tidak saja unsur pemerintah, tetapi juga sektor usaha/swasta dan masyarakat semestinya dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang sinergi dalam manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sementara masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah perlu dioptimalkan berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Penguatan sistem pelayanan birokrasi yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi yang adaptif dapat mendorong menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu keterkaitan antara masalah pokok, isu strategis dan misi dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 2. 132 Keterkaitan Masalah Pokok, Isu Strategis dan Misi

Masalah Pokok	Isu Strategis	Misi
1. Perekonomian daerah masih bernilai tambah rendah 2. Perekonomian daerah masih belum berkelanjutan	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal berkelanjutan 2. Ketersediaan pangan	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan
1. Pemenuhan akses dan kualitas pendidikan belum optimal 2. Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi
1. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar permukiman 2. Belum terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan	1. Pembangunan infrastruktur wilayah 2. Ketersediaan pangan dan air 3. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah
Belum optimalnya perlindungan sosial	Pengurangan angka kemiskinan	Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak perempuan dan anak
1. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat 3. Belum optimalnya kinerja Pendapatan Asli Daerah	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

BAB 3
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan di masa yang akan datang. Sedangkan sesuai dengan ketentuan, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam hal ini merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun mendatang.

Visi RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2025-2029 berpedoman pada visi RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045 yakni *"Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan,"* serta mempertimbangkan visi RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2021-2026 yakni *"Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan."* Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Ngada dan visi **Kepala Daerah Raymundus Bena, S.S., M.Hum** dan **Wakil Kepala Daerah Bernardinus Dhey Ngebu, S.P**; dengan *tagline* "**Membangun Desa Menata Kota"** serta *brand* unggulan **MURNI KASIH**, maka visi pembangunan Kabupaten Ngada dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA NGADA YANG UNGGUL, MANDIRI DAN BERBUDAYA BERBASIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN"

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

Ngada sebagai wilayah daerah otonom Kabupaten Ngada Provinsi NTT beserta seluruh masyarakatnya. Ngada merupakan bumi bersama yang mengandung makna sebagai ruang bagi kehidupan, sumber penghidupan dan keberagaman budaya. Dengan demikian interaksi sosial ekonomi antar masyarakat, antara masyarakat dengan alamnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian.

Ngada yang Unggul merupakan representasi daya saing Kabupaten Ngada dibandingkan dengan daerah lain dengan upaya meningkatkan kinerja sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata, sehingga dapat bersaing secara lebih baik dalam pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. Unggul ekonomi masyarakatnya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, tersedianya lapangan kerja dan bertambahnya penghasilan masyarakat. Unggul sumber daya manusia berupa masyarakat Ngada yang sehat, kuat, cerdas, terampil, kreatif, berkualitas dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman sehingga dapat memiliki tingkat kehidupan yang layak dan sejahtera. Unggul birokrasi yang ditandai tata kelola profesional, cepat melayani, cepat tanggap dan memberdayakan. Unggul sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang masyarakat dalam bekerja, menghasilkan, mengolah, menabung dan menjual berbagai komoditi.

Ngada yang Mandiri merupakan perwujudan kemampuan masyarakat Ngada yang memiliki tanggung jawab untuk membangun dirinya, keluarga, daerah dan bangsanya. Mandiri juga merupakan

perwujudan kemampuan daerah Kabupaten Ngada untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dengan mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki untuk mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi, pangan, dan energi.

Ngada yang Berbudaya adalah perwujudan masyarakat yang memiliki karakter kuat dan selalu menjaga moral, etika, nilai-nilai luhur, norma dan tradisi dan menjadi pedoman serta berfungsi mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada perilaku dalam kehidupan bermasyarakat Ngada. Berbudaya dalam masyarakat Ngada mencerminkan pemikiran maju sekaligus selalu menjaga persatuan dan kesatuan Ngada di tengah keberagaman suku dan budaya demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Berbudaya juga menandakan bahwa pembangunan di segala bidang harus selaras dengan nilai-nilai lokal atau kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat, terutama dalam merespon arus globalisasi dan modernisasi yang begitu pesat.

Ngada yang Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas merupakan perwujudan yang mencerminkan komitmen dalam mencapai sumber daya manusia masyarakat Ngada yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan perwujudan masyarakat Ngada yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan memadai, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki kemampuan berinovasi, serta menguasai teknologi dan informasi dengan memanfaatkan potensi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngada.

Ngada yang Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan merupakan perwujudan kondisi yang mencerminkan komitmen Ngada dalam menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi keberlanjutan terwujud ketika pembangunan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dapat selaras yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi berkelanjutan menjadikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga masa depan. Berkelanjutan juga berarti pembangunan yang lestari, seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mampu menyediakan ruang, sumber daya alam, dan mampu melakukan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem, serta memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Visi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 yakni **Terwujudnya Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya, Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**, selaras dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045, yaitu peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan menurun, kepemimpinan dan pengaruh global, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*. Ngada yang unggul, mandiri merupakan cerminan dari sasaran peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan yang menurun yang diukur dengan PDRB per kapita, kontribusi PDRB industri pengolahan, tingkat kemiskinan, Rasio Gini dan kontribusi PDRB kabupaten. Ngada yang berbudaya merupakan cerminan dari sasaran visi kepemimpinan dan pengaruh global yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Ngada yang berbasis pengelolaan sumber daya manusia berkualitas dan sumber daya alam berkelanjutan merupakan cerminan dari sasaran visi peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 3. 1. Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 "Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan"		
No	**Sasaran Visi**	**Indikator**
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp juta)
		Kontribusi PDRB industri pengolahan
2	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	Tingkat kemiskinan (%)
		Rasio Gini (indeks)
		Kontribusi PDRB kabupaten (%)
3	Kepemimpinan dan pengaruh global	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
		Indesk Daya Saing Daerah (IDSD)
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber: RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

Sementara itu jika dipetakan keterkaitan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 terlihat bahwa visi dan misi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 sudah selaras dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2. Keselarasan Visi, Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan Visi, Misi RPJPD Tahun 2025-2045

RPJMD 2025-2029		**RPJPD 2025-2045**
Visi		**Visi**
Unggul, Berbudaya, Mandiri, Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	**Selaras dengan**	**Maju, Berbudaya, Sejahtera, Berkelanjutan**
Misi		**Misi**
Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan		Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi		Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan menyejahterakan
Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif
Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak perempuan dan anak		Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan
Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat		Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan, dan berkesinambungan

Sumber: RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 dan Ranwal RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dengan Tujuan SDG's Tahun 2015-20

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan 17 tujuan implementasi Pembangunan Berkelanjutan

(SDG's) yang termasuk dalam sasaran nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk itu penerapan SDG's diselaraskan dalam misi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dengan Tujuan SDG's Tahun 2015-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029		SDGs Tahun 2015-2029
Misi 1	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	**Tujuan 1** Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
Misi 2	Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	
Misi 4	Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak perempuan dan anak	
Misi 5	Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	
Misi 1	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	**Tujuan 2** Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Misi 2	Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	
Misi 4	Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak perempuan dan anak	
Misi 5	Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	
Misi 2	Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	**Tujuan 3** Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Misi 2	Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	**Tujuan 4** Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
Misi 4	Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak perempuan dan anak	**Tujuan 5** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 6** Menjalin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 7** Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
Misi 1	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	**Tujuan 8** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,

Misi RPJMD Tahun 2025-2029		SDGs Tahun 2015-2029
Misi 2	Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh
Misi 4	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 9** Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
Misi 1	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	**Tujuan 10** Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
Misi 5	Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 11** Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Misi 5	Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 12** Menjamin pola produksi dan konsumsi berkelanjutan
Misi 1	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 13** Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
Misi 1	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	**Tujuan 14** Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 15** Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
Misi 4	Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak perempuan dan anak	**Tujuan 16** Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
Misi 5	Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	
Misi 3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	**Tujuan 17** Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

3.1.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, yang terdiri dari upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan" dirumuskan dalam misi yang terdiri dari 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.
2. Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi.
3. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah.
4. Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak.
5. Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

Berikut penjelasan masing-masing misi tersebut:

Misi 1:

Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Misi pertama ini untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan. Misi ini berfokus pada sektor strategis, yaitu pertanian, agroindustri, koperasi, dan pariwisata berbasis pedesaan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan lingkungan sebagai elemen penting dalam mendorong daya saing ekonomi daerah. Misi ini memiliki peranan yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Ngada melalui optimalisasi sumber daya lokal dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dengan mengintegrasikan potensi sektor pertanian dengan agroindustri secara terpadu. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian, yang pada gilirannya akan memperluas peluang ekonomi masyarakat pedesaan. Sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi daerah akan didorong ke arah produktivitas tinggi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui inovasi agroindustri.

Agroindustri yang dikembangkan berorientasi pada peningkatan kualitas, pengolahan lanjutan, serta pemasaran produk-produk unggulan pertanian yang ramah lingkungan. Upaya ini selaras dengan strategi hilirisasi produk pertanian untuk mendukung ketahanan ekonomi lokal. Dengan demikian, agroindustri akan bertindak sebagai penghubung antara sektor hulu dan hilir, serta mempercepat industrialisasi berbasis pertanian yang berkelanjutan.

Sektor ekonomi unggulan daerah yang akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan keberadaan lembaga ekonomi daerah. Lembaga ekonomi tersebut perlu dikelola secara profesional sebagai badan usaha milik daerah. Lembaga ekonomi usaha milik daerah diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu mengelola potensi unggulan daerah secara profesional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyedia pelayanan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha milik daerah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan PAD, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mendukung tumbuh berkembangnya UMKM dan membangun infrastruktur lokal, serta peningkatan pelayanan publik.

Sektor pariwisata pedesaan dikembangkan dengan pendekatan berbasis komunitas (*community-based tourism*) yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam mengelola destinasi wisata secara inklusif dan berkelanjutan. Pariwisata pedesaan di Kabupaten Ngada diarahkan untuk mengoptimalkan potensi budaya lokal dan menjaga kelestarian lingkungan, guna memastikan keberlanjutan dan daya tarik wisata yang otentik serta bertanggung jawab.

Selain itu, koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi rakyat akan diperkuat dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pasar, serta pengembangan teknologi informasi. Pengembangan koperasi bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah.

Misi 2:

Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi.

Mempercepat peningkatan kualitas SDM adalah mewujudkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan yang didahului dengan menyiapkan SDM yang sehat, kuat dan produktif. Oleh karena itu upaya penguatan sistem pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, penurunan stunting, pemberian gizi bagi ibu hamil dan menyusui pada periode emas (1.000 hari pertama kehidupan) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi premium. Pemenuhan dan pemerataan akses pelayanan menjadi fondasi awal untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Ngada yang sehat. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Ngada. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Dalam upaya transformasi kesehatan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti peningkatan layanan kesehatan pada semua fasilitas kesehatan baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, serta digitalisasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Aspek pencegahan dalam bentuk upaya pelayanan promotif dan preventif perlu terus ditingkatkan guna mencegah dan meminimalisir angka kesakitan di Kabupaten Ngada.

Selain penguatan sistem pelayanan kesehatan, diperlukan juga penguatan sistem pelayanan pendidikan sebagai pondasi dasar dalam meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter serta etos kerja tinggi juga dilakukan upaya dalam pembentukan karakter. Pada aspek pendidikan, peningkatan ketersediaan dan pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu fondasi guna mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan formal yang memadai. Selain itu, upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

serta pengembangan kurikulum yang diarahkan pada pendidikan karakter untuk membangun karakter dan budaya dengan tetap memperhatikan peningkatan keterampilan interpersonal, analitis dan digital dan memiliki etos kerja. Kondisi masyarakat sehat, cerdas, berkarakter dan memiliki etos kerja tinggi sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan termasuk produktivitas kerja di masa yang akan datang.

Etos kerja yang tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan. Dengan etos kerja yang baik akan memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi. Etos kerja yang baik juga akan mendorong untuk belajar mengembangkan diri dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Etos kerja yang tinggi merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk memiliki etos kerja yang tinggi dengan berbagai kebijakan yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya etos kerja yang tinggi di masyarakat dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan akses kesempatan kerja. Terbukanya akses kesempatan kerja yang didukung terbukanya informasi lowongan kerja pada akhirnya akan dapat menurunkan pengangguran. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang terbentuk akan lebih berkualitas.

Misi 3:

Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Pembangunan sarana prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan bukan hanya tentang kualitas yang dapat meningkatkan kenyamanan tinggal, namun pemerataan pembangunan di seluruh wilayah juga penting agar tidak terjadi ketimpangan. Kondisi geografis Kabupaten Ngada menjadi tantangan untuk mewujudkan keterhubungan antarwilayah, sehingga perlu upaya lebih lanjut agar konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi lebih berkualitas.

Pembangunan sarana-prasarana wilayah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Ngada yang telah dilakukan selama ini perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan pelaksanaannya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, agar cukup tersedia sarana prasarana wilayah yang memadai guna mendukung pembangunan wilayah untuk rakyat Ngada yang inklusif dalam semangat membangun desa menata kota. Pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dari seluruh masyarakat desa dan kota perlu difasilitasi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang berkualitas secara merata sesuai kebutuhannya. Pengembangan ekonomi wilayah yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten berupa pertanian dalam arti luas, agroindustri dan pariwisata perlu difasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai.

Selain itu diperlukan aksesibilitas dan penyediaan layanan air, penyediaan sarana-prasarana pendukung kehidupan sosial masyarakat yang berada di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Ngada. Untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat, sangat dibutuhkan ketersediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni berupa rumah dan prasarana sarana utilitas pendukungnya. Selain itu, penting untuk diperhatikan juga penataan Kota Bajawa sebagai ibukota Kabupaten Ngada yang berjati diri.

Lingkungan hidup yang berkualitas dalam rangka pembangunan berkelanjutan juga menjadi fokus perhatian pada misi ini. Hal ini mengingat kondisi wilayah Kabupaten Ngada yang memiliki kerawanan bencana kategori tinggi serta tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori sedang di sebagian besar wilayah. Hal ini membutuhkan ketangguhan terhadap bencana dan mengelola dampak perubahan iklim. Diperlukan upaya mitigasi, respon terhadap kejadian bencana, dan

penanganan pasca bencana. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dapat tercapai dan terus terpelihara.

Misi 4:

Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak.

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah difokuskan pada upaya mempercepat kemandirian kelembagaan ekonomi, sosial, dan budaya. Kelembagaan ekonomi baik lembaga formal seperti koperasi, lembaga keuangan dan lembaga informal seperti kelompok tani. Penguatan kelembagaan ekonomi diperlukan sebagai penyedia layanan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan koperasi diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani. Melalui koperasi masyarakat dimungkinkan mendapat akses keuangan, membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Penguatan BUMDesa dimaksudkan agar BUMDesa dapat dilibatkan dalam pengelolaan hasil produksi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah. Melalui BUMDesa usaha lokal dapat dikembangkan, nilai tambah produk lokal dapat ditingkatkan dan lapangan kerja dapat diciptakan. Sedangkan penguatan kelompok tani diharapkan sebagai wadah efektif untuk koordinasi dan berbagi pengetahuan di kalangan petani maupun stakeholder lain.

Sementara itu kelembagaan sosial, politik, budaya dan keagamaan yang kuat dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial yang hidup dalam masyarakat. Modal sosial dapat membangun solidaritas yang kuat, memelihara nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal, memelihara rasa aman dalam masyarakat, serta penyelesaian konflik dalam masyarakat secara responsif.

Kelembagaan sosial yang responsif dapat mendukung upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, perempuan dan anak serta kelompok pemuda. Lembaga tersebut mampu beradaptasi dan merespon kebutuhan serta perubahan yang terjadi di masyarakat, selain menjalankan fungsi dasar juga mencari solusi dan memberikan bantuan terkait masalah yang dihadapi masyarakat. Upaya pemberdayaan dan pendampingan bagi kelompok rentan tersebut menjadi hal yang perlu dilakukan guna menciptakan masyarakat sejahtera melalui kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan. Kelembagaan ekonomi dan sosial yang mandiri akan dapat mendukung peningkatan perlindungan sosial masyarakat khususnya bagi kelompok miskin dan rentan.

Kelembagaan ekonomi dan sosial yang kuat dan mandiri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Kemandirian kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan merupakan upaya untuk menciptakan ketahanan sosial dan budaya. Perwujudan hal ini memerlukan lingkungan yang inklusif bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, perempuan dan anak.

Sementara itu kemandirian kelembagaan kelompok ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan dapat mendorong pemuda untuk menjadi agen perubahan dan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam olahraga. Kelembagaan sosial melalui modal sosial yang hidup dalam masyarakat dapat mendukung kelompok pemuda dalam menghadapi tantangan perubahan jaman yang dinamis. Selain itu melalui olahraga dapat meningkatkan kesehatan, memperkuat karakter dan mendorong semangat

persatuan. Olahraga dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas hidup dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 5:

Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dimana kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi dengan pelayanan publik yang responsif, cepat, efektif, efisien dan terpercaya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan kualitas dan kapasitas ASN menjadi upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini didukung oleh perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis digital.

3.1.3. Tujuan

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran sehingga program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang menyumbang terwujudnya misi dan merupakan bagian dari upaya dalam misi pembangunan daerah yang lebih rinci dan kontekstual.

Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan (yang merupakan penjabaran setiap misi) selanjutnya dikaitkan dengan kondisi riil daerah, di antaranya aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum kewenangan urusan. Sasaran bertumpu pada isu strategis dan permasalahan kunci di Kabupaten Ngada untuk rentang waktu lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 ini kemudian dijadikan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam strategi untuk mencapai sasaran berikut program-program pembangunan sebagai tindak lanjutnya dengan tingkatan atau jenjang yang lebih operasional. Berikut keterkaitan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029:

Tabel 3. 4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

Visi Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**
1.	Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan
			Meningkatnya investasi
			Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

Visi Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**
	pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan		
2	Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan
			Menurunnya tingkat pengangguran
3	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur
			Meningkatnya konektivitas wilayah
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim
4	Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
			Meningkatnya perlindungan sosial
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan
5	Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur
			Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

Tabel 3.5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan										
Misi 1 Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,67	3,67- 4,29	3,97 - 4,59	4,27 - 4,90	4,58 - 5,20	4,88 - 5,51	5,19 - 5,81
			PDRB per kapita (Juta Rupiah)	25,67	24,98 - 28,11	25,89 - 29,01	26,82 - 29,95	27,79 - 30,91	28,79 - 31,91	29,82 - 32,95
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	35.07	34,83 - 36,19	35,26 - 36,63	35,70 - 37,06	36,14 - 37,50	36,58 - 37,94	37,01 - 38,38
			Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi (PAD)	8,23	8,37	9,46	10,6	11,93	12,6	13,87
		2. Meningkatnya investasi	Realisasi investasi	26,96	26,89 - 27,50	27,12 - 27,74	27,36 - 27,97	27,59 - 28,21	27,83 - 28,44	28,06 - 28,68
		3. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Persentase UMKM naik kelas	5	5	10	15	20	25	30
Misi 2 Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	72,04	72,46	72,88	73,29	73,71	74,13	74,55
		1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0.649	0,649	0,650	0,650	0,651	0,652	0,652
		2. Meningkatnya derajat kesehatan	Usia harapan hidup	74,43	74,71	74,91	75,12	75,32	75,53	75,74
			Prevalensi stunting	28,9	28,9	27,32	25,73	24,14	22,55	20,96
		3. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,68	1,80 - 3,25	1,64 - 3,10	1,49 - 2,94	1,33 - 2,79	1,18 - 2,63	1,02 - 2,48
Misi 3 Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana,	Terwujudnya infrastruktur berkualitas dan lingkungan		Indeks Infrastruktur	52,88	55,42	61,90	64,33	64,97	65,22	69,11
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,92	78,78	78,95	79,13	79,3	79,47	79,64
		1.Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	50	55	60	65	70	75	80

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan										
prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	hidup yang berkelanjutan	2.Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas	1,41	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		3.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	61,67	71,55	71,75	71,95	72,15	72,35	72,55
			Indeks Kualitas Udara	94,91	88,42	88,62	88,62	89,02	89,22	89,42
		4.Meningkatnya ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	122,18	94	93,5	93,76	92	91,54	91,3
Misi 4 Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	11,87	11,61 - 11,81	11,45 - 11,65	11,29 - 11,49	11,13 - 11,33	10,97 - 11,17	10,81 - 11,01
			Indeks Gini	0,326 (2020)	0,31 - 0,33	0,30 - 0,33	0,29 - 0,32	0,28 - 0,31	0,28 - 0,30	0,27 - 0,30
		1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	0,6341	0,635	0,636	0,637	0,638	0,639	0,64
		2. Meningkatnya perlindungan sosial	Persentase PMKS Mandiri	6	6	7	9	11	13	15
			Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	55,41 (2023)	55,45	55,49	55,53	55,57	55,61	55,65
Misi 5 Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	49,48	50,45	55,60	60,10	62,34	65,00	67,48
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP	60,1	60,5	61,00	61,20	61,70	62,20	62,70
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan										
dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 (2023)	69,17	70,33	71,50	72,67	73,83	75,00
			Indeks SPBE	2,17	2,30	2,33	2,49	2,65	2,81	3
		3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur	Indeks NSPK Manajemen ASN	62	70	72	74	76	78	80
		4. Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	67,359	68,43	69,53	70,64	71,77	72,91	74,08

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi pembangunan daerah “Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” dapat terwujud secara efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut akan menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Pada dasarnya semua program RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 merupakan program yang mendukung terwujudnya sasaran pokok pada tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045.

Tabel 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029

Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 1 **Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan**			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan	Optimalisasi pertanian inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani	Mempermudah akses petani dan nelayan kecil terhadap modal, teknologi dan pasar
		Optimalisasi potensi lokal dan inovasi teknologi dalam pengembangan sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk	Meningkatkan produksi, produktivitas, serta diversifikasi produk pertanian dan agroindustri melalui penggunaan inovasi dan teknologi ramah lingkungan
			Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
	Meningkatnya investasi	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	Menyederhanakan perizinan dan meningkatkan transparansi proses investasi
			Meningkatkan promosi investasi daerah dan kemitraan
			Meningkatkan infrastruktur pendukung investasi di sektor pertanian, agroindustri, dan pariwisata
			Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan akses permodalan dan teknologi	Meningkatkan fasilitasi akses kredit mikro dan permodalan bagi koperasi dan UMKM
		Optimalisasi kelembagaan dan kapasitas SDM koperasi	Revitalisasi koperasi dengan manajemen modern dan berbasis digital
		Peningkatan kemitraan dan kolaborasi strategis UMKM	Mendorong kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan perusahaan besar dalam rangka memperkuat rantai nilai
		Peningkatan akses pasar	Mengembangkan pemasaran digital
		Pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Mengembangkan kualitas dan kuantitas desa wisata berbasis produk ekonomi kreatif dan berkelanjutan

Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Peningkatan kapasitas masyarakat lokal	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pariwisata
		Pemasaran digital dan jejaring pariwisata	Meningkatkan promosi wisata pedesaan melalui platform digital, media sosial, dan *marketplace* pariwisata
		Pengembangan kolaborasi dan kemitraan strategis pemerintah daerah, swasta dan kelompok wisata lokal	Mengembangkan pariwisata pedesaan berbasis *community-based tourism* yang berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat dan kelestarian lingkungan
Misi 2 **Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi**			
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata	Meningkatkan ketersediaan pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi
			Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan akses layanan pendidikan
			Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan
			Meningkatkan mutu pembelajaran berbasis muatan lokal
			Meningkatkan akses biaya pendidikan
			Meningkatkan pemerataan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan
			Meningkatkan UHC (*Universal Health Coverage*)
			Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai
			Meningkatkan ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan
			Meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak
			Meningkatkan perilaku hidup sehat
			Meningkatkan kualitas gizi

Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan bagi perempuan khususnya usia 15-19 tahun
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan akses kesempatan kerja	Memperluas informasi lowongan kerja
			Meningkatnya akses lapangan kerja
			Meningkatkan program magang
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja
			Mengembangkan jiwa kewirausahaan
Misi 3 **Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah**			
Terwujudnya infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
		Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan permukiman perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan kualitas ruang kawasan perkotaan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah layak huni
			Meningkatkan ketersediaan listrik rumah tangga
			Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum
			Meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi aman
			Meningkatkan layanan persampahan
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana transportasi
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan
		Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
			Memantapkan regulasi pengelolaan lingkungan hidup
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim	Peningkatan kualitas penanganan bencana	Meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana

Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Optimalisasi mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan
			Meningkatkan keterlibatan dan kapasitas *stakeholder* dalam mitigasi perubahan iklim
Misi 4 **Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak**			
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pemberdayaan usaha masyarakat	Memperkuat BUMDes
			Meningkatnya daya saing IKM
		Optimalisasi modal sosial, modal manusia dan kemandirian kelembagaan sosial	Membangun solidaritas kelembagaan sosial dan budaya
			Memperkuat peran lembaga masyarakat adat dalam penyelesaian konflik
			Meningkatkan pendampingan lembaga ekonomi masyarakat
			Meningkatkan toleransi dan kearifan lokal
			Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat
	Meningkatnya perlindungan sosial	Optimalisasi perlindungan sosial	Memperkuat pelaksanaan jaminan sosial
			Meningkatkan pemberdayaan PMKS
			Memperkuat implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Optimalisasi pemberdayaan, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia`	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam semua sektor
			Meningkatkan perlindungan anak
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan olahraga
			Meningkatkan keberdayaan penyandang disabilitas dan lansia
Misi 5 **Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat**			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah daerah	Peningkatan fungsi dan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel	Meningkatkan pelaporan kinerja berbasis elektronik

Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Peningkatan kualitas pengawasan	Meningkatkan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
			Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk menunjang regulasi daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatkan implementasi SOP
			Meningkatkan pelayanan publik hingga tingkat desa
		Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas SDM
			Meningkatkan profesionalitas sistem birokrasi manajemen karir berbasis sinkronisasi regulasi
	Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah	Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sebagai gambaran berhasilnya pembangunan lima tahunan, visi RPJMD kemudian dijabarkan menjadi berbagai upaya pembangunan yang bersifat lebih operasional. Dimulai dari upaya garis besar utama berupa rumusan misi, kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Dilanjutkan perumusan strategi untuk mewujudkan sasaran, arah kebijakan pelaksanaan strategi, serta program-program pelaksanaan strategi. Penyusunan arah kebijakan implementasi harus memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin muncul selama masa periode lima tahun pembangunan. Arah kebijakan harus mempertimbangkan berbagai proyeksi kondisi yang akan datang maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya. Arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk mengarahkan tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan menjelaskan pilihan strategi sehingga perlu memiliki fokus dalam pengaturan pelaksanaannya berdasarkan tahapan. Berikut penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah.

Tabel 3.7 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Ngada

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi	**Percepatan**	**Pengembangan**	**Penguatan**	**Pemantapan**
Identifikasi klaster-klaster ekonomi pertanian, agroindustri dan pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, agroindustri, pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA, pariwisata yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat, kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal, serta penguatan inovasi teknologi	Pembentukan klaster-klaster ekonomi pertanian, agroindustri dan pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, agroindustri, pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA, pariwisata yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat, kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal, serta penguatan inovasi teknologi	Pengembangan klaster-klaster ekonomi pertanian, agroindustri dan pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, agroindustri, pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA, pariwisata yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat, kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal, serta pengembangan inovasi teknologi	Penguatan klaster-klaster ekonomi pertanian, agroindustri dan pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, agroindustri, pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA, pariwisata yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat, kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal, serta penguatan inovasi teknologi	Pemantapan klaster-klaster ekonomi pertanian, agroindustri dan pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, agroindustri, pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA, pariwisata yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat, kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal, serta pemantapan inovasi teknologi
Penguatan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat, didukung tata kelola pemerintahan yang efektif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	Peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat, didukung tata kelola pemerintahan yang efektif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	Peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat, didukung tata kelola pemerintahan yang efektif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	Penguatan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat, didukung tata kelola pemerintahan yang efektif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	Pemantapan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat, didukung tata kelola pemerintahan yang efektif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan
Penguatan fondasi pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, berkualitas, mudah diakses melalui penguatan fondasi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas, mudah diakses	Penguatan fondasi pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, berkualitas, mudah diakses melalui peningkatan penguatan fondasi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas, mudah diakses	Penguatan fondasi pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, berkualitas, mudah diakses melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fondasi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas, mudah diakses	Penguatan fondasi pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, berkualitas, mudah diakses melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fondasi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas, mudah diakses	Pemantapan fondasi pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, berkualitas, mudah diakses melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fondasi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas, mudah diakses
Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan dilakukan penguatan fondasi kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah secara berkelanjutan yang mendukung ketahanan ekologi, dan meningkatkan kualitas penataan ruang	Percepatan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan dilakukan penguatan fondasi kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah secara berkelanjutan yang mendukung ketahanan ekologi, dan meningkatkan kualitas penataan ruang	Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan dilakukan penguatan fondasi kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah secara berkelanjutan yang mendukung ketahanan ekologi, dan meningkatkan kualitas penataan ruang	Penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan dilakukan penguatan fondasi kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah secara berkelanjutan yang mendukung ketahanan ekologi, dan meningkatkan kualitas penataan ruang	Pemantapan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan dilakukan penguatan fondasi kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah secara berkelanjutan yang mendukung ketahanan ekologi, dan meningkatkan kualitas penataan ruang

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi	**Percepatan**	**Pengembangan**	**Penguatan**	**Pemantapan**
Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas kelembagaan sosial ekonomi, budaya, melalui pemberdayaan usaha masyarakat, penguatan modal sosial, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, lansia serta penguatan peran pemuda dan olah raga	Percepatan pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas kelembagaan sosial ekonomi, budaya, melalui pemberdayaan usaha masyarakat, penguatan modal sosial, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, lansia serta penguatan peran pemuda dan olah raga	Pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas kelembagaan sosial ekonomi, budaya, melalui pemberdayaan usaha masyarakat, penguatan modal sosial, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, lansia serta penguatan peran pemuda dan olah raga	Penguatan pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas kelembagaan sosial ekonomi, budaya, melalui pemberdayaan usaha masyarakat, penguatan modal sosial, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, lansia serta penguatan peran pemuda dan olah raga	Pemantapan pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas kelembagaan sosial ekonomi, budaya, melalui pemberdayaan usaha masyarakat, penguatan modal sosial, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, lansia serta penguatan peran pemuda dan olah raga
Konsolidasi kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta meletakkan fondasi stabilitas ketertiban dan keamanan yang kondusif, kepemimpinan daerah yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil	Percepatan pengembangan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat fondasi stabilitas ketertiban dan keamanan yang kondusif, kepemimpinan daerah yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil	Pengembangan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat fondasi stabilitas ketertiban dan keamanan yang kondusif, kepemimpinan daerah yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil	Penguatan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat fondasi stabilitas ketertiban dan keamanan yang kondusif, kepemimpinan daerah yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil	Pemantapan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta memantapkan fondasi stabilitas ketertiban dan keamanan yang kondusif, kepemimpinan daerah yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil

3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi prioritas pembangunan. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Program-program pembangunan daerah merupakan penentu bagi pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029. Program-program pembangunan harus mengarah pada tercapainya misi pembangunan daerah untuk mewujudkan Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Prioritas pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut.

Tabel 3.8 Program Prioritas RPJMD

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Mandiri	**Misi 1** Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Program penyediaan dan pengembangan ~~pra~~sarana pertanian
					Peningkatan produksi tanaman hortikultura	
					Peningkatan produksi komoditas peternakan	
				Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			Meningkatnya investasi	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka Usaha	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal
			Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program pengembangan UMKM
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program pemberdayaan perlindungan koperasi
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program pemberdayaan usaha menengah, kecil dan usaha mikro (UMKM)
				Meningkatnya penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
				Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Unggul	**Misi 2** Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	Program pendidik dan tenaga kependidikan
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SD sederajat	Program pengelolaan pendidikan
					Angka Partisipasi Sekolah SMP sederajat	
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum
			Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio dokter	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
					Rasio dokter gigi	
					Rasio perawat	
					Rasio bidan	
					Rasio tenaga promosi kesehatan	
					Rasio epidemiolog	
					Rasio perekam medik	
					Rasio sanitarian	
					Rasio nutrisionist	
					Rasio apoteker	
					Rasio asisten apoteker	
					Rasio analis	
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Cakupan ketersediaan obat	Program sediaan farmasi, alat kesehatan makanan minuman
					Cakupan ketersediaan BMHP	
					Cakupan ketersediaan alat kesehatan	
					Cakupan produk makanan dan minuman yang sesuai standar	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan posyandu aktif	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar	
					Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar	
					Cakupan pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar	
			Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri dan luar negeri	Program penempatan tenaga kerja
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	**Misi 3** Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah	Terwujudnya infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program penyelenggaraan jalan
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program pengelolaan sumber daya air
					Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	
					Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Program pengembangan permukiman
				Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani air minum (SPAM)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah domestik layak dan aman)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
				Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Program penataan bangunan dan lingkungan
			Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
					Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase limbah B3 yang terkelola	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang kabupaten	Program penyelenggaraan penataan ruang
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program pengelolaan persampahan
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan atau/ kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Meningkatnya ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana
					Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
					Persentase penanganan pasca bencana	
Berbudaya	**Misi 4** Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
					Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	
				Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan
					Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang ditangani	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	
				Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Program administrasi pemerintah desa
					Persentase fasilitasi tata kelola desa	

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya perlindungan sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program perlindungan dan jaminan sosial
					Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	
					Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	
				Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial kesejahteraan sosial	Program pemberdayaan sosial
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (PKH)	Program rehabilitasi sosial
					Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Program perlindungan perempuan
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program perlindungan khusus anak

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio kewirausahaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Pengelolaan SDM dan SDA berkelanjutan	**Misi 5** Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah daerah	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggara ataupun proses dan kewenangan	Persentase pengawasan Internal yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	Program penyelenggaraan pengawasan
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase unit kerja yang mendapatkan predikat WBK-WBBM	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	Program kepegawaian daerah
					Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	
					Persentase ASN berpendidikan minimal S1	
					Persentase ASN dengan SKP minimal bernilai baik	
					Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Program pengembangan sumber daya manusia
					Persentase pejabat struktural yang lulus diklat PIM TK 2, PKA, PKP	
					Persentase ASN yang lulus Diklat Dasar (LATSAR)	
			Meningkatnya perencanaan dan	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program pengelolaan keuangan daerah

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			pengelolaan keuangan daerah		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	
					Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	
					Persentase penurunan SILPA	
					Persentase laporan keuangan tepat waktu	

BAB 4
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, kemudian menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas disertai kebutuhan pendanaannya. Setiap satuan kerja perangkat daerah memiliki 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah disusun berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program pembangunan Kabupaten Ngada juga memperhatikan kapasitas riil fiskal daerah. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama periode ini akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	61	145.000	62	152.250	63	159.862	64	167.855	65	176.248	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SD sederajat	Persen	98,2	98,24	1.200	98,25	1.220	98,26	1.240	98,27	1.302	98,28	1.367	
	Angka Partisipasi Sekolah SMP sederajat	Persen	97,16	97,8	1.700	98,01	1.720	98,23	1.806	98,24	1.895	98,25	1.991	
Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	10,79	11,78	450	12	472	12,46	496	13,51	520	13,56	546	
	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	20,35	25,6	200	30,67	210	35,89	220	46,97	231	50,89	243	
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	88	92	1.200	93	1.260	95	1.323	98	1.389	100	1.458	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	62.1	64,68	196.000	67,26	206.000	69,84	225.000	67,26	244.000	69,84	267.000	Dinas Kesehatan Dan RSUD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar	Persen	92,23	100	150.000	100	155.000	100	160.500	100	166.550	100	173.205	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar	Persen	99,86	100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar	Persen	92,23	100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan pada balita sesuai standar	Persen	99,05	100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetansi SDM Kesehatan	Persen	0.27	37,21	9.328	49,81	9.603	62,41	9.866	75,01	10.129	75,01	10.143	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan posyandu aktif	Persen	99,49	99,49	100	99,49	105	99,49	125	99,49	130	99,49	135	
Program Sediaan Farmasi, Alkes makanan dan minuman	Cakupan ketersediaan obat	Persen	84	87,2	2.000	90,4	2.500	93,6	3.000	97	3.500	100	4	
	Cakupan ketersediaan BMHP	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan ketersediaan alat kesehatan	Persen	37,56	42,1		46,5		51		55,52		60		
	Cakupan produk makanan dan minuman yang sesuai standar	Persen	33,33	46,7		60		73,3		87		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	61	9.022	62	9.564	63	10,376	64	11,184	65	12,095	Dinas PUPRPKP
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Persen	0	20	2.500	20	2.500	20	2.500	20	2.500	20	4	
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen	0	20		20		20		20		20		
	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	55,07	55,53	7.500	55,57	7.875	56	8.268	56,23	8.682	56,47	9.116	
Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani air minum (SPAM)	Persen	63,35	68,09	2.850	71,1	3.200	74,55	3.300	78,43	3.400	82,74	3.500	
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	Persen	0	1	500	5	550	6	600	7	600	10	600	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persen	79,32	80,67	1.575	83,32	1.775	87,2	1,15	92,26	1.175	99,55	1,2	
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	50	55	1.075	60	1,15	65	1,2	70	1.275	75	1,3	
Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persen	59,82	61,82	10.000	63,82	10.600	65,82	11.200	67,82	11.800	69,82	12.400	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	50	53	5.950	56	5.200	59	4.200	62	4.200	65	4.200	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	Persen	36,6	47,86	25,95	49,12	27.247	50,37	28.608	51,63	30,04	52,88	31,542	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Persen	0	100	900	100	900	100	900	100	900	100	900	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang kabupaten	Persen	0	100	500	100	525	100	551	100	578	100	607	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	20	500	40	525	60	551	80	578	100	607	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	20	250	40	262,5	60	275,63	80	289,41	100	303,88	Dinas PUPRPKP
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	Persen	0	12	500	24	525	36	551	48	578	60	607	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persen	60	68	2.701	76	2.836	84	2.977	92	3.126	100	3.283	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	56,85	60	2.100	63	2.500	65	3.000	68	3500	70	4.000	SATPOLPP
	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	60	4.072	61	4.262	62	4.475	63	4.699	64	4.934	BPBD
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang ditangani	Persen	100	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	SATPOLPP
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	61,67	100	350	100	375	100	350	100	375	100	300	BPBD
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	tad	100	2.000	100	3.500	100	3.000	100	3.250	100	3.500	
	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	tad	100	1.500	100	1.750	100	3.000	100	1.250	100	1.500	
Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentasi kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tertangani	Persen	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	SATPOLPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Persen	70	71	2.738	72	2.781	73	2.822	74	2.863	75	2.906	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	110	54,72	950	66,04	1.024	77,36	1.106	88,68	1.187	100	1.271	
	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	tad	0,16	400	0,16	400	0,16	400	0,16	400	0,16	400	
	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persen	tad	85,44	350	85,44	400	85,44	450	85,44	500	85,44	550	
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (keluarga)	Persen	tad	0,16	37,7	0,16	37,7	0,16	42	0,16	44	0,16	46	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap bencana dan pasca bencana sesuai standar (TAGANA)	Persen	tad	22	200	22	210	22	220,5	22	232	22	242,55	
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen	tad	20	150	40	157,5	60	165	80	174	100	182	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	86,77	70,87	100	70,87	110	70,87	120	70,87	150	70,87	180	
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	15,08	32,31	80	49,23	85	66,15	90	83,07	95	100	100	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	48,33	52,07	350	52,07	400	52,07	450	52,07	500	52,07	550	
	Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	tad	55	450	66	472,5	77	496	89	520,95	100	550	
Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	20	450	40	475	60	500	80	525	100	600	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	55	60	1.974	65	2.065	67	2.15	68	2.261	69	2.295	Dinas Nakertrans
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	5	1	794	3	873	3	961	3	1,057	3	1,163	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri	Persen	8	7	111	8	126	9	132	11	145	13	154	
Program Hubungan Industri	Persentase pekerja yang terlindungi dan mendapatkan hak-hak pekerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan	Persen	75	75	205	87	208	94	204	100	207	100	200	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	100	60	2.706	61	2.706	62	2.977	63	3.275	64	3.602	Dinas PMDP3A
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	105	100	110	100	115	100	121	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	tad	3	120	5	126	5	132	5	138	5	145	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	Persen	70,47 (2023)	70,77		70,92		71,07		71,22		71,37		
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	297	100	312	100	328	100	344	100	361	
Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	tad	52.53	100	52.54	100	52.56	100	52.57	100	52.59	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	0	20	50	40	50	60	50	80	50	100	50	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Nilai	82,2	82,4	700	82,6	700	82,8	700	83	700	83,2	700	
Program Pegawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	96,63	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	49,67	49,67	50	60,26	50	73,51	50	80,13	50	86,75	50	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persen	0	10	100	20	105	30	110	40	115	50	121	Dinas PUPRPKP
Program Penatagunaan tanah	Persentase tanah aset pemerintah kabupaten bersertifikat	Persen	25,6	27,6	100	29,6	105	31,6	110	33,6	115	35,6	121	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	61.2	62	2.922	63	3.354	64	3.48	65	3.602	66	3.732	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	61,67	71,75	11	71,95	250	72,15	250	72,35	250	72,55	250	
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	94,91	88,62	11	88,82	250	89,02	250	89,22	250	89,42	250	
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUUH	Persen	100	100	100	100	100	100	110	100	120	100	130	
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Nilai	24.4	24,5	3.500	24,6	4	24,7	4,25	24,8	4,5	24,9	4,75	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	86	86	50	89,66	100	93,1	100	96,55	100	100	100	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	Persen	0,001749	0,001749	500	0,001749	550	0,001749	600	0,001749	650	0,001749	700	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	61	1.800	62	1.850	63	1.900	64	1.950	65	2.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persen	0,38	12	250	24	263	36	276	48	289	60	304	
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Persen	23,44	33		42,5		52		61,5		70		
Program Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	150	100	158	100	165	100	174	100	182	
	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase akte perkawianan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	105	100	110	100	116	100	122	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Persen	0	50	50	50	53	50	55	50	58	50	61	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	0	0,99	35	30,69	36	30,69	37	30,69	38	6,93	39	Dinas PMDP3A
Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	27,13	14,59	2.380	14,59	2.499	14,59	2.623	14,59	2.755	14.51	2.892	
	Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	8,64	20	680	20	714	20	749	20	787	20	826	
	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Persen	69,04	69,54		80,71		91,37		91,88		100		
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persen	71,05	71,05	60	71,05	63	73,68	66	78,95	69	85,26	68	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	61	2,5	62	2.625	63	2.756	64	2.894	65	3.038,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah pemantaatan parameter kependudukan untuk perencanaan pengendalian penduduk di daerah	Persen	0	0	700	25	750	50	800	75	850	100	900	
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	Angka	55,45	58,5	2.136	59,5	2.244	60,5	2.357	61,5	2.475	62,5	2.598	
	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*Unmetneed*)	Persen	15,75	13,75		12,75		11,75		10,75		9,75		
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	22,27	24	679	26	712	28	748	30	786	32	825	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	61	62	2.888	63	3.102	64	3.268	65	3.444	66	3.630	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konektivitas darat	Bobot	1,41	1,42	1.800	1,43	1.800	1,44	1.800	1,45	1.800	1,46	1.800	
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	39,41	41,38	187	43,45	206	45,62	226	47,9	249	50,3	274	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	61,9	62	1.500	63	1.550	65	1.600	66	1.750	68	1.800	Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persen	0	40	350	47,5	435	52,5	518	60	555	67,5	600	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Poin	2,17	2,33	1.000	2,49	1.100	2,65	1.210	2,81	1.331	3	1.464	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	61	1.986	62	2.085	63	2.190	64	2.299	65	2.414	Dinas Koperasi dan UMKM
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	5	10	250	15	270	20	300	25	320	30	350	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	8,91	26,73	2.800	35,64	3.000	44,55	3.300	53,46	3.500	62,37	4.000	
	Pertumbuhan wirausaha	Persen	1,63	6,63	100	11,63	150	16,63	170	21,63	200	26,63	250	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	45	50	35	54	45	58	55	62	65	64	75	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase/jumlah koperasi aktif	Persen	45	50	25	54	27	58	29	62	30	64	30	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	70	80	2.650	80	2.765	80	2.844	90	2.987	90	3.114	Dinas PMDPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	Persen	10,94	40	150	42,9	150	48	400	50	450	53,2	450	
Program Promosi Penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	0,48	4,8	250	4,9	300	5,4	350	5,5	400	5,6	450	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	Persen	80	60	220	63	260	65	285	67	310	69	355	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	1,25	25	300	33	350	40	375	50	400	55	450	
Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	100	75	100	76	100	78	100	80	100	82	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	61	1.600	62	1.680	63	1.764	64	1.852,2	65	1.944,81	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	0,2	0,24	560	0,25	588	0,26	617	0,27	648	0,28	680	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Atlet yang masuk Platnas	Persen	0,02	0,03	2.459	0,03	2.582	0,04	2.711	0,05	2.847	0,05	2.989	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,71	3,19	50	3,19	75	3,43	100	3,43	125	3,91	150	Dinas Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	0	35	50	38	60	40	70	42	80	45	90	Dinas Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	85,32	85,4	200	86	210	86,25	220,5	86,5	231,5	86,6	243,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	0,88	1,17		1,32		1,76		2,06		2,94		
Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	0,67	0,68	200	0,69	210	0,69	220,5	0,70	231,5	0,87	243,1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	55,35	55,60	1.986	55,70	2.085	55,80	2.190	55,90	2.299	56	180	Dinas Perpusarsip
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60,3	60,3	484	61	453	62	459	63	462	64	466	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	Persen	16,67	33,33	70	50	76	66,67	82	83,33	85	100	87	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	persen	75	75,06	50	77,2	52	79,32	55	81,34	57	83,28	60	Dinas Perpusarsip
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	tad	18,63	60	19,25	63	19,87	66	20,49	69	21,11	72	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Poin	70	B (76)	1.963	B (77)	2.061	B (78)	2.164	B (79)	2.272	B (80)	2.386	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kg	4.577.072	4.802.000	25	4.952.000	2.625	5.127.000	2.756	5.532.700	2.894	5.527.000	3.039	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	kg	1.735.000	1.778.000	1.000	1808000	1.050	1.830.000	1103	1.858.000	1158	1.888.000	1.216	
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Nilai	37,25	38,83	537	39,87	563	41,06	592	42,4	622	43,76	653	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60	61	1.967	62	2.500	63	2.625	64	2.756	65	2.894	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	32,47	36,13	7.500	36,77	8.000	49,08	8.500	58,01	9.000	63,31	9.550	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	45,92	55,92	250	60,92	300	65,92	500	70,92	500	75,92	500	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	32,47	51,47	250	52,7	500	55,82	600	59,17	600	61,72	1.000	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	45,92	55,92	200	60,92	250	65,92	300	70,92	500	75,92	600	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	70	71	7.253	72	7.608	73	7.840	74	7.964	75	12.640	Dinas Peternakan
	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	CC (50)	CC (53)	12.387	CC (56)	12.387	CC (59)	12.387	B (60)	12.387	B (62)	12.387	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan:				6.200		6.200		6.200		6.200		6.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	- Padi	Persen	53 (47,285 Ton)	55 (48.230 Ton)		60 (49.649 Ton)		68 (51.067,8 Ton)		79 (52.486,4 Ton)		94 (54.377,8 Ton)		
	- Jagung	Persen	40 (12.226 Ton)	42 (14.520 Ton)		47 (1.493,3 Ton)		55 (15.364 Ton)		66 (15.790 Ton)		81 (16.359 Ton)		
	- Kedelai	Persen	40 (12 Ton)	43 (12,36 Ton)		50 (12,84 Ton)		61 (13,32 Ton)		76 (13,8 Ton)		91 (13,8 Ton)		
	- Hortikultura	Persen	20	25		31,5		35		45		45		
	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	2		1.500	2,5	1.650	3	1.815	3,5	1.996	4	1.998	Dinas Peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar	14.880,33	14.880,33	8.500	14880,33	8.500	14880,33	8.500	14.880.33	8.500	14.880.33	8.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					2.500		3.700		4.000		5.000		6.000	Dinas Peternakan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	65	70	1.000	75	1.000	80	1.000	85	1.000	90	1.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	15	20		25		30		35		40		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	0	20	1.700	40	1.700	60	1.700	80	1.700	100	1.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase kelembagaan koperasi tani yg dibentuk dan beroperasi	Persen	5	5	200	10	250	15	300	20	350	25	400	Dinas Peternakan
	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	76	80,8		85,6		90,4		95,2		100		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	persen	5	10	2.000	15	3.500	20	2.600	25	3.000	25	4.000	Dinas Peternakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	76,18	78,53	150	79,79	750	81,89	750	84,78	150	85,56	900	Dinas Perindag
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	5,98	4,82	120	4,64	120	4,31	120	4,13	120	4	120	
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang	Rupiah	5.000.000.000	7.811.171.429	425	7.878.062.857	425	7.944.954.286	425	8.011.845.714	425	8.078.737.143	425	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	13,15	14,22	300	14,98	300	15,78	300	16,36	300	17,02	300	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	1,13	2,58	175	3,23	175	4,84	175	5,65	175	6,46	175	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	50	60	1.900	61	1.925	62	1.950	63	1.975	64	2.000	Dinas Perindag
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	5,26	5,72	350	5,86	350	6	350	6,18	350	6,37	350	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	2	13,42	120	17,95	120	18,49	120	19,18	120	19,47	120	
Program Pengelolaan informasi perindustrian Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Persen	2,42	8,88	350	12,11	350	15,34	350	18,57	350	21,8	350	
URUSAN TRANSMIGRASI														
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	0	0,33	800	0,33	840	0,33	882	0,33	926	0,33	972	Dinas Nakertrans
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persen	0,24	0,34	255	0,4	260	0,48	270	0,67	285	0,86	300	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen	0,0018	0,00189	250	0,00198	270	0,00896	300	0,00415	350	0,00435	400	
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	63,75	65	15.000	70	15.500	80	16.000	80	16.500	90	17.000	Setda
	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	0	35	500	37	500	39	500	42	500	46	500	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Persen	98,2	100	350	100	375	100	400	100	425	100	450	
	Terlaksanannya pelaksanaan kegiatan otonomi daerah	Persen	100	100	400	100	425	100	450	100	475	100	500	
	Terlaksanannya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Persen	100	100	100	100	125	100	150	100	175	100	200	
	Terlaksanannya pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	1500	100	1500	100	1500	100	1500	100	1500	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	42,22	65	100	70	100	75	100	75	100	80	100	
	Efektivitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persen	91	100	100	100	115	100	125	100	135	100	150	
	Efektivitas pemantuan kebijakan sumber daya alam	Persen	91	100	200	100	275	100	320	100	365	100	400	
	Efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan	Nilai	65	65	400	70	475	75	500	75	550	80	550	
	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	2	3	1.300	3	1.300	3	1.350	3	1.500	4	1.500	
UNSUR SEKRETARIAT DPRD														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	50	60	11.171	61	14.066	62	14.163	63	14.489	64	14.701	Setwan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketetapan penetapan Perda APBD tahun N	Persen	100	100	2.305	100	2.556	100	2.789	100	3.068	100	3.375	
	Persentase penetapan Ranperda tahun N	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Persen	100	100		100		100		100		100		
UNSUR PERENCANAAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	60,45	65	2.283	68	2.397,15	70	2.517	72	2.643	75	2.775	Bappeda
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	917	100	962,85	100	1.011	100	1.062	100	1.115	
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	449	100	471,45	100	495	100	520	100	546	
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100	200	100	216	100	233	100	250	100	268	
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100	100	197	100	215	100	232	100	249	100	267	
URUSAN KEUANGAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	50	60	5.000	61	5.250	62	5.513	63	5.788	64	6.078	BKAD
			50	60	2.000	61	2.250	62	2.513	63	2.788	64	3.078	Bappenda
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	30,5	30,5	190.000	30	195.000	30	200.500	30	210.500	30	220.500	BKAD
	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	21,61	25		30		35		40		40		

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	89,66	91		92		93		94		95		
	Persentase penurunan SILPA	Persen	-1,3	-5		-7		-9		-11		-13		
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	88,9	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	0	10	800	15	840	20	882	25	926	30	972	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	4,26	4,76	1.500	5,26	1.575	5,76	1.654	6,26	1.736	6,76	1.823	Bappenda
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Cakupan objek pajak (PBB)	4 objek PAD	8		12		16		20		24		
	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	95,9	96,1		96,3		96,5		96,7		96,9		
URUSAN KEPEGAWAIAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	61,2	70	2.503	70	2.628	70	2.760	70	2.898	70	3.042	BKPSDM
Program Kepegawaian Daerah	Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	Persen	100	100	250	80	250	80	250	80	250	80	250	
	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	100	100	700	100	700	100	700	100	700	100	700	
	Persentase ASN berpendidikan minimal S1	Persen	62,35	62,35	1.500	62,35	1.500	62,35	1.500	62,35	1.500	62,35	1.500	
	Persentase ASN dengan SKP minimal bernilai baik	Persen	67,24	67,24	70	75	70	85	70	90	70	95	70	
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	Persen	0,23	0,23	600	0,22	600	0,2	600	0,19	600	0,18	600	
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	22,41	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	
	Persentase pejabat struktural yang lulus Diklat Pim TK 2, PKA, PKP	Persen	31,84	34,47	480	37,11	480	39,74	480	42,37	480	45	480	
	Persentase ASN yang lulus Diklat Dasar (LATSAR)	Persen	100	100	2.940	100	1.990	100	1.840	100	2.000	100	2.000	
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Persen	7,69	7,69	850	10	850	10	850	20	850	20	850	Bappeda
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Persen	7,69	10	200	10	210	20	221	20	232	20	243	
	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persen	0	5		5		10		10		10		
URUSAN PENGAWASAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	68,15	70	2.503	72	2.628	74	2.760	75	2.898	77	3.042	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	75,8	76	3.230	77	3.427	78	3.538	79	3.696	80	3.787	
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase unit kerja yang mendapatkan predikat WBK-WBBM	Persen	0	13,3	1.508	16,6	1.520	20	1.520	23	1.520	26	1.520	
URUSAN KEWILAYAHAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	50	60	15.000	61	15.750	62	16.538	63	17.364	64	18.233	Kecamatan dan Kelurahan
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	1.200	100	1.260	100	1.323	100	1.389	100	1.459	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	4.800	100	5.040	100	5.292	100	5.557	100	5.834	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai SAKIP PD	Nilai	54,3	60	1.527	62	1.603,35	64	1.684	66	1.768	66	1.856	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	572	100	601	100	631	100	663	100	696	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah	250	277	120	277	126	277	132	277	138	277	148	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	100	100	1.000	100	1.050	100	1.102	100	1.157	100	1.215	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayatan kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	105	100	110	100	115	100	121	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	45	45	100	82	105	84	110	86	115	88	121	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada. Indikator ini akan menjadi tolok ukur dalam mengetahui tingkat ketercapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Program					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,66 - 4,29	3,97 - 4,59	4,27 - 4,90	5,58 - 5,20	4,88 - 5,51	5,19 - 5,81
2	Indeks Gini	Persen	0,31 - 0,33	0,30 - 0,33	0,29 - 0,32	0,28 - 0,31	0,28 - 0,30	0,27 - 0,30
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	23,95 - 27,07	23,79 - 26,91	23,63 - 26,75	23,47 - 26,59	23,31 - 26,43	23,15 - 26,27
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,80 - 3,25	1,64 - 3,10	1,49 - 2,94	1,33 - 2,79	1,18 - 2,63	1,02 - 2,48
5	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	72,46	72,88	73,29	73,71	74,13	74,55
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	50,45	55,6	60,1	62,34	65	67,48
7	Tingkat kemiskinan	Persen	11,61 - 11,81	11,45 - 11,65	11,29 - 11,49	11,13 - 11,33	10,97 - 11,17	10,81 - 11,01
8	Indeks Infrastruktur	Indeks	55,42	61,9	64,33	64,97	65,22	69,11
9	Indeks Konektivitas	Indeks	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115	108	101	94	84	75
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,78	78,95	79,13	79,3	79,47	79,64
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	68,43	69,53	70,64	71,77	72,91	74,08

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ngada

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	82,77	82,79	82,81	82,83	82,85	82,87
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	11,35	11,3	11,25	11,2	11,15	11,1
	Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum	Persen	97,2	97,9	98,2	98,9	99,2	100
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,78	78,95	79,13	79,3	79,47	79,64
	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	79,66	80,11	80,55	81	81,45	81,9
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	25,39	27,98	30,57	33,16	35,75	38,34
	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	10,2	11,38	12,57	13,75	14,94	16,12
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115	108	101	94	84	75
	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kepadatan penduduk	Persen	102	103	105	106	107	109
2	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,66 - 4,29	3,97 - 4,59	4,27 - 4,90	5,58 - 5,20	4,88 - 5,51	5,19 - 5,81
	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,61 - 11,81	11,45 - 11,65	11,29 - 11,49	11,13 - 11,33	10,97 - 11,17	10,81 - 11,01
	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	23,95 - 27,07	23,79 - 26,91	23,63 - 26,75	23,47 - 26,59	23,31 - 26,43	23,15 - 26,27
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,80 - 3,25	1,64 - 3,10	1,49 - 2,94	1,33 - 2,79	1,18 - 2,63	1,02 - 2,48
	Indeks Gini	Indeks	0,31 - 0,33	0,30 - 0,33	0,29 - 0,32	0,28 - 0,31	0,28 - 0,30	0,27 - 0,30
	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,06	72,08	72,1	72,12	72,14	72,16
	Usia harapan hidup	Tahun	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9	75
	Angka Kematian Ibu	Kasus per 100000 KH	170,2	170,2	170,2	113,4	113,4	113,4
	Prevalensi stunting	Persen	28,9	27,32	25,73	24,14	22,55	20,96

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Cakupan penemuan dan pengeobatan kasus TB	Persen	90	90	90	90	90	90
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	176,46	178,84	181,22	183,61	185,98	188,36
	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98	99	99	100	100	100
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,84	8,85	8,86	8,87	8,88	8,89
	Harapan lama sekolah	Tahun	12,76	12,77	12,78	12,79	12,8	12,81
	Angka literasi	Angka	72,6	74,43	75,97	77,54	78,15	79,5
	Angka numerasi	Angka	65,73	67,67	70,23	77,8	78,92	79,8
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,25	65,04	65,65	66	67,1	68,25
	Indeks Pendidikan	Indeks	0,649	0,65	0,65	0,651	0,652	0,652
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	10,64	10,74	10,85	10,96	11,07	11,18
	Cakupan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja	Persen	5,5	5,6	6,3	6,7	7,9	8
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,23	0,25	0,27	0,29	0,3	0,32
	Persentase PMKS Mandiri	Persen	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Keternagakerjaan Kabupaten	Persen	35	55	70	75	85	90
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	54,25	55,04	55,65	56	57,1	58,25
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	57,22	57,71	58,84	59,09	59,78	60,47
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	76,53	76,55	76,57	76,58	76,6	76,61
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,673	0,635	0,597	0,521	0,483	0,445
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,25	97,4	97,55	97,7	97,85	98
	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	55,45	55,49	55,53	55,57	55,61	55,65
	Persentase luasan areal pertanian organik	Persen	68,33	68,33	68,67	69	69,33	69,67
	Persentase produksi pertanian organik	Persen	68,33	68,33	68,67	69	69,33	69,67
	Total Fertility Rate	Angka	1,24	1,24	1,23	1,22	1,21	1,2

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
4	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
	Angka ketergantungan	Persen	52,16	52,04	51,93	51,82	51,70	51,59
	Rasio PDRB industri pengolahan	Persen	1,52	1,55	1,58	1,61	1,64	1,67
	Rasio PDRB akomodasi makan dan minum	Persen	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61
	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang menginap	Orang	23.941	24.441	24.941	25.441	25.941	26.441
	Proporsi PDRB ekonomi kreatif	Persen	6,59	6,86	7,48	7,8	8,25	8,72
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menegah Non pertanian pada level Kabupaten	Persen	12,24	10,9	9,83	8,95	8,22	7,59
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	0,15	0,16	0,18	0,2	0,22	0,24
	Rasio kewirausahaan	Rasio	7,29	7,47	7,68	7,86	8,06	8,27
	Rasio Omzet Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio	1,6	1,9	2,1	2,3	2,5	2,9
	Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Persen	16,29	17,10	17,95	18,85	19,80	20,78
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	86,4	86,9	87,4	87,9	88,4	88,9
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	35	37	40	42	44	49
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar Rupiah	1.278.06	1.353,43	1.430.33	1.503,03	1.578,45	1.653.78
	Ekspor barang dan jasa	Miliar Rupiah	-19,81	-19,13	-18,48	-17,85	-17,24	-16,65
	Indeks Infrastruktur	Indeks	55,42	61,9	64,33	64,97	65,22	69,11
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	55	60	65	70	75	80
	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	65	70	75	80	85	90
	Rasio Elektrifikasi	Persen	95	96	97	98	99	100
	Kapasitas Air Baku	m3/detik	3,59	3,60	3,60	3,60	3,60	3,61
	Akses Rumah tangga terhadap air minum perpipaan	Persen	57,9	59,67	61,43	63,2	64,97	66,74
	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,05	1,57	1,57	1,57	2,1	2,63
	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	Persen	0,26	0,28	0,3	0,32	0,34	0,36
	Tingkat inflasi	Persen	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase peningkatan jumlah UMKM	Persen	29,7	39,7	49,7	59,7	69,7	79,7
	Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi (PDRB)	Persen	35,51	35,95	36,38	36,82	37,26	37,7
	Persentase UMKM naik kelas	Persen	5	10	15	20	25	30
5	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	B	B	B	A	A	AA
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,45	55,6	60,1	62,34	65	67,48
	Indeks SPBE	Indeks	2,17	2,33	2,49	2,65	2,81	3
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	69,17	70,33	71,50	72,67	73,83	75,00
	Persentase penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100
	Indeks Rasa Aman	Indeks	100	100	100	100	100	100
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	100	100	100	100	100	100
	Angka Kriminalitas	Angka	0,15	0,15	0,17	0,19	0,19	0,21
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3	3,25	3,28	3,31	3,34	3,36
	Indeks Sistem Merit	Indeks	130	130,5	131	131,5	132	132,5
	Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	3	3
	Persentase titik blankspot	Persen	0,4	0,37	0,35	0,32	0,3	0,28
	Persentase kemitraan strategis yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	62	70	72	74	76	78
	Nilai SAKIP	Nilai	60,1	60,5	61	61,20	61,70	62,20
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
1	**PENDIDIKAN**							
	Angka Partisipasi Sekolah SD sederajat	Persen	98,2	98,24	98,25	98,26	98,27	98,28
	Angka Partisipasi Sekolah SMP sederajat	Persen	97,16	97,8	98,01	98,23	98,24	98,25

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	10,79	11,78	12	12,46	13,51	13,56
	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	20,35	25,6	30,67	35,89	46,97	50,89
	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	88	92	93	95	98	100
	APK PAUD	Persen	22,56	23,4	25	27	32,66	35,7
	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,112	0,103	0,99	0,87	0,65	0,32
	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,3	0,2	0,2	0,23	0,31	0,33
	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,53	0,52	0,5	0,52	0,48	0,32
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	83,85	83,89	83,92	84,01	80,38	83,89
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	78,54	78,56	78,86	78,91	79,67	79,88
	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	51,37	52,4	53,65	54,33	54,78	54,89
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan sekolah dasar	Rasio	1:12	1:11	1:11	1:10	1:10	1:11
	Rasio guru terhadap murid pendidikan sekolah menengah pertama	Rasio	1:12	1:11	1:11	1:12	1:11	1:10
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	97,92	98,12	98,56	98,64	98,76	98,89
2	**KESEHATAN**							
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Balita Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100
	Rasio Dokter	per 1000 penduduk	0,39	0,51	0,63	0,75	0,87	1

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Rasio Dokter Gigi	per 1000 penduduk	0,08	0,11	0,13	0,16	0,18	0,2
	Rasio Perawat	per 1000 penduduk	3,68	3,68	3,68	3,68	3,7	3,7
	Rasio Bidan	per 1000 penduduk	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	Rasio Tenaga Promosi Kesehatan	per 1000 penduduk	0,24	0,24	0,25	0,25	0,3	0,3
	Rasio Epidemiolog	per 1000 penduduk	0,09	0,09	0,14	0,19	0,2	0,3
	Rasio Perekam Medik	per 1000 penduduk	0,08	0,097	0,114	0,131	0,1	0,2
	Rasio Sanitarian	per 1000 penduduk	0,33	0,33	0,33	0,33	0,30	0,30
	Rasio Nustrisionist	per 1000 penduduk	0,38	0,38	0,38	0,38	0,4	0,4
	Rasio Apoteker	per 1000 penduduk	0,36	0,47	0,58	0,69	0,8	0,91
	Rasio Asisten Apoteker	per 1000 penduduk	0,42	0,42	0,56	0,7	0,8	1
	Rasio Analis	per 1000 penduduk	0,54	0,54	0,54	0,54	0,5	0,5
	Cakupan Posyandu Aktif	Persen	99,49	99,49	99,49	99,49	99,49	99,49
	Cakupan Ketersediaan Obat	Persen	87,2	87,2	90,4	93,6	97	100
	Cakupan Ketersediaan BMHP	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan	Persen	42,1	42,1	46,5	51	55,52	60
	Cakupan produk makanan dan minuman yang sesuai standar	Persen	46,7	46,7	60	73,3	87	100
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	14,30	13,85	13,40	12,95	12,50	12,00
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	80	85	90	93	95	97
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Rasio puskesmas	per 1000 penduduk	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	90	90	90	90	90	90
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	176,46	178,84	181,22	183,61	185,98	188,36
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,11	0,21	0,31	0,41	0,51	0,61
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	95	95	95	95	95	95
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	91,89	93,51	95,13	96,75	98,37	100
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani air minum (SPAM)	Persen	65,5	68,09	71,1	74,55	78,43	82,74
	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	tad	1	5	6	7	10
	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persen	79,32	80,67	83,32	87,2	92,26	99,55
	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	50	55	60	65	70	75
	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persen	tad	61,82	63,82	65,82	67,82	69,82
	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	50	53	56	59	62	65
	Tingkat kemantapan jalan	Persen	36,6	47,86	49,12	50,37	51,63	52,88
	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang kabupaten	Persen	0	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	55,07	55,53	55,77	56	56,23	56,47
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Persen	0	20	20	20	20	20
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen	0	20	20	20	20	20
	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Persen	0	100	100	100	100	100
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	0,47	0,47	0,49	0,5	0,52	0,53
	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Persen	46,61	47,86	49,12	50,37	51,63	52,88
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	Persen	46,61	47,86	49,12	50,37	51,63	52,88
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	(Km/ Orang)	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	79,32	80,67	83,32	87,2	92,26	99,55
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	56,07	59,06	62,05	65,033	68,02	71,01
	Rasio jaringan irigasi	Persen	55,3	55,53	55,77	56	56,23	56,47
	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	55,73	58,07	61,26	62,9	66,91	69,64
	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	112.740	117.240	121.740	126.240	130.740	135.240
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan	Persen	55,73	58,07	61,26	62,9	66,91	69,64
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	0,001749	0,001749	0,001749	0,001749	0,001749	0,001749
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotan	Persen	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	59,82	61,82	63,82	65,82	67,82	69,82

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	60	68	76	84	92	100
	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	Persen	0	12	24	36	48	60
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	20	40	60	80	100
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	20	40	60	80	100
	Rasio rumah layak huni	unit/ Orang	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	87,15	87,38	87,61	87,84	88,08	88,32
	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	84,22	85,22	86,22	87,22	88,22	90
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	1.6	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	32,65	30	25	20	10	0
	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	65	5.000	5.000	5.000	5.000	9.100
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Orang	0	125	125	125	125	0
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Presentasi gangguan trantibum yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	61,67	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	tad	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	tad	100	100	100	100	100
	Presentasi kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Persen per desa/kelurahan	1035	100	200	300	400	500
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Lokasi	15	13	11	11	11	11
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	tad	8,2	8,15	8,1	8,05	8
	Persentase penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**							
	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	43,40	55	66	77	89	100
	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persen	75	85,44	85,44	85,44	85,44	85,44
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (keluarga)	Persen	100	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan	Persen	87	22	22	22	22	22

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	penanganan korban bencana pada masa tanggap bencana dan pasca bencana sesuai standar (TAGANA)							
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen	0	20	40	60	80	100
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	86,77	70,87	70,87	70,87	70,87	70,87
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	15,07	32,31	49,23	66,15	83,08	100
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	48,33	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07
	Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	43	55	66	77	89	100
	Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	20	40	60	80	100
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	18	20	20	20	20	20
	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	94	94	95	97	98	100
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	110	55	66	77	89	100
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	20	40	60	80	100
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
7	**TENAGA KERJA**							
	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	5	1	3	3	3	3
	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri dan luar negeri	Persen	8	7	8	9	11	13

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase pekerja yang terlindungi dan mendapatkan hak-hak pekerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan	Persen	75	75	87	94	100	200
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0,027	0,024	0,022	0,02	0,018	0,26
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	100	100	100	100	100
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	77,78	50	47,62	55,56	61,54	69,77
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	0,55	0,56	0,63	0,68	0,79	0,81
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100
	Rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk di atas 10 tahun	Persen	10	12	15	16	21	12
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	Tad	3	5	5	5	5
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	Persen	70,62	70,77	70,92	71,07	71,22	71,37
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	52,53	52,54	52,555	52,57	52,585	52,6
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	3,75	3,8	3,81	3,83	3,85	3,86
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Orang	0	0	0	0	4	4
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	1,303	1,304	1,305	1,306	1,307	1,308
	Rasio KDRT	Persen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	Persen	0	0	0	0	0	0
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	83,57	83.58	83,59	83,6	83,61	83,62

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	Persen	58,06	58,07	58,08	58,09	58,1	58,11
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	0,995	0,996	0,997	0,998	0,999	0,999
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	1,21	1,22	1,23	1,23	1,24	1,24
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	0,851	0,852	0,853	0,854	0,855	0,856
	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Rasio	0,019	0,02	0,02	0,021	0,022	0,023
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	1,015	1,016	1,017	1,018	1,019	1,02
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	Persen	49,61	50,66	51,71	52,76	53,81	54,86
9	**PANGAN**							
	Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	Tad	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	tad	82,40	82,60	82,80	83,00	83,20
	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	96,63	100	100	100	100	100
	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Persen	49,67	49,67	60,26	73,51	80,13	86.75
	Ketersediaan pangan utama	kg/ Orang /tahun	146,40	161,04	177,14	194,86	214,34	235,78
	Ketersediaan energi	Kkal/ Orang /Hari	3.692	3.692	3.693	3.694	3.695	3.696
	Ketersediaan protein	Gram/ Orang /Hari	84,61	84,61	84,63	84,65	84,67	84,69
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100
10	**PERTANAHAN**							
	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	Persen	25,6	27,6	29,6	31,6	33,6	35,6
	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persen	5	10	20	30	40	50
	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	m^2	0	737,8	1.475,6	2.213,4	2.951	3.689
	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	52	60	70	80	90	100
	Penyelesaian kasus tanah negara	Persen	2	4	6	8	10	12
	Penyelesaian izin lokasi	Persen	6	12	18	24	30	34
11	**LINGKUNGAN HIDUP**							
	Persentase RTH	Persen	0,001749	0,001749	0,001749	0,001749	0,001749	0,001749
	Persentase limbah B3 yang terkelola	Ton	86	89,66	93,1	96,55	100	100
	Indeks Kualitas Air	Poin	71,55	71,75	71,95	72,15	72,35	72,55
	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,42	88,62	88,82	89,02	89,22	89,42

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	Persen	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	24,5	24,6	24,7	24,8	24,9	25
	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Pengaduan	4	5	6	7	8	9
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persen	tad	12	24	36	48	60
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Persen	tad	33	42,5	52	61,5	70
	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Persen	0	50	50	50	50	50
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	95,13	95,3	95,45	95,6	95,97	96
	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	87,92	88	89	90	91	92
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	66,18	66,5	67	67,5	68	68,5

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	95,13	95,3	95,45	95,6	95,97	96
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	46,77	46,8	47	47,5	48	48,5
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
	Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	0,99	30,69	30,69	30,69	6,93	0
	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	20	20	20	20	20	20
	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Persen	69,04	69,54	80,71	91,37	91,84	100
	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persen	71,05	71,05	71,05	73,68	78,95	85,26
	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	27,13	14,59	14,59	14,59	14,59	14,51
	Persentase fasilitasi tata kelola desa	Dokumen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Jumlah	187	187	188	188	189	189
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	87,92	87,92	87,92	87,92	87,92	87,92
	Persentase LPM berprestasi	Persen	66,18	66,18	66,18	66,18	66,18	66,18
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	135	135	190	190	190	190
	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase posyandu aktif	Persen	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48
	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
	TFR	Angka	1,24	1,24	1,23	1,22	1,21	1,2

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	ASFR 15-19	Angka	7,7	7,68	7,65	7,6	7,55	7,5
	Persentase perangkat daerah pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan pengendalian penduduk di Ddaerah	Persen	0	0	25	50	75	100
	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	22,27	24	26	28	30	32
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	55,45	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5
	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi	Persen	15,75	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen	20	20	20	20	30	30
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Angka	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	Ratio akseptor KB	Persen	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5
	Tingkat prevalensi kesertaan KB pria	Persen	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	Persen	1,67	1,57	1,47	1,37	1,27	1,17
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	14,75	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	52	53	54	55	56	57
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	69,52	67,52	65,52	63,52	62,52	60,52
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	81,5	82	82,5	83	83,5	84
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	42,5	43	43,5	44	44,5	45
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	22	22,5	23	23,5	24	24,5

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	42,5	43	43,5	44	44,5	45
	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	72,5	73	73,5	74	74,5	75
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	69,5	70	70,5	71	71,5	72
15	**PERHUBUNGAN**							
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	39,41	41,38	43,45	45,62	47,90	50,30
	Konektivitas darat	Bobot	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	58.770	61.708	64.793	68.033	71.435	75.006
	Rasio ijin trayek	Nilai	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	284	567	680	816	1.225	1.591
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	6	6	6	6	6	6
	Persentase layanan angkutan darat	Persen	75	75	75	75	75	75
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	12	12	12	12	12	12
	Pemasangan rambu-rambu	Buah	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/KM	20,82	22,27	23,82	25,48	27,25	29,14
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	58.770	61.708	64.793	68.033	71.435	75.006
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Unit	31395	32.965	34.613	36.344	38.161	40.069
	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	130.599	137.129	143.985	151.185	158.744	166.681
	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Unit	560.916	588.962	618.410	649.331	681.797	715.887
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
	Indeks SPBE	Indeks	2,17	2,33	2,49	2,65	2,81	3
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persen	0	40	47,5	52,5	60	67,5
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persen	0	5	10	15	20	25
	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	60	61	62	63	64	65
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	0	15	20	25	30	35
	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir	Persen	0	1	2	3	4	5
	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir	Persen	0	1	2	3	4	5

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	0	10	15	20	25	30
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	5	10	15	20	25	30
	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	9	26,73	35,64	44,55	53,46	62,37
	Pertumbuhan wirausaha	Persen	2	6,63	11,63	16,63	21,63	26,63
	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	45	50	54	58	62	64
	Persentase/jumlah koperasi aktif	Persen	45	50	54	58	62	64
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	5	5	5	5	5	5
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	5	5	5	5	5	5
18	**PENANAMAN MODAL**							
	Realisasi total terhadap target investasi	Persen	40	40	42,9	48	50	53,2
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	Persen	60	60	63	65	67	69
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	25	25	33	40	50	55
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Investor	4,8	4,8	4,9	5,4	5,5	5,6
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	2	2	4	4	6	6
	Nilai investasi PMA	Miliar Rupiah	47,12	47,25	48,5	50	50,25	55
	Nilai investasi PMDN	Miliar Rupiah	117,5	120,25	125,5	127,5	130	130,5
	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Miliar Rupiah	12,5	17,5	25	37	55,5	85
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Rasio kewirausahaan	Rasio	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0.28
	Persentase atlet yang masuk pelatnas	Persen	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0.05
	Persentase partisipasi peserta didik dalam kepramukan	Persen	tad	tad	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	97	97,5	97,25	97,5	98	98,5
	Persentase wirausaha muda	Persen	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0.26
	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	120	140	160	180	200
	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	46	48	50	52	54	56
	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	90	95	100	100	100	100
	Jumlah atlet berprestasi	Orang	80	120	80	80	100	100
	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	6	10	5	3	6	10
20	**STATISTIK**							
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,17	2,5	2,5	3	3	3,5
	Tersedianya sitem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	**PERSANDIAN**							
	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	tad	35	38	40	42	45
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	0	40	40	40	40	40
22	**KEBUDAYAAN**							
	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	85,32	85,4	86	86,25	86,5	86,6
	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	0,88	1,17	1,32	1,76	2,06	2,94
	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	0,68	0,68	0,69	0,69	0,70	0,87

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	4,33	4,34	4,35	4,36	4,37	4,37
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	561	561	561	561	561	561
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	57	57	57	57	57	57
23	**PERPUSTAKAAN**							
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60,3	60,3	61	62	63	64
	Persentase koleksi dan naskah kuno yang dimiliki	Persen	33	33,33	50	66,67	83,33	100
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	6.278	7.278	8.278	9.278	10.278	11.278
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	24.014	24.064	24.114	24.164	24.214	24.264
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Perpustakaan/ Orang	1,91	1,93	1,95	1,96	1,98	2
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	5.778	6.278	6.778	7.278	7.778	8.278
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	12.078	12.128	12.178	12.228	12.278	12.328
	Jumlah pustakawasan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	28,5	42,85	57,14	71,42	85,71	100
	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen	4,39	6,08	7,77	9,46	11,15	11,15
24	**KEARSIPAN**							
	Tingkat ketersediaan arsip	Persen	75	75,06	77,2	79,32	81,34	83,28
	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	tad	18,63	19,25	19,87	20,49	21,11
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	76,19	80	80	80	80	80
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	5	23	27	32	36	38
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Angka konsumsi ikan	Nilai	37,80	38,83	39,87	41,06	42,4	43,76
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kg	4.577.072	4.802.000	4.952.000	5.127.000	5.532.700	5.527.000
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg	1.755.000	1.778.000	1.803.000	1.830.000	1.858.000	1.888.000
26	**PARIWISATA**							
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	32,47	36,13	36,77	49,08	58,01	63,31
	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	45,92	55,92	60,92	65,92	70,92	75,92
	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	47,31	51,47	52,70	55,82	59,17	61,72
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	50,92	55,92	60,92	65,92	70,92	75,92
	Kunjungan wisata	Orang	155.574	175.340	176.465	198.191	215.889	227.330
	Lama kunjungan wisata	Hari	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	8,37	9,46	10,6	11,93	12,6	13,87
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	11,56	14,84	16,72	19,71	21,94	24,63
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Ngada	Persen	24,61	28,33	29,04	32,75	37,34	39,38
27	**PERTANIAN**							
	Peningkatan produksi tanaman pangan:							
	- Padi	Persen	53 (47.285 ton)	55 (48.230,7 ton)	60 (49.649,3 Ton)	68 (51.067,8 Ton)	79 (52.486,4 Ton)	94 (54.377,8 Ton)
	- Jagung	Persen	40 (14.226 Ton)	42 (14.510,5 Ton)	47 (14.937,3 Ton)	55 (15.364,08 Ton)	66 (15.790,9 Ton)	81 (16.359,9 Ton)
	- Kedelai	Persen	40 (12 Ton)	43 (12,36 Ton)	50 (12,84 Ton)	61 (13,32 Ton)	76 (13,8 Ton)	91 (13,8 Ton)
	- Hortikultura	Persen	20	25	31,5	35	40	45
	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	2	2	2,5	3	3,5	4

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar	14.880,33	14.880,33	14.880,33	14.880,33	14.880,33	14.880,33
	Persentase penangangan bencana pertanian	Persen	65	70	75	80	85	90
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	15	20	25	30	35	40
	Persentase kelembagaan koperasi tani (pertanian) yang dibentuk dan beroperasi	Persen	0	20 (2 Unit Koperasi)	40 (4 Unit Koperasi)	60 (6 Unit Koperasi)	80 (8 Unit Koperasi)	100 (10 Unit Koperasi)
	Persentase kelembagaan koperasi tani (perternakan) yang dibentuk dan beroperasi	Persen	5	5	10	15	20	25
	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	76 (total penyuluh 212 orang)	80,8	85,6	90,4	95,2	100
	Tingkat pengendalian hewan penyakit menular strategis (PHMS)	Persen	10	10	15	20	25	25
	Persentase areal pertanian yang tidak terserang hama dan penyakit	Persen	65	70	75	80	85	90
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/ha	53	58	64	71	78	85
	Cakupan bina kelompok petani	Persen	93	94	95	96	97	98
	Produksi peternakan							
	Sapi	Ton	320	320	320	320	320	320
	Kambing	Ton	10	10	10	10	10	10
	Ayam	Ton	30	30	30	30	30	30
	Babi	Ton	250	250	250	250	250	250
	Telur		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	Persentase kelompok ternak yang menerapkan IPTEK produksi	Persen	20	21	21	22	22	23
	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai	Persen	66	68	71	74	75	76
	Tingkat kematian ternak	Persen	5	4,5	4	3,5	3	2,5

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul	Persen	60	60	60	60	60	60
	Tingkat kelahiran ternak	Ekor	150	150	150	150	150	150
	Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/mencukupi	Persen	66	68	71	74	75	76
	Persentase toko pakan ternak yang terdaftar	Persen	61	62	63	64	65	66
	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis	Persen	25	26	27	28	29	30
	persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP	Persen	25	26	27	28	29	30
	Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASUH	Persen	6,15	6,88	7,54	8,13	8,68	9,17
	Persentase peningkatan populasi ternak (ternak besar dan unggas)	Persen	32	33	34	35	36	37
	Persentase produk hasil ternak yang bersertifikat ASUH	Persen	10	10	10	10	10	10
28	**PERDAGANGAN**							
	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	77,49	78,53	79,79	81,89	84,78	85,56
	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	4,76	4,82	4,64	4,31	4,13	4,00
	Nilai ekspor barang	Rupiah	7.744.280.000	7.811.171.429	7.878.062.857	7.944.954.286	8.011.845.714	8.078.737.143
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	13,6	14,22	14,98	15,78	16,35	17,02
	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	2,1	2,6	3,2	4,8	5,7	6,5
	Ekspor bersih perdagangan	Rupiah	7.744.280.000	7.811.171.429	7.878.062.857	7.944.954.286	8.011.845.714	8.078.737.143
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	92,01	92,42	92,83	93,24	93,65	94,05
29	**PERINDUSTRIAN**							
	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	5,26	5,72	5,86	6	6,18	6,5

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Tersedianya Informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Persen	2,42	8,88	12,11	15,34	18,57	21,8
	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	14,89	13,42	17,95	1849	19,18	19,47
	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	5,82	6,28	6,74	7,21	7,67	8,13
	Jumlah IKM	Unit	3.252	3.407	3.562	3.716	3.871	4.026
30	**TRANSMIGRASI**							
	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persen	0,24	0,34	0,40	0,48	0,67	0,86
	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen	0,0018	0,00189	0,00198	0,00396	0,00415	0,00435
31	**SEKRETARIAT DAERAH**							
	Indeks kematangan organisasi	Skor	0,00	35	37	39	42	46
	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Persen	98,20	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan otonomi daerah		100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Status	42,22	65	70	75	75	80
	Efektivitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persen	91	100	100	100	100	100
	Efektivitas pemantuan kebijakan sumber daya alam	Persen	91	100	100	100	100	100
	Efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan	Persen	65	65	70	75	75	80
	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	2	3	3	3	3	4
32	**SEKRETARIAT DEWAN**							
	Ketepatan pentapan perda APBD tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Persentase penetapan ranperda tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
33	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**							
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Penjabaran konsisten program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100
34	**KEUANGAN**							
	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	30,5	35	30	30	30	30
	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayaan publik	Persen	21,61	25	30	35	40	40
	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	89,66	91	92	93	94	95
	Persentase penurunan SILPA	Persen	-1,3	-5	-7	-9	-11	-13
	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	10	10	15	20	25	30
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	88,9	100	100	100	100	100
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	4,26	4,76	5,26	5,76	6,26	6,76
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Cakupan objek pajak (PBB)	4 objek PAD	8	12	16	20	24
	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasi digital	Persen	95,9	96,1	96,3	96,5	96,7	96,9
	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA terhadap APBD (Realisasi)	Persen	9,8	8	7	6	5	4
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (Realisasi)	persen	0	0	0	0	0	0
	Persentase belanja pendidikan (20%) (Realisasi)	Persen	29,41	20	20	20	20	20
	Persentase belanja kesehatan (10%) (Realisasi)	Persen	19,22	10	10	10	10	10
	Penetapan APBD	Persen	90,7	100	100	100	100	100
35	**KEPEGAWAIAN**							
	Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	Persen	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Presentase ASN berpendidikan minimal S1	Persen	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35
	Presentase ASN dengan SKP minimal bernilai baik	Persen	67,24	67,24	75	85	90	95
	Presentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	Persen	0,23	0,23	0,22	0,2	0,19	0,18
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	92	95	97	99	100
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	36	36	36	36	36	36
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	149	149	149	149	149	149
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.254	2.254	2.500	2.500	2.500	2.500
36	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	22,41	25	25	25	25	25
	Persentase pejabat struktural yang lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP	Persen	31,84	34,47	37,11	39,74	42,37	45
	Persentase ASN yang lulus Diklat Dasar (LATSAR)	Persen	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Pelajaran	511	511	511	511	511	511
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68	50,68
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33
37	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Persen	7,69	10	10	20	20	20

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	0	5	5	10	10	10
	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Persen	7,69	10	10	20	20	20
	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persen	0	5	5	10	10	10
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	0	5	5	10	10	15
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	5	5	10	10	15
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	5	5	10	10	20	20
38	**PENGAWASAN**							
	Persentase pengawasan Internal yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	76	76	77	78	79	80
	Persentase unit kerja yang mendapatkan predikat WBK-WBBM	level	6,6	13,3	16,6	20	23	26
	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	72,4	76	77	78	79	80
	Jumlah temuan BPK	Temuan	9	9	8	8	8	8
39	**PEMERINTAHAN UMUM**							
	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah	250	277	277	277	277	277
	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	45	45	82	84	86	88
	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	beragama, dan penghayatan kepercayaan di daerah yang dilaksanakan							
40	**KECAMATAN**							
	Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB 5
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada periode 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngada. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada; kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Pusat; komitmen dan dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Ngada; partisipasi dan peran aktif para tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda/pemudi, organisasi masyarakat; serta kerja sama dengan perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku usaha dan media.

5.1. Pedoman Transisi

Dalam hal RPJMD Kabupaten Ngada periode berikutnya belum disusun dan ditetapkan, demi menjada kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten maka penyusunan RPKD Tahun 2030 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ngada periode bersangkutan, serta berpedoman pula pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode bersangkutan guna menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Ngada dengan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. RKPD Tahun 2030 disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Selanjutnya. RKPD Tahun 2030 sebagai masa transisi akan menjadi tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Ngada dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kaidah pelaksanaan penting untuk disusun agar tercipta koordinasi yang baik, efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target kinerja pembangunan, serta terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Ngada berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada agar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 ini;
4. Penetapan target kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
5. RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2026-2029:
6. RKPD Kabupaten Ngada merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggara berikutnya, yang sebelumnya dirumuskan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngada dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan indikator kinerja program pada setiap tahun dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD
2. Pembentukan dan penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Ngada yang efisien, efektif dan berbasis kompetensi;
3. Pengembangan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ngada;
4. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Government*) sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
5. Penguatan peran pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, manajemen keuangan;
7. Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
8. Kepala Bapperida Kabupaten Ngada menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
9. Kepala Bapperida Kabupaten Ngada menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Berbagai strategi, arah kebijakan, dan program yang telah dikembangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat hambatan di luar kendali Pemerintah Kabupaten Ngada. Hasilnya

harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Ngada untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.